SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa sistem perencanaan pembangunan diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi pada perencanaan pembangunan di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan sosial;
b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna mengakomodir kebutuhan dan mengalokasikan sumber daya yang ada berdasarkan visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan penetapan rencana jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Perencanaan dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada rencana Pembangunan jangka panjang nasional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

RPJMD merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah pusat dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bagian Kedua
Sistematika RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I berisi pendahuluan;
    b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
    c. bab III berisi Visi, Misi dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
    d. bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. bab V berisi penutup,
(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila:
   a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
   b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Semua ketetapan Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI SASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-138/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan Pembangunan Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Sejalan dengan pola pembangunan tersebut, terdapat amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menciptakan perencanaan yang berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Karena itu, perencanaan pembangunan diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan prinisipnya, rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergisme pembangunan, maka terdapat urgensi dibentuk kebijakan perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sehingga diarahkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi pada perencanaan pembangunan di pusat dan Daerah dalam rangak pencapaian kesejahteraan sosial. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 103

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 adalah untuk mensinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada, sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Kepala pemerintahan yang baru akan mengemban tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, melalui pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien disusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan pembangunan di daerah ikut mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Kepala daerah terpilih Kabupaten Banyumas hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang telah dilantik tanggal 20 Februari 2025 untuk periode jabatan Tahun 2025–2030 berkewajiban menyusun RPJMD selambat-lambatnya 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah, dan pendekatan bawah-atas, holistik-tematik, integratif dan pendekatan spasial. Dalam penyusunan RPJMD Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Skenario Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi dua yaitu Tanpa Upaya Tambahan (TUT) dan Dengan Upaya Tambahan (DUT). Terdapat 12 indikator dengan status Tanpa Upaya Tambahan. Artinya indikator tersebut Ketika diproyeksikan sampai dengan tahun 2030 sudah mencapai target Perpres 111 tahun 2022. Dan terdapat 71 indikator dengan status Dengan Upaya Tambahan. Skenario pencapaian TPB dengan upaya tambahan merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu 2018 – 2022 yang belum mencapai target nasional seperti yang tertuang dalam Perpres 111 tahun 2022. Selain itu juga adanya permasalahan terhadap kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa lingkungan yang

menjadikan tantangan dalam pencapaian TPB. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier, geometri, dan eksponensial berdasarkan tren 5 tahun terakhir.

Terdapat tiga skenario pencapaian TPB dengan upaya tambahan yaitu:

1. Skenario 1 adalah jika capaian TPB pada tahun 2022 belum tercapai dan diperkirakan tetap tidak akan tercapai pada tahun 2030 berdasarkan laju perubahan atau tren kurun 2018 – 2022.
2. Skenario 2 adalah jika data capaian TPB tahun 2022 tidak memiliki data tetapi tersedia penjelasan dalam metadata dua dan data dapat diakses atau disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Skenario 3 adalah jika jika data capaian TPB tahun 2022 tidak memiliki data tetapi tersedia penjelasan dalam metadata dua dan data tidak dapat diakses atau disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas

Penjelasan dalam upaya TPB yang membutuhkan upaya tambahan berikut dibagi dalam 2 yaitu kelompok pertama adalah data yang memiliki data capaian pada tahun 2022 tetapi tetap tidak akan tercapai pada tahun 2030 yang merupakan tahun target TPB, serta kelompok 2 adalah indikator TPB yang belum memiliki data pada tahun 2022 dengan dijelaskan pendataan data indikator berdasarkan metadata dua yang dihasilkan oleh BAPPENAS (Target Perpres 111/ 2022).

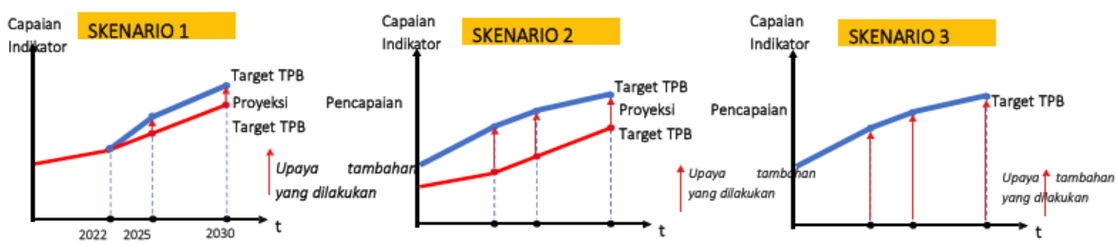

Gambar 1. Skenario Pencapaian TPB Dengan Upaya Tambahan

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis dan akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan keberlanjutan masyarakat dan Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional penyusunan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah maupun antar waktu/periode. RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banyumas 2025-2029 serta RPJPD

Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, memperhatikan data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029, kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, manajemen risiko Pembangunan Nasional di daerah serta Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Keterkaitan/hubungan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1.

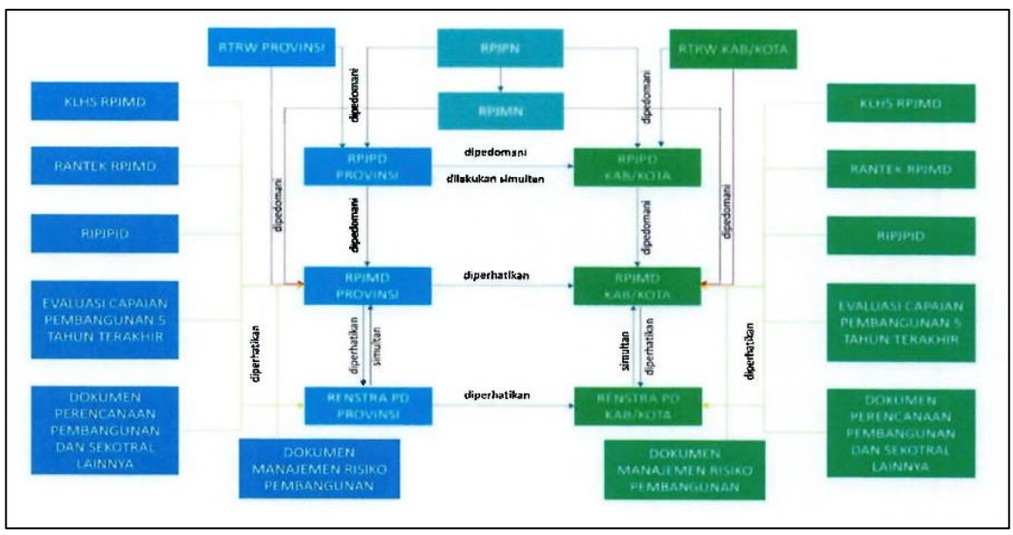

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 diuraikan secara detail seperti dalam Tabel 1.1.

Disamping memperhatikan keselarasan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan yang tingkatannya lebih tinggi, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 harus disinkronkan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dari

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, seperti dalam Tabel 1.2.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2043, khususnya pada indikator program dan kegiatan sesuai dengan tahun perencanaan.

Tabel 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045
Visi : Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera	**Visi :** Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	**Visi :** Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	**Visi :** Banyumas "H E B A T" yaitu Harmoni bErkelanjutan, Berdaya saing maju, mandiri berbudayA sejahTera
Misi :	**Misi :**	**Misi :**	**Misi :**
1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global	1. Mewujudkan Transformasi Sosial 4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan 6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045
3. Memperkuat ketahanan pangan	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas
5. Meningkatkan keberlanjutan Sumber daya alam dan lingkungan hidup	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	5. Mewujudkan Ketahanan Ekologi
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah	1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas 5. Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	3. Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2025

Tabel 1.2
Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten dalam Lingkup Wilayah Pengembangan Cibalingmas

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029
Visi:	**Visi:**	**Visi:**
Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera	Menuju Cilacap yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Merata (Maju dan Besar)	Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera
Misi:	**Misi:**	**Misi:**
1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia 2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan 3. Memperkuat ketahanan pangan 4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan 5. Meningkatkan keberlanjutan Sumber daya alam dan lingkungan hidup. 6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.	1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul,terampil dan andal 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan 3. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya, Berkarakter dan Inklusif 4. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian 2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas Ekonomi 3. Reformasi Pelayanan Publik: Digitalisasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk membangun SDM yang Unggul

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2025

Tabel 1.3
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2043

Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 PJM II Tahun 2023-2043	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029
A. Perwujudan Struktur Ruang	
1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman	
1) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan 4) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Kawasan Permukiman 8. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 10. Program Penatagunaan Tanah 11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 12. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
1. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana	
1) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	
a. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan b. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api c. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 5. Program Pengelolaan Pelayaran
2) Perwujudan Sistem Jaringan Energi	
a. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi b. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
3) Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	
a. Perwujudan Jaringan Tetap b. Perwujudan Jaringan Bergerak	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
4) Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
a. Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan Pelayaran
5) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	

Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 PJM II Tahun 2023-2043	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029
a. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) b. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) c. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) d. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan e. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana f. Perwujudan Sistem Drainase	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 7. Program Penanggulangan Bencana 8. Program Penanganan Bencana 9. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 10. Program Pengelolaan Persampahan
B. Perwujudan Rencana Pola Ruang	
1. Perwujudan Kawasan Lindung	
1) Perwujudan Badan Air	
a. Penyusunan kajian pemanfaatan Badan Air b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada ruang Badan Air c. Pengendalian pelepasan limbah ke ruang Badan Air d. Kajian penetapan garis sempadan dan pemanfaatan ruang sempadan Badan Air e. Penetapan sempadan badan air di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan f. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan Badan Air g. Peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan vegetasi bagi pelestarian *biodiversity* h. Penertiban bangunan di atas sempadan Badan Air i. Penetapan/ pemberian rekomendasi teknis sempadan sekitar Badan Air	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2) Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
a. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	
2. Perwujudan Kawasan Budi Daya	
1) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	
2) Perwujudan Kawasan Pertanian	
a. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan b. Perwujudan Kawasan Perkebunan c. Perwujudan Kawasan Peternakan	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan 4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 9. Program Penyuluhan Pertanian
3) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	

Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 PJM II Tahun 2023-2043	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029
a. Penyusunan / revisi Rencana Pengembangan Industri Kabupaten b. Penyusunan Studi Kelayakan pengembangan kegiatan industri di Kawasan peruntukan industri Kabupaten Banyumas c. Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri pada Kawasan lereng dan rawan gerakan tanah tinggi melalui rekayasa teknis dan pengaturan zona d. infrastruktur penunjang kegiatan industri berwawasan lingkungan e. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri f. Pengembangan RTH pada kegiatan industri sebagai bagian perlindungan *biodiversity* g. Pemanfaatan air permukaan dan jaringan perpipaan bagi kegiatan industri dan efisiensi penggunaan air tanah h. Penetapan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja j. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 5. Program Pengembangan Umkm 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Promosi Penanaman Modal 8. Program Pelayanan Penanaman Modal 9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4) Perwujudan Kawasan Pariwisata	
a. Menyusun/ revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah b. Penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Pariwisata berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata c. Pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata d. Pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata/ pengembangan desa wisata e. Pembentukan pola jalur wisata intra dan inter kabupaten menuju Kawasan Pariwisata f. Pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara terpadu	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
5) Perwujudan Kawasan Permukiman	
a. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan b. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Program Penataan Desa 5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
6) Perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	
a. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan b. Pemenuhan syarat – syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya.	
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten	
1. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	

Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 PJM II Tahun 2023-2043	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029
1) Penataan Kawasan perdagangan dan jasa	1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 4. Program Pengembangan Ekspor 5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2) Pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan pertumbuhan ekonomi	1. Program Perekonomian Dan Pembangunan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4. Program Penyelenggaraan Jalan 5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3) Penyusunan rencana rinci Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Baturraden	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	
1) Penataan Kawasan	
a. Penyusunan Masterplan dan perencanaan teknis Kawasan Kota Lama Banyumas b. Revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Kota Lama Banyumas c. Peningkatan aksesibilitas Kawasan	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
2) promosi dan *branding* serta penyelenggaraan *event* rutin wisata	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3) Penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan	1. Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten Banyumas tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD dikarenakan perubahan kewenangan daerah terhadap beberapa urusan seperti urusan kehutanan dan energi sumber daya mineral. Kebijakan dan strategi yang tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD antara lain: kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, strategi mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif, strategi mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata, startegi mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan, dan strategi mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas juga memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten sekitar. Rumusan detail setiap visi dan misi berbeda, namun secara substansi dan makna tetap terdapat hubungan atau kesamaan. Hubungan dan kesamaan visi dan misi tersebut dapat berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program, sesuai permasalahan, potensi dan prioritas masing-masing RPJMD. Perbedaan permasalahan, potensi dan prioritas tersebut menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Sebaliknya permasalahan, potensi dan prioritas yang sama yang dihadapi oleh Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar dapat menjadi dasar kerjasama antar daerah dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian permasalahan bersama, serta mengoptimalkan potensi yang ada pada suatu kawasan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan keterkaitan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi RPJMD kabupaten dalam lingkup Cibalingmas (Cilacap, Purbalingga dan Banyumas).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;

c. Memberikan tolok ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi daftar program, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah Barat Daya Provinsi. Secara astronomis, 7°14'46,640"-7°39'57,035 Lintang Selatan dan antara 108°53'211,379"–109°26'46,943" Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.

Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap.

Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

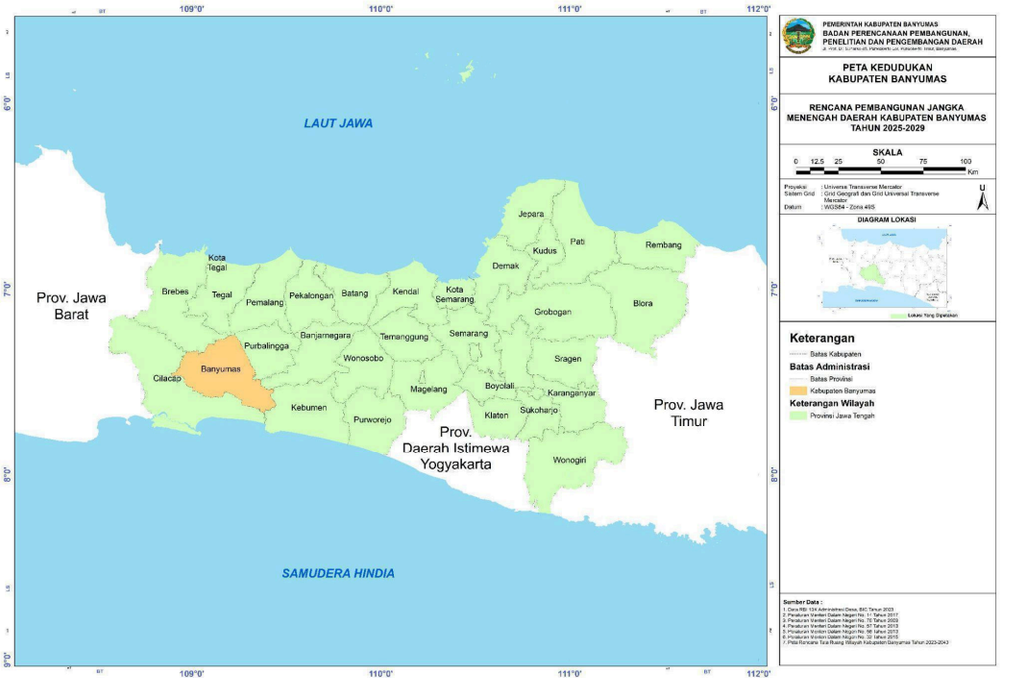

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 1
Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan, dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas berada di kota Purwokerto. Total luas wilayah Kabupaten Banyumas 139.115,30 hektar, sekitar 4,05 persen luas Provinsi Jawa Tengah.

Luas dan persentase setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada peta berikut ini:

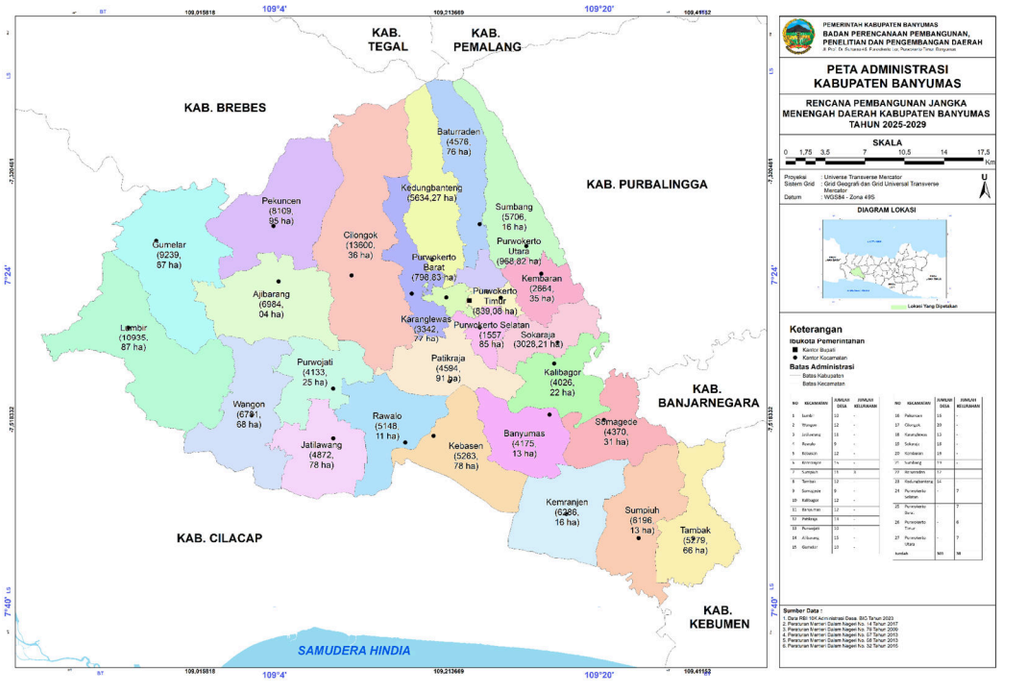

Sumber: Kebijakan Satu Peta Badan Informasi Geospasial, diolah 2024

Gambar 2. 2
Peta Administrasi, dan Luas Wilayah serta Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah, Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Purwokerto sebagai sebagai PKW memiliki banyak fasilitas pelayanan, di antaranya 12 Perguruan Tinggi (negeri dan swasta), 16 rumah sakit, dan 26 kantor cabang Bank umum. Sebagai kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional Perkotaan Purwokerto merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, kawasan strategis provinsi di Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Strategis Provinsi Industri Prioritas dan Kawasan Agropolitan Slamet yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, serta Kawasan Gunung Slamet yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Selanjutnya Kabupaten Banyumas menjadi bagian dari Wilayah Pengembangan Cibalingmas (Cilacap, Purbalingga, Banyumas).

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1. Topografi

Bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya di wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

1) Daerah pegunungan di sebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang.
2) Dataran rendah terletak di antara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan dengan lebar rata-rata 15 km;
3) Dataran rendah di sebelah Selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah Barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen dengan lebar rata-rata 10 km.

Kelas topografi wilayah Kabupaten Banyumas memiliki rentang ketinggian -4,26 mdpl sampai dengan 3.112 mdpl (Badan Informasi Geospasial, 2018). Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas berada pada ketinggian 0-200 mdpl, yaitu seluas 75.641 ha atau sekitar 54,37%, dan wilayah terkecil berada pada ketinggian lebih dari 3.000 mdpl, yaitu sekitar 0,03% atau seluas 41,95 ha.

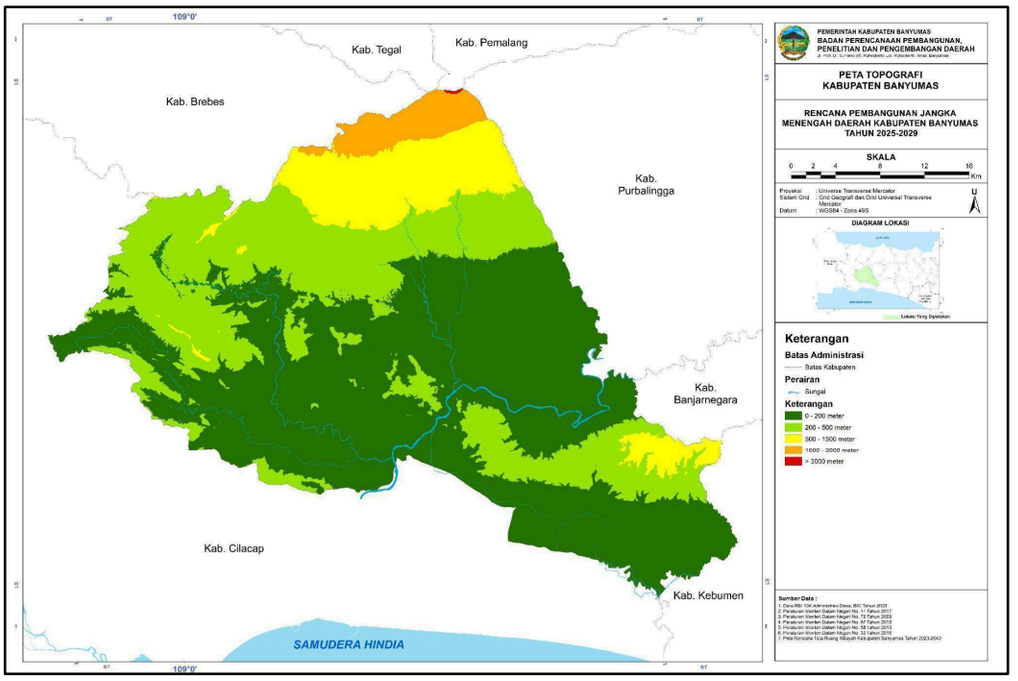

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 3
Peta Topografi Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki kemiringan yang beragam dan hampir terdistribusi merata untuk setiap kelas lereng. Namun, sebagian besar memiliki kondisi yang datar dengan kemiringan 0%-8%. Berdasarkan

kemiringan lahannya, wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:

1) 0%–8% (datar) meliputi area seluas 37.856,9 Ha (27,21%) yang terdistribusi di wilayah bagian timur, tengah, selatan, dan sedikit di bagian barat. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi datar terluas adalah Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Sokaraja.
2) 8%–15% (landai) meliputi area seluas 30.156,4 Ha (21,68%) yang terdistribusi di wilayah bagian timur, tengah, selatan, dan sedikit di bagian barat. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi landai terluas adalah Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Pekuncen.
3) 15%–25% (agak curam) meliputi area seluas 30.778 Ha (22,12%) yang terdistribusi di wilayah bagian utara, selatan, dan timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi agak curam terluas adalah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, dan Kecamatan Cilongok.
4) 25%-40% (curam) meliputi area seluas 28.086,2 Ha (20,19%) yang terdistribusi di wilayah utara, selatan, dan timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi curam terluas adalah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, dan Kecamatan Cilongok.
5) Lebih dari 40% (sangat curam) meliputi area seluas 12.237,8 Ha (8,80%) yang sebagian besar terdistribusi di wilayah utara, selatan, dan timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi sangat curam terluas adalah Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Kedungbanteng.

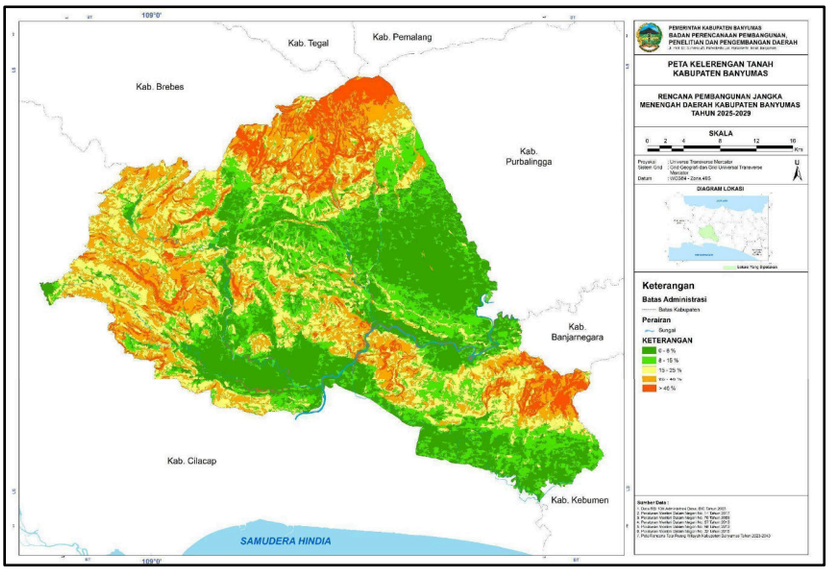

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 4
Peta Kelerengan Lahan Kabupaten Banyumas

2.1.2.2. Klimatologi

Iklim Kabupaten Banyumas adalah tropis basah. Tekanan udara rata-rata antara 1.001 mbs, suhu udara berkisar antara 21,4ºC-30,9ºC. Wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 5 kelas wilayah berdasarkan curah hujan tahunan yaitu wilayah dengan curah hujan 2.000-2.500 mm/tahun, 2.500-3.000 mm/tahun, 3.000-3.500 mm/tahun, 3.500-4.000 mm/tahun, 4.000-4.500 mm/tahun. (Badan Informasi Geospasial, 2024).

Secara detail wilayah curah hujan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada peta berikut:

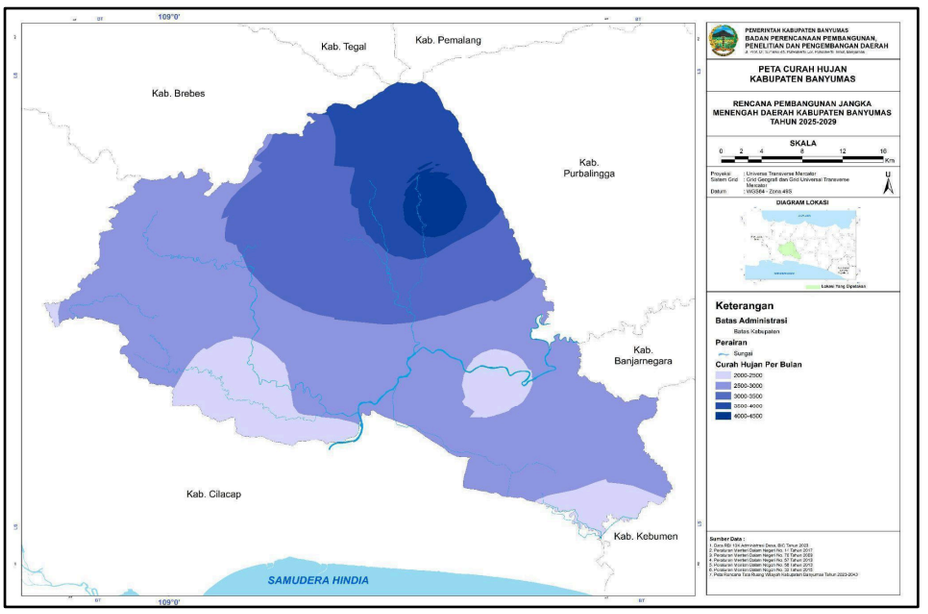

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 5
Peta Curah Hujan Kabupaten Banyumas

2.1.2.3. Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, yang sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet; Pegunungan Serayu Selatan yang pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam yang memanjang mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas; dan Zona Serayu Selatan yang terletak di antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur dan ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi 6 (enam) jenis tanah yaitu Aluvial, Glei Humus Rendah, Andosol, Litosol, Regosol dan Grumusol, dapat digambarkan pada peta berikut.

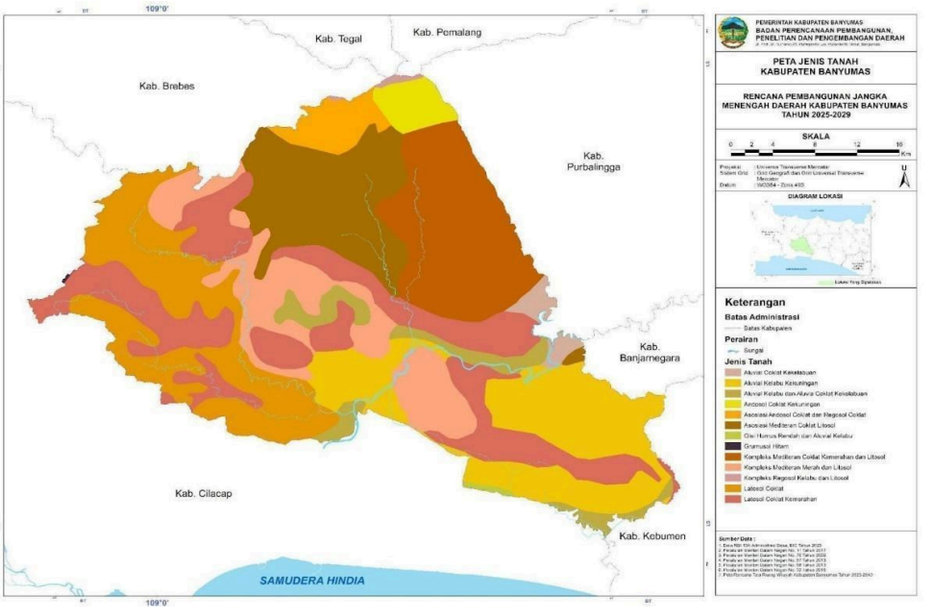

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 2. 6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Banyumas

Struktur geologi Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi : 1)Alluvium, 2)Basalt, 3) Gunung Slamet Lava, 4) Gunung Slamet Undifferentiated Volcanic Rock, 5)Halang Formation, 6)Intrusive Rock, 7)Kumbang Formation, 8)Laharic Deposit Of Gunung Slamet, 9)Old Eruption Product Of Slamet, 10)Pasean Formation, 11)Penosogan Formation, 12) Rambatan Formation, 13)Tapak Formation, 14)Terrace Deposit, yang digambarkan pada peta berikut.

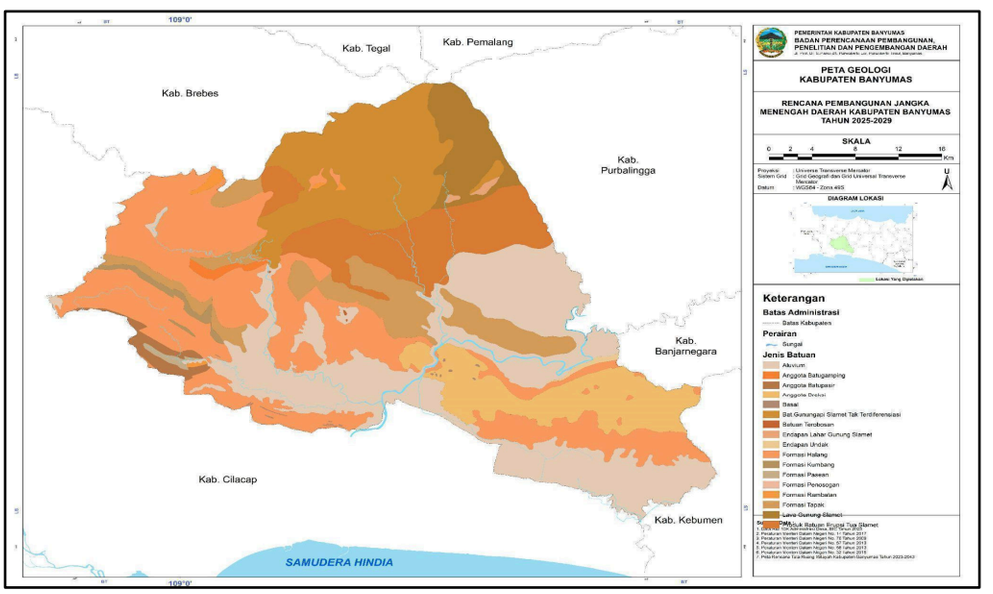

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 2. 7
Peta Geologi Kabupaten Banyumas

Kondisi geologi Kabupaten Banyumas ini menyimpan potensi bahan galian dengan nilai ekonomis cukup tinggi, yang tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi andesit, batu

gamping, bentonit, sirtu, tanah liat, tras dan tanah urug. Menurut data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Kawasan Pertambangan (KP) Serayu Selatan yang membentang di wilayah Banyumas bagian Selatan sampai Timur, KP Gunung Slamet yang berada di bagian Utara, yang berdekatan wilayah Gunung Slamat dan KP Majenang – Bantarkawung, dan berada di bagian Barat di sekitar Lumbir.

Sebaran dan potensi bahan galian yang telah dilakukan inventarisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Sebaran dan Cadangan Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

Jenis Bahan Mineral	Sebaran	Cadangan Terbukti (Ton)
Andesit	Baturraden, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Wangon, Pekuncen, Karanglewas, Patikraja, Kedungbanteng, Sumbang & Cilongok	174.620.000
Andesit Hornblende	Kedungbanteng	201.388
Batu Tempel Andesit	Kedungbanteng & Pekuncen	150.536
Basalt	Jatilawang, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Rawalo, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon	21.511.646
Batugamping	Ajibarang, Gumelar, Purwojati	482.200.000
Batupasir	Cilongok, Gumelar, Lumbir, Pekuncen	NA
Diorit	Purwojati & Ajibarang	11.560.000
Granodiarit	Kedungbanteng	11.566
Kaolin	Sokaraja	535.505
Oker	Banyumas, Pekuncen	NA
Pasir	Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Rawalo	11.597.363
Sirtu	Ajibarang, Karanglewas, Kedungbanteng, Lumbir, Purwokerto Barat, Wangon	2.710.998
Tanah Liat	Kembaran, Lumbir, Patikraja, Pekuncen, Sokaraja	45.487.328
Tanah Urug	Patikraja, Purwokerto Selatan	2.348.814
Emas	Lumbir dan Gumelar	9.470.000

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011

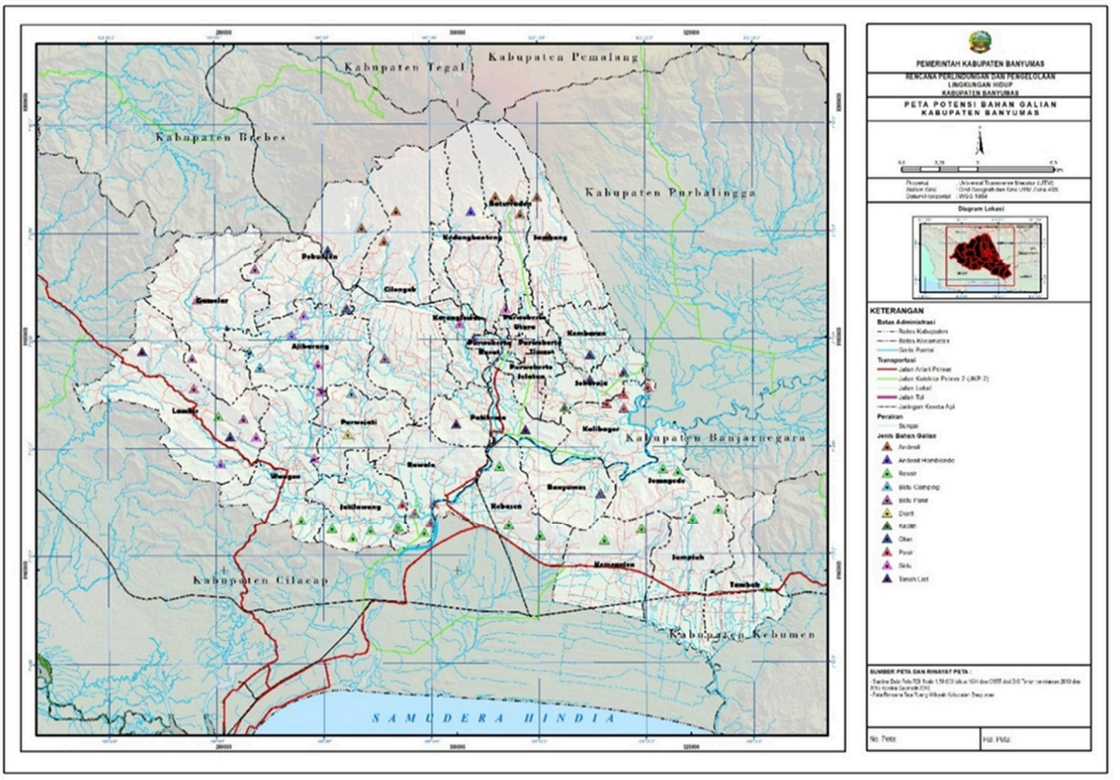

Sumber : DLH Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 8
Peta Sebaran Potensi Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

2.1.2.4. Lahan Sawah

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/Kepala BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan keputusan tersebut luas LSD di Kabupaten Banyumas adalah 30.316,84 Ha. Setelah dilakukan verifikasi faktual, telah disepakati untuk luasan LSD yang dipertahankan di Kabupaten Banyumas adalah seluas 28.559,76 Ha. LSD yang sudah disepakati tidak boleh dialihfungsikan dan harus tetap menjadi lahan sawah. Peta LSD selanjutnya diintegrasikan ke dalam revisi RTRW sebagai bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW.

Sumber Daya Hutan

Kawasan hutan di Kabupaten Banyumas mencapai 28.646,70 Ha dengan luasan terbesar berada di hutan produksi terbatas mencapai 12.823,41 Ha. Sementara itu di kabupaten Banyumas juga terdapat hutan rakyat seluas 39.671,11 Ha, sehingga total luas untuk Kawasan hutan dan hutan rakyat mencapai 68.317,81 Ha.

Berikut ditampilkan rincian luasan hutan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2. 2
Luasan Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	10.530,71
2	Hutan Produksi	5.292,58
3	Hutan Produksi Terbatas	12.823,41
	Jumlah Kawasan Hutan	28.646,70
4	Luas Hutan Rakyat	39.671,11
	Total Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat	68.317,81

Sumber: SK MenLHK Nomor 6605 Tahun 2021

2.1.2.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Banyumas menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan, dan kualitas sumber daya air di wilayah Kabupaten Banyumas, dan dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumber daya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah.

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, Cimeneng, Serayu, Ijo, Tipar, Pemali, dan Gung. Ketujuh DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di antara tujuh DAS tersebut, DAS Serayu merupakan DAS dengan luasan paling besar. Sebagai daerah tengah-hilir Sungai Serayu, aktivitas di hulu sungai di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara akan sangat berpengaruh pada kondisi sungai di Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk sumber irigasi pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan.

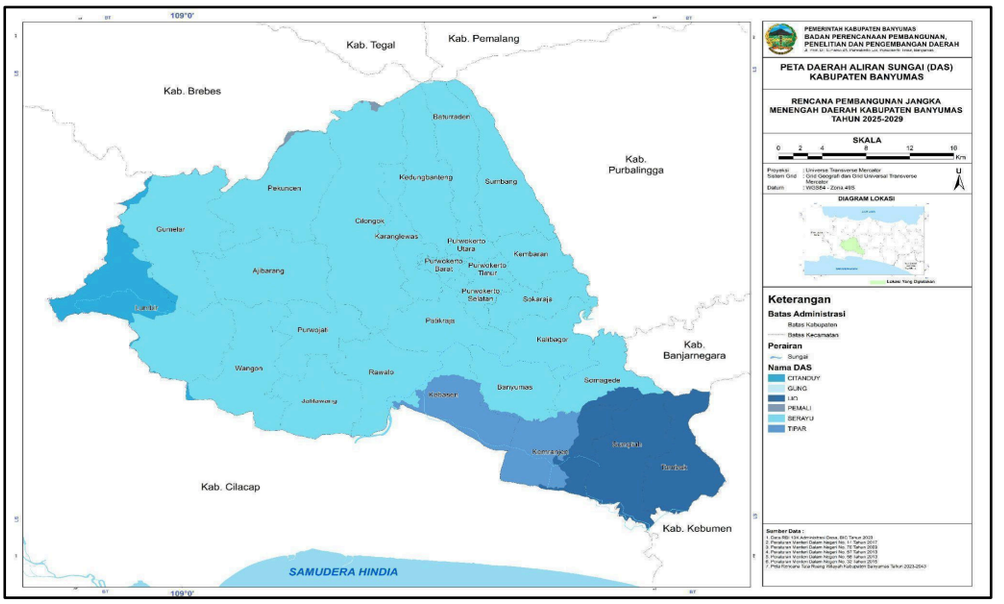

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 2. 9
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Banyumas

Air tanah yang telah termanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah (CAT) Purwokerto–Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya, Cekungan Air Tanah Cilacap, Cekungan Air Tanah Lebaksiu, dan Cekungan Air Tanah Banyumudal. Cekungan air di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada peta berikut ini:

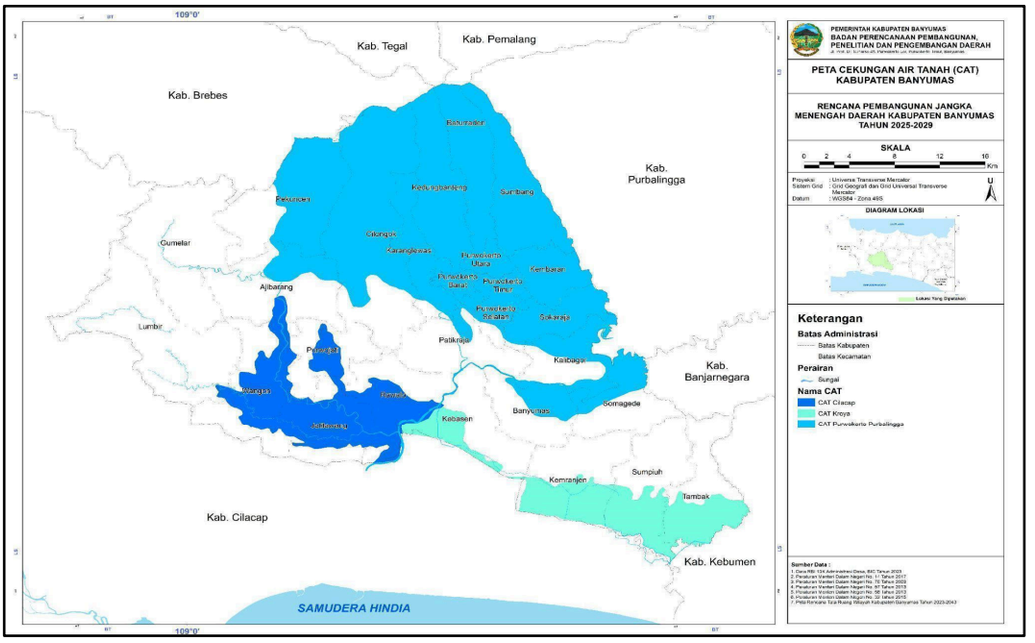

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 2. 10
Peta Cekungan Air Tanah

Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Potensi air bawah tanah tinggi, berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda), Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m3/hari/km, Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.
2. Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang, berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.
3. Potensi air bawah tanah sedang, berada pada kelulusan sedang, meliput: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik, dan 2) air tanah pada aluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m3/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.

4. Potensi air bawah tanah rendah, berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada aluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).
5. Potensi air bawah tanah langka, berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Daya Dukung Air

Kondisi daya dukung air di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 secara keseluruhan dalam kondisi surplus sebesar (623.811.208,68 m3/tahun) dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2029 untuk kondisi daya dukung air masih surplus 657.459.765,56 m3/tahun, dengan total ketersediaan airnya sebesar 1.738.876.910,19 m3/tahun sementara kebutuhan air mencapai 1.115.065.701,51 m3/tahun. Kondisi surplus ini menyebabkan potensi ketersediaan air yang belum terlampaui di Kabupaten Banyumas masih tinggi yaitu sebesar 72,17% atau setara dengan 100.593,80 Ha dan terdapat 27,83% atau setara dengan 38.795,50 Ha wilayah sudah terlampaui. Jika dilihat per kecamatan terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki daya dukung air dengan status defisit sedangkan 24 (dua puluh empat) kecamatan lainnya berstatus surplus. Wilayah dengan kondisi defisit tertinggi berada di Kecamatan Sokaraja sebesar -2.199.244 m3 /tahun.

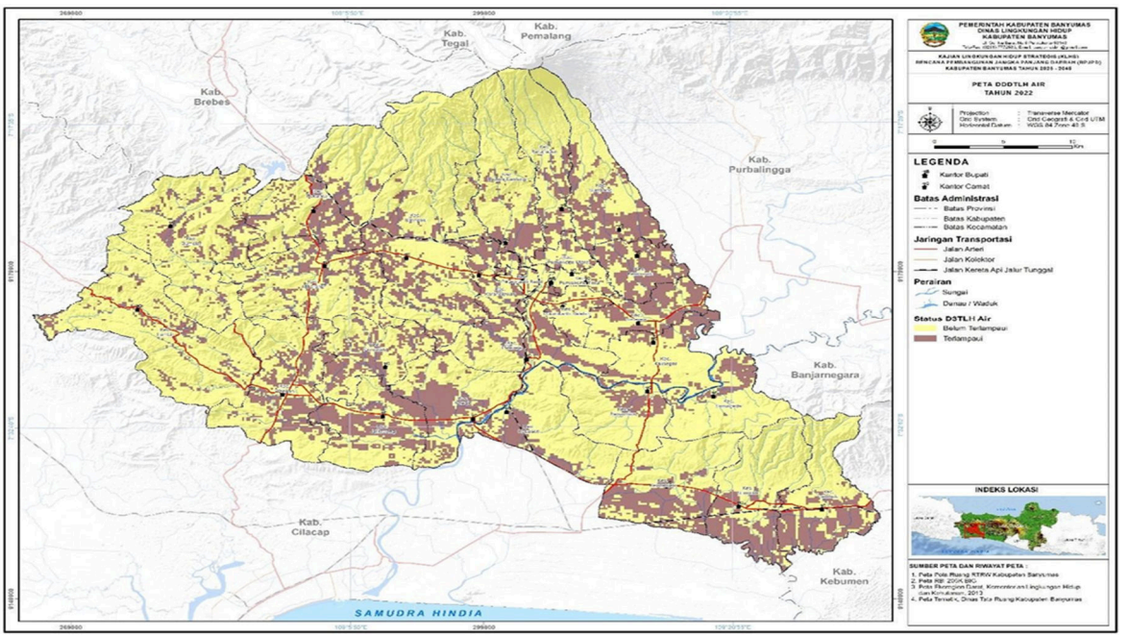

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 2. 11
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Banyumas

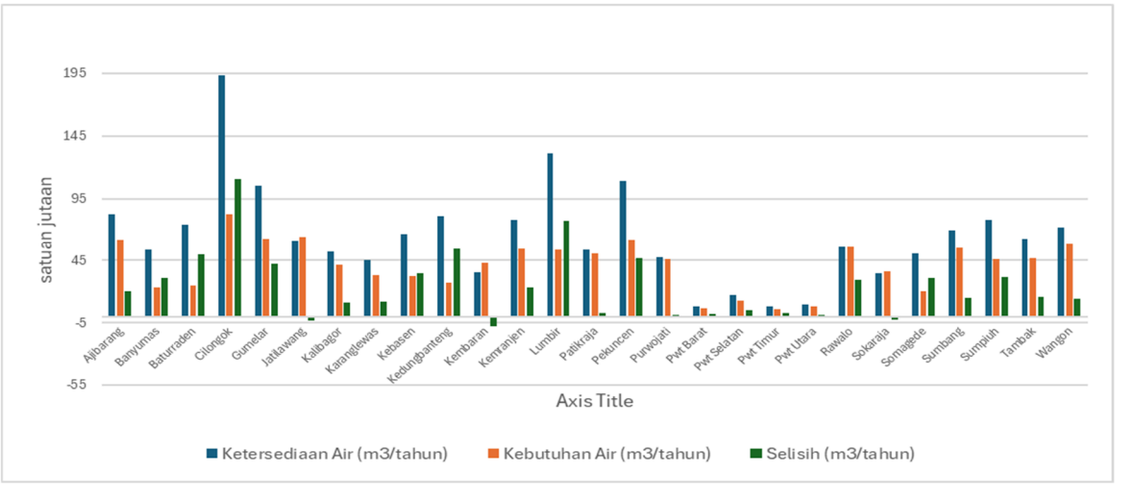

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 2. 12
Status Daya Dukung Air Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas

2.1.3.2. Daya Dukung Pangan

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan masih surplus sebesar 27.461,62 Ton dengan ketersediaan pangan mencapai 163.635 ton dan kebutuhan pangan sebesar 136.173,38 ton. Berdasarkan kondisi daya dukung pangan, maka status daya dukung pangan sebesar 71,84% atau setara dengan 10.13,36 Ha wilayah belum terlampaui dan 28,16% atau setara dengan 39.255,94 Ha wilayah yang sudah terlampaui. Jika dilihat per kecamatan, beberapa kecamatan memiliki status daya dukung pangan defisit seperti pada Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kembaran, Kecamatan, Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Utara, dan Kecamatan Sokaraja. Kecamatan dengan persentase belum terlampaui tertinggi yaitu Kecamatan Lumbir dengan nilai persentase belum terlampaui sebesar 84,09%. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan untuk sawah masih mendominasi wilayah dan juga jumlah penduduknya tidak setinggi kecamatan lainnya.

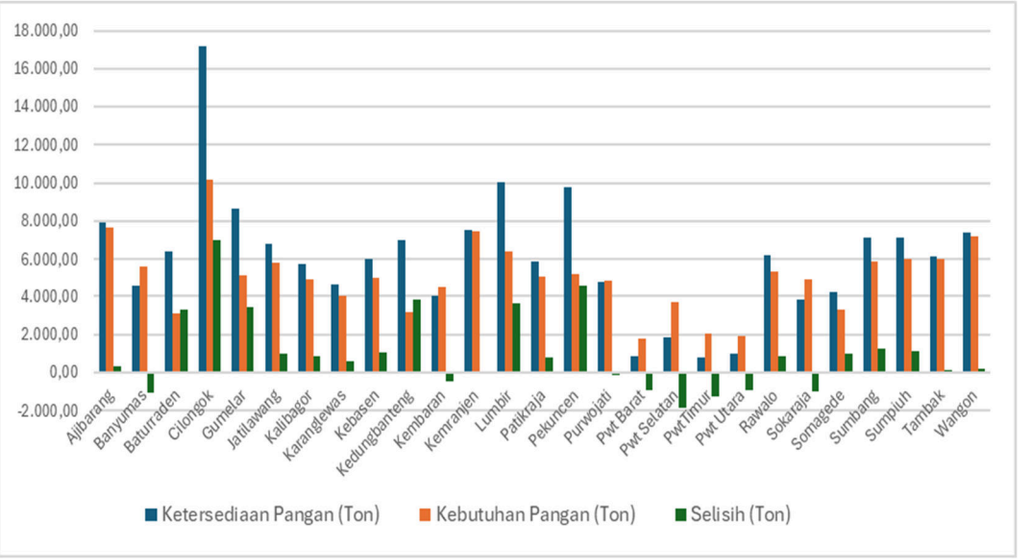

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 2. 13
Peta Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan Kabupaten Banyumas

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Ketersediaan Energi

Ketersediaan energi listrik di Kabupaten Banyumas cukup memadai, dapat dilihat pada tahun 2024 PLN di Kabupaten Banyumas sudah melakukan pemasangan daya sebesar 759 MegaVolt-Ampere (MVA) meningkat sebesar 33 MVA dari tahun sebelumnya dan sudah bisa memproduksi listrik sebesar 1.235.284.227 KWh, pada tahun 2024 PLN UP3 Purwokerto menyalurkan 1.169.662.405 KWh listrik yang meningkat dari tahun 2023 yang sebelumnya 1.094.198.518 KWh dengan jumlah pelanggan sebanyak 583.461 pelanggan. Pada tahun 2024 total listrik yang terjual sebesar 1.169.662.405 KWh dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebesar 1.847.097 jiwa sehingga dapat dihitung untuk pemakaian listrik per kapita di Kabupaten Banyumas sebesar 633,24 KWh per kapita.

Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, bisnis, pelayanan publik, dan dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik maka dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 3
Tabel Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada UP3/ULP PLN di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daya Terpasang (MVA)	611	647	680	726	759
2	Produksi Listrik (KWh)	989.865.332	1.051.759.012	1.105.887.776	1.154.292.570	1.235.284.227
3	Listrik Terjual (KWh)	963.909.514	1.012.906.542	1.043.619.936	1.094.198.518	1.169.662.405
4	Dipakai Sendiri (KWh)	1.050.100	2.676.499	5.073.033	5.330.561	5.641.057
5	Susut/ Hilang (KWh)	42.364.370	57.020.568	67.875.391	65.370.713	70.281.680

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2025

2.1.4.2. Ketersediaan Air Baku

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, wilayah Kabupaten Banyumas masuk dalam dua Wilayah Sungai (WS), yaitu Serayu–Bogowonto dan Citanduy. Luas wilayah Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam WS Serayu-Bogowonto seluas 133.590,34 ha yang mempunyai ketersediaan air andalan sebesar 1.669.235.426,9 m3/tahun. Sedangkan wilayah Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam WS Citanduy sebesar 5.551,51 yang mempunyai ketersediaan air andalan sebesar 69.641.483,29 m3/tahun. Sehingga total ketersediaan air di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 1.738.876.910,19 m3/tahun. Selanjutnya wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan daerah CAT seluas 72.178,36 ha atau 51,87 %, sedangkan sisanya berupa kawasan non CAT seluas 66.963,50 ha atau 48,13%.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas termasuk dalam CAT Purwokerto–Purbalingga yaitu seluas 50.527,29 ha atau 36,31 %, sedangkan wilayah CAT terkecil adalah CAT Banyumudal. Sebaran CAT dan non CAT berkaitan dengan kerawanan bencana kekeringan. Wilayah non CAT lebih rentan terhadap kekeringan karena terbatasnya ketersediaan air yang hanya mengandalkan pada air permukaan dan air pada lapisan tanah (soil water), sedangkan pada wilayah CAT selain potensi air permukaan yang sama dengan wilayah non CAT juga memiliki potensi air bawah tanah yang dapat dimanfaatkan.

Tabel 2. 4
Perkiraan Potensi Air Tanah CAT di Kabupaten Banyumas

No	CAT	Luas (Ha)			Potensi Air Tanah (Juta m3/tahun)			
		Seluruh CAT	Di Kab. Banyumas	%	Seluruh CAT		Di Kab. Banyumas	
					Bebas	Terteka n	Bebas	Terteka n
1	Purwokerto – Purbalingga	131.820	50.545,92	38,34 %	502,6	9,7	192,72	3,72
2	Kroya	42.280	10.408,34	24,62 %	65,1	-	16,03	-
3	Cilacap	21.760	11.139,07	51,19 %	43,2	-	22,11	-
4	Lebaksiu	66.120	95,67	0,14%	365,9	3,4	0,53	-
5	Banyumudal	6.730	11,15	0,17%	49,2	-	0,08	-
	Total	268.710	72.189,00				231,47	3,72

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045

Jika dilihat dari data mengenai potensi luas dan air tanah tiap CAT maka CAT Purwokerto–Purbalingga memiliki potensi besar yaitu 502,6 juta m3/tahun yang merupakan CAT bebas. Jika dilihat secara persentase luasan CAT yang ada di Kabupaten Banyumas terhadap luas CAT keseluruhan maka diperkirakan potensi CAT bebas yang ada di Kabupaten Banyumas mencapai 231,47 juta m3/tahun.

2.1.4.3. Cakupan Air Minum

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyediaan air minum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota. Penyediaan air dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat dan disediakan mandiri olah masyarakat.

Sampai dengan Tahun 2024 jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan akses air minum layak sebanyak 508.586 KK atau baru menjangkau 79,51% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyumas. Untuk akses air minum aman masih sebesar 32,89%. Dan untuk capaian air minum jaringan perpipaan baru tahun 2024 baru mencapai 32,89 % dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,11%. Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) kedepannya capaian akses air minum

diharapkan menjadi akses air minum aman dan berkelanjutan untuk seluruh penduduk Kabupaten Banyumas.

Air minum aman berkaitan erat dengan kualitas air minum. Air minum aman telah dapat diakses oleh sebagian besar penduduk perkotaan dengan jaringan perpipaan Perumda Air Minum Tirta Satria. Sampai tahun 2024 jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Perumda Air Minum Tirta Satria sebesar 99.836 SR yang keseluruhannya sudah diuji sesuai Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 di setiap Jaringan Distribusi Bagi maupun Jaringan Distribusi Langsung. Namun untuk air minum perpipaan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui sistem penyediaan air minum perdesaan kualitasnya masih harus ditingkatkan.

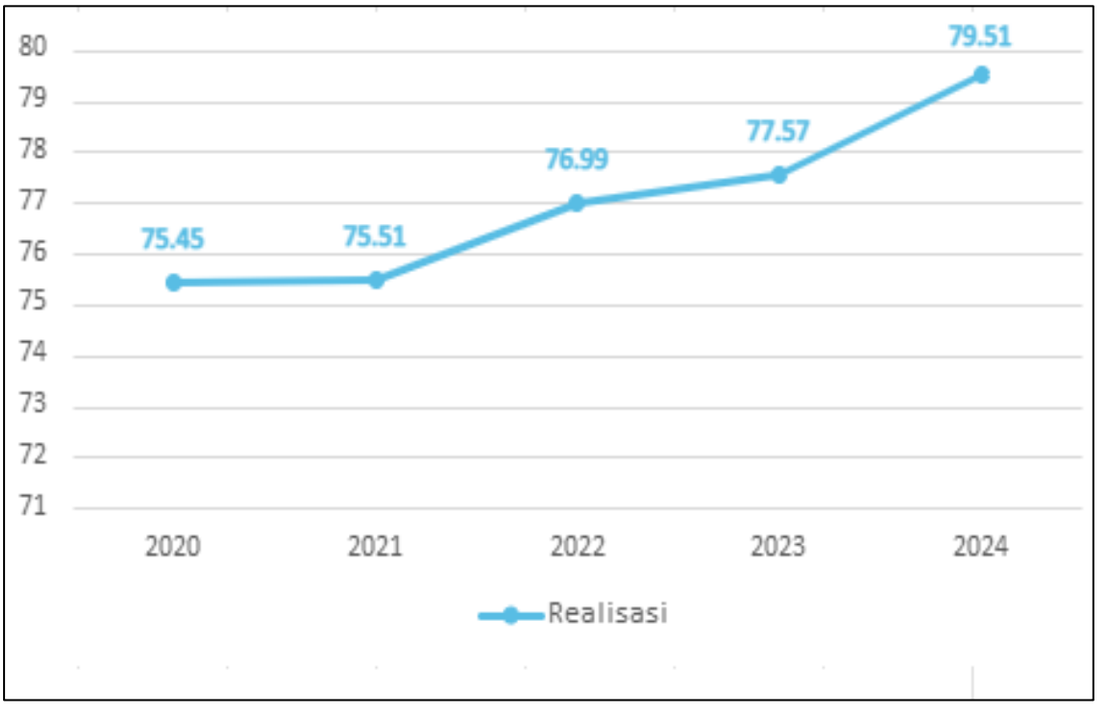

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 14
Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih (%)
di Kabupaten Banyumas

2.1.4.4. Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami tren penurunan. Nilai IKP Pada tahun 2024 sebesar 80,74 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 85,34. Melihat dari aspek ketersediaan pangan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami tren penurunan nilai sebesar -0,5%, hal ini disebabkan oleh masih penurunan produksi komoditas pangan dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung cadangan pangan. Aspek keterjangkauan pangan juga belum optimal, hal ini dapat ditunjukkan melalui rata-rata pertumbuhan nilai ketersediaan dalam 5 tahun terakhir yang baru mencapai 0,7%. Hal tersebut

terjadi karena masih menghadapi permasalahan pada nilai inflasi harga pangan dan masih adanya 76 desa rawan di tahun 2024 berdasarkan data FSVA. Sementara itu, aspek pemanfaatan pangan juga juga terjadi penurunan pada tahun 2024, hal tersebut dapat ditinjau dari nilai Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi yang masih belum ideal (2024: 92,6) dan nilai Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) yang masih cukup tinggi (2024: 7,98%).

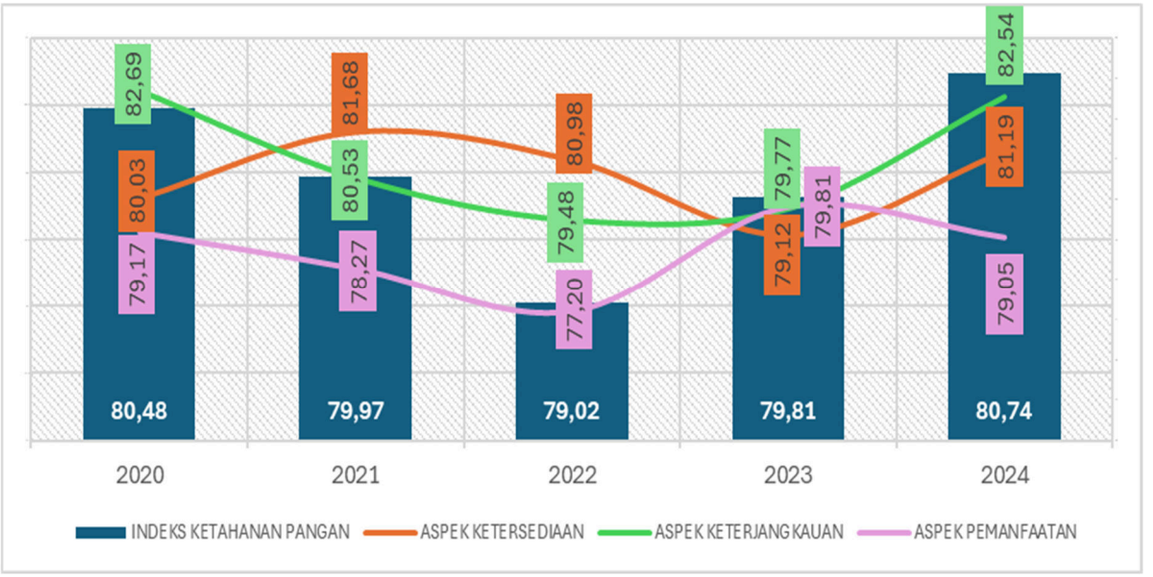

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2. 15
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 2020-2024

Luas areal perkebunan di Kabupaten Banyumas didominasi oleh perkebunan kelapa. luas perkebunan tembakau terus mengalami peningkatan di Banyumas yang disebabkan oleh insentif yang diberikan oleh DBHCHT. Luas areal panen untuk padi mengalami penurunan di tahun 2024, yang disebabkan oleh pergeseran bulan panen. Kegiatan Gertam Cabai mampu meningkatkan luas areal panen cabai rawit dan cabai keriting di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.5
Luas Areal dan Luas Panen Komoditas Pertanian 2020 – 2024

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Areal Tanaman Perkebunan (Hektar)					
Kelapa	17.640	15.105	15.521	17.822	10.396
Kopi	518	335	345	502	470
Pala	306	182	182	288	339
Tembakau	75	53	84	77	97
Luas Areal Panen Tanaman Pangan (Hektar)					
Padi	64.106	64.457	64.034	63.783	57.823
Jagung	5.158	4.301	5.155	4.509	4.830
Kedelai	238	1.079	292	1.285	205
Luas Areal Panen Hortikultura (Hektar)					
Melon	1	2	33	2	15
Cabai Rawit	122	109	104	118	165
Cabai Keriting	-	49	67	77	93
Bawang Merah	20	36,7	14,88	3	17

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan nilai yang menggambarkan proporsi penduduk yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Nilai PoU Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 adalah 7,98% (turun 26% dari tahun 2023). Dengan nilai tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat 143.640 jiwa masyarakat Banyumas mengalami ketidakcukupan pangan. Nilai PoU Kabupaten Banyumas 2024 tersebut lebih rendah dari PoU Provinsi Jawa Tengah (8,63%) dan Nasional (8,27%).

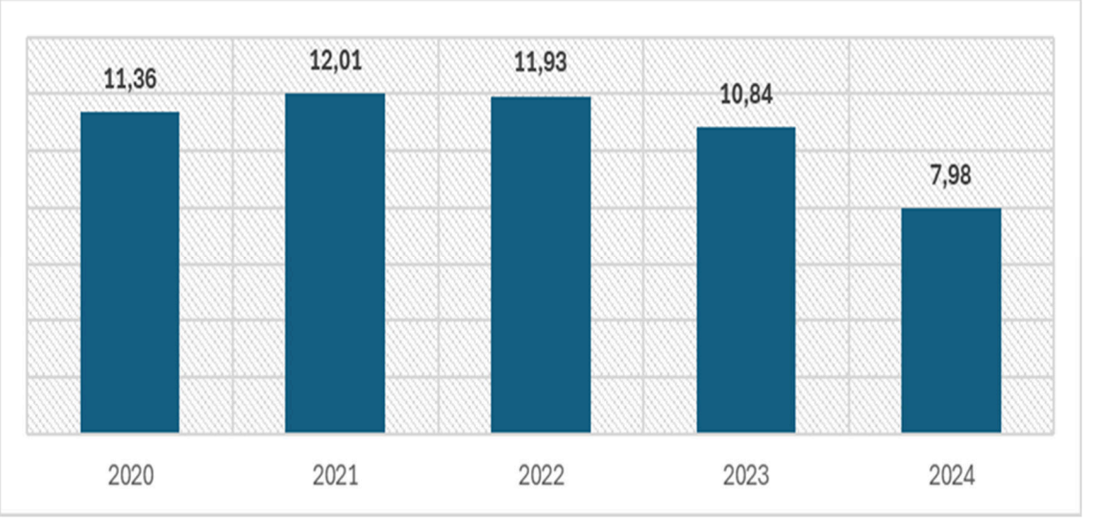

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2.16
Nilai PoU Kabupaten Banyumas 2020-2024 (%)

Dalam konteks hilirisasi komoditas pertanian dan pangan, dari 3 komoditas utama ekspor Banyumas, 2 diantaranya adalah produk pertanian

dan pangan, yaitu gula kelapa dan minyak atsiri. Khususnya untuk gula kelapa, memberikan *share* hingga 12 persen terhadap total nilai ekspor di Kabupaten Banyumas. Sementara itu, untuk hilirisasi minyak atsiri memberikan *share* ekspor hingga 57%. Data dari Dinperindag Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa hilirisasi komoditas pertanian dan pangan yang sudah di ekspor dari Banyumas antara lain: serabut kelapa, jelly grass, arang, kerupuk, emping melinjo, kemiri, mie telor, soun, margarin, kopi, tamarin, cengkeh dan beras jagung. semua komoditas tersebut memiliki share terhadap ekspor kurang dari 1%. Beberapa komoditas memiliki potensi untuk dilakukan hilirisasi lebih lanjut, antara lain: durian, kopi dan susu kambing. Saat ini untuk komoditas durian masih dominasi dijual segar, dan untuk komoditas kopi saat ini telah dikembangkan hilirisasi di Kecamatan Gumelar, Somagede, Cilongok, dan Baturraden. Sementara untuk produk susu kambing juga masih dominasi untuk dijual segar belum ada hilirisasi dan daerah yang memiliki potensi untuk hilirisasi susu kambing adalah di daerah Lumbir dan Gumelar.

2.1.4.5. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Banyumas meliputi: 1) koordinasi pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang berupa koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha; 2) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten; 3) penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten; 4) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam satu daerah kabupaten yang terdiri dari inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah; 5) inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah, koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten, dan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mengamanatkan bahwa reforma agraria ada 2 (dua), yaitu Penataan Aset (No. reform) dan Penataan Akses (access reform). Terkait Penataan Aset (No. reform), BPN sudah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setiap tahun, sementara Penataan Akses (access reform) adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Penataan

akses diimplementasikan dalam kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, yang dilaksanakan kepada pemilik tanah yang tanahnya telah atau belum dilegalisasi No./disertifikatkan, berprinsip pada partisipasi, kemandirian, dan kewirausahaan, keadilan, kemakmuran dan keberlanjutan.

Penanganan Akses Reforma Agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan akses reforma agraria dilaksanakan secara bertahap, tahun pertama adalah Penanganan Akses Reforma Agraria, kegiatan ini diawali dengan penetapan Lokasi untuk mendata subjek calon penerima manfaat Program Penanganan Akses Reforma Agraria, dilanjutkan kegiatan Penyuluhan dalam rangka Akses Reforma Agraria untuk pengenalan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dan Pemetaan sosial sebagai basis data dilanjutkan Penyusunan Model Akses Reforma Agraria, Penyusunan Data Penerima Akses Reforma Agraria serta arahan dan program sebagai bahan pengusulan pemberian fasilitasi akses kepada pemangku kepentingan. Tahun kedua adalah Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria. Kegiatan ini berfokus pada penguatan kelembagaan ekonomi yang dibentuk berdasarkan sektor ekonomi. Tahun ketiga adalah Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran.

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) desa yang mengikuti kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang, Desa Kalisari Kecamatan Cilongok, dan desa Pliken Kecamatan Kembaran. Untuk Desa Kotayasa penanganan akses reforma agraria memasuki tahun kedua, dengan kegiatan Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria. Kegiatan ini berfokus pada penguatan kelembagaan ekonomi yang dibentuk berdasarkan sektor ekonomi. Kegiatan ini dimulai dengan Penguatan Kelembagaan untuk pembentukan kelompok, dilanjutkan Fasilitasi pembentukan kerjasama, pendampingan kewirausahaan/kelembagaan, dan penerbitan surat keputusan kelompok masyarakat.

Pada tahun 2025 reforma agraria memasuki tahap penentuan Tanah Obyek Reforma (TORA) untuk Desa Cindaga, Tora sendiri adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi yang meliputi TORA dari Kawasan Hutan, dari non-Kawasan Hutan, dan dari hasil penyelesaian Konflik Agraria.

2.1.4.6. Sistem Irigasi

Prasarana sumber daya air meliputi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sistem pengendali banjir, dan sistem jaringan air baku. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Berikut detail jumlah daerah irigasi dan luasnya dilihat dari kewenangan.

Tabel 2. 6
Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	Pusat	2	6.578
2	Provinsi Jawa Tengah	10	5.084
3	Kabupaten Banyumas	573	23.716
	Jumlah	**585**	**35.378**

Sumber: Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

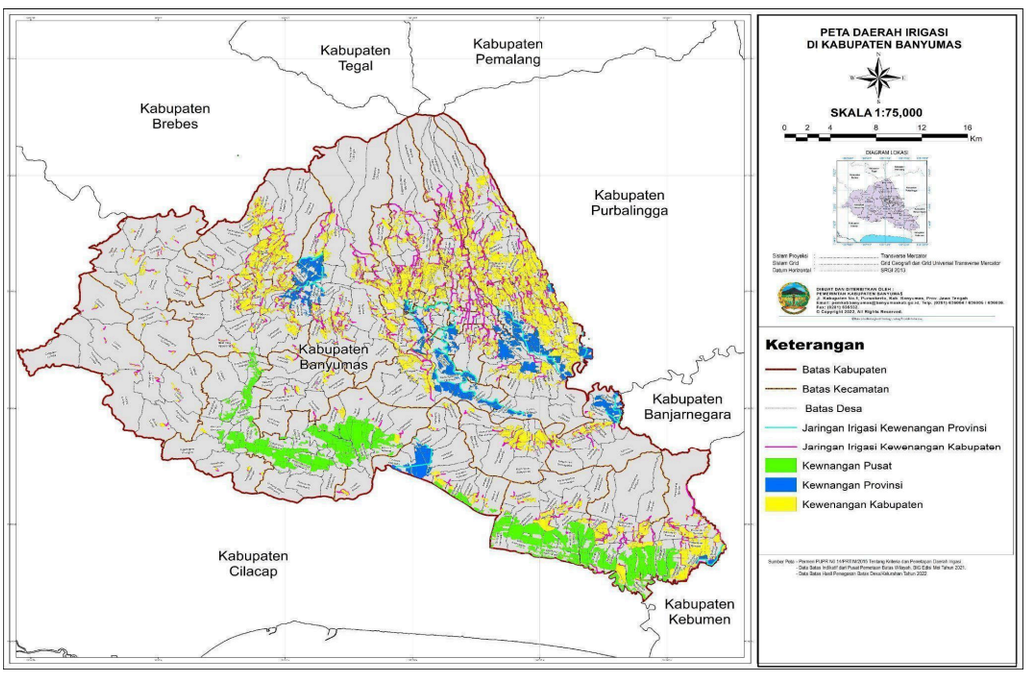

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025 Diolah

Gambar 2. 17
Sebaran Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas

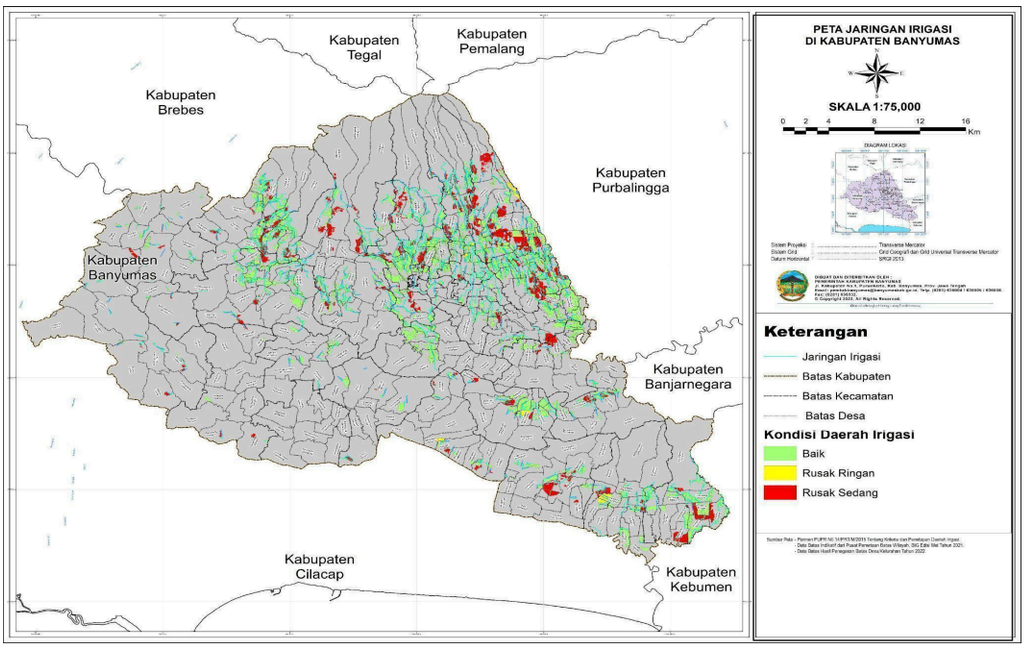

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025 diolah

Gambar 2. 18
Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas

Adanya kerusakan pada Daerah Irigasi menyebabkan tidak optimalnya ketersediaan air yang berpengaruh pada produksi pertanian. Oleh karena itu Kondisi Daerah Irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan. Berikut Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 yang digambarkan dalam grafik berikut.

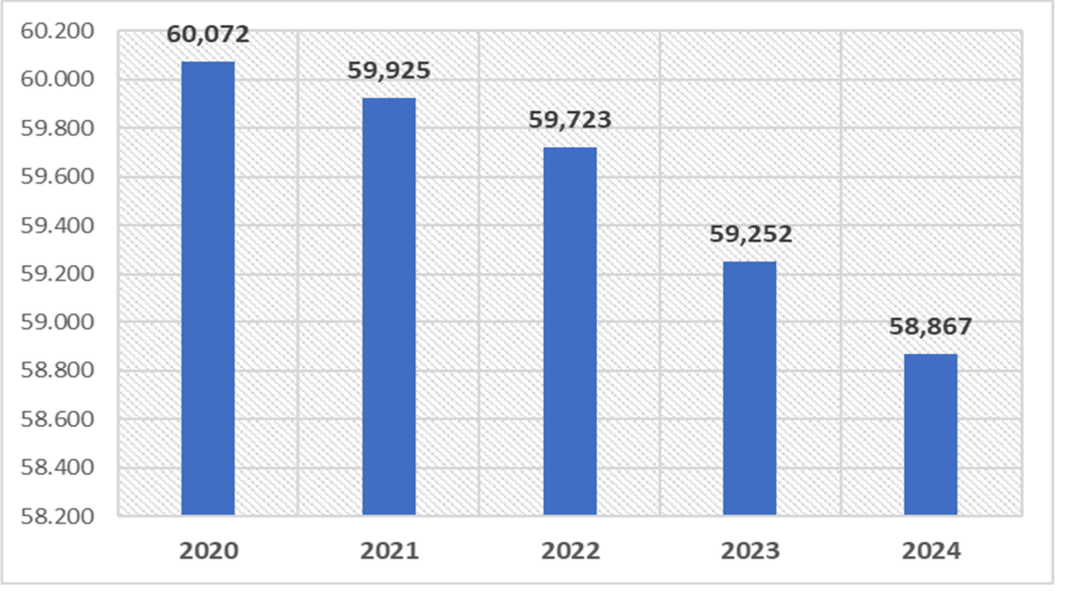

Sumber: Dinas PU Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 19
Grafik Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Keterangan Kategori Kinerja sesuai Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi:

1. *Nilai 80-100: Kinerja Sangat Baik;*
2. *Nilai 70-79: Kinerja Baik;*
3. *Nilai 55-69: Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian;*
4. *Nilai <55: Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian.*

Dari grafik diatas bisa disimpulkan Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2024 masuk Kategori Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian. Sehingga diperlukan peningkatan kinerja operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi serta penguatan kelembagaan pengelola irigasi menjadi kegiatan prioritas untuk meningkatkan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Keberlanjutan pembangunan dari aspek lingkungan yang ditunjukan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, mencapai 67,00 (kategori sedang) pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023. Peningkatan IKLH pada tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang cukup signifikan. Pada masa yang akan datang, peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan masyarakat diperkirakan akan menjadi tantangan dalam mencapai kondisi lingkungan hidup yang berkualitas.

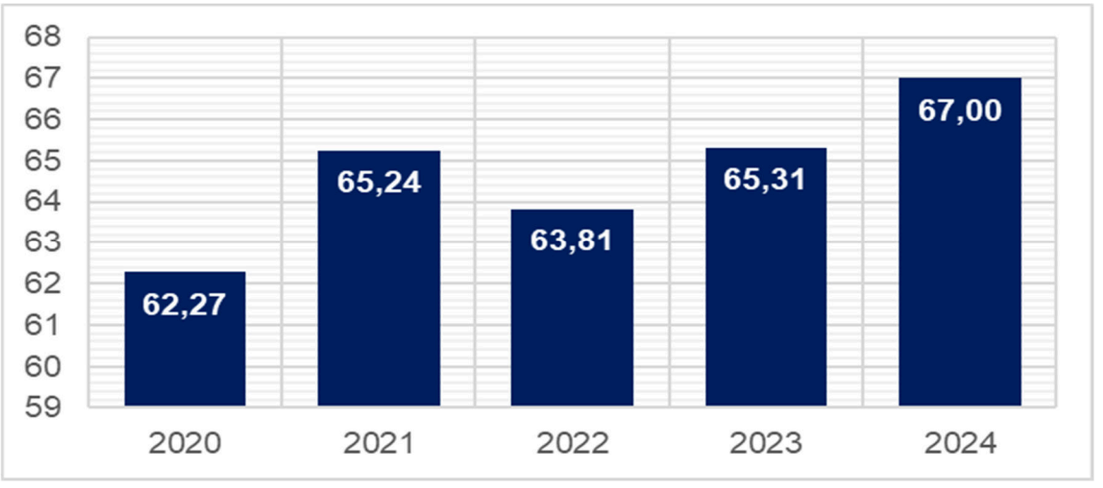

Sumber : DLH Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 20
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Selain dari IKLH, untuk mengetahui kondisi pencemaran lingkungan bisa juga dilihat dari capaian akses sanitasi aman. Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja

(IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Sampai dengan tahun 2024 Capaian Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Banyumas baru mencapai 2,46 % hal ini dikarenakan masih sedikitnya masyarakat yang melakukan penyedotan tangki septik dalam 5 (lima) tahun dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

2.1.5.2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah pada tahun 2024 meningkat disebabkan bertambahnya jumlah penduduk. Persentase sampah yang dikelola mencapai 99,34% yang terdiri dari 67,52% pengurangan sampah dan 31,83% penanganan sampah. Peningkatan persentase sampah yang dikelola didukung oleh meningkatnya volume pemanfaatan kembali sampah dan pendaurulangan sampah yang dilakukan di fasilitas pengolahan sampah (TPST/TPS3R/PDU).

Tabel 2. 7
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas
Tahun 2021-2024

Tahun	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah		Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola	
		(Ton/ Tahun)	(%)	(Ton/ Tahun)	(%)	(Ton/ Tahun)	(%)
2021	195.358	128.388	65,7	63.106	32,3	3.863	1,98
2022	195.964	130.962	66,8	63.649	32,4	1.354	0,69
2023	197.758	132.668	67,0	63.729	32,2	1.362	0,68
2024	200.229	135.187	67,5	63.729	31,8	1.148	0,65

Sumber: SIPSN dan Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Kinerja pengelolaan sampah diukur dengan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). IKPS dihitung berdasarkan dua komponen yaitu indeks pengelolaan dan indeks efektivitas dan efisiensi. IKPS Kabupaten Banyumas memiliki nilai yang tinggi karena didukung oleh jumlah sarana prasarana pengolahan sampah yang cukup banyak tersedia seperti alat pengangkutan sampah, alat pengolah sampah, dan fasilitas pengolah sampah seperti TPST/TPS 3R, PDU dan Bank Sampah. Pengolahan sampah menjadi RDF yang sudah dijalankan di Kabupaten Banyumas juga turut serta menambah nilai IKPS. Nilai IKPS tahun 2024 menurun karena terjadi perubahan estimasi volume timbulan sampah per orang berdasarkan review dari Kementerian Lingkungan Hidup.

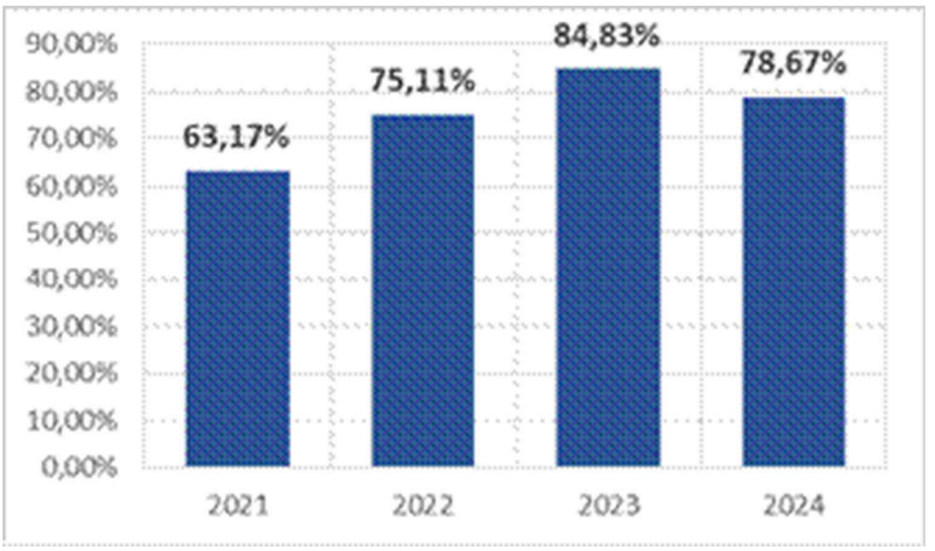

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Gambar 2. 21
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024

Sampai dengan tahun 2023, terdapat 49 TPST/TPS3R/PDU di Kabupaten Banyumas yang tersebar di 19 Kecamatan termasuk di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Untuk mencapai target zero waste to landfill, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan, khususnya karena belum semua wilayah memiliki fasilitas pengelolaan sampah. Masih terdapat 8 (delapan) kecamatan yang belum memiliki TPST/TPS3R/PDU. Selain itu, Kabupaten Banyumas belum memiliki sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah spesifik, yaitu sampah B3 dan sampah yang mengandung limbah B3.

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 22
Peta Sebaran Fasilitas Persampahan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Selain IKPS, kinerja pengelolaan sampah juga dapat dilihat dari timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengelolaan sampah. Indikator tersebut mengindikasikan banyaknya jumlah daur ulang sampah dan pengolahan sampah yang sudah dilakukan. Tingkat timbunan sampah terolah di Kabupaten Banyumas mencapai 75,62% pada tahun 2024 karena tingkat pendaurulangan sampah sudah cukup tinggi.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih belum sepenuhnya responsif gender. Masih terdapat ketimpangan khususnya dalam hal akses terhadap pekerjaan dan sumber daya karena sebagian besar aktor yang terlibat dalam ekosistem pengelolaan sampah masih didominasi oleh laki-laki. Selain itu, kebijakan-kebijakan persampahan yang ada juga masih berupa kebijakan yang netral gender.

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan Karakteristik geografis, Kabupaten Banyumas memiliki potensi bencana alam seperti gerakan tanah, banjir, kekeringan, dan letusan gunung berapi. Bencana gerakan tanah atau tanah longsor merupakan yang paling umum terjadi dan hampir menyeluruh di setiap kecamatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik wilayah yang memiliki kemiringan tinggi dan adanya sesar atau patahan yang meningkatkan kerawanan terhadap gerakan tanah.

Banjir dan kekeringan adalah bencana alam lain yang sering terjadi, dengan wilayah rawan bencana banjir tersebar di tujuh kecamatan dan kekeringan di enam belas kecamatan. Kedua jenis bencana ini sangat dipengaruhi oleh iklim dan kondisi topografi wilayah. Meski demikian, berdasarkan hasil pemetaan bencana ada tiga kecamatan yang relatif aman dari risiko bencana, yaitu Kecamatan Kembaran, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur.

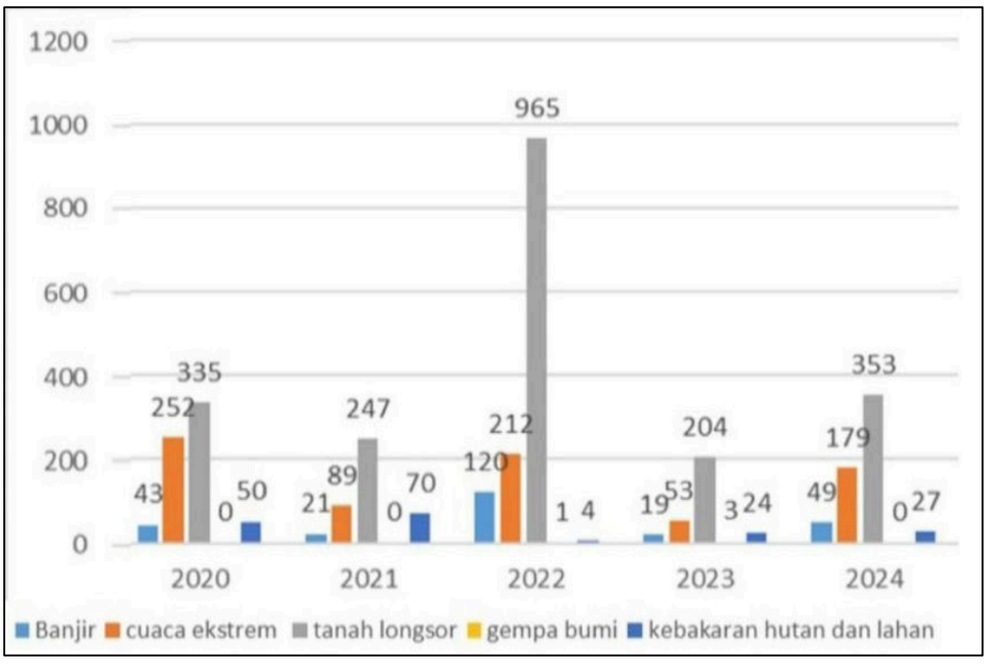

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 23
Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024

Berdasarkan data dari BPBD selama enam tahun terakhir (2020-2024), bencana di Kabupaten Banyumas didominasi oleh tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan serta lahan. Tanah longsor merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 965 kejadian. Cuaca ekstrem juga menjadi bencana yang signifikan, dengan jumlah kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 252 kejadian. Kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2021 dengan 70 kejadian. Kejadian banjir menunjukkan pola fluktuatif, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebanyak 120 kejadian.

2.1.6.1. Tingkat risiko Bencana

Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang positif dengan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB Kabupaten Banyumas menunjukkan penurunan dari 193,71 pada tahun 2020 menjadi 109,01 pada tahun 2024. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, menunjukkan bahwa Banyumas masih memiliki risiko bencana yang relatif lebih tinggi.

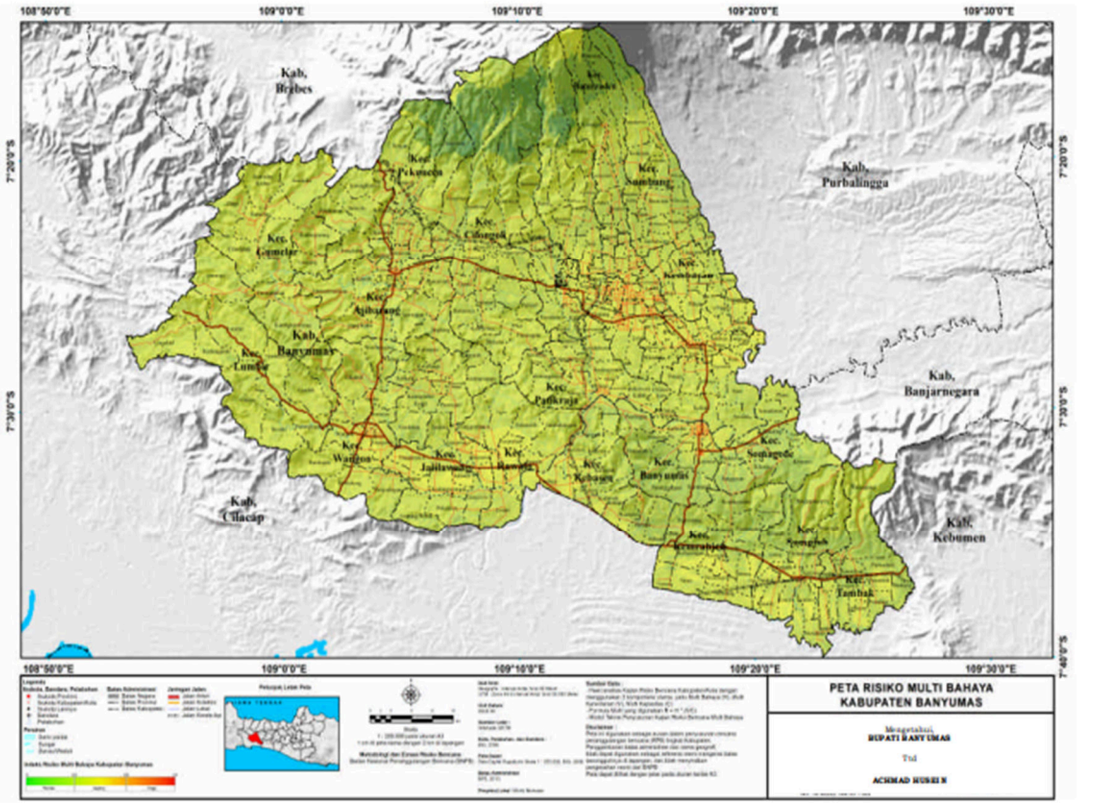

Sumber: KRB BPBD Kabupaten Banyumas, 2023

Gambar 2. 24
Peta Risiko Bencana Kabupaten Banyumas

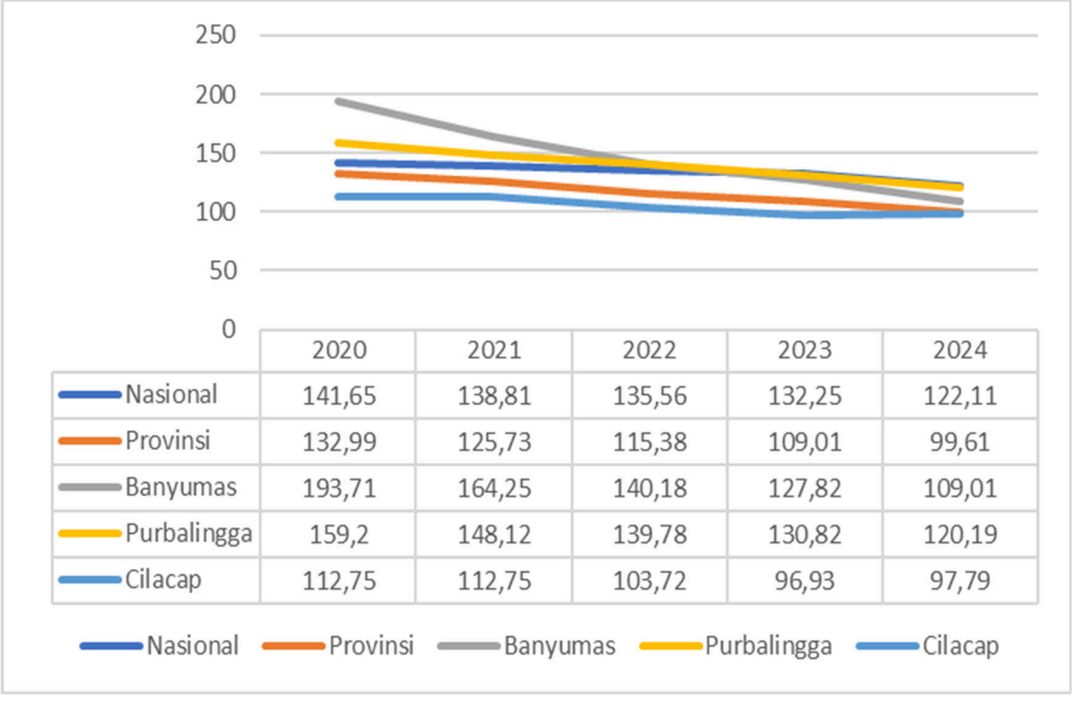

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	141,65	138,81	135,56	132,25	122,11
Provinsi	132,99	125,73	115,38	109,01	99,61
Banyumas	193,71	164,25	140,18	127,82	109,01
Purbalingga	159,2	148,12	139,78	130,82	120,19
Cilacap	112,75	112,75	103,72	96,93	97,79

Sumber: BNPB, 2024

Gambar 2. 25
Indeks Risiko Bencana Provinsi, Nasional,Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan Banyumas dalam menurunkan resiko bencana meliputi program penanggulangan bencana baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian bencana. Program penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas antara lain mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan,

penanganan tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Pada mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan sudah tersusunnya dokumen rencana kontinjensi yaitu Kajian Risiko Bencana (KRB), terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan juga mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana. Pada saat penanganan tanggap darurat, sudah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi. Dan pada pemulihan pasca bencana, untuk menganalisa dampak dan perkiraan kebutuhan pascabencana maka disusun Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P).

2.1.6.2. Ancaman Perubahan Iklim

Penyebab perubahan iklim saat ini banyak dikaitkan dengan aktivitas manusia, terutama pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data pada aplikasi SIGNSMART Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebesar 4.446,90 Gg CO2Eq cenderung mengalami penurunan sebesar 26,12% (1.572,40 Gg CO2Eq) dibanding dengan tahun 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan emisi GRK di tahun 2020 dan 2021. Penurunan emisi pada tahun 2024 disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada sektor Kehutanan dan Proses Industri dan Pengadaan dan Penggunaan Energi. Pada sektor kehutanan, penurunan emisi didukung oleh tidak terjadinya perubahan penggunaan lahan pada lahan hutan dan lahan pertanian. Sedangkan pada sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi, penurunan emisi disebabkan karena penurunan penggunaan bahan bakar di Kabupaten Banyumas.

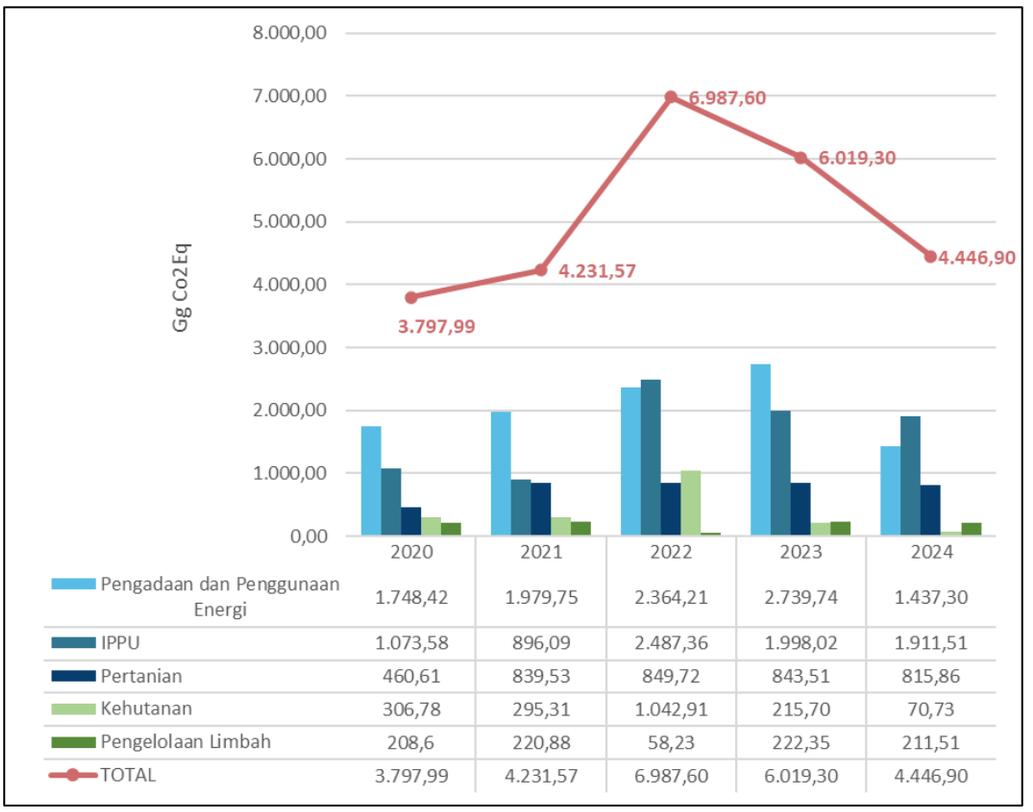

	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan dan Penggunaan Energi	1.748,42	1.979,75	2.364,21	2.739,74	1.437,30
IPPU	1.073,58	896,09	2.487,36	1.998,02	1.911,51
Pertanian	460,61	839,53	849,72	843,51	815,86
Kehutanan	306,78	295,31	1.042,91	215,70	70,73
Pengelolaan Limbah	208,6	220,88	58,23	222,35	211,51
TOTAL	3.797,99	4.231,57	6.987,60	6.019,30	4.446,90

Sumber: Aplikasi SIGNSMART KLHK 2025

Gambar 2. 26
Tingkat Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada aplikasi AKSARA sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Banyumas telah berkontribusi terhadap capaian penurunan emisi GRK sebesar 40.271,776 TonCO2 eq. Kontribusi penurunan emisi GRK paling dominan ada pada sektor pengelolaan limbah khususnya sektor persampahan.

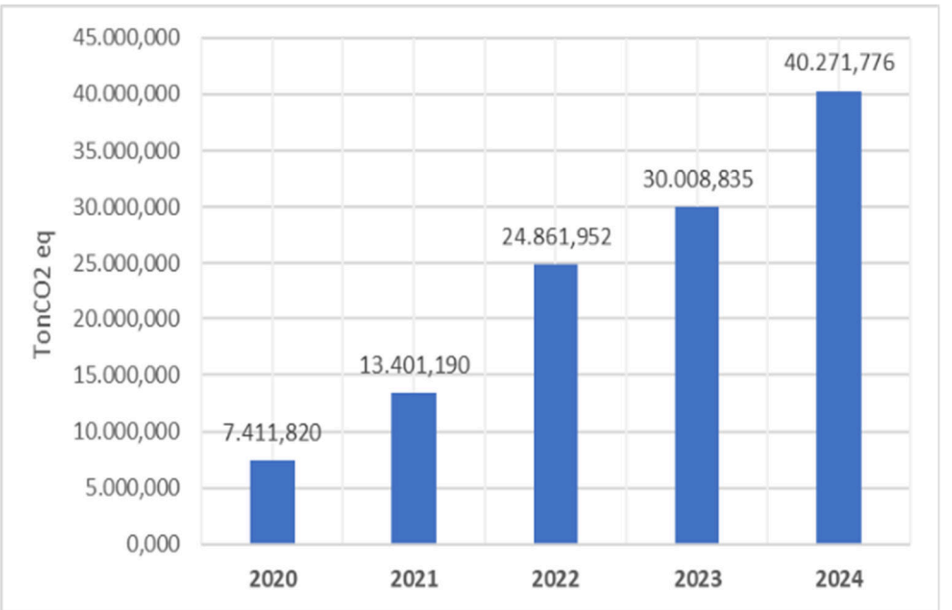

Sumber: Aplikasi AKSARA 2025

Gambar 2. 27
Capaian Pembangunan Rendah Karbon Kab. Banyumas
Tahun 2020-2024

2.1.7. Demografi

2.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 70.179 jiwa, dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 1.847.097 jiwa, terdiri dari 928.905 laki-laki dan 918.192 perempuan. Berikut grafik jumlah penduduk Kabupaten Banyumas 2020-2024:

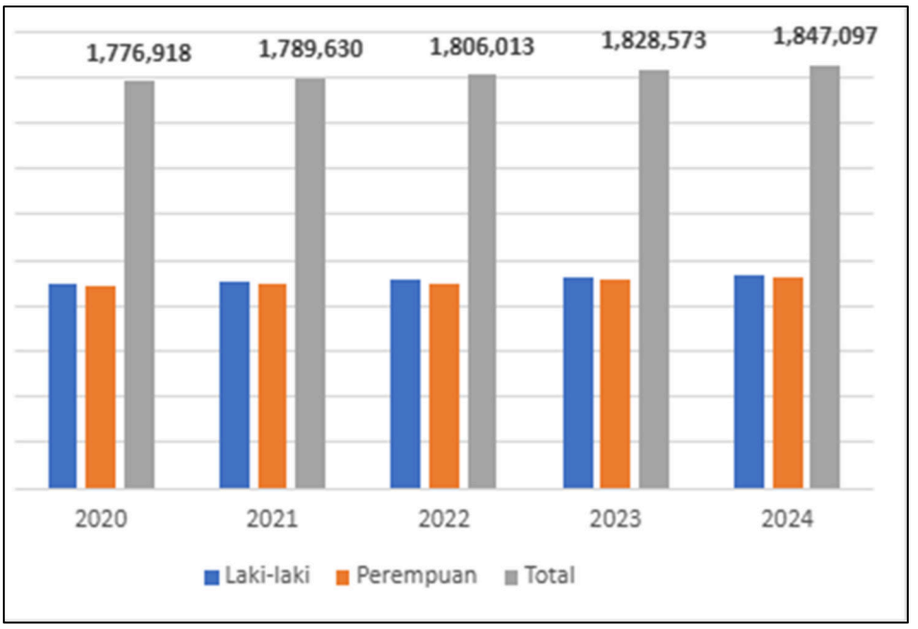

Sumber : Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2025

Gambar 2. 28
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tersebut dapat dihitung rasio jenis kelaminnya. Rasio jenis kelamin Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2020 sampai 2024 cenderung menurun, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah laki-laki relatif semakin sedikit terhadap jumlah perempuan. Nilai rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

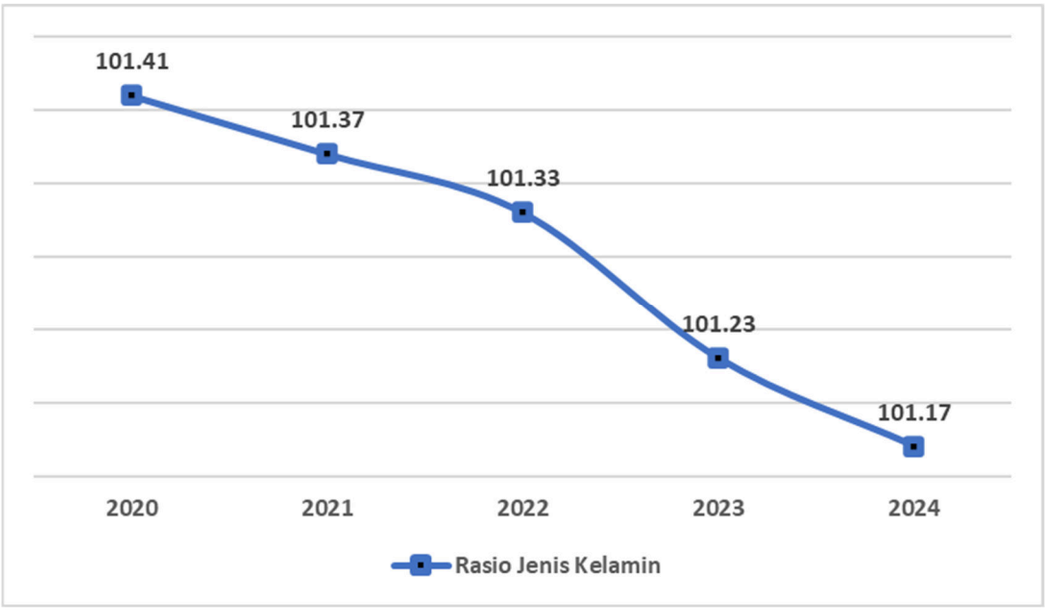

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Gambar 2. 29
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 1,05%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Kemudian di tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk sedikit menurun menjadi 1,04%. Sementara itu, sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata, dimana Cilongok menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan 128.614 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 38.846 jiwa.

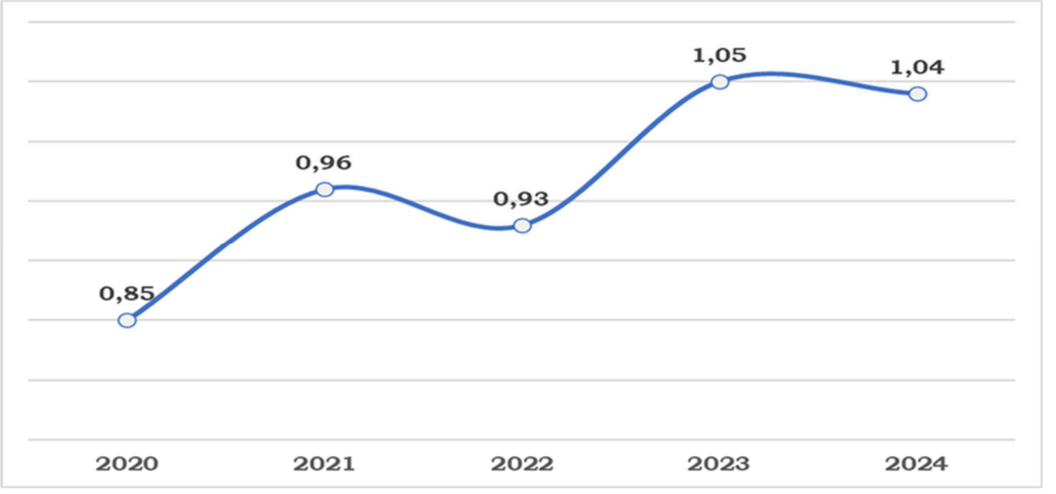

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Gambar 2. 30
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

2.1.7.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas terpusat di perkotaan Purwokerto, yaitu di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara, dengan kepadatan penduduk rata-rata 13 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Banyumas terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 68 jiwa/Ha dan terendah berada di Kecamatan Lumbir dengan kepadatan 5 jiwa/Ha.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

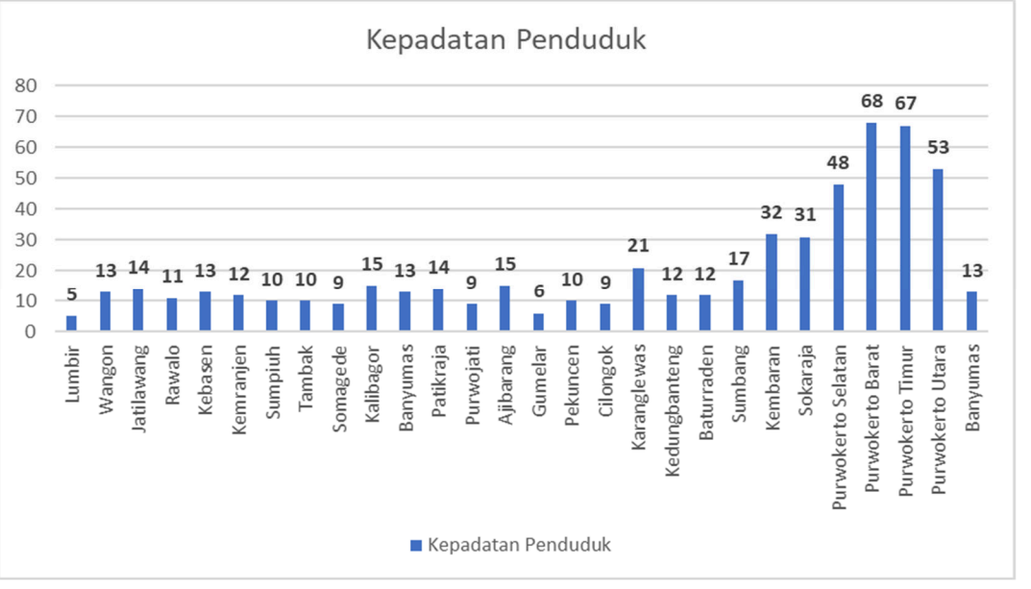

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025, diolah

Gambar 2. 31
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Jiwa/Ha)

Mayoritas penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), yaitu sebesar 1.267.301 jiwa atau sebesar 68,61% dari total penduduk. Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebesar 45,75%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas sudah memasuki masa bonus demografi.

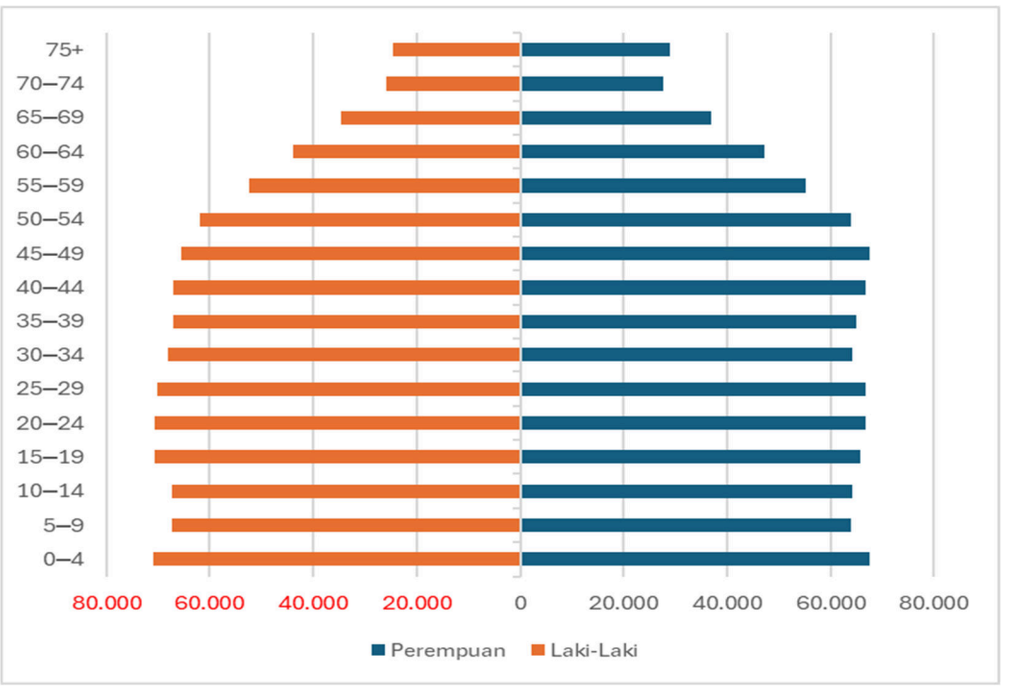

Sumber : Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2025, diolah

Gambar 2. 32
Piramida Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2024

2.1.7.3. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2025-2029 memiliki tren yang meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 1.853.772 jiwa diperkirakan meningkat menjadi 1.902.378 jiwa pada tahun 2029.

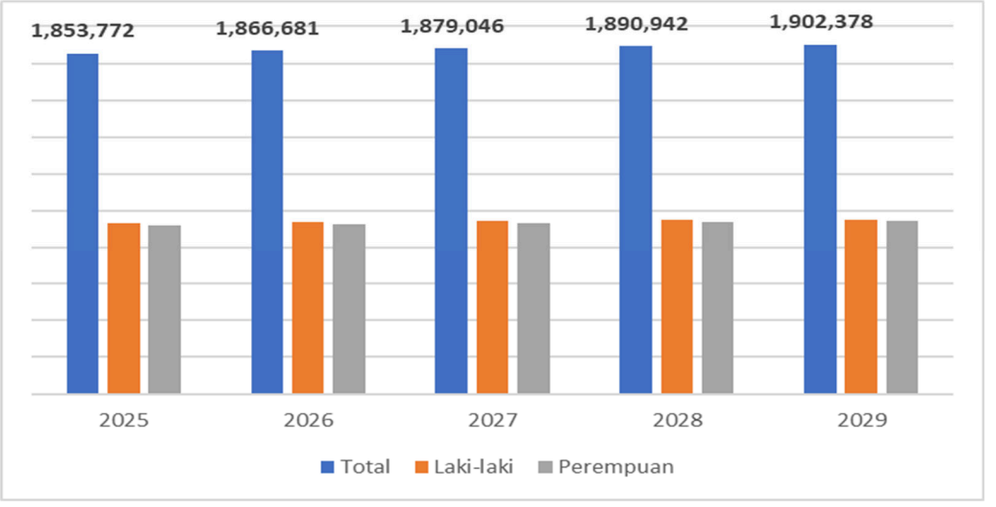

Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 2. 33
Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2029

2.1.7.4. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Dengan asumsi tren kepadatan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas masih terpusat pada Kawasan Perkotaan Purwokerto.

Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada rentang tahun 2025–2029 diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat pada tahun 2023 sebesar 13,14 jiwa/Ha menjadi 13,67 jiwa/Ha di tahun 2029.

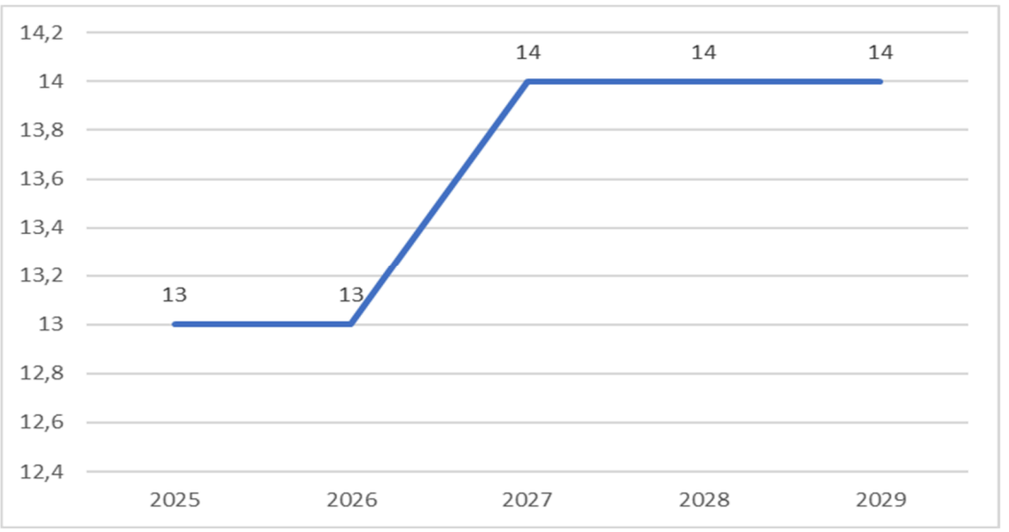

Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 2. 34
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 – 2029

2.1.7.5. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Proyeksi proporsi penduduk usia produktif mendominasi komposisi penduduk pada tahun 2025-2029.

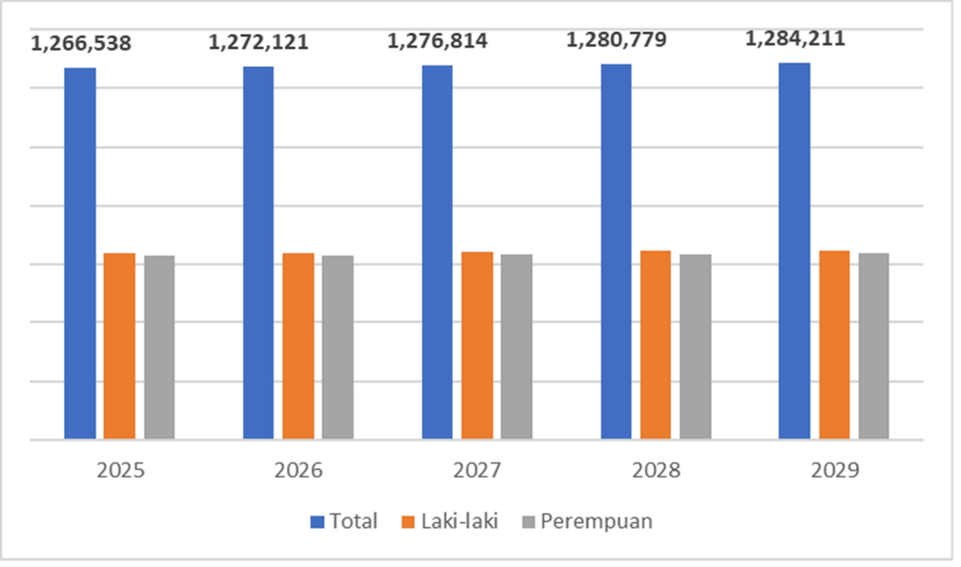

Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 2. 35
Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2029

Proyeksi rasio ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 cenderung meningkat. Meskipun demikian,

dominasi penduduk usia produktif selama kurun waktu tersebut Kabupaten Banyumas masih akan mengalami bonus demografi.

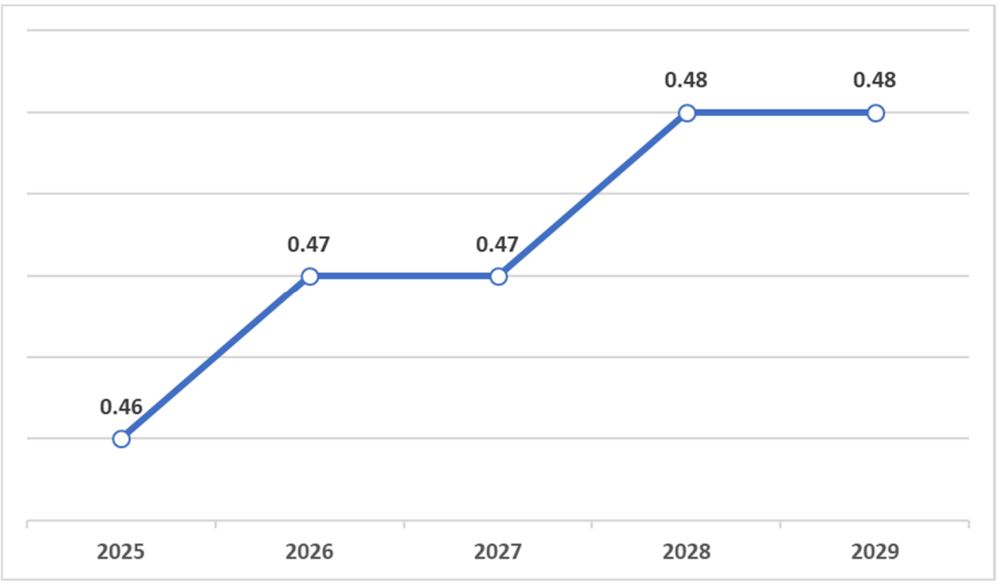

Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 2. 36
Proyeksi Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*)
Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Hal ini disebut bonus karena tidak terjadi terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun. Terjadinya bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara.

Bonus demografi dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi, jika:

1) Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita. Hal ini terjadi apabila ada kesempatan kerja yang produktif, dan bisa menabung;
2) Meningkatnya peranan perempuan, dengan jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, dan membantu peningkatan pendapatan;
3) Tabungan rumah tangga yang diinvestasikan secara produktif;

2.1.7.6. Modal manusia berkualitas

Pemerintah menetapkan 4 (empat) syarat untuk dapat memanfaatkan peluang Bonus Demografi yaitu : penduduk harus berkualitas, penduduk

produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan peningkatan kualitas modal manusia, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kecukupan gizi, kemampuan berkomunikasi, menguasai matematika dan teknologi serta aspek-aspek sosial-budaya lainnya, peningkatan lapangan kerja, dan kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030. Peningkatan kualitas manusia harus dimulai sekarang, karena kelompok umur 0-14 tahun akan menjadi angkatan kerja di masa datang. Perencanaan pembangunan tahunan maupun jangka menengah menjadi langkah strategis untuk menangkap peluang bonus demografi. Jika pemerintah daerah tidak bertindak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kecukupan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan mensinergikan program tersebut dalam perencanaan pembangunan maka rantai kemiskinan antar generasi berlanjut.

2.1.7.7. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Penduduk usia lanjut menurut World Health Organization (WHO) adalah penduduk dengan usia 60 tahun ke atas. Proyeksi penduduk usia lanjut tahun 2025-2029 cenderung meningkat dari 285.754 jiwa pada 2025 menjadi 325.256 jiwa di tahun 2029.

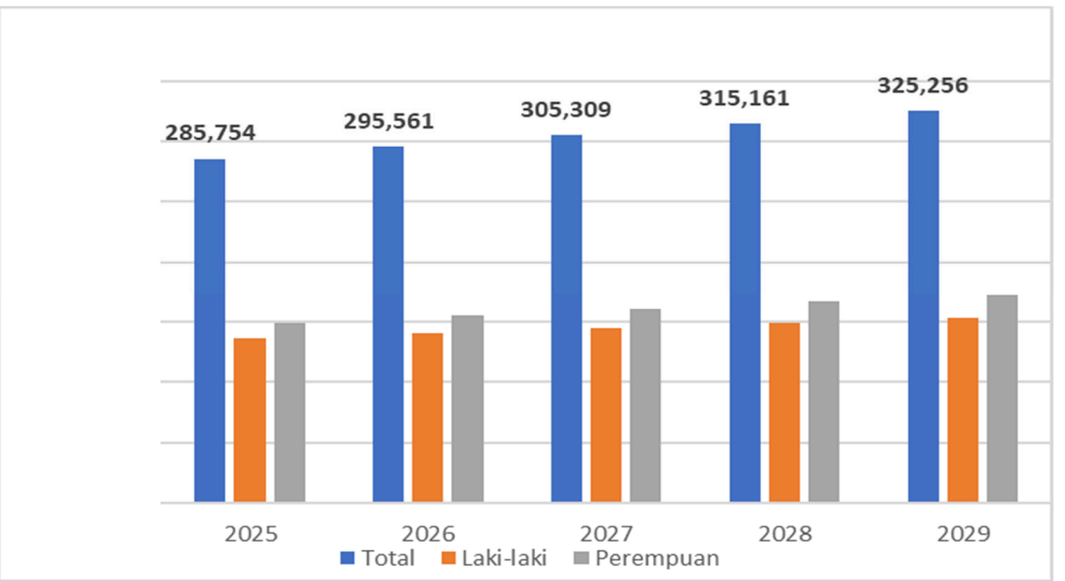

Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 2. 37
Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2029

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju pertumbuhan ekonomi

Perekonomian Kabupaten Banyumas semakin membaik setelah mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*. Membaiknya perekonomian Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam 5 tahun terakhir. Sempat mengalami kontraksi hingga -1,65% pada tahun 2020, perekonomian Banyumas beranjak pulih dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3% dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas adalah 5,29%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan 5,03% dan Provinsi Jawa Tengah dengan 4,95%. Lebih lanjut, Laju Pertumbuhan Ekonomi Banyumas konsisten tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten Cilacap dan Purbalingga sejak tahun 2020. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas, Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:

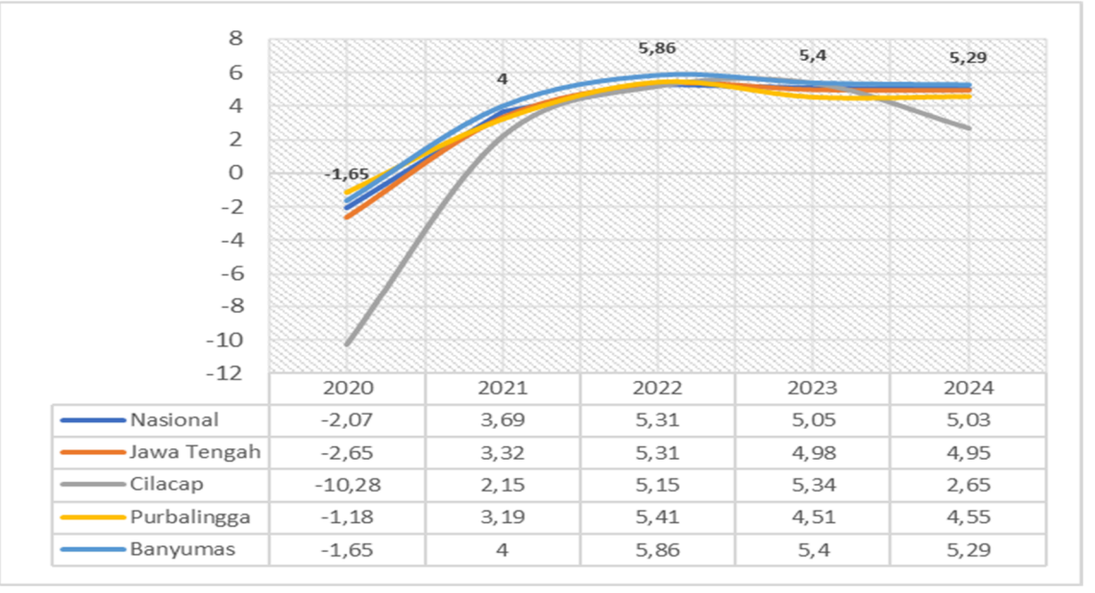

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03
Jawa Tengah	-2,65	3,32	5,31	4,98	4,95
Cilacap	-10,28	2,15	5,15	5,34	2,65
Purbalingga	-1,18	3,19	5,41	4,51	4,55
Banyumas	-1,65	4	5,86	5,4	5,29

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Gambar 2. 38
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Banyumas adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Nasional, Jawa Tengah, Cilacap, dan Purbalingga, Ekonomi Banyumas di tahun 2024 tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan negatif dari Sektor Pertanian pada 2024 dengan nilai -0,54%. Sementara itu, sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor Industri dengan share mencapai 26,40%.

2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menurun sebesar 0,58% dari 12,53% pada tahun 2023 menjadi 11,95% di tahun 2024. Perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

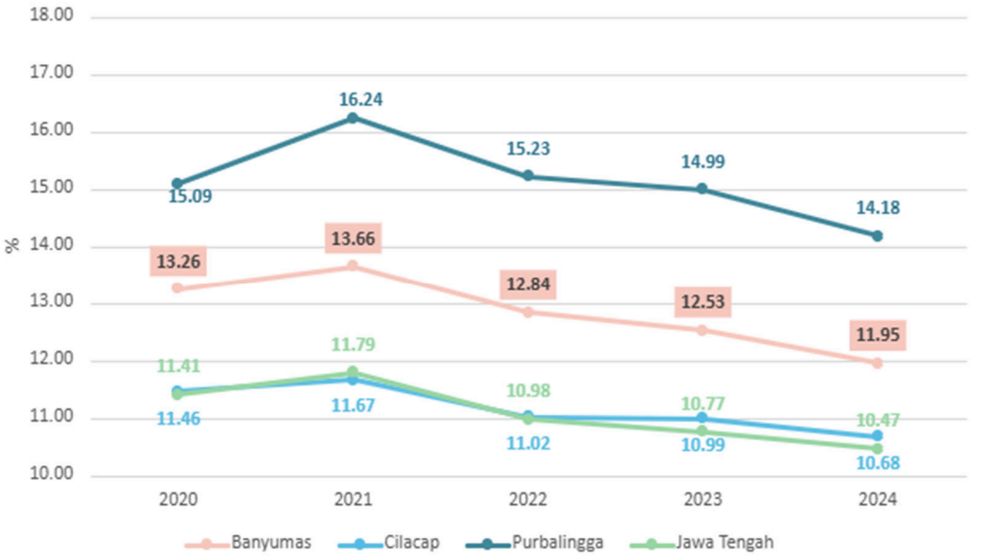

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 39
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Selain kemiskinan umum, kemiskinan ekstrem juga masih menjadi permasalahan yang belum mencapai 0%, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas adalah belum meratanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya layanan sanitasi dan rumah layak huni. Hal ini dapat dilihat dari hasil verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2024 oleh dinsospermasdes Kabupaten Banyumas kebutuhan RTLH sebanyak 15.603 unit, dan kebutuhan Sanitasi sebesar 18.099 unit serta kebutuhan air bersih sebesar 18.712 satuan sambungan rumah Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat miskin dan memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan. Selain itu, belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat miskin juga menjadi kendala

dalam mendorong kemandirian ekonomi, sehingga banyak kelompok rentan masih bergantung pada bantuan sosial tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Masalah lain yang memperparah kondisi ini adalah masih adanya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam pendataan kemiskinan yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Perbedaan data antara Kementerian Sosial dan Kemenko PMK semakin memperumit upaya intervensi, karena terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Akibatnya, hanya sekitar 60% penerima bantuan yang benar-benar tepat sasaran, sementara 40% lainnya masih belum terjangkau bantuan sosial yang seharusnya. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan hal ini terlihat dari nilai RB tematik kemiskinan tahun 2024 untuk capaian dampak masih rendah dengan nilai 1 dari total bobot 3, dikarenakan koordinasi yang kurang terintegrasi menghambat efektivitas program dan distribusi sumber daya.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas mencapai 6,83%. Namun, berkat berbagai intervensi, angka ini turun drastis menjadi 1,02 % pada tahun 2024. Namun, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama, yaitu sebesar 0,89%

Penurunan kemiskinan ekstrem di Banyumas didorong oleh program-program seperti penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air bersih dan listrik, pembangunan jamban, serta penanganan stunting. Selain itu, program untuk mengatasi anak tidak sekolah (ATS), dukungan bagi penyandang disabilitas, dan mereka yang tidak bekerja juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Pada tahun 2023 dan 2024, implementasi program pendampingan "Satu OPD Satu Desa Dampingan" di desa prioritas ekstrem juga berkontribusi signifikan dalam memastikan bantuan dan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi, Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMD, Baznas, dan alokasi APBD Kabupaten, turut memperkuat upaya penurunan kemiskinan ekstrem ini. CSR dan BUMD memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Pembiayaan alternatif melalui CSR dari BUMD tidak hanya memperbesar alokasi dana, tetapi juga memperluas jangkauan program-program sosial, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), jamban, dan penanganan stunting. Dengan demikian, bantuan yang diterima

masyarakat miskin menjadi lebih banyak dan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, penting untuk memperbaiki tata kelola dan basis data kemiskinan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat terlaksana secara lebih efektif. Pendekatan kolaboratif dan multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, akan sangat menentukan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas.

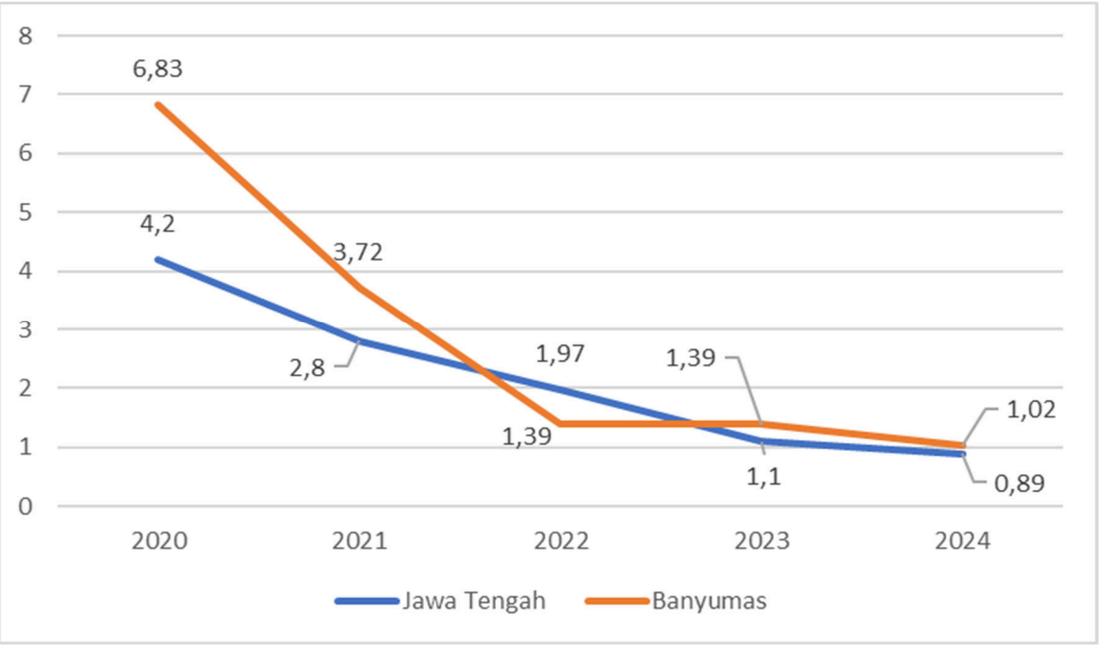

Sumber : BPS, 2024

Gambar 2. 40
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Banyumas telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam perekonomian. Kemajuan ini dilihat dari meningkatnya nilai Produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun pembangunan. Pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Banyumas mencapai Rp 74 Triliun, meningkat 1,38% kali lipat dari tahun 2020. PDRB Banyumas masih dibawah Cilacap dengan Rp 135 Triliun, dan diatas Purbalingga dengan Rp 33 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah, PDRB Banyumas berkontribusi sekitar 4,08% meningkat 0,03% dibandingkan dengan tahun 2023.

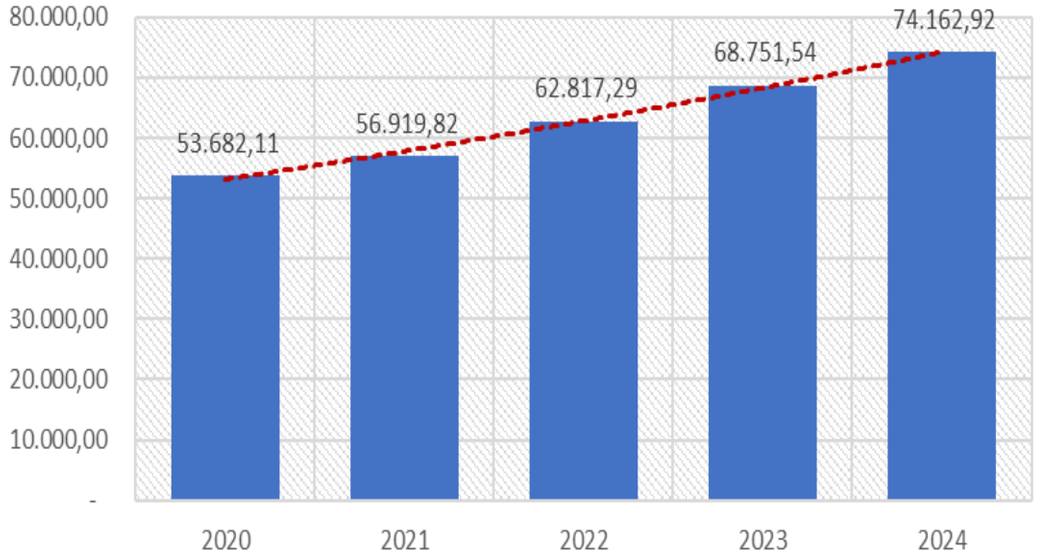

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Gambar 2. 41
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

2.2.1.4. PDRB per Kapita

Seiring dengan peningkatan ekonomi daerah, nilai PDRB per kapita terus meningkat dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp.40,30 juta. Peningkatan ini menggambarkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Banyumas dalam satu tahun mencapai Rp.40,30 juta per tahunnya atau sekitar Rp.3,35 juta per bulannya. Rincian perkembangan PDRB Perkapita ADHB 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

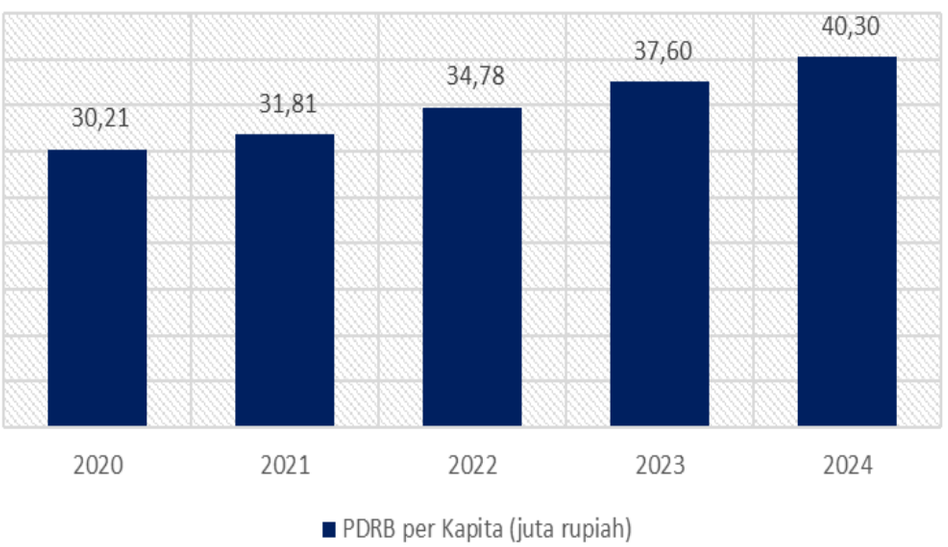

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2025, diolah.

Gambar 2. 42
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Per Kapita
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

2.2.1.5. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Banyumas telah terjadi peningkatan selama periode 2020-2024 dari Rp. 11.448.000 di tahun 2020 menjadi Rp. 12.960.000 di tahun 2024 dan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 12.276.000 dan nasional sebesar 12.341.000. Jadi peningkatan paritas daya beli tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita

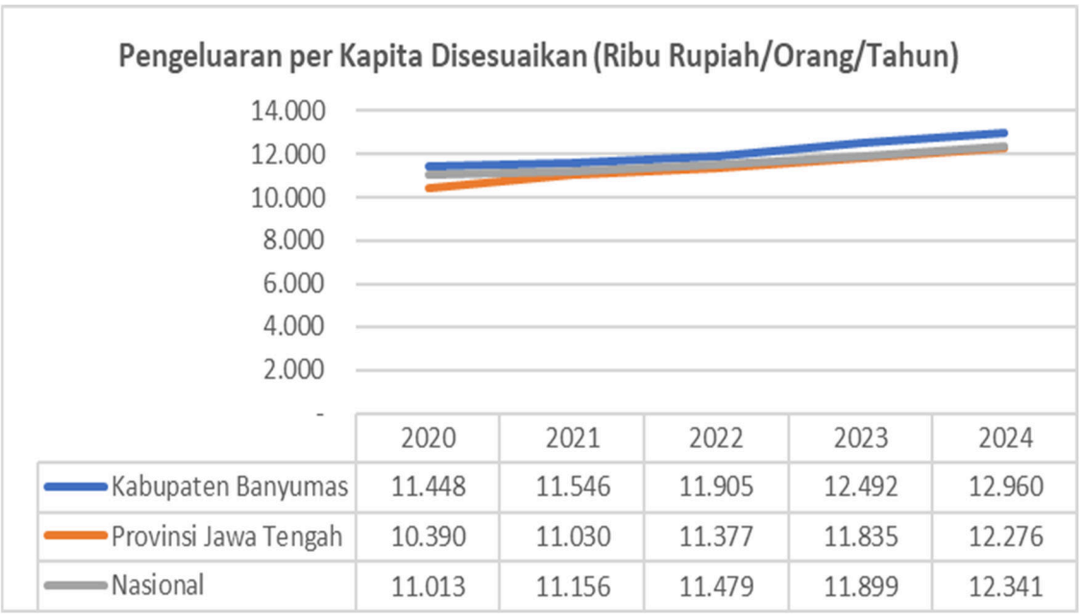

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Banyumas	11.448	11.546	11.905	12.492	12.960
Provinsi Jawa Tengah	10.390	11.030	11.377	11.835	12.276
Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Gambar 2. 43
Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

2.2.1.6. Indek Keparahan Kemiskinan

Indek keparahan kemiskinan yang semakin tinggi, menggambarkan ketimpangan pendapatan yang semakin besar di dalam kelompok miskin itu sendiri, dan mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di kalangan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan semakin memperburuk kemampuan mereka untuk mengatasi kondisi kemiskinan. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada

periode 2020-2024 fluktuatif, dimana dari tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu 0,41 menjadi 0,5 di tahun 2024. Hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan yang semakin lebar di antara penduduk miskin. Kenaikan ini menandakan bahwa selain tantangan untuk meningkatkan pendapatan, kelompok miskin di Banyumas juga menghadapi kesulitan lebih besar dalam meningkatkan taraf hidupnya karena adanya ketimpangan yang semakin signifikan di dalam komunitas mereka. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

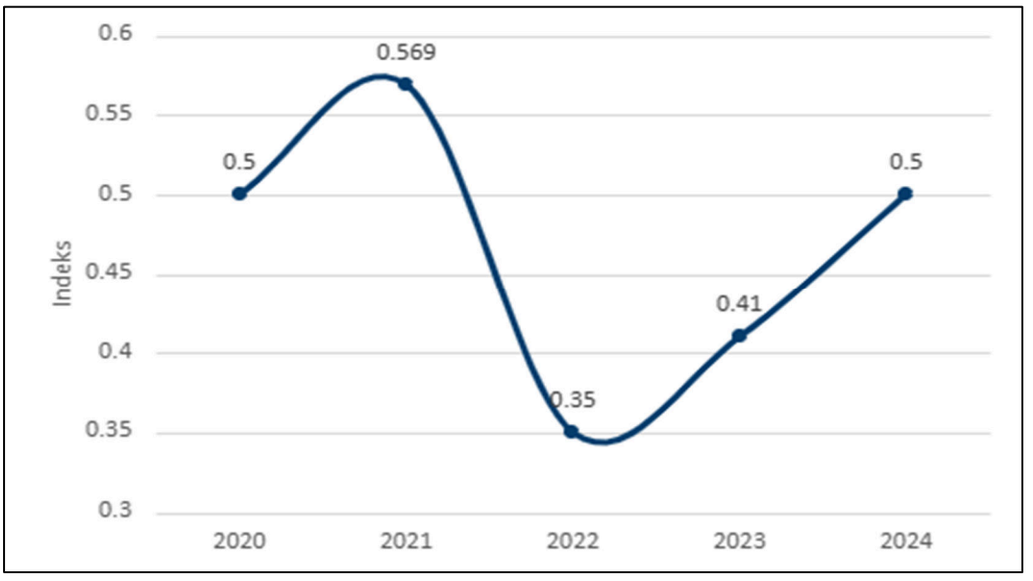

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 44
Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

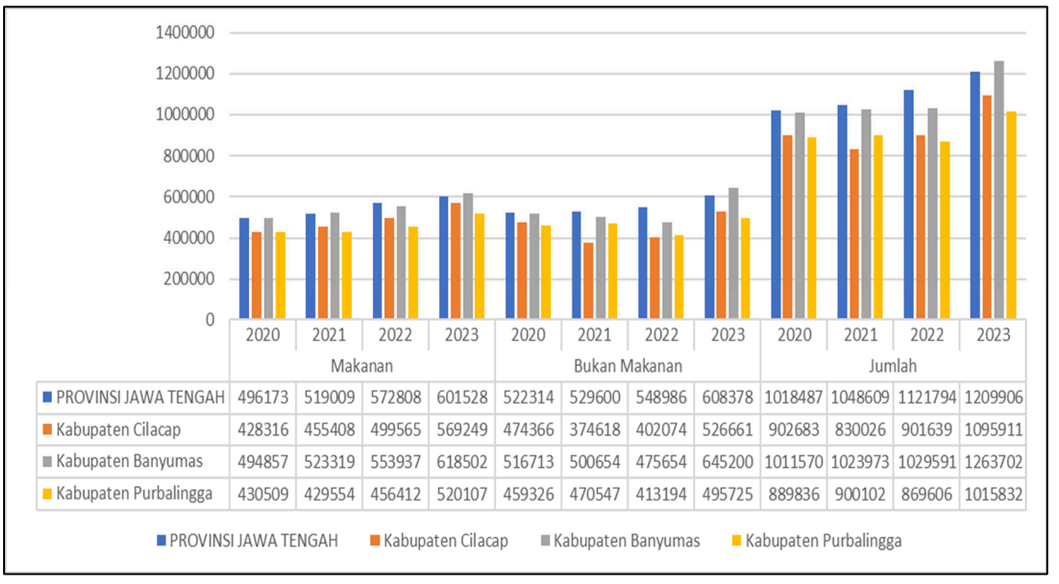

Sumber : BPS 2024

Gambar 2.45
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah) Tahun 2020-2024

2.2.1.7. Indek Kedalaman Kemiskinan

Seluruh permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banyumas, mulai dari tingginya angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, ketimpangan pendapatan, hingga keterbatasan pemenuhan infrastruktur dasar, saling terkait dan berdampak langsung pada kedalaman kemiskinan. Pada periode 2020-2024, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banyumas menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan kenaikan dari 1,78 pada tahun 2023 menjadi 2,09 pada tahun 2024. Semakin tinggi angka indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, yang memperburuk kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kenaikan ini mencerminkan bahwa kelompok miskin di Banyumas semakin kesulitan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sementara kondisi ekonomi yang stagnan, rendahnya akses terhadap layanan dasar, dan keterbatasan peluang ekonomi semakin memperpanjang jarak mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

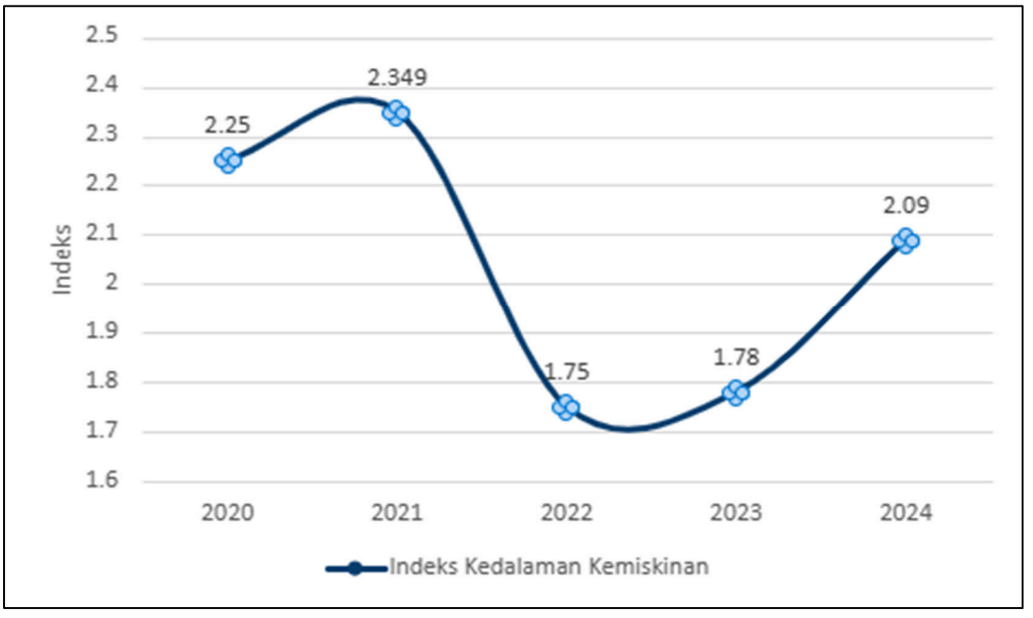

Gambar 2.46
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

2.2.1.8. Distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terendah berdasarkan Bank Dunia

Selain tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, akurasi data, dan efektivitas program pemberdayaan, ketimpangan pendapatan juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2020 distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terendah di Kabupaten Banyumas sebesar 18,47%, namun mengalami kenaikan menjadi 18,65% pada tahun 2024. Meskipun angka ini mengalami kenaikan yang cukup baik , tetapi ketimpangan di Kabupaten Banyumas lebih

tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang tercatat 18,9% namun lebih kecil ketimpangannya dari nasional yang tercatat sebesar 18,4.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

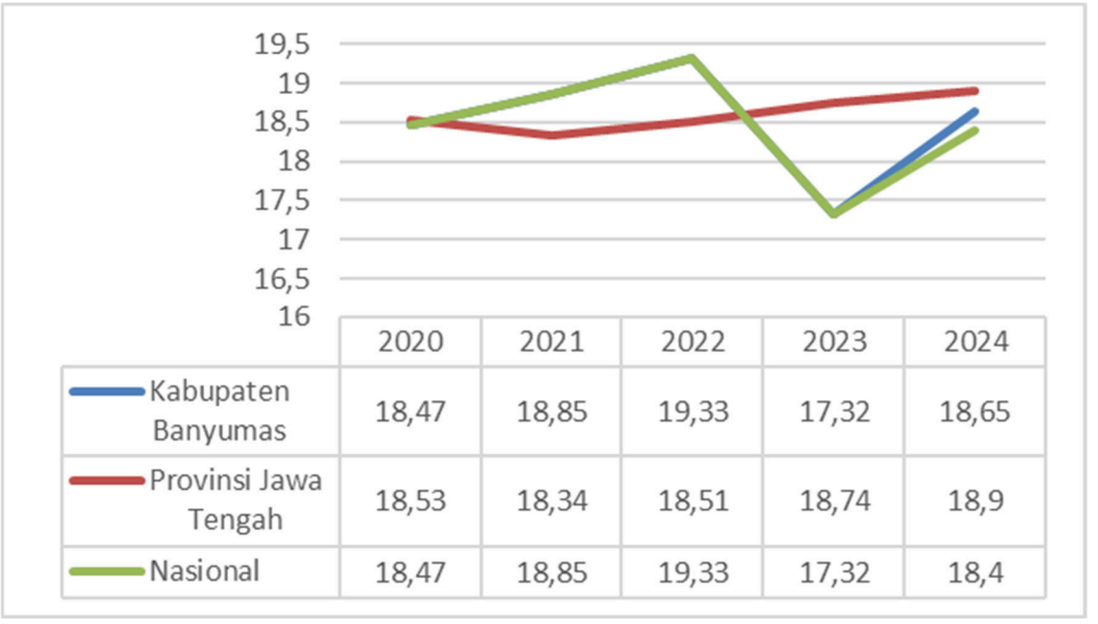

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Banyumas	18,47	18,85	19,33	17,32	18,65
Provinsi Jawa Tengah	18,53	18,34	18,51	18,74	18,9
Nasional	18,47	18,85	19,33	17,32	18,4

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024

Gambar 2. 47
Distribusi Pengeluaran Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

2.2.1.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dinamika ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TPT Kabupaten Banyumas terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023. Namun pada tahun 2024, TPT Kabupaten Banyumas mengalami penurunan menjadi 6,18%. Namun meski mengalami penurunan, TPT Banyumas masih lebih tinggi dari Nasional dengan 4,91% dan Jawa Tengah dengan 4,78%. Faktor utama yang mempengaruhi angka ini antara lain ketersediaan lapangan kerja serta kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi dunia kerja. Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka Banyumas dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitar.

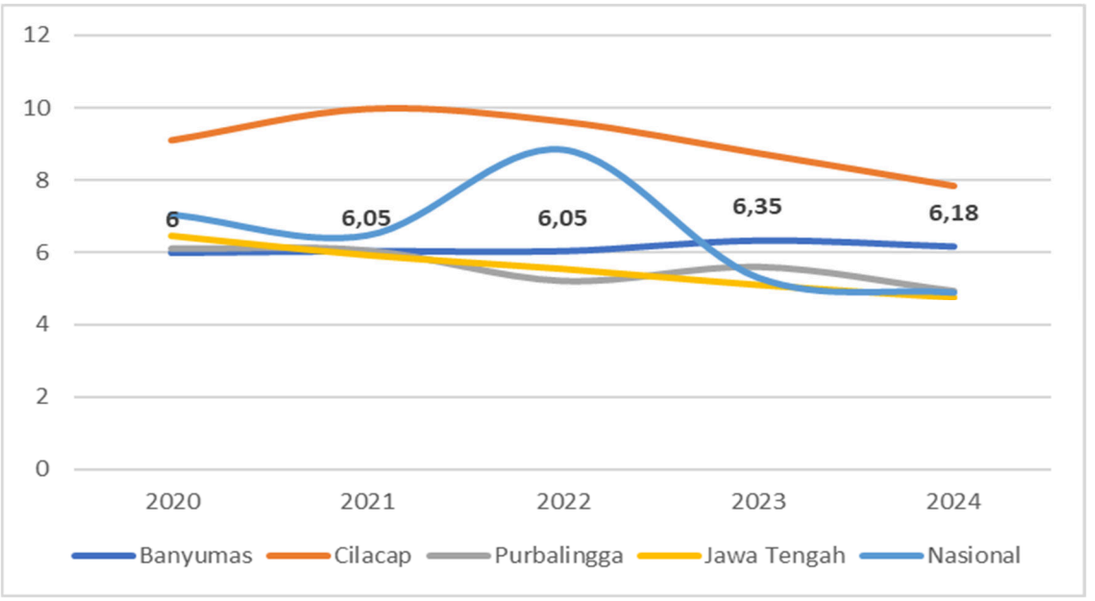

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 48
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024 (%)

2.2.1.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, dengan komponen pembentuk yaitu kualitas pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, kualitas kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup dan kemampuan daya beli masyarakat berdasarkan komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. IPM di Kabupaten Banyumas berdasarkan metode baru perhitungan Angka Harapan Hidup Long Form SP2020 periode 2020-2024 terus meningkat seiring meningkatnya nilai-nilai komponen pembentuknya. Pada tahun 2024 nilai IPM Kabupaten Banyumas sebesar 74,52 menempatkan Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori “Tinggi” (70 ≤ IPM ≤ 80) berdasarkan klasifikasi UNDP (United Nations Development Program). IPM masih menjadi sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan IPM menjadi kategori “Sangat Tinggi” (IPM lebih dari 80).

Nilai IPM Kabupaten Banyumas cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya di Wilayah Cibalingmas dan Provinsi Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional.

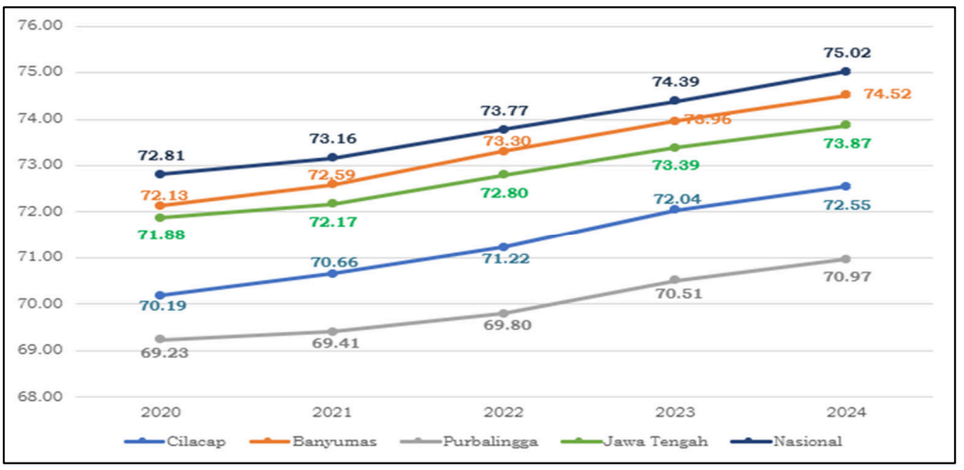

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 49
IPM Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Metode Baru Hasil Perhitungan Angka Harapan Hidup Long Form SP2020

2.2.1.11. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Provinsi

Kabupaten Banyumas telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam perekonomian. Kemajuan ini dilihat dari meningkatnya nilai Produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun pembangunan. Pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Banyumas mencapai Rp 74 Triliun, meningkat 1,38% kali lipat dari tahun 2020. PDRB Banyumas masih dibawah Cilacap dengan Rp 135 Triliun, dan diatas Purbalingga dengan Rp 33 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah, PDRB Banyumas berkontribusi sekitar 4,08% meningkat 0,03% dibandingkan dengan tahun 2023.

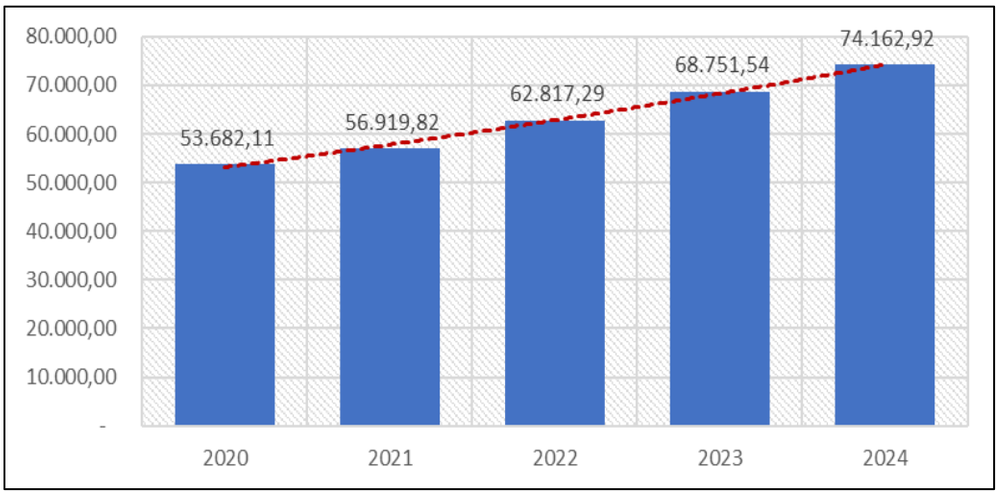

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Gambar 2. 50
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup menggambarkan kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. Angka Harapan Hidup sangat berkaitan dengan program pembangunan kesehatan di suatu daerah. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu daerah, semakin tinggi pula derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

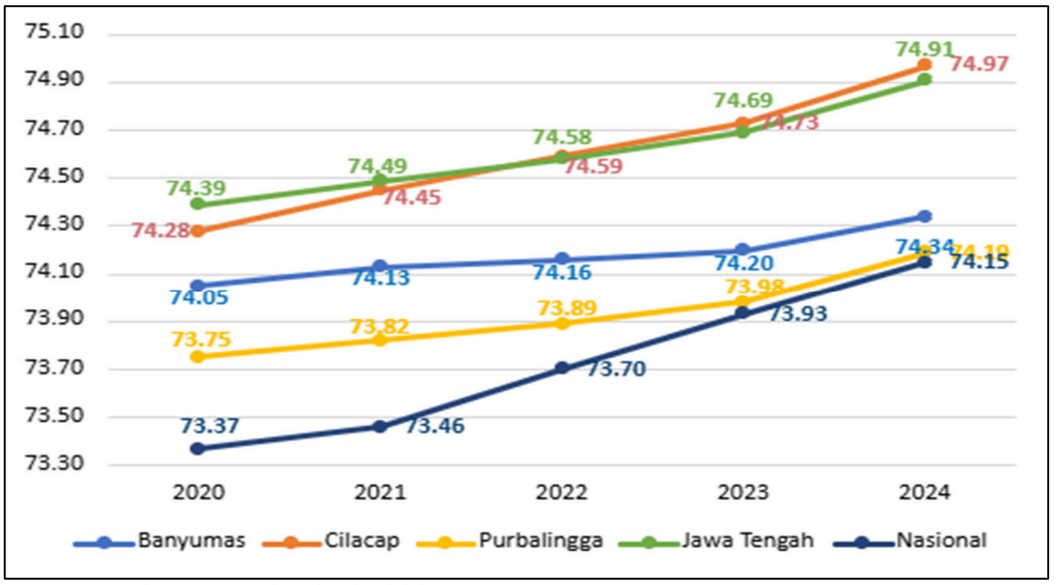

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 51
AHH Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Metode Baru Hasil Perhitungan Angka Harapan Hidup Long Form SP2020

Angka Harapan Hidup Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas sebesar 74,34 tahun. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga dan Nasional, namun masih lebih rendah dibandingkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah. Faktor penting yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akan menjadi investasi di masa yang akan datang. Rendahnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah karena kurang optimalnya faktor-faktor penunjang kesehatan seperti kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan gizi, perubahan perilaku, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan serta faktor fasilitas pelayanan kesehatan baik itu fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

2.2.2.2. Prevalensi Balita Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek daripada balita seusianya. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Prevalensi Stunting di Kabupaten Banyumas mengacu kepada dua sumber pengukuran yakni Survei Kemenkes dan Penimbangan Posyandu Dinas Kesehatan.

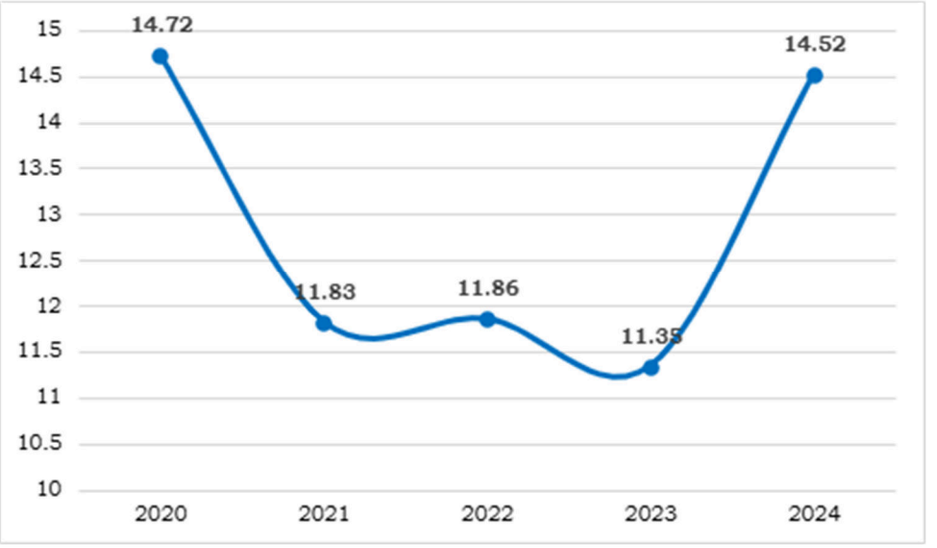

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 52
Prevalensi Stunting Berdasarkan Data Hasil Pengukuran Bulan Timbang Tahun 2020-2024

Berdasarkan Penimbangan Posyandu Dinas Kesehatan Pada Tahun 2020-2024 prevalensi stunting mengalami penurunan dari 14,72% menjadi 14,52%. Prevalensi stunting naik seiring dengan naiknya persentase balita ditimbang yang saat ini sudah 100%.

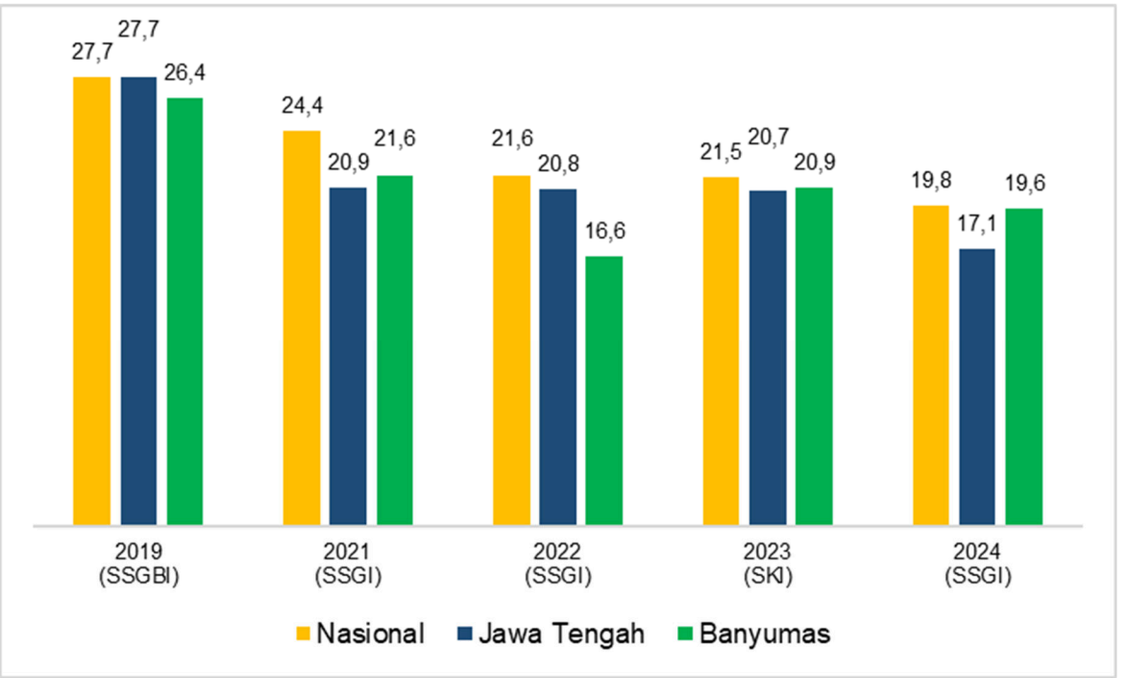

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2025

Gambar 2. 53
Prevalensi Stunting Tahun 2019-2024 Berdasarkan Survei Kemenkes RI

Berdasarkan Survei Kemenkes RI periode tahun 2019-2024 mengalami penurunan dari 26,4% menjadi 16,6% namun mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 20,9% pada Survei Kesehatan Indonesia dan kemudian kembali turun pada tahun 2024 menjadi 19,6% pada SSGI yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI. Secara umum, kedepannya intervensi stunting difokuskan kepada pencegahan stunting.

2.2.2.3. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (*Antenatal Care*), pertolongan

persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 sebesar 18 kasus dari 18.409 kelahiran hidup atau setara dengan 97,8 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*SDG's*. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

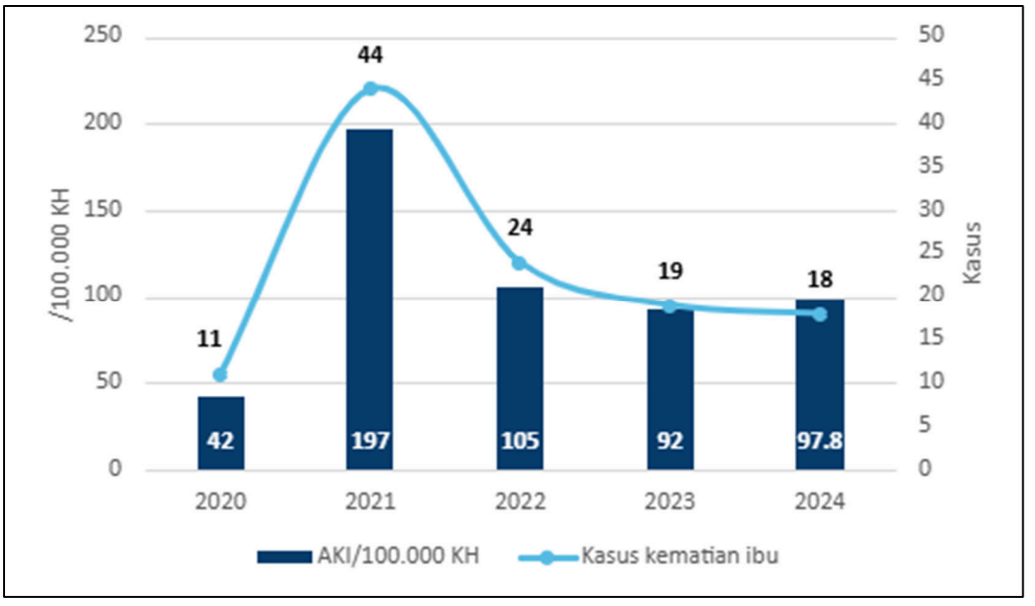

Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 54
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024

2.2.2.4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)

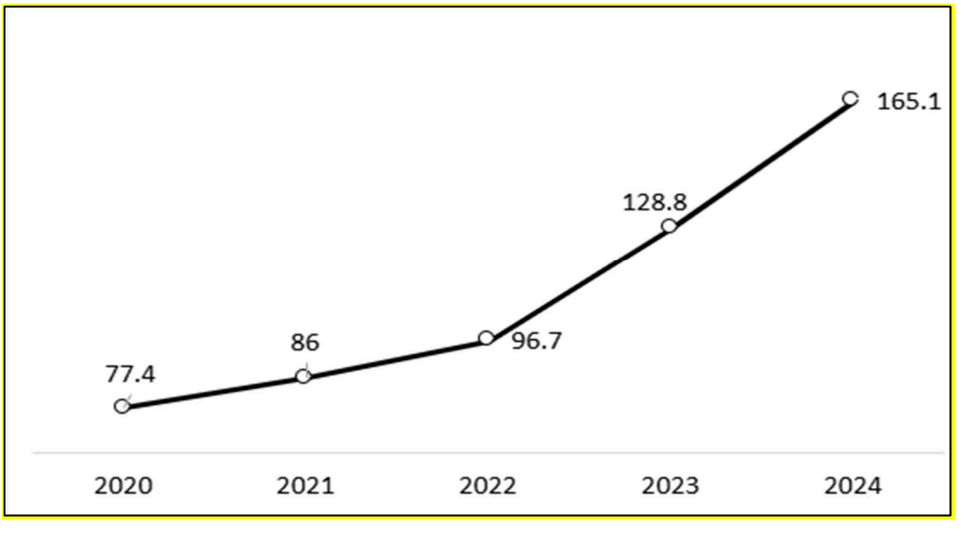

Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 55
Cakupan Penemuan dan Pengobatan *(Treatment Coverage)* Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024

Penemuan kasus tuberkulosis merupakan salah satu strategi dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang bertujuan untuk menemukan penderita tuberkulosis. Penemuan kasus tuberkulosis harus melalui serangkaian kegiatan sehingga dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis serta penularanya. Fokus penanganan penyakit menular tuberkulosis berhasil meningkatkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate). Sejak tahun 2020, cakupan penemuan dan pengobatan TBC di Kabupaten terus meningkat sampai dengan 165,1% di tahun 2024.

2.2.2.5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)

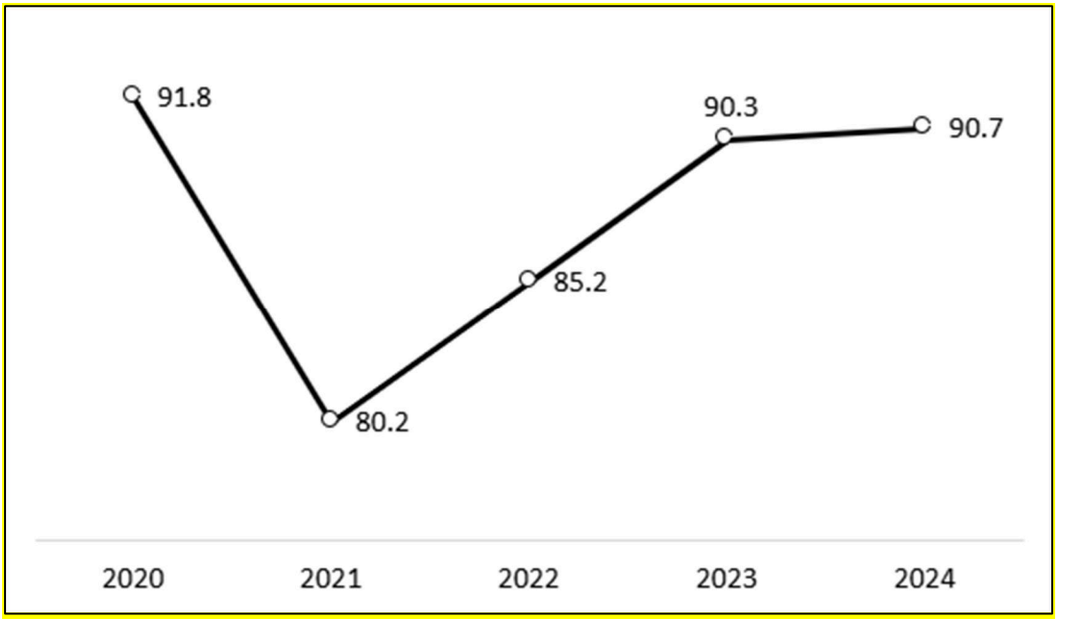

Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 56
Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024

Angka kesembuhan pengobatan tuberkulosis mengindikasikan persentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang sembuh setelah selesai masa pengobatan, diantara pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Rendahnya angka kesembuhan pengobatan menandakan bahwa masih banyak penderita TB paru yang belum sembuh, hal ini tidak hanya berpengaruh pada penularan yang akan semakin banyak terjadi pada keluarga penderita maupun orang-orang di lingkungan penderita

tetapi ditakutkan akan terjadi kekebalan ganda terhadap Obat Anti Tuberkulosis sehingga proses kesembuhan akan semakin sulit. Sejak tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten terus meningkat sampai dengan 90,7% di tahun 2024.

2.2.2.6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Dari sisi akses terhadap pelayanan kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyumas terus meningkat namun masih belum semua penduduk di Kabupaten Banyumas memiliki Jaminan Kesehatan Nasional. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banyumas tahun 2024 telah mencapai target 98% yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jaminan Sosial (RPJMN) Tahun 2020-2024. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 sebagai berikut:

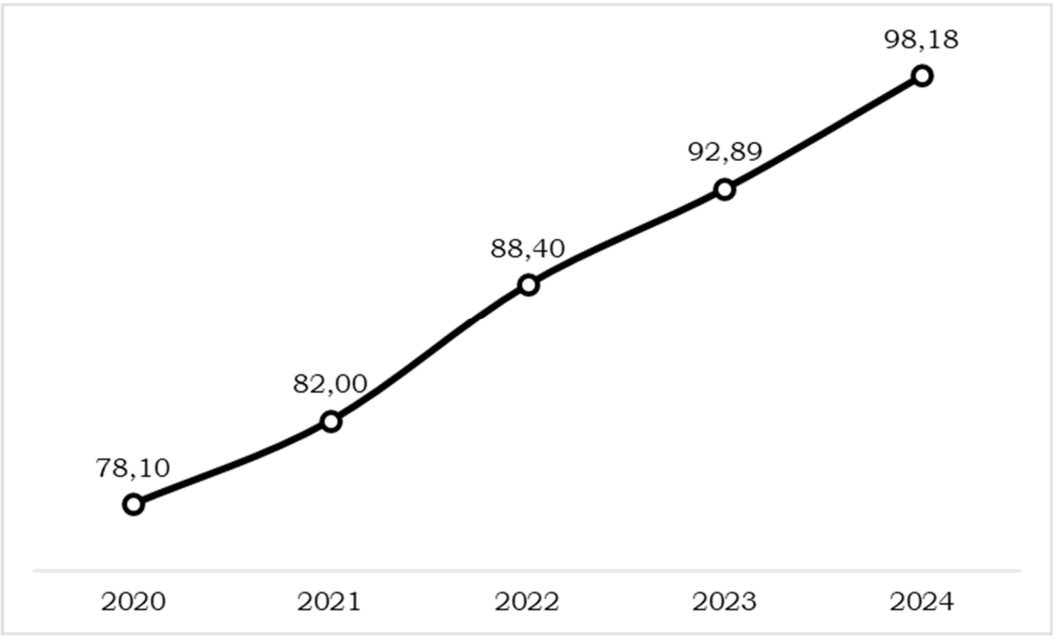

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 57
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
di Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024

2.2.2.7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebanyak 40 unit. Berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan dan lokasi pendirian Puskesmas harus mempertimbangkan rasio penduduk dan/atau aksesibilitas. Rasio ideal Puskesmas di suatu daerah adalah 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk atau 1 : 30.000. Untuk memenuhi rasio ideal tersebut, Kabupaten Banyumas

perlu memiliki sebanyak 62 Puskesmas atau kekurangan sebanyak 22 Puskesmas. Selain itu berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, rasio ideal Kecamatan dibandingkan Puskesmas adalah 1:2 (satu Kecamatan terdapat 2 Puskesmas) maka berdasarkan data eksisting, Kabupaten Banyumas masih membutuhkan 14 Puskesmas. Dari 40 Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas, 16 diantaranya sudah memiliki fasilitas rawat inap.

Tabel 2. 8
Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	1.776.920	1.790.530	1.809.710	1.828.570	1.847.100
2	Jumlah Puskesmas	40	40	40	40	40
3	Rasio Puskesmas	1 : 44.423	1 : 44.763	1 : 45.243	1 : 45.714	1 : 46.178

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah Tahun 2024 sebesar 7,91 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke dalam jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata-rata tingkat pendidikan di Kabupaten Banyumas adalah baru pada tingkat tamatan SD. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

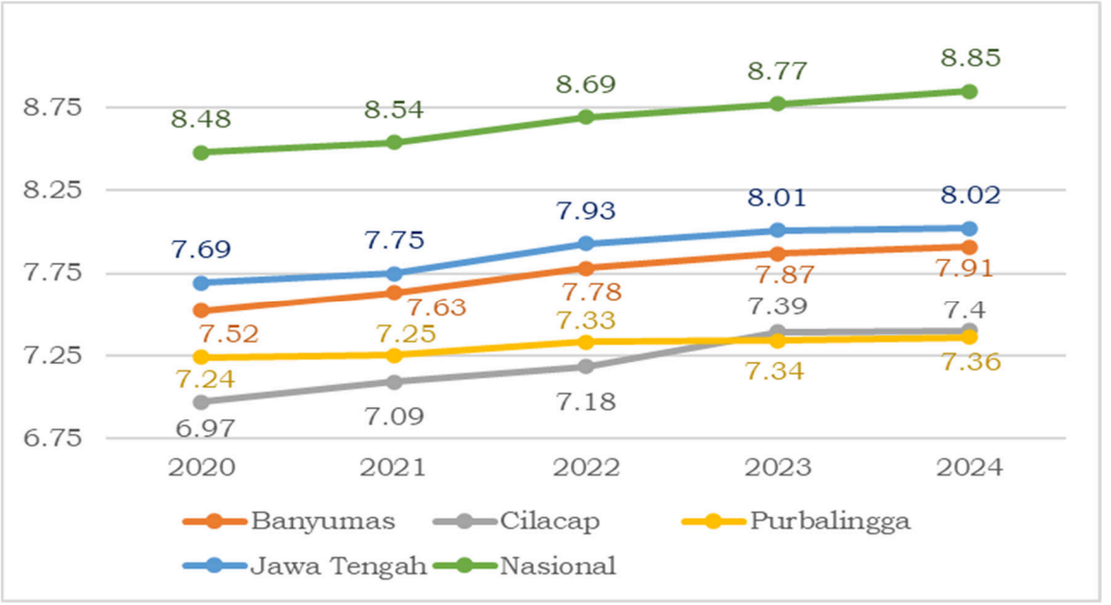

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 58
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, namun angka tersebut masih di bawah Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) dan peningkatan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dilakukan dari 3 perspektif yaitu siswa, guru, dan infrastruktur. Perspektif siswa yaitu biaya sekolah dibebaskan, beasiswa dan bantuan pendidikan ditingkatkan, dan mengintensifkan pendidikan kesetaraan. Perspektif guru yaitu menambah jumlah guru, pelatihan dan sertifikasi guru, serta tambahan tunjangan guru. Perspektif infrastruktur yaitu rehabilitasi dan melengkapi fasilitas sekolah, membangun sekolah baru, menjamin aksesibilitas sekolah lokasi sekolah berupa jalan atau jembatan, serta moda transportasi dan bus sekolah gratis.

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. HLS Tahun 2024 adalah sebesar 13,34 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2024 memiliki peluang bersekolah selama 13,34 tahun atau setara dengan Diploma I.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

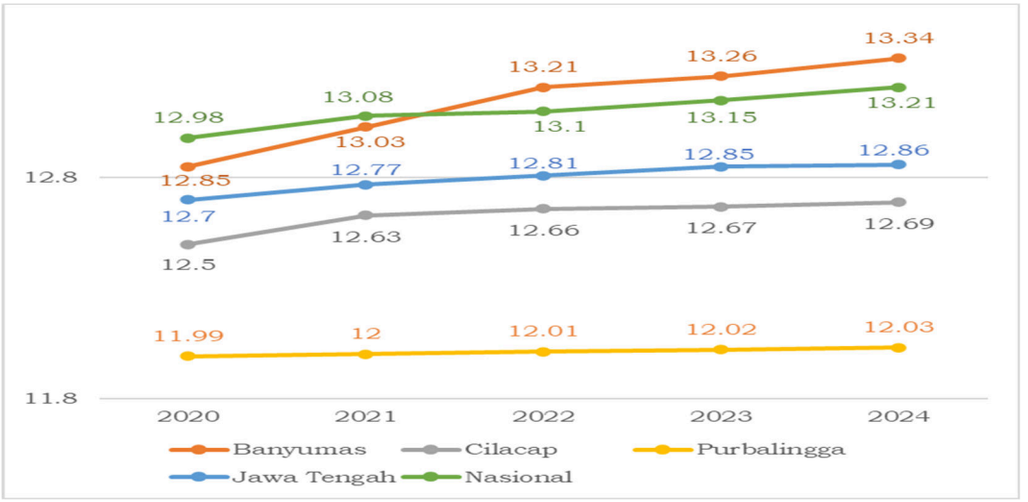

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 59
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat ke-1 dan di atas Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk meningkatkan SDM Kabupaten Banyumas yang berkualitas dengan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

2.2.3.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banyumas dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 sebesar 34,02 menjadi 67,88 (kategori sedang) pada tahun 2024. Angka IPLM Kabupaten Banyumas berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 70,57 (kategori sedang) dan di bawah angka nasional yaitu 73,52 (kategori sedang). IPLM Kabupaten Banyumas tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

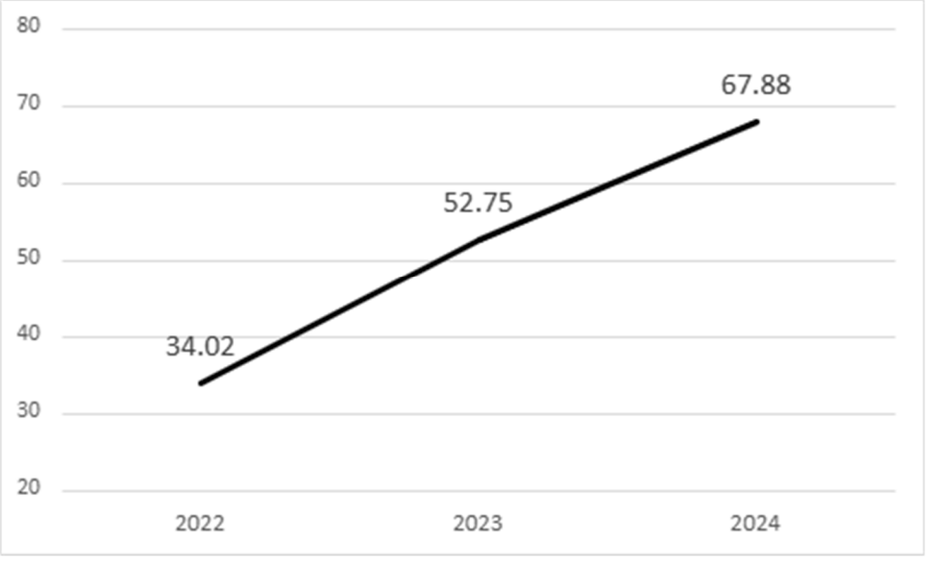

Sumber : Dinarpusda Kabupaten Banyumas

Gambar 2. 60
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024

2.2.3.4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Kualifikasi pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Penduduk Kabupaten Banyumas yang berkualifikasi pendidikan tinggi pada tahun 2024 sebesar 7,49%.

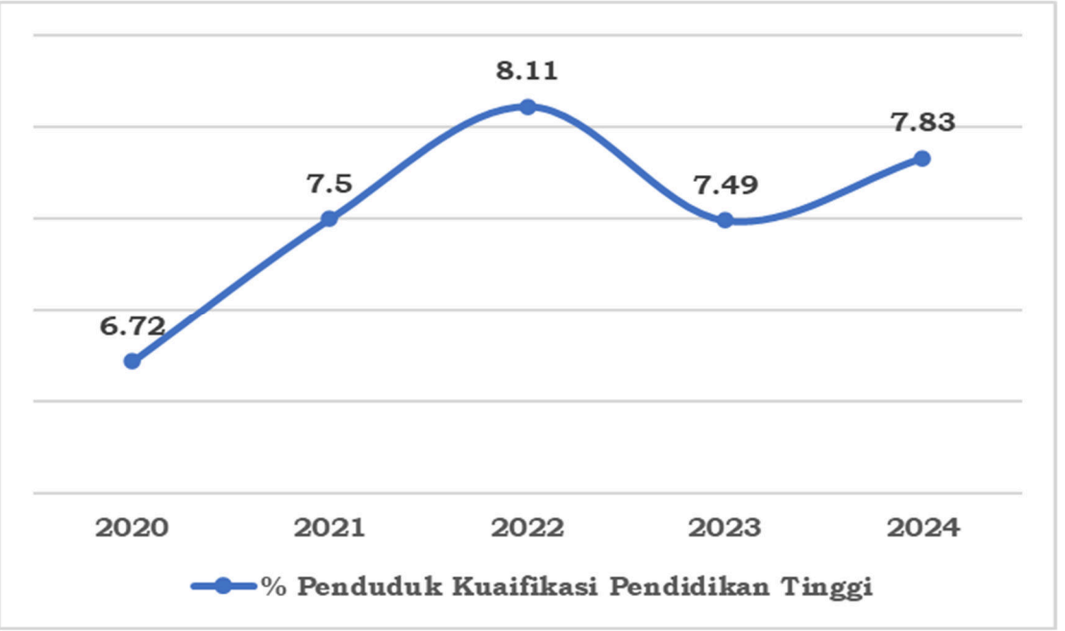

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 - 2024

Gambar 2. 61
Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

2.2.3.5. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):

a. Literasi Membaca SD/Sederajat dan SMP/Sederajat

Angka literasi dalam Rapor Pendidikan merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas pendidikan di suatu daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rapor Pendidikan. Rapor Pendidikan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik, termasuk dalam hal literasi, yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Angka literasi menjadi salah satu parameter yang sangat penting untuk menilai kemajuan dalam pembangunan pendidikan, serta untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dengan mengacu pada data angka literasi, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan, serta merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di semua jenjang pendidikan.

Tabel 2.9
Nilai Kemampuan Literasi Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemampuan Literasi SD	N/A	1.82	74.86	81.15	82.93
2.	Kemampuan Literasi SMP	N/A	1.95	77.38	82.9	85.42

Sumber: Laporan Rapor Pendidikan 2025 Kemendikdasmen, 2025

b. Numerasi SD/Sederajat dan SMP/Sederajat

Angka numerasi dalam Rapor Pendidikan merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep matematika dasar, seperti perhitungan, pemecahan masalah, serta logika angka. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rapor Pendidikan, yang mengatur penilaian hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Dalam konteks rapor pendidikan, angka numerasi berfungsi untuk memetakan tingkat kemampuan numerik siswa di berbagai jenjang pendidikan, sehingga menjadi dasar bagi perbaikan kurikulum dan pengembangan program pengajaran. Pengukuran numerasi yang akurat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin bergantung pada kemampuan matematika. Dengan mengacu pada hasil angka numerasi, kebijakan pendidikan dapat disusun untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan menjamin pemerataan kompetensi di seluruh daerah.

Tabel 2.10
Nilai Kemampuan Numerasi Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemampuan Numerasi SD	N/A	1.6	55.88	68.95	79.07
2.	Kemampuan Numerasi SMP	N/A	1.75	53.88	76.98	81.82

Sumber: Laporan Rapor Pendidikan 2025 Kemendikdasmen, 2025

2.2.3.6. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup 1 tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), 6 tahun pendidikan dasar, dan 6 tahun pendidikan menengah. Pendidikan pada usia dini merupakan fondasi penting untuk menumbuhkan kesiapan belajar, kemampuan sosial-emosional, serta keterampilan dasar anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu, peningkatan APS pada kelompok usia 5–6 tahun menjadi salah satu indikator awal keberhasilan program wajib belajar 13 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun, Tahun 2020-2024

Usia	Angka Partisipasi Sekolah (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
5 - 6 Tahun	N/A	N/A	65.69	82.39	80.1

Sumber: Laporan Rapor Pendidikan 2025 Kemendikdasmen, 2025

APS usia 5-6 tahun sudah baik karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2023 dari 65,69 menjadi 82,39, namun mengalami penurunan di Tahun 2024 yaitu dari 82,39 menjadi 80.10. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum semua anak usia 5-6 tahun mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Semakin tinggi partisipasi anak usia dini dalam pendidikan formal, semakin besar peluang keberlanjutan partisipasi mereka pada jenjang pendidikan berikutnya. Kabupaten Banyumas perlu memastikan perluasan akses, pemerataan layanan PAUD, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjamin seluruh anak usia 5–6 tahun mendapatkan hak atas pendidikan yang layak sejak dini.

2.2.3.7. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan

Indikator Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan mendukung pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui kegiatan pembelajaran. Indikator ini mencerminkan komitmen dunia pendidikan dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, khususnya bahasa daerah dan seni budaya yang menjadi identitas kultural masyarakat. Keberadaan guru yang secara khusus mengajar mulok bahasa daerah atau seni budaya menunjukkan bahwa satuan pendidikan tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga berperan aktif dalam mengarusutamakan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan karakter peserta didik. Semakin tinggi persentase satuan pendidikan yang memiliki guru untuk mata pelajaran ini, semakin kuat pula peran pendidikan dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan penguatan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

2.2.3.8. Tingkat pemanfaatan perpustakaan

Terkait literasi budaya baca, sampai dengan tahun 2024 perpustakaan yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.107 unit yang terdiri atas 1 (satu) Perpustakaan umum daerah, 974 Perpustakaan Sekolah, 72 Perpustakaan Desa, 16 Perpustakaan Perguruan Tinggi, 1 Perpustakaan Rumah ibadah, 11 Perpustakaan Khusus Lainnya dan 32 Taman Bacaan Masyarakat. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebanyak 1.815.417 kunjungan. Adapun tingkat pemanfaatan perpustakaan pada tahun 2024 senilai 98%, mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang hanya mencapai 30%.

Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebesar 67,39. Angka ini berada di bawah Provinsi Jawa Tengah senilai 73,91 dan juga berada di bawah angka nasional yaitu 72,44. Sedangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banyumas Tahun 2024 masuk dalam kategori Sedang dengan skor 67,88. Angka ini berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah senilai 70,57, dan juga berada di bawah capaian angka nasional senilai 73,52.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kepesertaan yang paling rendah terjadi di tahun 2021 sebanyak 67.171 orang yang terdaftar dikarenakan kondisi pandemik COVID-19. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah pekerja/buruh yang terdaftar dalam Program Jamsostek Aktif meningkat menjadi 138.772 orang. Peningkatan jumlah pekerja/buruh juga diikuti oleh peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar dalam Jamsostek. Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Banyumas 2020 – 2024 sebagai berikut:

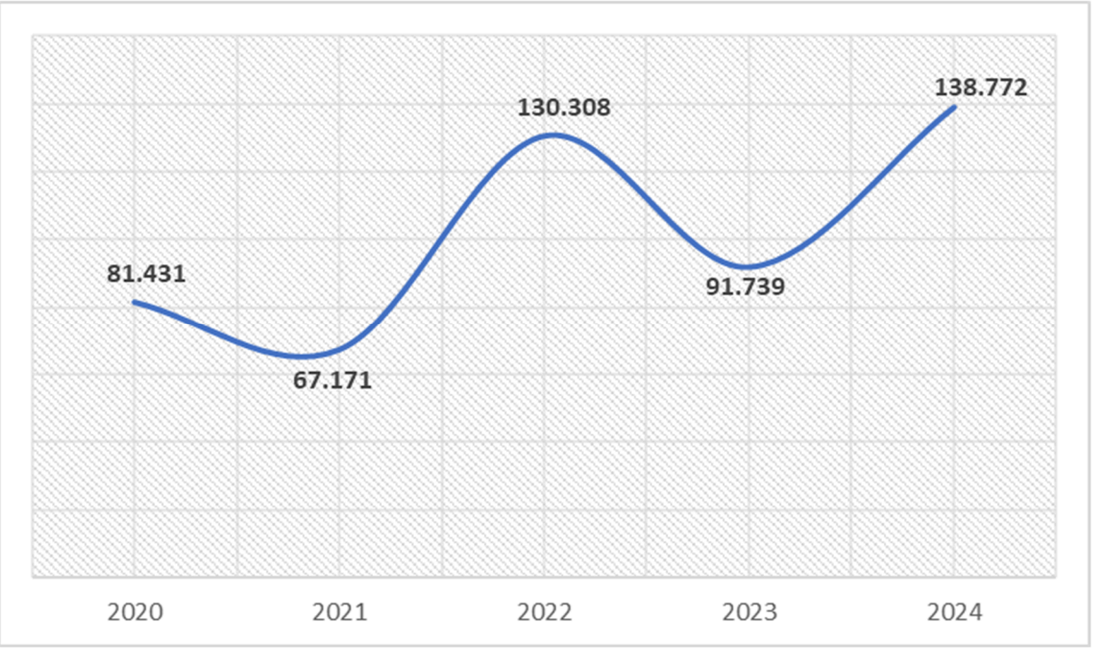

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, 2025

Gambar 2. 62
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.2.4.2. Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kesejahteraan sosial di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. IKESOS terdiri dari tiga komponen utama: Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial, dan Keberdayaan Ekonomi, yang saling terkait untuk menggambarkan kondisi sosial secara menyeluruh. Kebutuhan Dasar mencakup pemenuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, sementara Peranan Sosial mengukur kontribusi sosial individu terhadap masyarakat. Keberdayaan Ekonomi fokus pada kemandirian ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Setiap komponen memiliki bobot tertentu yang mempengaruhi skor keseluruhan IKESOS, dengan pembobotan terbesar pada Kebutuhan Dasar (42%), diikuti oleh Keberdayaan Ekonomi (31%), dan Peranan Sosial (27%).

Pada skoring IKESOS, terdapat lima level yang menggambarkan tingkatan kesejahteraan sosial, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tidak Sejahtera (IKESOS ≤ 20): Merupakan kondisi terendah, di mana kebutuhan dasar dan sosial masyarakat belum terpenuhi, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan kesejahteraan yang signifikan.
b. Berkembang (20 < IKESOS ≤ 40): Di level ini, beberapa kebutuhan dasar mulai terpenuhi, tetapi masyarakat masih menghadapi kerentanannya

dalam aspek ekonomi dan sosial. Peningkatan kualitas hidup masih perlu dilakukan untuk memastikan kesejahteraan lebih merata.

c. Maju (40 < IKESOS ≤ 60): Kebutuhan dasar masyarakat telah cukup banyak terpenuhi, dan stabilitas ekonomi serta partisipasi sosial mulai terlihat. Namun, masyarakat masih perlu mencapai tingkat kemandirian dan keterlibatan sosial yang lebih tinggi.
d. Inklusif (60 < IKESOS ≤ 80): Pada level ini, masyarakat sudah aktif terlibat dalam pembangunan, dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan kesetaraan yang semakin meningkat.
e. Sejahtera (IKESOS > 80): Ini adalah tingkat puncak kesejahteraan, dengan masyarakat yang sudah mencapai kemandirian ekonomi yang tinggi, kohesi sosial yang kuat, dan kualitas hidup yang sangat baik.

Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 memperoleh skor IKESOS keseluruhan sebesar 53,96, yang menempatkannya pada level Maju. Skor ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas sudah mencapai kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan mulai tercapainya stabilitas ekonomi dan partisipasi sosial. Namun, lebih rinci lagi, skor IKESOS untuk lansia tercatat sebesar 54,31, sedangkan untuk penyandang disabilitas mencapai 56,70. Meskipun angka ini menggambarkan kemajuan, skor tersebut masih berada di bawah kabupaten-kabupaten sekitar seperti PurbaIingga dan Cilacap yang sudah mencapai skor lebih tinggi, mencerminkan perbedaan dalam tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperkuat kebijakan untuk mendukung kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, serta mempercepat proses peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan memenuhi harapan nasional.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1. Pemajuan Kebudayaan Daerah

Kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan daerah dan nasional. Pengembangan pemajuan kebudayaan daerah dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan peningkatan karakter SDM/ Jati diri masyarakat Banyumas melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Unsur budaya yang menjadi sasaran utama

dalam pengembangan pemajuan kebudayaan adalah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi bahasa, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Pada tahun 2024, terdapat 108 Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyumas. Lebih lanjut, untuk karya budaya yang ada di Kabupaten Banyumas ada 60 seni budaya tercatat. Dari 60 seni budaya, terdapat 18 kesenian langka meliputi Rinding, Gumbeng, Macapat, Sintren, Terbang Jawa, Angguk, Bongkel, Ringgeng, Cokekan, Gadhon, Siteran, Kaster, Jemblung, Buncis, dan Gandalia, Hadroh, Karawitan, dan Calung Banyumasan. Sementara, jumlah kelompok kesenian yang dibina di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 mencapai 93 kelompok, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 40 kelompok. Kelompok seni yang dibina meliputi kelompok hadroh, musik, dan pedalangan/wayang. Berikut data perkembangan pembangunan kebudayaan Kabupaten Banyumas 2020-2024. Berikut data perkembangan pembangunan kebudayaan Kabupaten Banyumas 2020-2024:

Tabel 2. 12
Perkembangan Pembangunan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kebudayaan daerah yang dilestarikan	N/A	61	70	97	65
2.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	53	58	70	76	-

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2024

Pada tahun 2024, Kabupaten Banyumas telah melaksanakan kegiatan pelestarian pada 65 kebudayaan meliputi 22 kesenian, 14 nilai tradisi, dan 29 Cagar Budaya. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97. Lebih lanjut, peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan mencapai 76 orang dengan rincian 35 orang pada kesenian, 26 kegiatan pada nilai tradisi, dan 15 orang juru situs. Keterbatasan sumber daya menjadi penyebab turunnya pelaksanaan pelestarian kebudayaan.

Dari data yang ada, Banyumas sudah cukup baik melakukan pelestarian, namun masih perlu optimalisasi dalam pengembangan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya kajian tentang Budaya Banyumas. Kajian mengenai kebudayaan baru dilaksanakan pada 2022 dengan mengangkat budaya Tosan Aji, dan tahun 2023 dengan kajian "History Sokaraja Kota Niaga di Banyumas Raya". Pada tahun 2024 terlaksana 2 kajian yang berfokus pada wayang berjudul "Koleksi Wayang Gagrag Banyumas Museum Wayang Banyumas" dan "Kajian Ragam Wayang Kabupaten Banyumas". Selain itu untuk Pembinaan sejarah lokal di Kabupaten Banyumas masih tergolong minim. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak melakukan pembinaan sejarah lokal. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya pelaksanaan pembinaan sejarah lokal

Dari beberapa dimensi pembangunan kebudayaan, Kabupaten Banyumas telah berupaya melaksanakan pembangunan kebudayaan antara lain melalui: 1) penyediaan guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya; 2) pelestarian cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB); dan pembangunan literasi masyarakat. Pada Tahun 2023 Satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya telah mencakup 100%. Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan hanya 52,63% dari 37 CB dan WBTB yang telah ditetapkan (dicatat/diakui).

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup termasuk kesehatan, kebugaran, dan produktivitas melalui olahraga. Besarnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga dapat dilihat dengan nilai Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). IPO merupakan indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga yang dilihat berdasarkan 9 dimensi dasar, yaitu sumber daya manusia olahraga (SDM), ruang terbuka (RT), literasi fisik (LF), kebugaran (KEB), perkembangan personal (PP), kesehatan (KES), ekonomi (EKO), performa (PER) dan partisipasi (PAR).

Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2024 telah menghitung IPO secara mandiri per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dimana ditunjukan nilai IPO Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebesar 0,286, paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan masih berada di bawah nilai IPO Provinsi Jawa Tengah (0,400) dan Nasional (0,334). Dimensi

IPO Kabupaten Banyumas paling rendah terletak pada SDM olahraga (0,075), ruang terbuka (0,099), dan performa (0,044). Secara lebih rinci nilai IPO Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Capaian Nilai Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024 berdasarkan Dimensi

Wilayah	SDM	RT	LF	PAR	KEB	KES	PP	EKO	PER	IPO
Cilacap	0,049	0,185	0,539	0,240	0,133	0,413	0,688	0,547	0,011	0,312
Banyumas	0,075	0,099	0,468	0,160	0,174	0,412	0,729	0,413	0,044	0,286
Purbalingga	0,008	0,224	0,509	0,280	0,144	0,437	0,706	0,467	0,038	0,312
Jawa Tengah	0,122	0,402	0,513	0,330	0,148	0,424	0,670	0,574	0,420	0,400
Nasional	0,049	0,258	0,584	0,263	0,196	0,424	0,544	0,531	0,161	0,334

Sumber: Laporan Survey IPO Jateng 2024

Keterangan:

SDM: Sumber daya manusia olahraga; RT: Ruang terbuka; LF: Literasi fisik; PAR: Partisipasi; KEB: Kebugaran; KES: Kesehatan; PP: Perkembangan personal; EKO: Ekonomi; PER: Performa; IPO: Indeks Pembangunan Olahraga

Dalam rangka peningkatan nilai IPO Kabupaten Banyumas, diperlukan melakukan peningkatan pada seluruh dimensi IPO terutama pada dimensi yang paling rendah, seperti SDM olahraga dilakukan dengan upaya meningkatkan rasio jumlah pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga dengan jumlah penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas. Pada dimensi ruang terbuka olahraga dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan ruang terbuka untuk aktivitas olahraga, serta pada dimensi performa dilakukan dengan meningkatkan perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit di Kabupaten Banyumas.

2.2.5.3. Jumlah pengunjung tempat bersejarah

Keberadaan tempat bersejarah memiliki peran penting dalam pembangunan berkarakter, kunjungan masyarakat pada tempat bersejarah menjadi wahana pembelajaran nilai budaya. Kabupaten Banyumas memiliki 15 tempat bersejarah meliputi situs, cagar budaya, makam, dan museum. Berikut kunjungan tempat bersejarah dalam 5 tahun terakhir.

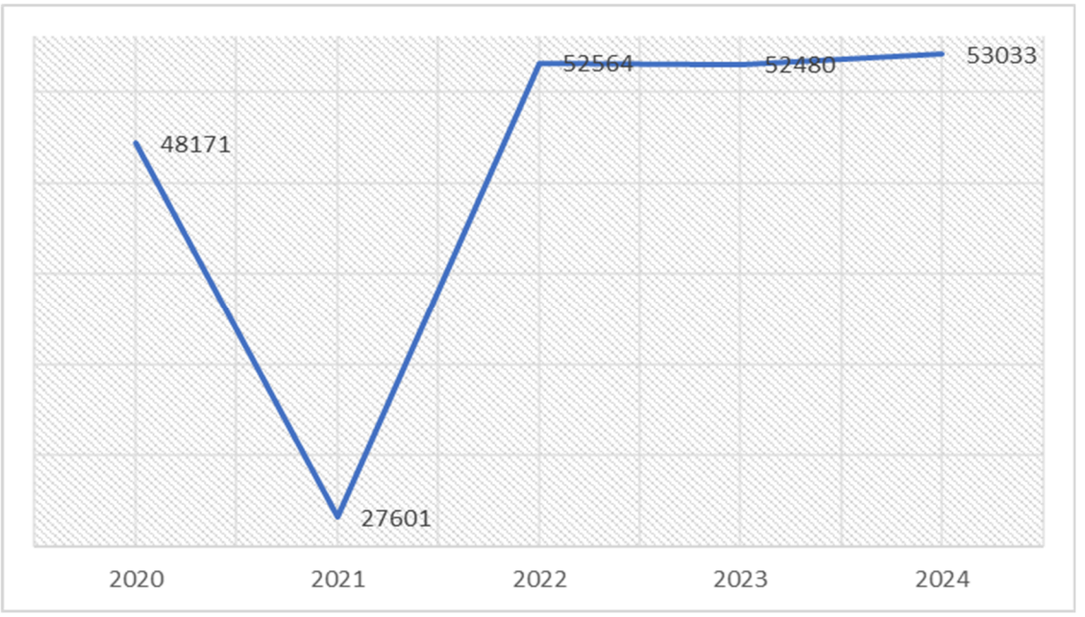

Sumber : Dinporabudpar, 2025

Gambar 2. 63
Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, kunjungan pada tempat bersejarah di Kabupaten Banyumas masih fluktuatif. Pada tahun 2024, kunjungan mencapai 53.033 orang dengan kunjungan terbanyak ada pada Museum Wayang Banyumas dengan 17.674 orang dan Makam Syekh Makdum Wali dengan 12.160 orang.

2.2.5.4. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir

Aktifnya kelompok seni dalam satu tahun dapat digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kelestarian seni budaya. Aktivitas kelompok kesenian dapat dilihat dari pertunjukan yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat ada 50 kelompok seni yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan seluruh kelompok seni di Banyumas sejumlah 100 Kelompok, ada sekitar 50% kelompok kesenian yang aktif mengadakan pertunjukan. 50 Kelompok kesenian ini terdiri dari 19 kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas seperti Kenthongan, Kethoprak, Wayang, Seni Tari dan Teater.

2.2.5.5. Jumlah Kejadian Konflik SARA

Sepanjang tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas mencatat sebanyak 35 kejadian konflik dan potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas. Meskipun demikian, hanya ada 1 kejadian konflik terkait isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Hal

ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi dan kerukunan masyarakat Banyumas relatif terjaga dengan baik, meskipun potensi gesekan sosial tetap ada dan perlu diantisipasi melalui penguatan deteksi dini, fasilitasi dialog, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Capaian pembangunan yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari nilai Kabupaten Layak Anak (KLA). Nilai KLA Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan status KLA Kabupaten Banyumas berada di level "Pratama". Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat peningkatan nilai KLA dari sebesar 528 menjadi 542,9 pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai KLA Kabupaten Banyumas tahun 2023 (542,9) mengalami penurunan/lebih rendah dari tahun 2022 (595). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembangunan yang berfokus pada hak anak di Kabupaten Banyumas belum optimal. Secara lebih detail nilai KLA di Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

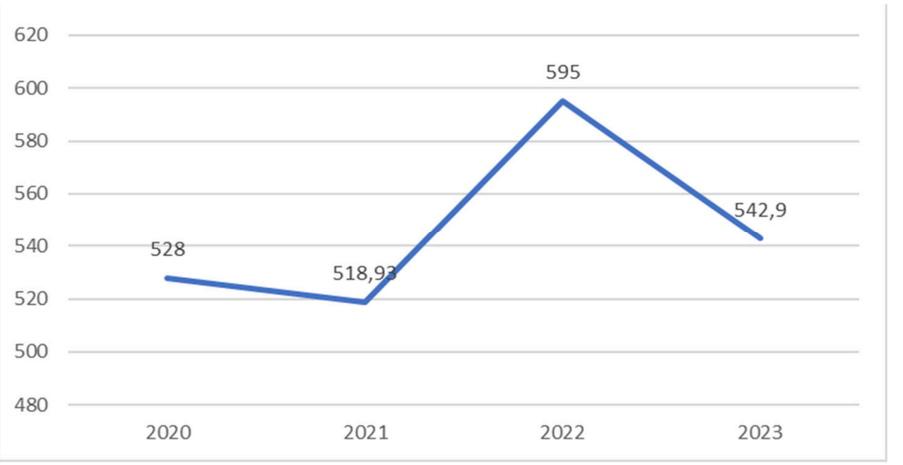

Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Gambar 2. 64
Nilai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023

2.2.6.2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Keluarga yang berkualitas akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Indeks

Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, Ibangga tercatat sebesar 56,49, kemudian mengalami peningkatan menjadi 62,29 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, Ibangga mengalami sedikit penurunan, tercatat 61,09. Dengan penurunan ini, angka Ibangga Kabupaten Banyumas semakin tertinggal di bawah angka Ibangga Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat naik menjadi 63,90 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga jika dibandingkan dengan provinsi.

Ibangga mengukur berbagai dimensi kualitas keluarga, yang meliputi dimensi ketentraman, kebahagiaan, dan kemandirian. Berdasarkan data komponen Ibangga tahun 2024, dimensi ketentraman tercatat 62,89, dimensi kebahagiaan 69,26, dan dimensi kemandirian 51,3. Penurunan terutama terlihat pada dimensi kemandirian, yang menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Banyumas. Meskipun ada perbaikan dalam dimensi ketentraman dan kebahagiaan, aspek kemandirian keluarga masih memerlukan perhatian lebih. Kemandirian merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

2.2.6.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Kesetaraan Gender

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Capaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender.

Nilai IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dari 88,27 di tahun 2020 menjadi 89,27 di tahun 2024. IPG Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 93 dan nasional sebesar 91,85. Hal ini menunjukkan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Banyumas lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, kabupaten sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.

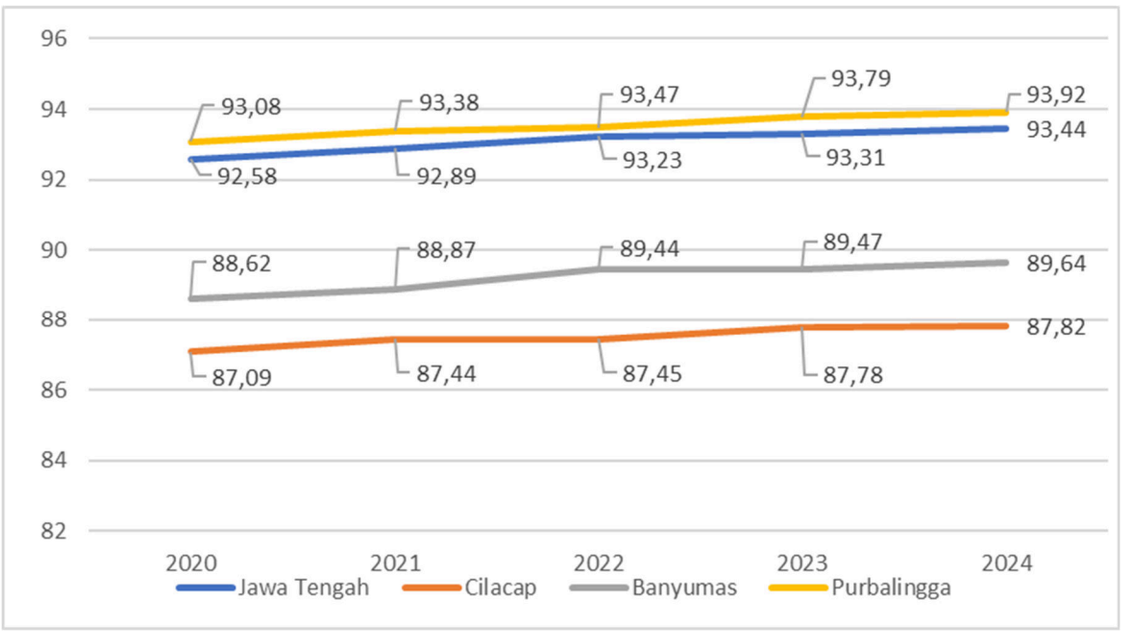

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 65
Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten Lain, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Data IPM pilah gender Tahun 2024 menunjukkan kesenjangan gender dalam pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan grafik berikut:

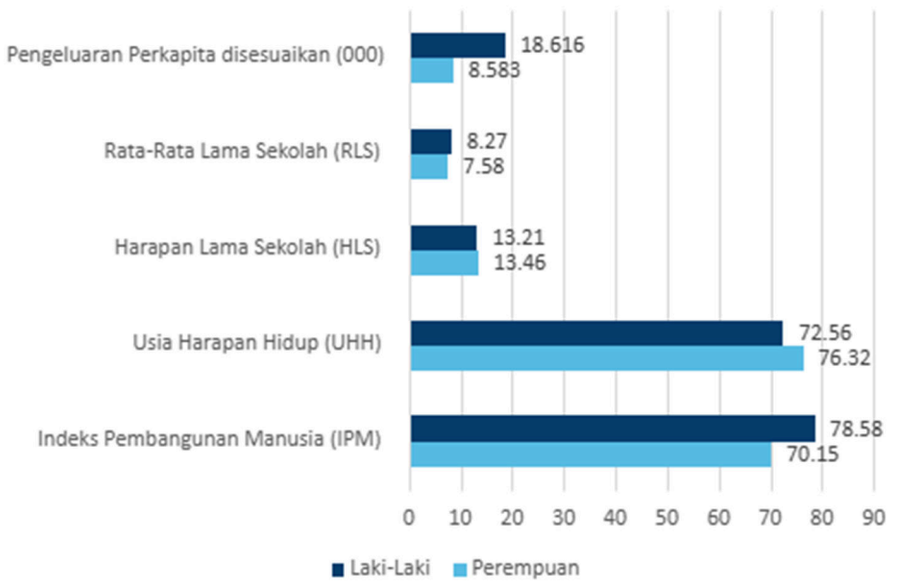

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 66
Komponen IPM Kabupaten Banyumas Pilah Gender Tahun 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah angka yang menunjukkan sejauh mana terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Aspek yang diukur meliputi kesehatan ibu dan remaja perempuan, pendidikan dan keterlibatan dalam politik, serta

kesempatan untuk bekerja. Nilai IKG berada pada rentang 0 sampai 1, di mana angka 0 berarti tidak ada ketimpangan (laki-laki dan perempuan setara), sedangkan angka mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang besar. Semakin rendah nilai IKG, maka semakin baik tingkat kesetaraan gender di suatu wilayah. Nilai IKG Kabupaten Banyumas selama rentang tahun 2020-2024 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan.

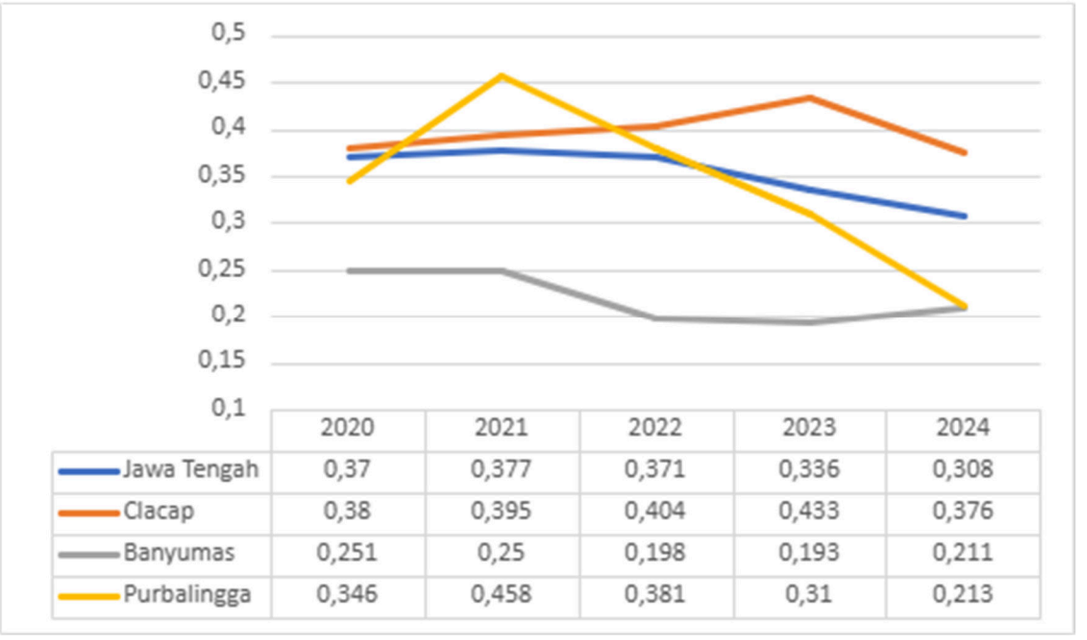

	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	0,37	0,377	0,371	0,336	0,308
Clacap	0,38	0,395	0,404	0,433	0,376
Banyumas	0,251	0,25	0,198	0,193	0,211
Purbalingga	0,346	0,458	0,381	0,31	0,213

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 67
IKG Kabupaten Banyumas Pilah Gender Tahun 2024

2.2.6.4. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kualitas pemuda menentukan keberhasilan pencapaian tujuan daerah dalam meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam mengoptimalkan bonus demografi. Berdasarkan kesepakatan provinsi jawa tengah dalam perhitungan IPP bahwa usia pemuda adalah 15-29 tahun. Jumlah penduduk usia 15-29 tahun yang dimiliki Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebanyak 409.464 jiwa. Oleh karena itu, jumlah pemuda yang cukup banyak perlu dioptimalkan potensinya dalam mendorong pembangunan daerah.

Status pembangunan pemuda diukur menggunakan indeks pembangunan pemuda (IPP) yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan 5 (lima) domain

pengungkit, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. Pembangunan pemuda dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial serta politik, dan menitikberatkan pada pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi politik maupun aktivitas di organisasi masyarakat.

Belum seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melakukan perhitungan IPP, termasuk Kabupaten Banyumas. Hanya 4 (empat) Kabupaten/Kota yang sudah melakukan perhitungan IPP (Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, dan Kota Semarang. Minimnya jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berkaitan erat dengan belum optimalnya penggunaan IPP sebagai alat ukur kinerja daerah. Sehingga potensi manfaatnya sebagai tolok ukur pembangunan pemuda tidak terealisasi secara maksimal. Untuk mendukung kinerja Pembangunan Pemuda, Kabupaten Banyumas akan menyusun IPP mulai tahun 2025.

2.2.6.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan merujuk pada persentase perempuan usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Ini adalah indikator penting yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga

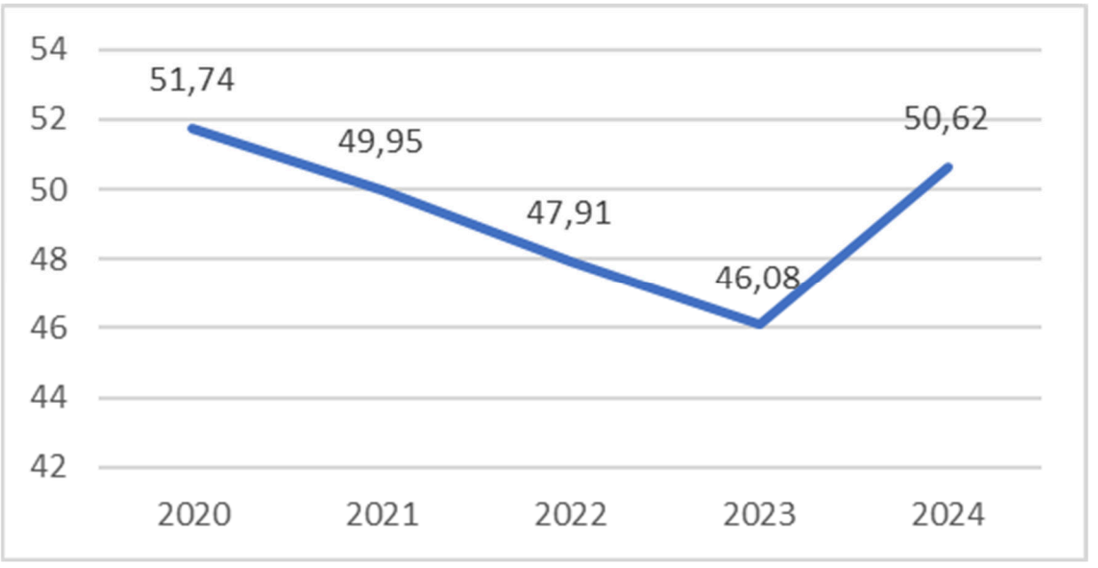

Gambar 2. 68
TPAK Perempuan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

TPAK perempuan Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2024 perkembangannya fluktuatif. dan bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki di tahun 2024 sebesar 85,44% maka TPAK Perempuan sangatlah jauh tertinggal. Lebih rendah dibandingkan dengan TPAK Perempuan Provinsi Jawa Tengah 61,82% dan Nasional sebesar 55,41%.

2.2.6.6. Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD

Kabupaten Banyumas memiliki satu Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bentuk komitmen dalam penyediaan akses, layanan, dan dukungan ketenagakerjaan bagi kelompok disabilitas. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan menjahit dengan mesin dengan melatih 16 orang penyandang disabilitas. Lebih lanjut, peserta pelatihan yang tercatat adalah 9 orang Tuna Daksa, 4 orang Tuna Grahita, dan 3 orang Tuna Wicara. Selain pelatihan, ULD Banyumas juga memfasilitasi 154 lowongan pekerjaan pada Job Fair yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 cenderung naik. Pada Tahun 2024 angka ketergantungan adalah 45,75 artinya bahwa setiap setiap 100 orang yang aktif bekerja, ada 45 orang yang bergantung pada mereka (baik karena masih anak-anak atau sudah lansia).

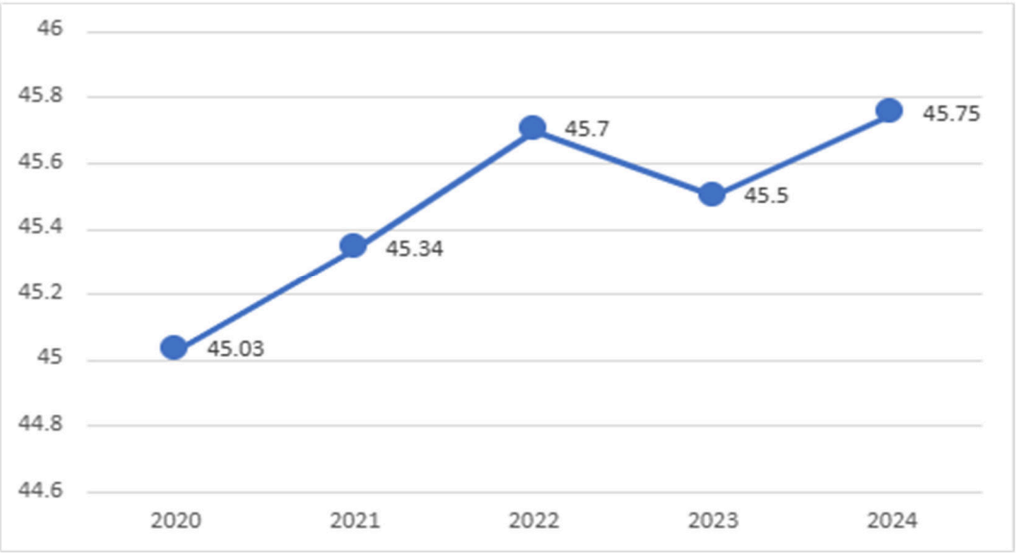

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, diolah 2025

Gambar 2. 69
Angka Ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Share Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Banyumas telah mengalami pergeseran. Kontribusi (share) sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan menggeser kontribusi (share) sektor pertanian yang mengalami penurunan. Pada tahun 2024, share PDRB ADHB Sektor Industri meningkat mencapai 26,4% dari sebelum sebesar 25,37% pada tahun 2020, sementara share PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2024 menurun hingga 11,16% dari sebelumnya sebesar 12,45% tahun 2020. Pada tahun 2024, nilai PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas meningkat hingga mencapai Rp 19 Triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi ADHK mencapai 5,05. Sementara itu nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya mencapai Rp 8 Triliun dan mengalami penurunan hingga -0,54%. Laju pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan yang terkecil dibandingkan 16 sektor lapangan usaha lainnya. Berikut grafik pergerakan kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian dalam 5 tahun terakhir.

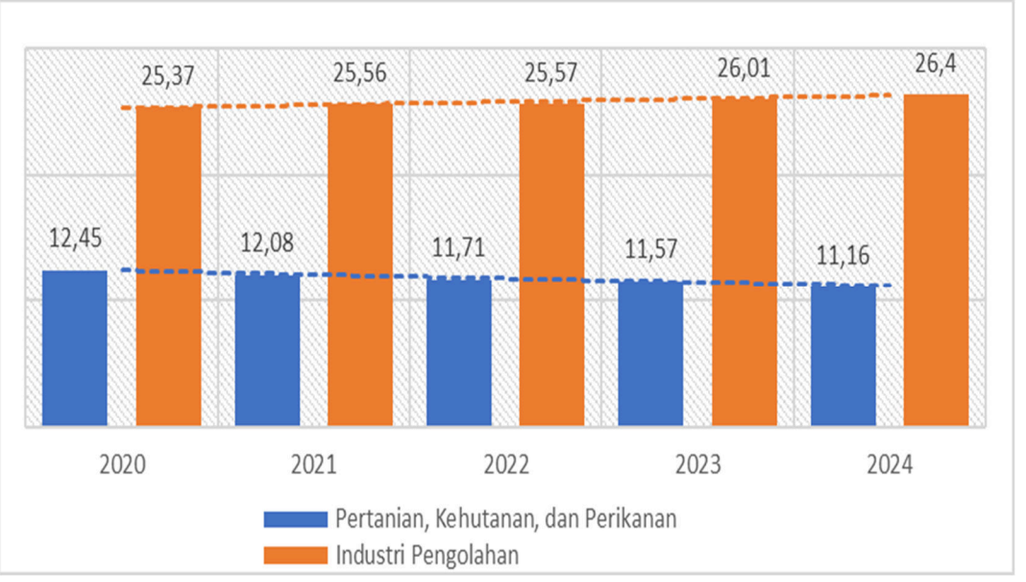

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 70
Kontribusi (Share) PDRB Sektor Industri dan Pertanian
Tahun 2020-2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Dalam 5 tahun terakhir share PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Banyumas merupakan yang terbesar dan selalu diatas 20%. Pada 2020 industri pengolahan memiliki share sebesar 25,37% dan

menjadi 26,4% pada tahun 2024. Industri di Kabupaten Banyumas didominasi oleh industri kecil sebanyak 44.096 unit atau 99% dari total jumlah industri di Kabupaten Banyumas 2024.

Sementara itu, sektor lain yang memiliki potensi untuk berkembang adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum konsisten meningkat dalam lima tahun terakhir. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor potensial yang dapat mendukung banyak sektor lainnya. Pada 2020 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2020 memiliki share sebesar 3,11% dan meningkat kontribusinya hingga 3,62% pada 2024. Meningkatnya share PDRB pada sektor makan minum dikarenakan beberapa faktor, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan preferensi konsumen, serta pertumbuhan sektor pariwisata.

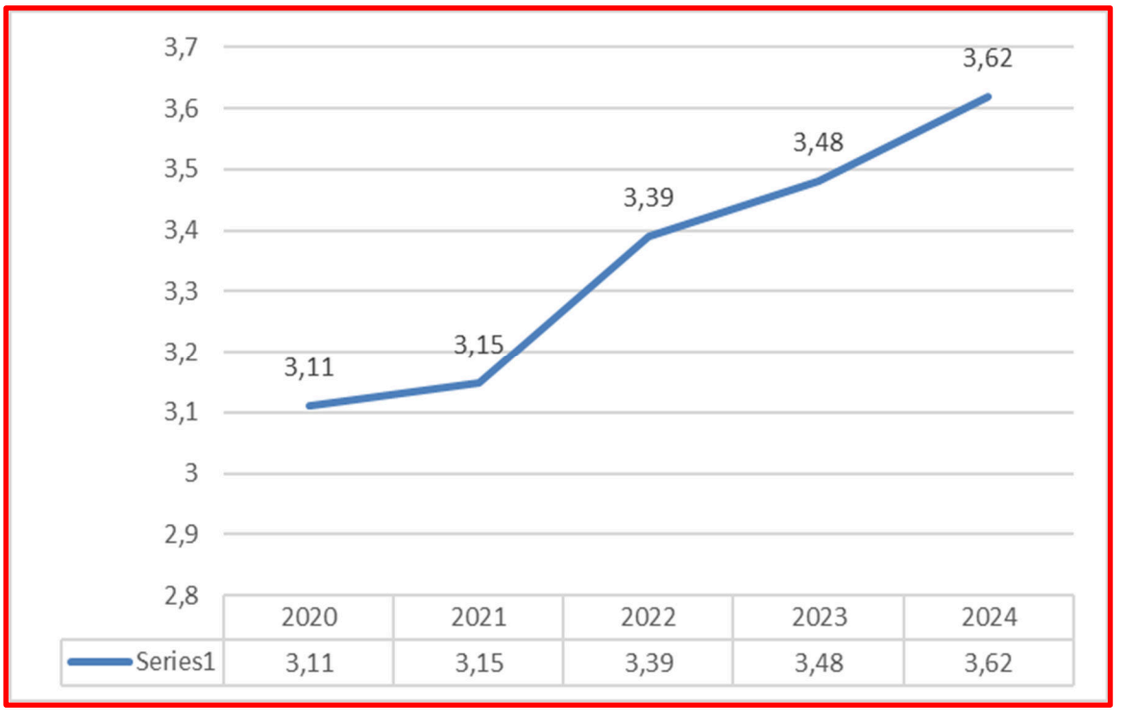

Sumber BPS Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 2. 71
Kontribusi (Share) PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Tahun 2020-2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)

2.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Banyumas meningkat pada tahun 2024. Meski mengalami penurunan dalam 4 tahun sebelumnya, TPAK Kabupaten Banyumas mencapai 68,03%, meningkat 3,43%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya labor supply yang memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Banyumas. Lebih sederhana, semakin tinggi TPAK, semakin tinggi pula potensi usia produktif yang

dapat memproduksi barang dan jasa. Meskipun berhasil meningkat pada tahun 2024, masih adanya permasalahan tenaga kerja yaitu masih banyaknya ketidak cocokan antara kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan pasar kerja. Berikut data TPAK Kabupaten Banyumas dari tahun 2020-2024.

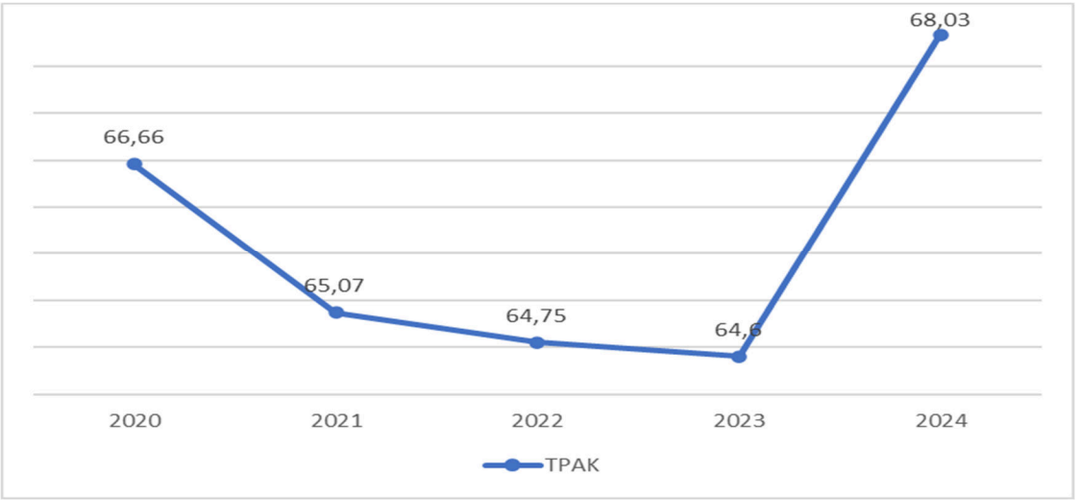

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Pengangguran berjenis kelamin laki-laki tercatat 39.907 orang, sementara perempuan hanya 18.820 orang. Meskipun jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak, namun angkatan kerja yang bekerja juga lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2023 adalah 46,08%.

2.3.2.3. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Banyumas masih fluktuatif. Rasio kewirausahaan mengalami peningkatan pada 2021 di angka 3,49%, lalu terus menurun hingga 2023 di angka 2,4%, lalu meningkat kembali pada 2024 dengan angka 3,19%. Hal ini menggambarkan kondisi angkatan kerja yang terus bertambah tidak diimbangi dengan jumlah jumlah pengusaha yang dibantu buruh tetap dan dibayar. Fluktuatifnya rasio kewirausahan daerah disebabkan oleh belum optimalnya pendampingan dalam pelatihan kewirausahaan. Berikut rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Banyumas 2020-2024.

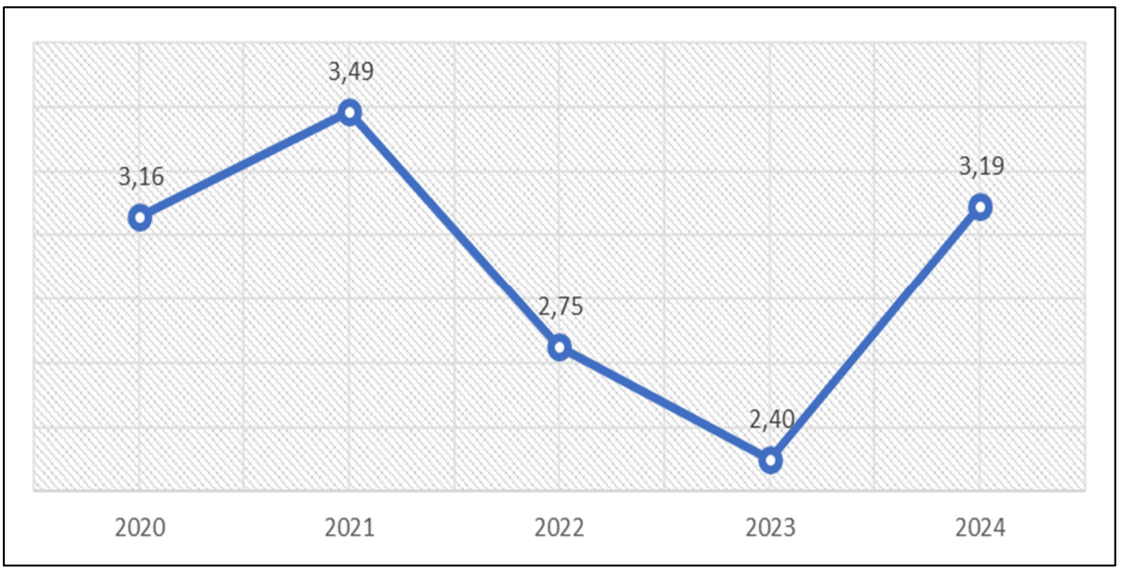

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 73
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Banyumas 2020-2024

2.3.2.4. *Return on Asset* (ROA) BUMD

ROA BUMD merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. ROA merupakan indikator penting untuk menilai kinerja perusahaan. Di Kabupaten Banyumas ada 3 BUMD yaitu Perumdam Tirta Satria Kab Banyumas, Perumda Pasar Satria dan PT Banyumas Investama Jaya (BIJ). Dimana Return on Aset pada 3 BUMD tersebut dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan yaitu 2,66% menjadi 3,26% namun masih dibawah 5% dimana ROA dengan katagori baik dengan angka 5%. Hal ini disebabkan oleh produktivitas dan efisiensi yang belum optimal dalam menggunakan aktiva/asetnya dalam memperoleh laba.

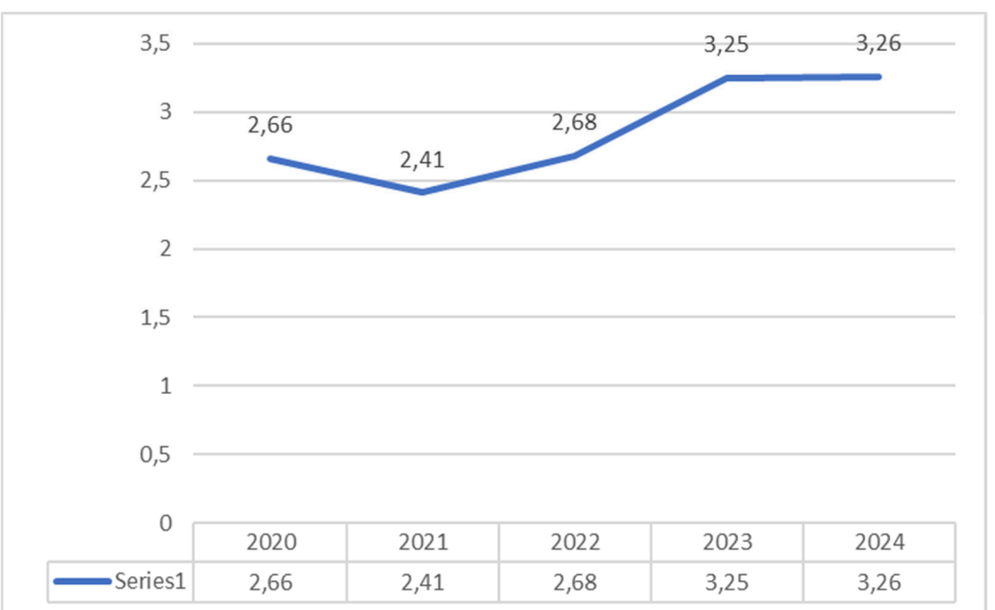

Gambar 2. 74
ROA BUMD Tahun 2020-2024

2.3.2.5. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah memiliki keterkaitan dengan literasi keuangan masyarakat. Terdapat 3 komponen dalam IKAD yaitu penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman. Dalam mengawal indikator ini, Kabupaten/kota akan membentuk TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah). Indikator ini termasuk baru sehingga masih sedikit informasi yang tersedia.

2.3.2.6. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menerapkan inovasi dalam kebijakan dan program pembangunan. Dengan adanya Indeks Inovasi Daerah, daerah dapat menilai efektivitas kebijakan inovatifnya serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar pembangunan lebih efisien dan berdaya guna. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan.

Berdasarkan Profil Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas mengalami kelemahan pada aspek jumlah inovasi dan hasil kreatif dan aspek kecanggihan produk inovasi. Selain menjadi instrumen pengukuran untuk mengetahui perkembangan inovasi di Kabupaten Banyumas sehingga dapat menghasilkan peta pembinaan sesuai karakteristik dan permasalahan di Kabupaten Banyumas, Indeks Inovasi Daerah juga menjadi salah satu komponen variabel pengungkit Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu adanya upaya yang lebih lanjut dan strategi dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas.

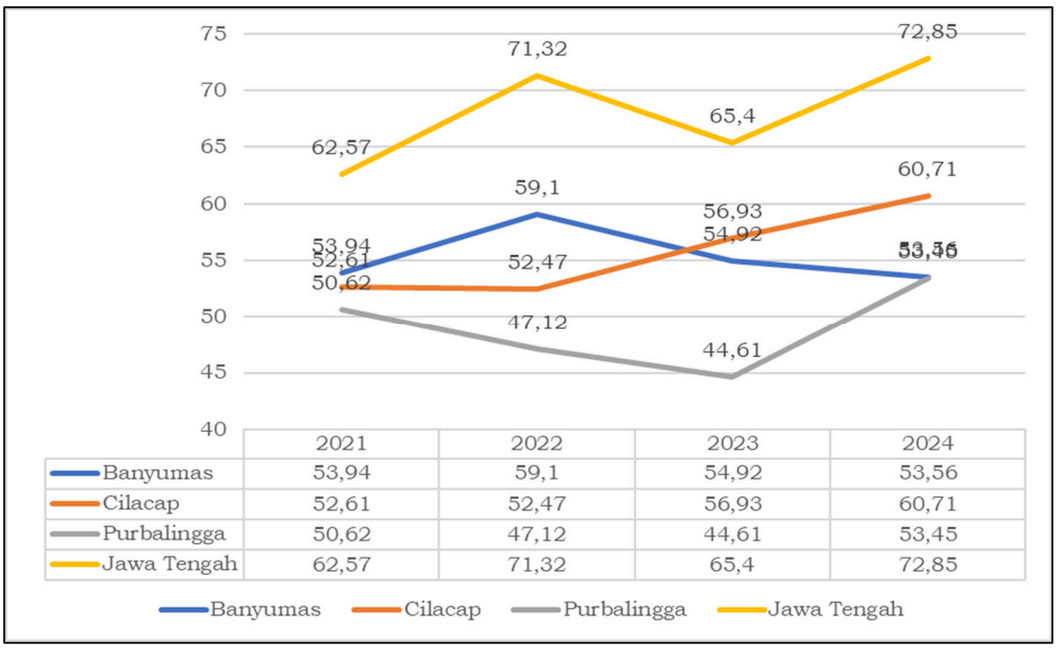

Sumber: Kemendagri

Gambar 2. 75
IID Kab. Banyumas Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian tahun 2020 dibandingkan dengan tahun lainnya terdapat perbedaan dikarenakan adanya perubahan cara menganalisis variabel dan indikatornya. Indeks Inovasi Daerah Kab. Banyumas tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Cilacap. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu berkolaborasi dengan akademisi, pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melihat perkembangan inovasi daerah, selain dari Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Banyumas juga melihat dari nilai kapabilitas inovasi daerah. Nilai pilar kapabilitas inovasi daerah pada tahun 2024 meningkat yaitu sebesar 4.25, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 3.64. Akan tetapi terdapat penambahan indikator pada Tahun 2024. Berikut perbedaan indikator pada Pilar Kapabilitas Inovasi Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.14

Nilai Kapabilitas Inovasi

Tahun	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi							**Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi**
	Keanekaragaman dan Kolaborasi		Riset				Komersialisasi	
	Keanekaragaman tenaga kerja	Pengembangan Klaster	Publikasi ilmiah	Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	Belanja Riset	Indeks keunggulan lembaga riset	Aplikasi merek dagang	
2023	3.21	N/A	5.00	4.26	2.78	2.96	3.61	**3.64**
2024	3.18	5.00	4.11	4.66	5.00	3.86	3.91	**4.25**

2.3.2.7. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat, berupa giro, tabungan, dan deposito. DPK merupakan sumber dana utama bagi bank untuk melakukan kegiatan perkreditan dan investasi dalam mendukung pertumbuhan PDRB.

Tabel 2. 15

Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Tahun	**Jumlah Giro (Juta Rp)**	**Jumlah Tabungan (Juta Rp)**	**Jumlah Deposito (Juta Rp)**	**Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Kab.Banyumas (Juta Rp)**	**PDRB (Juta Rp)**	**Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Kab.Banyumas (%)**
2021	2.217.069	11.163.880	3.421.844	16.802.793	56.919.816	29,52
2022	2.268.230	11.821.874	3.529.530	17.619.634	62.817.303	28,05
2023	2.140.606	11.468.955	3.890.194	17.499.755	68.751.652	25,45
2024	2.390.504	12.088.477	4.205.008	18.683.989	74.162.920	25,19

Data BPS diolah Bappedalitbang tahun 2024

Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Banyumas dari tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami penurunan namun Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, ini menunjukan kontribusi keuangan masyarakat dalam PDRB masih sangat kecil.

2.3.2.8 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB adalah rasio yang membandingkan total kredit yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar peran perbankan daerah dalam perekonomian daerah, khususnya dalam hal penyaluran kredit.

Tabel 2.16

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB

Tahun	Total Kredit Pada Bank Milik Kab. Banyumas (Juta Rp)	PDRB (Juta Rp)	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB
2020	15.569.000	53.682.118	29,00
2021	16.551.769	56.919.816	29,08
2022	18.762.567	62.817.303	29,87
2023	18.297.476	68.751.652	26,61
2024	18.822.260	74.162.920	25,38

Data BPS diolah Bappedalitbang tahun 2024

Total kredit yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah daerah kabupaten Banyumas dari tahun 2021 sampai 2024 meningkat namun rasio dengan PDRB setiap tahun menurun, dimana ini menggambarkan bahwa total kredit yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah daerah belum optimal.

2.3.2.9. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu membangun dan memaksimalkan potensi wilayah adalah Koperasi. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 636 unit koperasi di Kabupaten Banyumas, dan hanya 375 koperasi (59%) yang dinyatakan aktif. Sementara koperasi sehat yang terdata sejumlah 110 unit (17,63%) dan koperasi yang tidak sehat sejumlah 514 unit (82,37%), dengan volume usaha koperasi sebesar Rp.1.160.523.000.000 dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Rp. 74.162.920.000.000 menjadi 1,565% hal ini

menunjukan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah masih sangat kecil. Adapun data sebagai berikut:

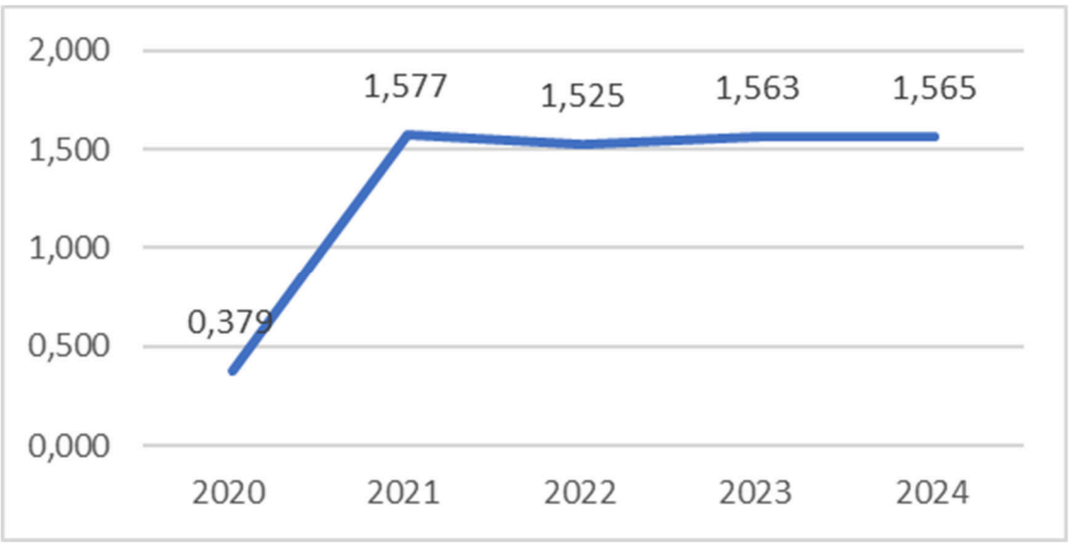

Sumber: Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2.76
Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2018-2023 (Persen)

2.3.2.10. Wisatawan Mancanegara

Pariwisata merupakan sektor yang yang memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Bersama dengan wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara memberikan kontribusi langsung melalui pengeluaran di sektor akomodasi, makan minum, serta transportasi. Kunjungan wisatawan mancanegara juga berpotensi meningkatkan citra daerah, memperluas jejaring promosi, dan menciptakan peluang investasi. Berikut data kunjungan wisatawan Banyumas dalam 5 tahun terakhir.

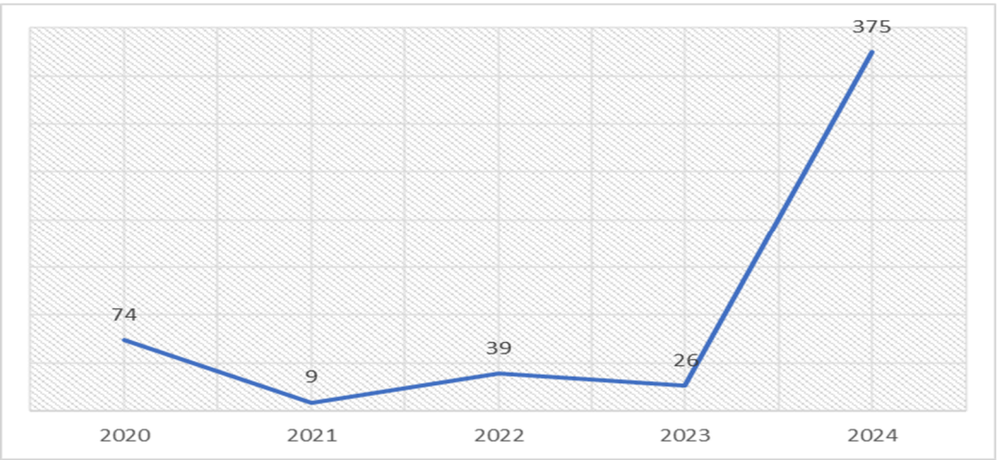

Sumber: Dinporabudpar, 2025

Gambar 2. 77
Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyumas masih fluktuatif. Mengalami tren penurunan sejak 2020 hingga 2023, kunjungan wisatawan meningkat pesat pada tahun 2024. Bahkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2024 mencapai 1.342%. Banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara terjadi karena banyaknya event bertajuk budaya yang diselenggarakan pada tahun 2024 seperti Festival Kenthongan, Lengger Bicara, Grebek Suran dan Festival Serayu. Selain itu, wisata *live in* di desa wisata juga berkontribusi pada kunjungan wisatawan mancanegara.

2.3.2.11. Kondisi Keuangan Syariah

2.3.2.11.1 Indek Zakat Nasional

Indek Zakat Nasional pada Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh Basnaz Kabupaten Banyumas untuk tahun 2024 dimana Secara Kewilayahan, pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas berada pada kategori Baik dengan nilai dimensi makro 0,77. Secara tata kelola dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas berada pada kategori Cukup Baik dengan nilai dimensi mikro 0,51. Secara umum, pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas masuk pada kategori Stabil dengan nilai IZN 0,59.

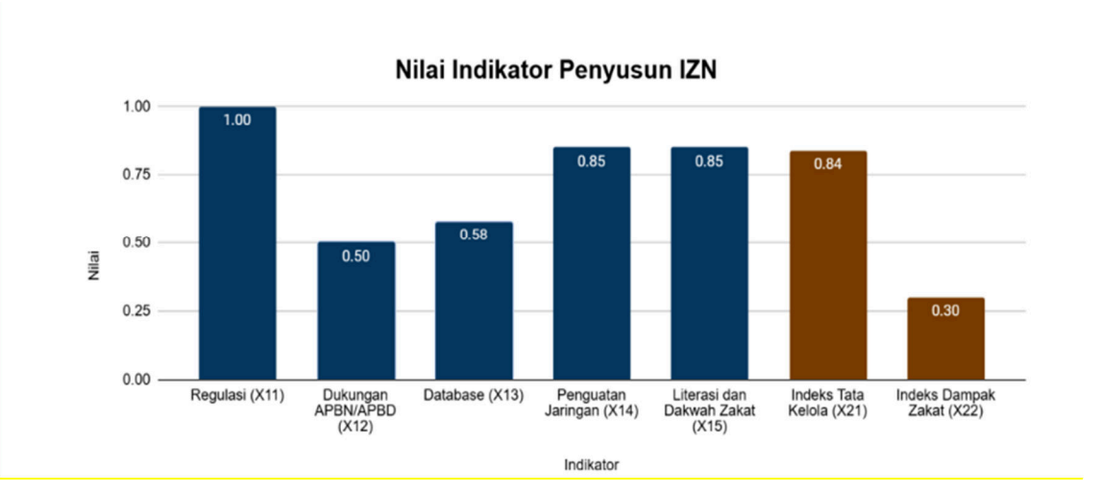

Sumber : Data Primer, diolah (2025) Baznas

Gambar 2. 78
Indeks Zakat Nasional
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan nilai masing-masing indeks indikator penyusunan IZN, indikator regulasi merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi atau termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai sempurna yaitu 1,00. Disusul indikator penguatan jaringan (0,85), literasi

dakwah zakat (0,85), dan indeks tata kelola (0,84) yang ketiganya berada pada kategori Sangat Baik. Selanjutnya indikator database (0,58) dan dukungan APBD/APBN (0,50) berada di kategori Cukup Baik. Dan indeks dampak zakat berada di kategori Kurang Baik dengan nilai 0,30. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis IZN 2024, BAZNAS Kabupaten Banyumas secara keseluruhan sudah Cukup Baik namun masih diperlukan penguatan dan peningkatan melalui evaluasi guna meningkatkan kinerja dan hasil IZN di seluruh indikator penyusunan IZN, khususnya pada indikator dampak zakat baik dalam hal mustahik yang dientaskan dari kemiskinan maupun mustahik yang berhasil terentaskan menjadi muzaki, indikator dukungan APBN/APBD dari pemerintah daerah dan pengalokasian APBN/APBD untuk hak keuangan pimpinan, dan indikator database dalam aspek pemutakhiran data mengenai mustahik serta muzaki perorangan.

2.3.2.11.2 Produk yang bersertifikat halal

Jumlah pelaku usaha mikro Kabupaten Banyumas sejumlah 89.022 di tahun 2024, tercatat yang sudah bersertifkat halal 6.630 atau baru 7,5%, sertifikat halal ini wajib di miliki para pelaku usaha UMKM karena itu merupakan legalitas usaha, disamping harus punya NIB (Nomer Induk Berusaha).

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau memiliki peran krusial dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dewasa ini, fokus pembangunan berbasis keberlanjutan sosial dan lingkungan kerap menjadi isu penting untuk menjamin keberlanjutan sebuah pembangunan daerah. Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor ini konsisten diatas 5%. Rata-rata pertumbuhan lebih tinggi dari sektor pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Pada tahun 2024 tercatat nilai PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Banyumas 56,52 miliar rupiah. Berikut nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Banyumas dalam 5 tahun terakhir.

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 79
Nilai PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Banyumas menandakan penerapan ekonomi hijau sudah cukup baik. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi yaitu terus meningkatnya timbulan sampah di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2024, timbulan sampah di Kabupaten Banyumas mencapai 200.299 ton per tahun. Jika ditelaah lebih dalam, dilihat dari sumber sampah, 38% berasal dari rumah tangga dan 26% berasal dari perniagaan, 14% dari pasar, dan 6% dari perkantoran. Sementara itu, dilihat dari komposisi sampahnya, sampah tertinggi adalah dari sisa makanan sebesar 35%, dan sampah plastik sebesar 30%. Kondisi ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau di Kabupaten Banyumas. Dengan penguatan pengelolaan persampahan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, peningkatan partisipasi perempuan, serta penguatan kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender akan mengoptimalkan peningkatan Nilai PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Banyumas.

Penerapan ekonomi hijau berupa penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sudah dilakukan di Kabupaten Banyumas adalah penggunaan PLTS, PLTM, PLTMH, dan biomassa sampah. Kabupaten Banyumas memiliki beberapa potensi EBT diantaranya energi angin, surya, hidro, biomassa, dan panas bumi. Potensi energi paling besar adalah potensi energi panas bumi sebesar 258 MW.

Tabel 2. 17
Potensi EBT Kabupaten Banyumas

No.	Potensi Komoditas EBT	Besaran Energi	
1.	Potensi Angin	Onshore	9,4 MW
2.	Potensi Surya	PLTS	7,1 GWp
3.	Potensi Hidro	PLTA RoR	0,9 MW
4.	Potensi Bioenergi	Biomassa Sampah kota teknis	6,0 MW
		Biomassa Sampah kota teoritis	20,1 MW
		Biomassa Hutan Produksi Kritis	155,4 MW
5.	Potensi Panas Bumi	Cadangan Hipotetik	83,0 MW
		Cadangan Mungkin	45,0 MW
		Cadangan Terduga	130,0 MW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.3.3.2. Penerapan Ekonomi Biru

Kabupaten Banyumas bukan merupakan kabupaten yang bukan wilayah maritim atau wilayah yang mempunyai sumber daya laut, namun dalam mendukung ekonomi biru merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru meliputi beberapa sektor yaitu perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Ekonomi biru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dengan Pengembangan Smart Fisheries Village (SFV), Peningkatan budidaya (penerapan CPIB CBIB) dan Kajian Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan.

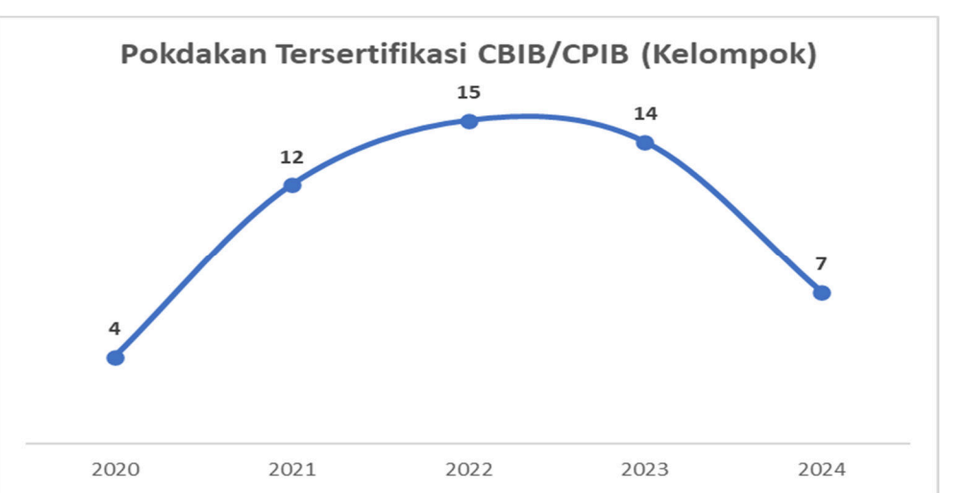

Gambar 2. 80
Pokdakan Tersertfikasi Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

2.3.4. Transformasi Digital

2.3.4.1. Penduduk Mengakses Internet

Transformasi digital memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transformasi digital adalah keniscayaan dalam pembangunan daerah. Daerah yang mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang komprehensif dalam melaksanakan transformasi digital. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur digital yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekosistem digital yang kondusif. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah di era digital ini. Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas Tahun 2024, pada tahun 2024, pengguna ponsel/komputer telah mencakup 77,79% anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas, dan 74,87% anggota rumah tangga anggota rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah mengakses internet. Banyaknya masyarakat yang mengakses internet berdampak positif terhadap meningkatnya literasi digital dan aksesibilitas, sehingga penyebarluasan dan penyerapan informasi dapat berlangsung lebih cepat.

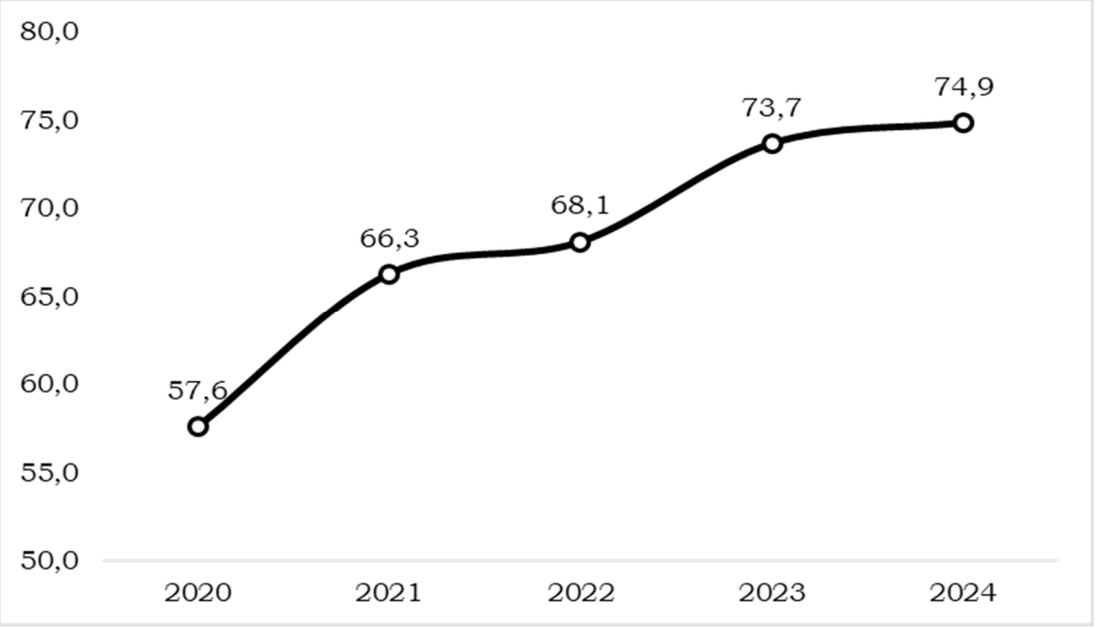

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 81
Persentase Penduduk Mengakses Internet
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Integrasi ekonomi baik di tingkat domestik dan global menjadi motor penggerak transformasi ekonomi suatu daerah. Integrasi ekonomi yang baik akan mendorong terbukanya pasar yang lebih luas. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor suatu daerah dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana perekonomian terintegrasi baik domestik dan global.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) per PDRB di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2024 PMTB per PDRB 35,41%, menurun 1,03% dibanding dengan tahun 2020. Menurunnya PMTB per PDRB menandakan pertumbuhan investasi pada Kabupaten Banyumas tidak sebesar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Berikut data PMTB per PDRB pada 2020-2024 di Kabupaten Banyumas.

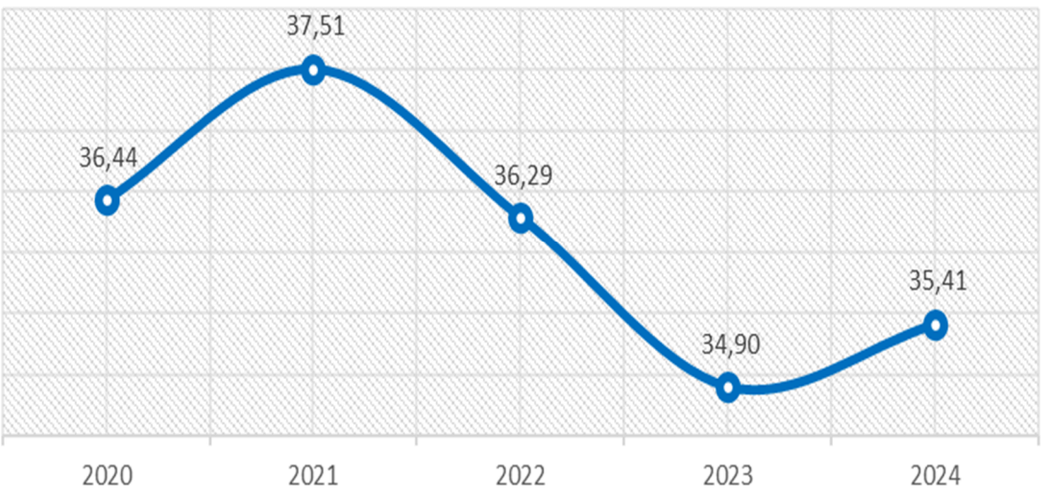

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 82
Pembentukan Modal Tetap Bruto Per PDRB (%) Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Selain dari investasi pada daerah, menguatnya integrasi ekonomi domestik dan global juga dapat dilihat dari meningkatnya nilai ekspor. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai ekspor Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai ekspor kabupaten Banyumas mencapai USD 93.349.222,46, meningkat 6,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

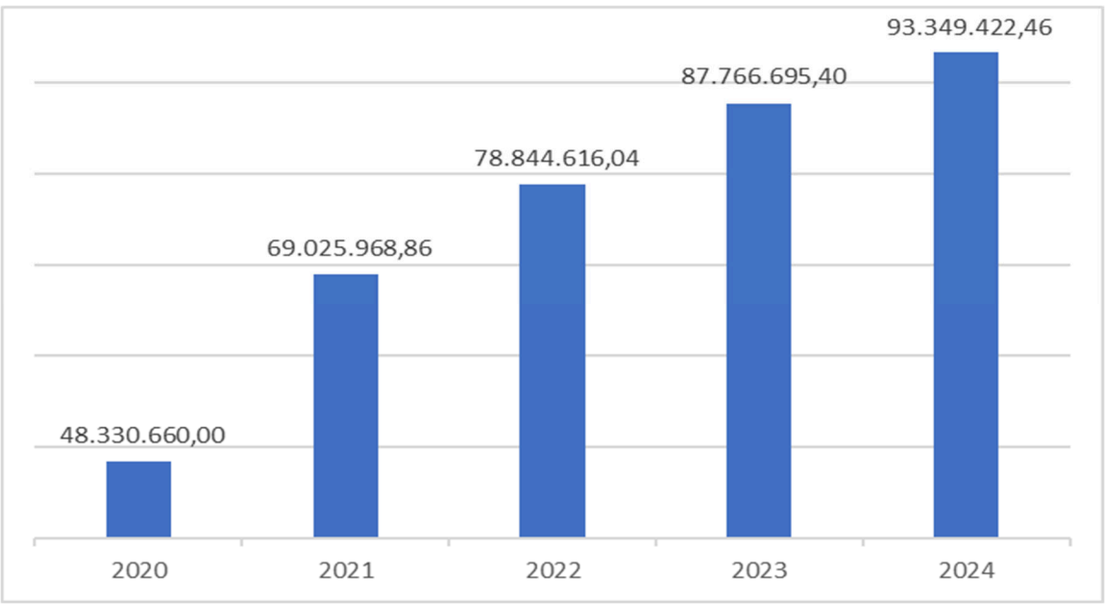

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 83
Nilai Ekspor (US$) Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Meskipun nilai ekspor mengalami peningkatan, diversifikasi produk ekspor masih terbatas. Dalam lima tahun terakhir, tiga komoditas unggulan masih menjadi tumpuan yaitu gula kelapa, minyak atsiri dan kayu olahan yang mendominasi hingga 97,63%.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang merata merupakan salah satu tantangan utama yang di Kabupaten Banyumas. Agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi secara keseluruhan, perlu ada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dengan demikian, kedua wilayah ini dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian provinsi dan nasional. Rasio PDRB Kabupaten Banyumas terhadap Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir ini tidak ada perkembangan dimana 0,040 di tahun 2020 menjadi 0,041 di tahun 2024 dan apabila dibandingkan dengan Cibalingmas, Kabupaten lebih tinggi dari Kabupaten Purbalingga namun lebih rendah dari Kabupaten Cilacap.

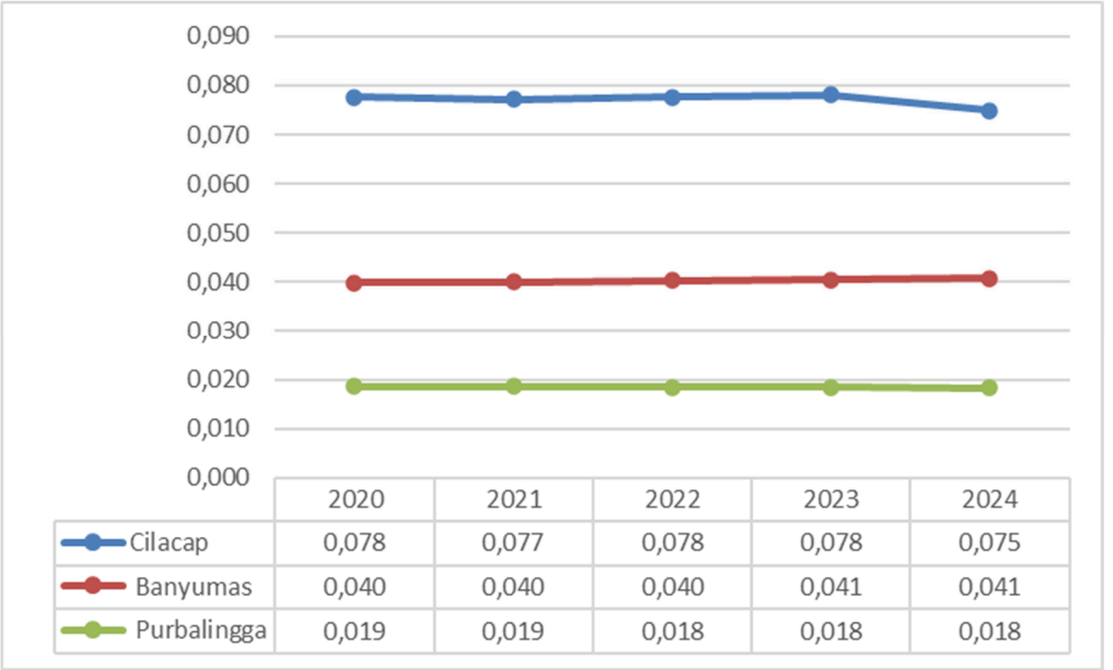

	2020	2021	2022	2023	2024
Cilacap	0,078	0,077	0,078	0,078	0,075
Banyumas	0,040	0,040	0,040	0,041	0,041
Purbalingga	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.84
Rasio PDRB Kabupaten Banyumas Terhadap Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

2.3.6.1. Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Banyumas meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan, dan jalan desa. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan lingkungan dan jalan desa adalah 1.557,12 km, dengan panjang jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sepanjang 1.315 Km (sesuai Keputusan Bupati Banyumas Nomor 621/421/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Banyumas), jalan kewenangan Nasional sepanjang 172,66 Km, dan jalan kewenangan Provinsi sepanjang 69,46 Km. Selanjutnya berdasarkan data Potensi Desa 2018 di Kabupaten Banyumas tidak ada desa terpencil, semua tersedia telah akses jalan aspal/beton yang memadai.

Rasio panjang jalan kewenangan kabupaten terhadap luas wilayah adalah 0,99 km/km2. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah terbesar adalah pada Kecamatan Purwokerto Timur 3,705 km/Km2, dengan panjang 31,197 Km dan luas 8,42 Km2, dari terkecil ada di Kecamatan Pekuncen 0,512 km/Km2, dengan panjang 47,45 Km dan luas 92,7 Km2. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18
Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1.508	1.508	1.508	1.315	1.315
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (Km)	716,602	770,729	868,549	665,429	665,429
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	47,52	51,11	57,60	50,59	50,59
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (Km)	389,516	432,146	356,686	285,412	285,412
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	25,83	28,66	23,65	21,70	21,70
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (Km)	547,404	305,125	282,765	364,506	364,506
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	36,30	20,23	18,75	27,71	27,71

Sumber : Dinas PU Kabupaten Banyumas, 2025
*Keterangan *) Panjang Jalan Kabupaten sesuai Keputusan Bupati Banyumas Nomor 621/421/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Banyumas*

Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 akan tetapi tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan penetapan SK jalan terbaru. Jalan kewenangan Kabupaten Banyumas yang semula sepanjang 1.508 Km menjadi 1.315 Km. Pengurangan tersebut berasal dari adanya ruas jalan kabupaten yang diserahkan kewenangannya menjadi jalan nasional (Lingkar Sumpiuh) dan jalan desa, serta ada juga jalan desa yang diserahkan kewenangannya menjadi jalan kabupaten. Namun demikian jalan tersebut memiliki jenis permukaan yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya perubahan SK jalan terbaru, maka kondisi jalan dalam kondisi baik, sedang, dan rusak juga berubah.

Peningkatan kondisi jalan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sampai dengan Tahun 2024 jalan kondisi mantap mencapai 72,29 %. Bahaya bencana di Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Pada kawasan rawan bencana infrastruktur dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Bencana tanah longsor

seringkali menyebabkan kerusakan jalan di Kabupaten Banyumas. 52 ruas jalan kabupaten dengan total sepanjang 82,48 Km diidentifikasi berada pada kawasan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

Tabel 2. 19
Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Kabupaten Banyumas

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Kabupaten Banyumas	49,03%	52,89%	53,40%	53,64%	54,89%

Sumber : Dinhub Kabupaten Banyumas, 2025

Jumlah sarana prasarana perhubungan terus bertambah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan ideal sarana prasarana perhubungan di lapangan dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten. Peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana prasarana jalan, meskipun secara keseluruhan capaiannya masih dibawah kondisi ideal.

2.3.6.2. Nilai Daya Saing Infrastruktur

Daya saing infrastruktur merupakan salah satu komponen daya saing daerah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur tersebut dinilai dengan IDSD Pilar Kedua, yaitu Pilar Infrastruktur. Nilai IDSD Pilar 2 Infrastruktur Kabupaten Banyumas berfluktuasi dari tahun-ketahun, fluktuasi tersebut disebabkan oleh perubahan indikator penilaian dan rentang nilai, terutama IDSD pada rentang tahun 2020 dan 2022. Sistem penilaian rentang tahun 2020 sampai dengan 2021 berdasarkan isian mandiri daerah masing-masing yang dikumpulkan dan tervalidasi datanya ke Provinsi Jawa Tengah, sedangkan tahun 2022 isian mandiri dikumpulkan ke BRIN. Tahun 2023 terjadi perubahan dan penetapan indikator penilaian serta sistem penilaian yang menjadi standar penilaian IDSD hingga saat ini. Sehingga tahun 2020 - 2021 merupakan perhitungan IDSD dengan metode perhitungan dan indikator yang lama, sedangkan tahun 2022 mulai menggunakan indikator yang baru dan metode perhitungan di tahun ini yang menjadi pakem.

Tabel 2. 20
Capaian Nilai Daya Saing Infrastruktur
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Banyumas	3,00	3,5833	2,08	2,55	3,57
Rata-Rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	-	-	2,15	2,63	3,62
Jawa Tengah	-	-	3,32	4,14	4,06

Sumber:
Tahun 2020 - 2021, Penilaian Mandiri dikoordinir oleh Pemprov Jawa Tengah
Tahun 2022 - 2024, Penilaian oleh Badan Riset Inovasi Nasional RI

Nilai IDSD Pilar Infrastruktur Kabupaten Banyumas masih di bawah nilai Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2022, nilai IDSD Pilar Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.32, sedangkan Kabupaten Banyumas sebesar 2.08. Tahun 2023, nilai IDSD Pilar Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah sebesar 4.14, sedangkan Kabupaten Banyumas sebesar 2.55, Tahun 2024, nilai IDSD Pilar Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah sebesar 4.06, sedangkan Kabupaten Banyumas sebesar 3.57. Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas sama - sama mengalami peningkatan, namun nilai Kabupaten Banyumas cukup jauh di bawah nilai Provinsi Jawa Tengah.

2.3.6.3. Indeks Desa Membangun

Dalam rangka mewujudkan desa yang maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi saat aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan melengkapi. Sehingga kelak dapat ditemukan suatu potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh desa yang dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di desa.

IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yang digunakan untuk menentukan status desa. Ketiga indeks tersebut adalah indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Penilaian IDM dilakukan setiap tahun dengan desa menginput data yang dibutuhkan pada website yang disediakan oleh Kemendes PDTT.

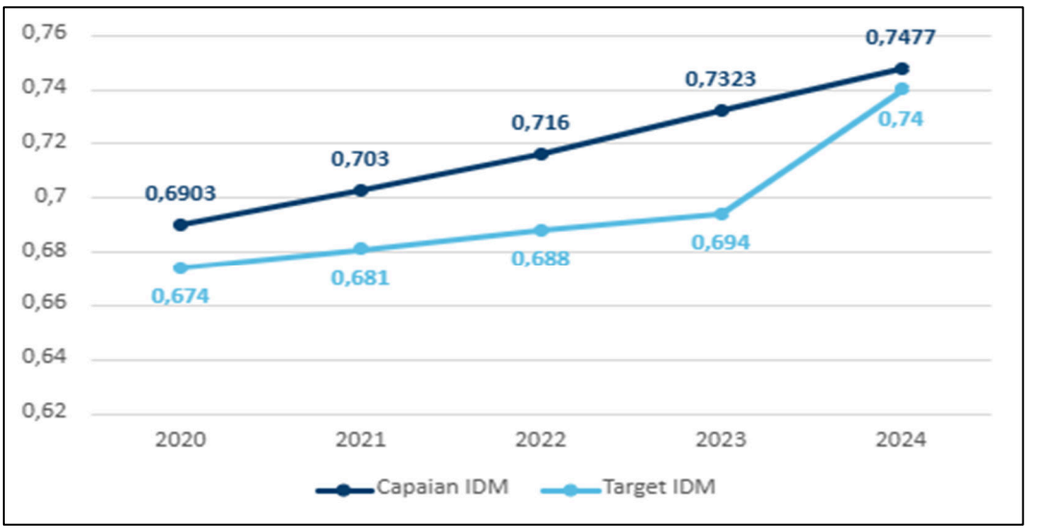

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 85
Perkembangan IDM Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.85 didapatkan hasil bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Banyumas mendapat nilai IDM 0,7477 yang menandakan status desanya adalah maju. Nilai ini meningkat dari tahun 2023 dimana nilai IDM yang diperoleh adalah 0,716 yang disebabkan oleh peningkatan status desa dari yang sebelumnya berkembang menjadi maju/mandiri dan yang sebelumnya maju menjadi mandiri. Pengukuran IDM menjadi ukuran status desa dalam wilayah kabupaten, dimana wilayah Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 tahun selalu meningkat.

2.3.6.4. Persentase Desa Mandiri

Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk menentukan status desa di Kabupaten Banyumas selama periode 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut, tidak ada desa yang terklasifikasi sebagai desa Sangat Tertinggal atau Tertinggal. Status desa Berkembang mengalami penurunan, sementara status desa Maju dan Mandiri semakin meningkat. Meskipun demikian, sebagian besar desa berada pada status Maju. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengklasifikasikan status desa berdasarkan nilai IDM sebagai berikut:

a. Desa Mandiri (Desa Sembada) dengan nilai IDM > 0,85155
b. Desa Maju (Desa Pra Sembada) dengan nilai IDM ≤ 0,8155->0,7072
c. Desa Berkembang (Desa Madya) dengan nilai IDM ≤ 0,7072 dan > 0,5989
d. Desa Tertinggal (Pra Madya) dengan nilai IDM ≤0,5985 dan > 0,4907

e. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) dengan nilai IDM ≤0,4907

IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks. Ketiga indeks tersebut adalah indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Status desa di Kabupaten Banyumas berdasarkan nilai IDM di Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

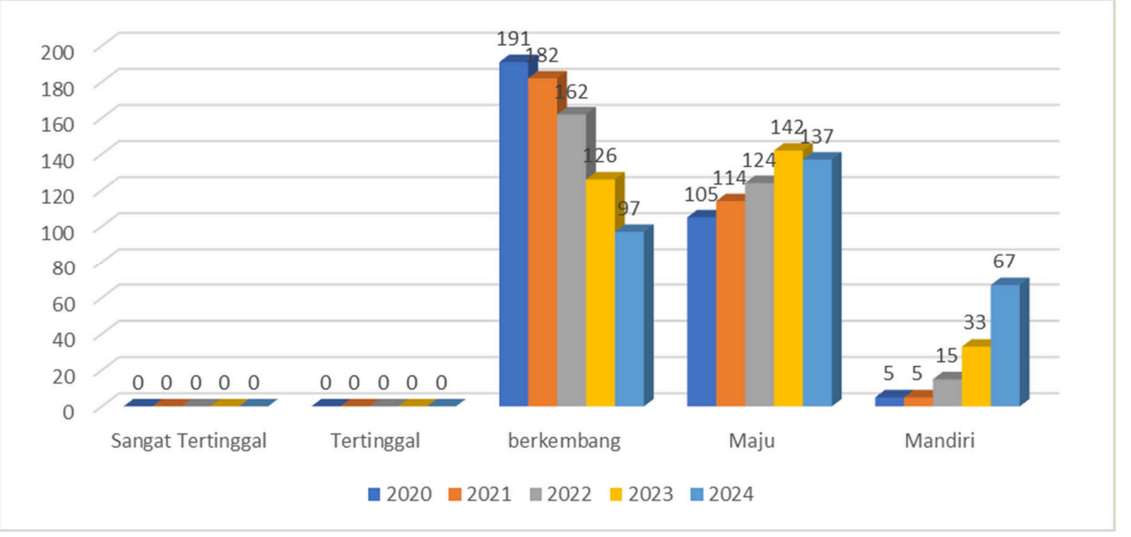

Gambar 2.86
Status Desa dalam IDM Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

2.3.6.5. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Menurut Data dari Simperum tahun 2024 menunjukkan bahwa angka *backlog* kepemilikan di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 2.765 unit.

Di samping permasalahan ketersediaan perumahan Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2024 yang disusun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024 sebanyak 93,87% rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah memiliki rumah. Meskipun tingkat kepemilikan rumah tinggi, dari aspek kelayakan masih terdapat rumah tidak layak huni dan rumah tanpa akses air minum dan sanitasi. Hingga Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas masih terdapat 73.094 unit rumah tidak layak huni yang belum ditangani atau dengan rasio rumah layak huni di Kabupaten Banyumas baru mencapai 80,15%. Banyaknya rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator permukiman kumuh.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,67 Ha, mencakup kawasan dan lokasi kumuh di Perkotaan Purwokerto.

Tabel 2. 21
Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas

No	Lokasi	Luas Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1.	Kawasan Unsoed		23,24
	● Grendeng	13,48	
	● Karangwangkal	5,02	
	● Arcawinangun	4,47	
2.	Kawasan Perdagangan dan Jasa		16,13
	● Purwokerto Lor	3,3	
	● Purwokerto Kidul	4,99	
	● Purwokerto Kulon	4,35	
	● Purwokerto Wetan	3,49	
3.	Kawasan Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji		15,9
	● Kedungwuluh	5,06	
	● Kranji	7,52	
	● Bantarsoka	3,32	
4.	Kawasan Purbomampir		14,73
	● Purwanegara	5,52	
	● Bobosan	2,96	
	● Sumampir	6,25	
5.	Kawasan Takarpucung		12,94
	● Tanjung	3,95	
	● Karangklesem	5,12	
	● Karangpucung	3,87	
	Kelurahan		
6.	Sokanegara	3,02	3,02
7.	Pasirmuncang	3,26	3,26
8.	Bancarkembar	0,76	0,76
9.	Berkoh	1,47	1,47
10.	Karanglewas Lor	2,5	2,5
11.	Kober	2,22	2,22
12.	Mersi	5,87	5,87
13.	Pabuaran	2,88	2,88
14.	Pasir Kidul	0,81	0,81
15.	Rejasari	4,07	4,07
16.	Teluk	5,9	5,9
	Total luas kawasan kumuh (Ha)		115,7

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020

Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi lapangan penanganan kawasan kumuh Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2024 telah mengurangi 64,09 Ha kawasan kumuh, dan masih ada 51,58 Ha kawasan kumuh.

Tabel 2. 22
Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh s/d Tahun 2024 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2024 (Ha)
1	Purwokerto Barat	Bantarsoka	3,32	1,37	1,95
2	Purwokerto Barat	Karanglewas Lor	2,50	1,65	0,85
3	Purwokerto Barat	Kedungwuluh	5,06	4,17	0,89
4	Purwokerto Barat	Kober	2,22	2,22	0
5	Purwokerto Barat	Pasir Kidul	0,81	0	0,42
6	Purwokerto Barat	Pasirmuncang	3,26	0,05	3,21
7	Purwokerto Barat	Rejasari	4,07	3,54	0,53
8	Purwokerto Selatan	Berkoh	1,47	1,47	0
9	Purwokerto Selatan	Karangklesem	5,12	5,12	0
10	Purwokerto Selatan	Karangpucung	3,87	0,14	3,73
11	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kidul	4,98	4,56	0,42
12	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kulon	4,35	1,9	2,45
13	Purwokerto Selatan	Tanjung	3,95	3,95	0
14	Purwokerto Selatan	Teluk	5,90	2,22	3,68
15	Purwokerto Timur	Arcawinangun	4,74	0,22	4,52
16	Purwokerto Timur	Kranji	7,52	7,52	0
17	Purwokerto Timur	Mersi	5,87	2,25	3,62
18	Purwokerto Timur	Purwokerto Lor	3,30	0,49	2,81
19	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	3,49	1,99	1,50
20	Purwokerto Timur	Sokanegara	3,02	0,36	2,66
21	Purwokerto Utara	Bancarkembar	0,76	0,07	0,69
22	Purwokerto Utara	Bobosan	2,95	1,51	1,44
23	Purwokerto Utara	Grendeng	13,47	5,3	8,17
24	Purwokerto Utara	Karangwangkal	5,02	1,36	3,66
25	Purwokerto Utara	Pabuaran	2,89	2,07	0,82
26	Purwokerto Utara	Purwanegara	5,52	4,22	1,3
27	Purwokerto Utara	Sumampir	6,26	4,4	1,86
TOTAL			**115,67**	**64,09**	**51,58**

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2024

Untuk meningkatkan rasio rumah layak huni penanganan RTLH di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan kolaborasi kegiatan dan pendanaan oleh Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait. Rumah tak layak huni ini mengacu pada kriteria rumah tak layak huni yang meliputi pondasi rumah, material, luas minimum ruangan, sirkulasi, fasilitas

dasar, dan lingkungan tidak sehat. Sampai dengan 2024 jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas sebanyak 73.016 unit dan untuk realisasi penanganan RTLH pertahun dapat dilihat pada gambar berikut:

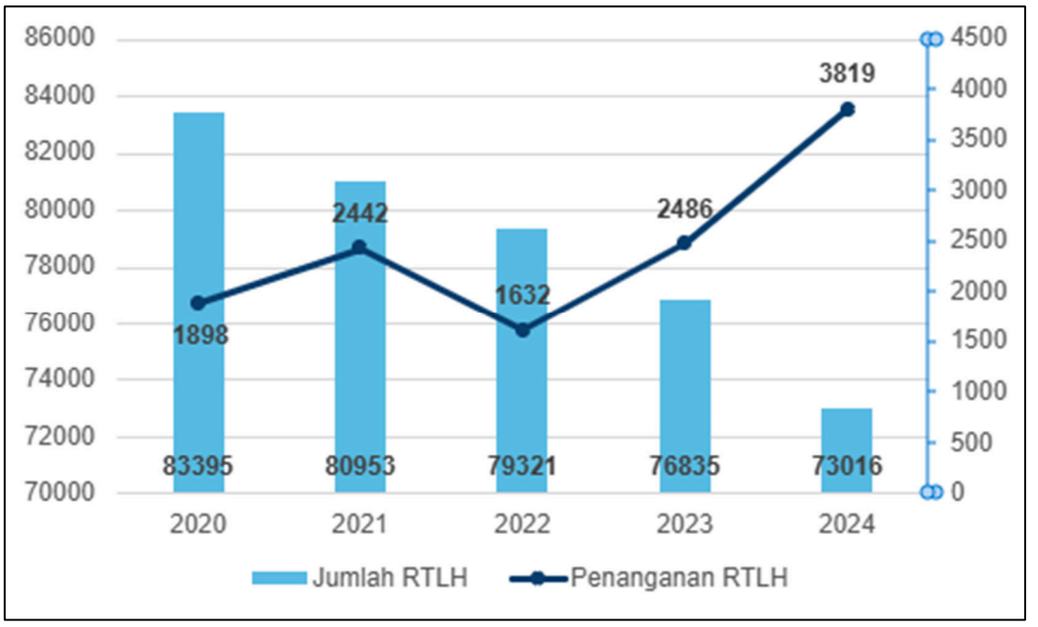

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 87
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan
Realisasi Penanganan Sampai Dengan Tahun 2024

Seperti terlihat pada tabel dibawah ini, realisasi penanganan RTLH di Kabupaten Banyumas dari 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini merupakan hasil kolaborasi penanganan RTLH dari berbagai kegiatan yang bersumber dari beberapa pihak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 23
Realisasi Penanganan RTLH Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan	Jumlah Penanganan RTLH (unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	APBD Kabupaten	-	347	231	135	1387
2	APBD Provinsi	468	487	491	770	761
3	RTSTLH	-	799	301	-	-
4	BSPS	1.230	420	485	1.234	1.282
5	DAK Perumahan	195	139	-	-	-
6.	BAZNAS KABUPATEN	-	-	48	124	75
	BAZNAS PROVINSI	-	-	-	40	47
	BAZNAS RI	-	-	-	-	4
7	Dana Desa	-	243	66	72	130

No.	Kegiatan	Jumlah Penanganan RTLH (unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	CSR	5	2	3	100	133
9	LAZIZNU		5	7	-	
10	Filantropi/OPD	-	-		11	-
Jumlah		1.898	2.442	1.632	2.486	3.819

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2024

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan. RTLH menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan oleh karena itu semakin besar penanganan RTLH maka akan penurunan angka kemiskinan akan semakin besar. Untuk penganggaran yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 24
Anggaran Penanganan RTLH dari tahun 2020 – 2024

	Kegiatan	Anggaran (dalam Rp. Jutaan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	APBD Kabupaten	-	3.470,0	3.465,0	2.025	20.805
2	APBD Provinsi	4.680,0	5.796,0	5.616,0	15.400	15.220
3	RTSTLH	-	11.985,0	4.530,0	-	-
4	BSPS	21.525,0	8.400,0	9.700,0	24.680	25.640
5	DAK Perumahan	3.412,5	2.432,5	-	-	-
6.	BAZNAS KABUPATEN	-	-	-	1.860	1.148
	BAZNAS PROVINSI	-	-	-	720	868
7	Dana Desa				720	1.020
8	CSR					1.142
9	Filantropi/OPD				165	-
Jumlah		29.617,5	32.083	23.311	45.570	64.350

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2024

2.3.6.6. Penataan Ruang

Potensi investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Banyumas harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ada di Kabupaten Banyumas, untuk saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas sedang dalam tahap revisi yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Revisi RTRW yang sekarang sudah diajukan ke

Kementerian ATR/BPN dan menunggu persetujuan dari kementerian ATR/BPN, dalam revisi RTRW yang terbaru pola ruang Kabupaten Banyumas terdiri atas: Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Tanaman Pangan, dengan adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Banyumas dapat menarik para investor dalam melakukan investasi dikarenakan dapat memberikan kepastian lokasi yang tepat dan sesuai untuk melakukan investasi dan memberikan kemudahan dan mempercepat dalam melakukan perizinan

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Banyumas sampai Tahun 2025 yang sudah ditetapkan dengan Perbup dan Perda, yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto yang sudah di tetapkan dengan Perda No 6 Tahun 2019 yang saat ini baru dalam tahap revisi, RDTR Kawasan Perkotaan yang sudah ditetapkan dengan Perbup No 4 Tahun 2023, RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas yang sudah ditetapkan dengan Perbup No 9 Tahun 2023, dan untuk bebedrapa RDTR sedang dalam tahap penyusunan, yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Ajibarang, RDTR Perkotaan Ajibarang, RDTR Perkotaan Sumpiuh, dan RDTR Kawasan Baturraden

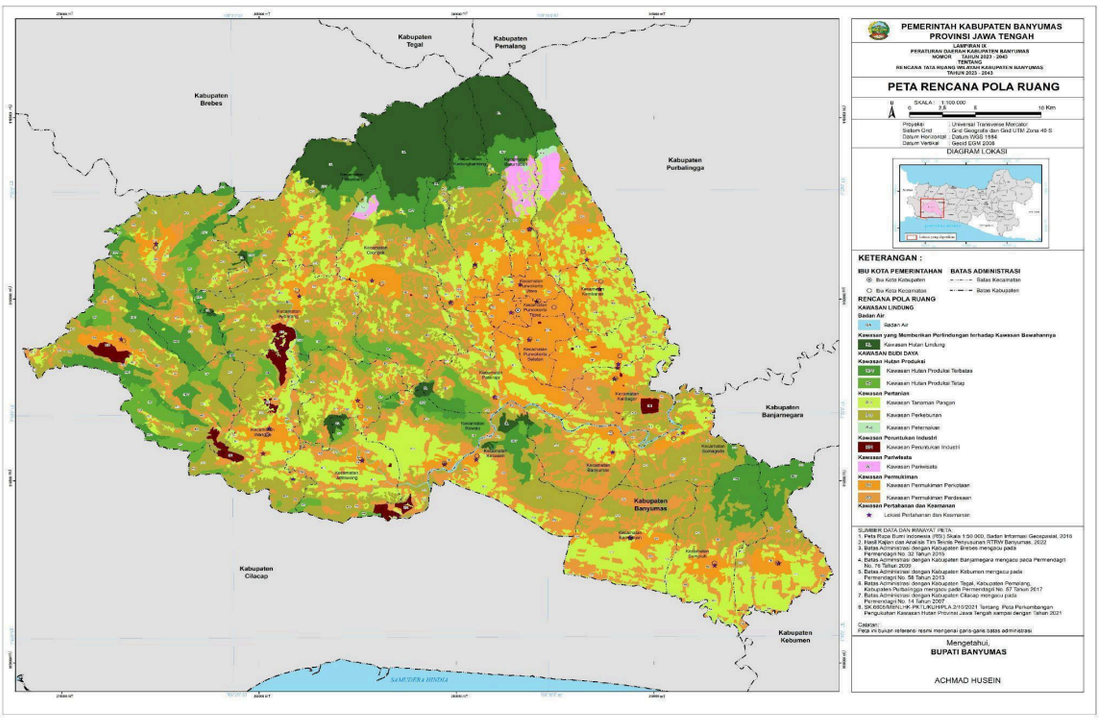

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 88
Peta Pola Ruang

2.3.6.7. Pengembangan Wilayah berbasis Produk Unggulan Daerah

Pemerataan pengembangan wilayah untuk mendorong berkembangnya perkotaan, perdesaan, dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Banyumas, dapat dilakukan melalui pengembangan pada sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sektor utama di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta sektor Transportasi dan Pergudangan.

Share PDRB terbesar di Kabupaten Banyumas adalah pada sektor Industri Pengolahan sebesar 25,37% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 26,4% pada tahun 2024, sedangkan share PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 12,45% menurun hingga 11,16% pada tahun 2024. Share PDRB pada sektor Jasa pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya dengan angka yang fluktuatif dari tahun 2020 sebesar 8,43 dan 7,86% di tahun 2024.

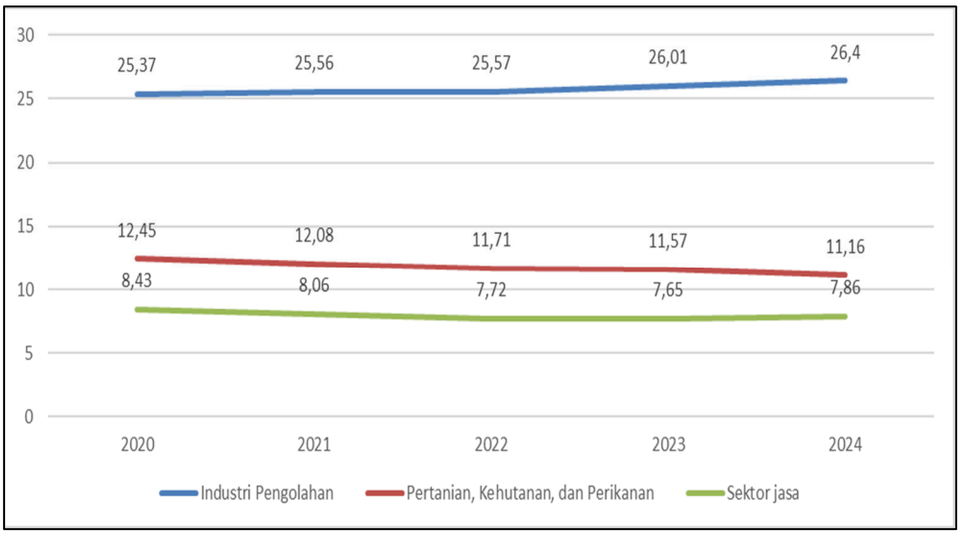

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 2. 89
Share PDRB Terbesar Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 451.171 penduduk atau 48,79 persen, kemudian sektor industri pengolahan sebanyak 294.057 penduduk atau 31,80 persen, dan sektor pertanian dalam arti luas baik usaha on-farm (kegiatan usaha pertanian) dan off-farm (pengolahan hasil pertanian) serta usaha lanjutan pemasaran hasil pertanian menjadi andalan bagi penyerapan tenaga kerja sebanyak 179.529 penduduk atau 19,41 persen.

Hasil analisis Location Quotient (LQ), shift–share, dan kontribusi sektoral pada PDRB Kabupaten Banyumas harga konstan dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah serta kesesuaian dengan penentuan kriteria Produk Unggulan Daerah (PUD) pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka Kabupaten Banyumas memiliki potensi Produk Unggulan Daerah yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 6 produk, yaitu Gula Kelapa, Durian, Kayu Olahan, Minyak Atsiri, Kopi dan Susu Kambing Perah.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dari hasil pertanian dan industri ini, diharapkan sebagai pengembangan produk yang potensial mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong untuk mampu memasuki pasar global, bersifat padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja di pedesaan, serta diproduksi berdasarkan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar) dan bakat masyarakat, sehingga diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah, khususnya bagi wilayah pengembangan PUD dan masyarakat setempat. Wilayah potensial pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut.

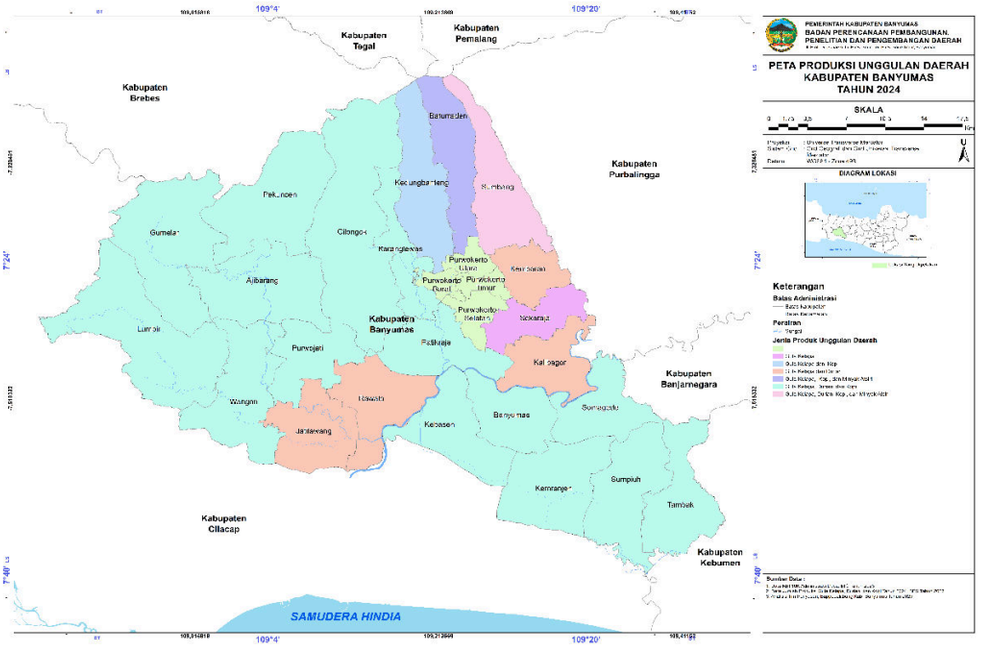

Gambar 2. 90
Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Daerah
di Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Produktivitas komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan yang merupakan bahan baku Produk Unggulan Daerah cenderung lambat atau stagnan peningkatannya bahkan untuk komoditas durian mengalami penurunan, dapat dilihat pada gambar berikut.

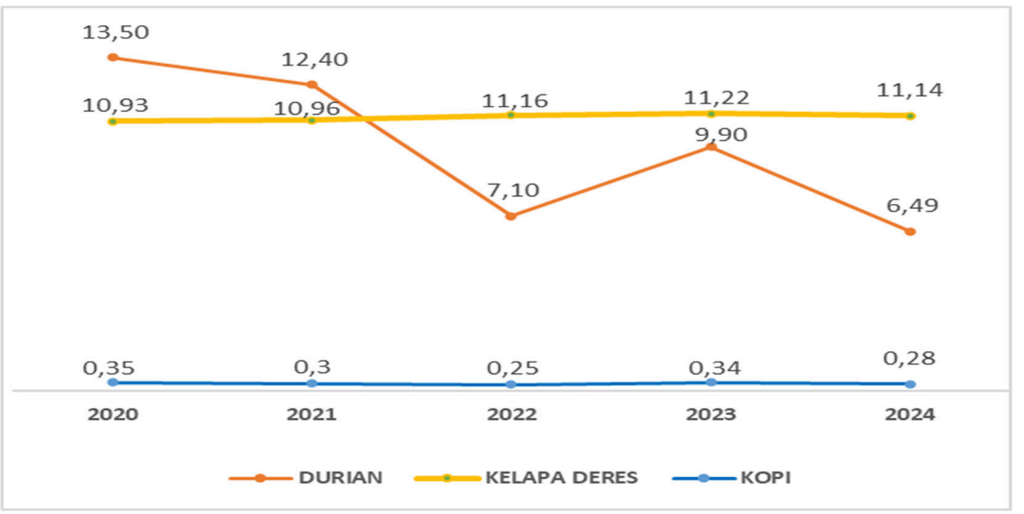

Sumber: Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 91
Produktivitas Komoditas Durian, Kelapa dan Kopi di wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Gambaran kondisi masing-masing produk unggulan daerah adalah sebagai berikut :

1) Produk Olahan Gula Kelapa

Sentra gula kelapa tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, kecuali di wilayah perkotaan Purwokerto. Gula kelapa tersedia dalam bentuk cetak dan kristal. Saat ini telah dikembangkan gula kelapa dalam bentuk cair. Produksi gula kelapa di Kabupaten Banyumas cenderung meningkat. Banyumas menyumbang devisa terbesar untuk ekspor gula kelapa secara nasional. Perlu upaya untuk menjadikan gula kelapa yang memiliki cita rasa khas ini sebagai komoditas indikasi geografis Banyumas.

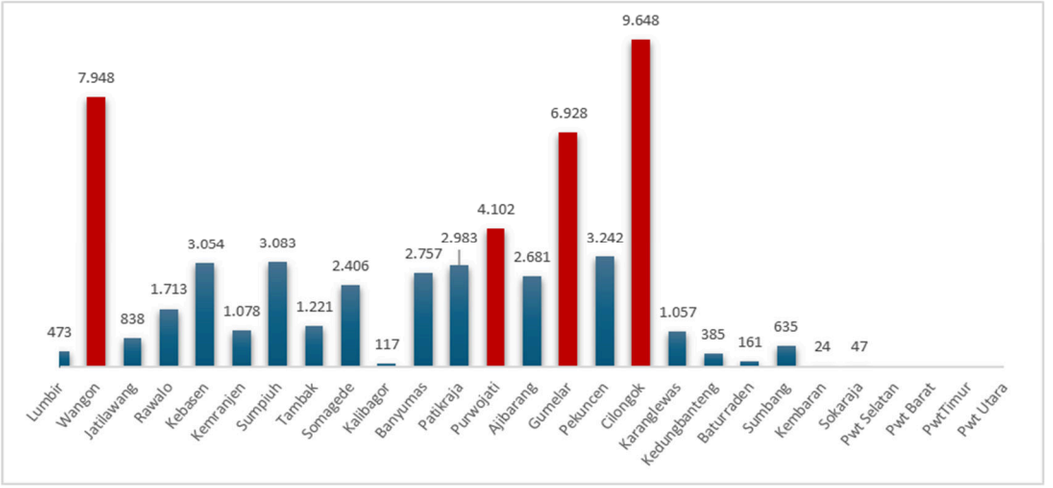

Sumber: Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 92
Produksi Gula Kelapa per Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas (Ton) Rata-rata 5 tahun Tahun 2020-2024

Produksi gula kelapa di Kabupaten Banyumas selama lima tahun dari tahun 2020-2024 mempunyai rata-rata produksi sekitar 56,26 Ton, sedangkan rata-rata produksi gula kelapa yang bersertifikat sekitar 49,93 Ton dengan jumlah perusahaan yang telah mengajukan sertifikat organik di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2021-2024 sebanyak 15 perusahaan eksportir dengan luas lahan sekitar 1.533,59 dan jumlah pohon sebanyak 168.894,85 pohon.

2) Komoditas Durian

Beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan sentra komoditas durian yaitu di kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Banyumas dan Kedungbanteng dengan varian durian lokal dan non lokal. Sebagian durian dijual dalam bentuk segar, yang dapat langsung dikonsumsi atau sebagai bahan tambahan kuliner durian (es durian dengan berbagai varian bentuk). Hilirisasi produk durian belum berkembang karena kebutuhan pasar durian segar masih sangat besar dan luas (baru 1 pelaku usaha, dengan produk utama yaitu dodol durian, yang sudah memiliki sertifikasi dan pasar skala nasional-hingga ke Bali, secara rutin, dan sekarang sedang menuju untuk kelayakan produk ekspor).

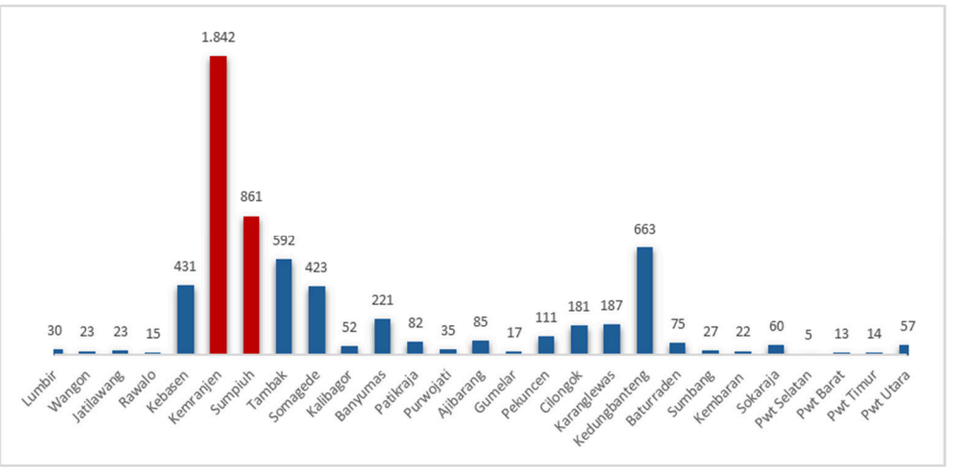

Sumber : Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 93
Produksi Durian di Kabupaten Banyumas per Kecamatan Rata-rata 5 tahun tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata produksi durian di Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir adalah sekitar 804,15,12 Ton dengan rata-rata produksi terbanyak di Kecamatan Kemranjen yaitu 246,543 Ton. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kerjasama dengan Balai penelitian tanaman buah

tropika (Balitbu Tropika) Solok Sumatera Barat dalam rangka pelepasan varietas durian dengan nama varietas Durian Kromo Banyumas.

3) Produk Kayu olahan

Produk kayu olahan di Kabupaten Banyumas berupa papan, partikel, kayu lapis, dan lainnya. Secara umum, kayu olahan diproduksi oleh pelaku usaha kecil yang secara umum di Banyumas sudah mapan atau oleh industri yang skala nya lebih besar lagi.

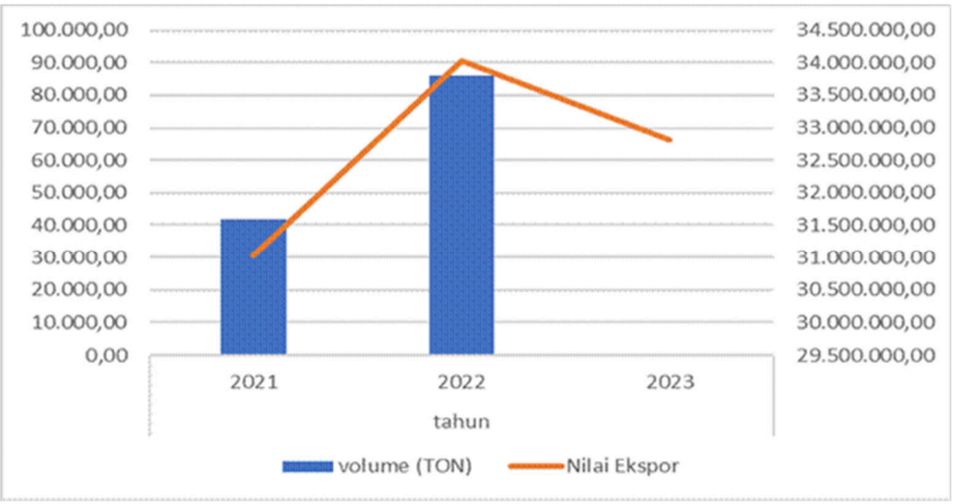

Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2024

Grafik 2. 94
Produksi Kayu Olahan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

Perusahaan Kayu Olahan yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu CV Karya Purabaya; PT Ajiwana Tangguh Nusantara; PT Pundi Indokayu Industri; PT Girisantosa Adiraya; PT Cebong Kayuindo; PT Kemilau Anugerah Sejati; dan PT Albasia Cipta Sejahtera.

4) Produk Olahan Minyak atsiri

Hanya ada beberapa pelaku usaha penyulingan minyak atsiri yg saat ini masih eksis di banyumas (cengkeh dan nilam, cengkeh dari banyumas, nilam sebagian besar bukan dari banyumas). Minyak atsiri terbesar disumbangkan oleh industri yaitu PT Indesso, namun asal minyak nya tidak dari Banyumas, hanya lokasi pabriknya saja. Hingga saat ini, kapulaga masih dijual dalam bentuk kapulaga kering, begitu juga cengkeh (khususnya bunga cengkeh). Jahe diolah secara sederhana menjadi beberapa produk seperti sirup jahe dan serbuk jahe instan oleh beberapa pelaku usaha di beberapa wilayah seperti kecamatan Sumbang.

Perusahaan Minyak Atsiri yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu:

a. PT Indesso Aroma;

b. PT Takasago Indonesia;

c. CV Aromatik Jaya;

d. CV Xoso (lokasi pabrik di Jawa Barat).

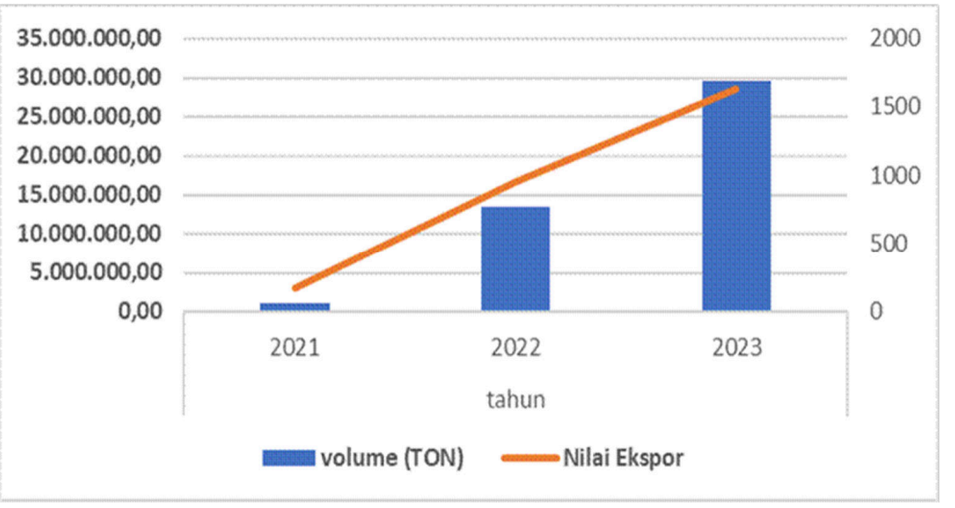

Sumber: Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. 95
Produksi Minyak Atsiri di Kabupaten Banyumas
Tahun 2021-2023

5) Komoditas dan Produk Olahan Kopi

Beberapa wilayah sentra produk olahan kopi ada di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas antara lain kecamatan Tambak, Pekuncen, Karanglewas, Gumelar dan Ajibarang. Varian kopi yang berkembang di Kabupaten Banyumas adalah varian robusta dan arabica. Hingga saat ini, sebagian kopi dijual dalam bentuk green bean. Belum ada pelaku usaha Banyumas yang memproduksi roasted bean atau kopi bubuk menggunakan peralatan yang representatif untuk menghasilkan kopi dengan kualitas seduhan yang baik. Sebagian besar pengolahan kopi sangrai dan kopi bubuk masih dilaksanakan secara tradisional. Produksi kopi masih terbatas sehingga penjualan kopi banyumas, jangkauan pasarnya juga terbatas. Maraknya kedai kopi di Banyumas menjadi peluang untuk pengembangan lebih lanjut riset dan inovasi kopi dari hulu ke hilir.

Produktivitas komoditas kopi di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari tahun 2020 (0,35 ton/ha) sampai dengan tahun 2022 (0,25 ton/ha), dan meningkat pada tahun 2023 (0,34 ton/ha), namun kembali menurun di tahun 2024 menjadi sebesar 0,28 ton/ha.

Pengembangan produksi komoditas Kopi di Banyumas tersebar di 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas, dengan produksi tertinggi di kecamatan Cilongok, dapat dilihat pada gambar berikut.

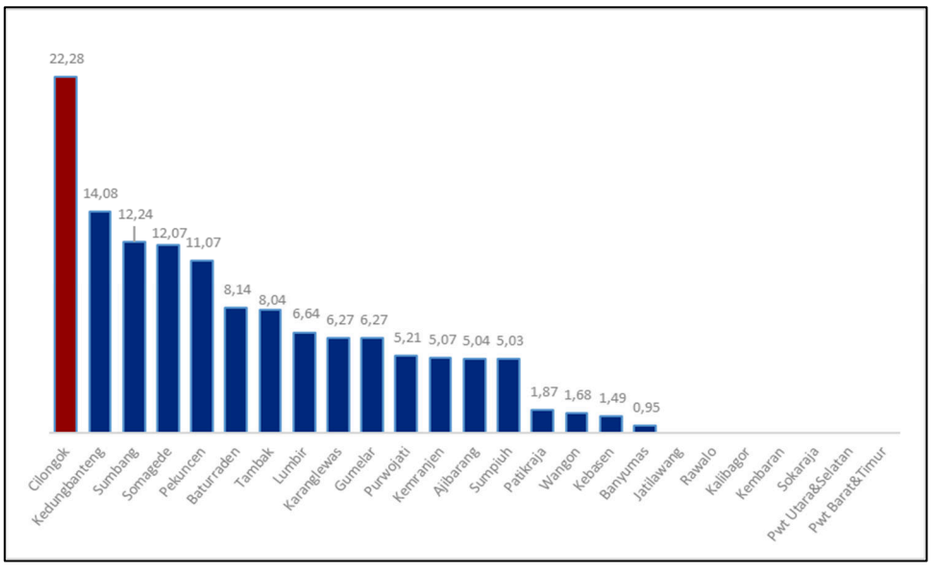

Sumber: Banyumas dalam Angka 2024

Gambar 2. 96
Produksi Komoditas Kopi (Ton)
Di Kabupaten Banyumas dan per Kecamatan Tahun 2024

Sedangkan produktivitas per kecamatan cukup beragam dari yang terendah sebesar 0,2 Ton/Ha di kecamatan Gumelar sampai yang tertinggi sebesar 0,57 Ton/Ha di kecamatan Banyumas, dapat dilihat pada gambar berikut.

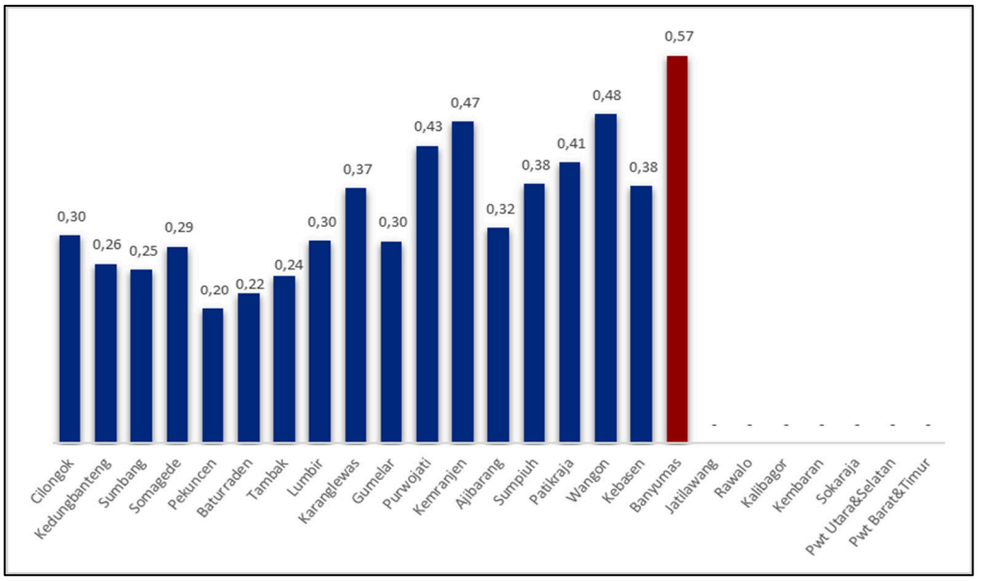

Sumber: Banyumas dalam Angka 2024

Gambar 2. 97
Produktivitas Komoditas Kopi (Ton/Ha)
Di Kabupaten Banyumas dan per Kecamatan Tahun 2024

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2020–

2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2024 inflasi Kabupaten Banyumas sebesar 1,51% lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 2,61%. Inflasi merupakan peningkatan harga barang/jasa secara konstan dan terus menerus, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya harga pada beberapa komoditas pangan strategis seperti beras dan telur ayam ras serta transportasi. Permintaan masyarakat yang tinggi mengakibatkan ketidakstabilan harga di pasar. Tingginya permintaan menyebabkan tinggi harga di pasar dan mendorong inflasi semakin tinggi. Di tengah ketidakpastian global, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya mengendalikan inflasi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan gerakan pangan murah, rapat koordinasi rutin pemantauan inflasi, operasi pasar, bantuan sosial untuk IKM, PKL, BLT BBM untuk ojol, opang, supir angkutan kota, angkutan desa dan perbaikan RTLH. Inflasi Kabupaten Banyumas (%) Tahun 2020–2024 disajikan dalam gambar berikut:

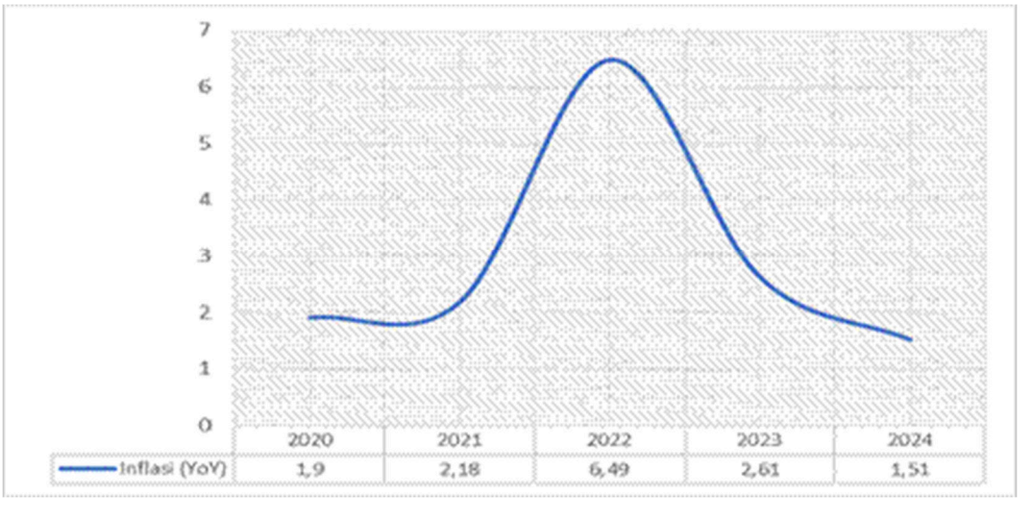

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 - 2025

Gambar 2. 98
Inflasi Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024 (%)

2.3.7.2. Disparitas Harga

Disparitas harga pangan, dapat dilihat dari nilai koefisien variasi harga yang menunjukkan stabilitas harga di suatu wilayah dengan menghitung 42 komoditas pangan strategis. Suatu daerah dinyatakan stabil harga komoditas pangannya jika di koefisien variasi harga kurang dari 10%. Pada tahun 2024 nilai Koefisien Variasi Harga Kabupaten Banyumas mencapai 7,49%. Komoditas dengan nilai koefisien harga tertinggi adalah cabai rawit merah (36%), cabai merah keriting (37%) dan bawang merah (25%).

Disparitas harga cabai dan bawang merah yang tinggi disebabkan keterjangkauan komoditas tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Banyumas dan produksi komoditas pangan di wilayah sendiri, dimana di wilayah yang infrastruktur jalannya tidak baik (terpencil) atau tidak adanya produksi komoditas pangan tersebut di wilayah sendiri, menyebabkan harga cenderung menjadi lebih mahal.

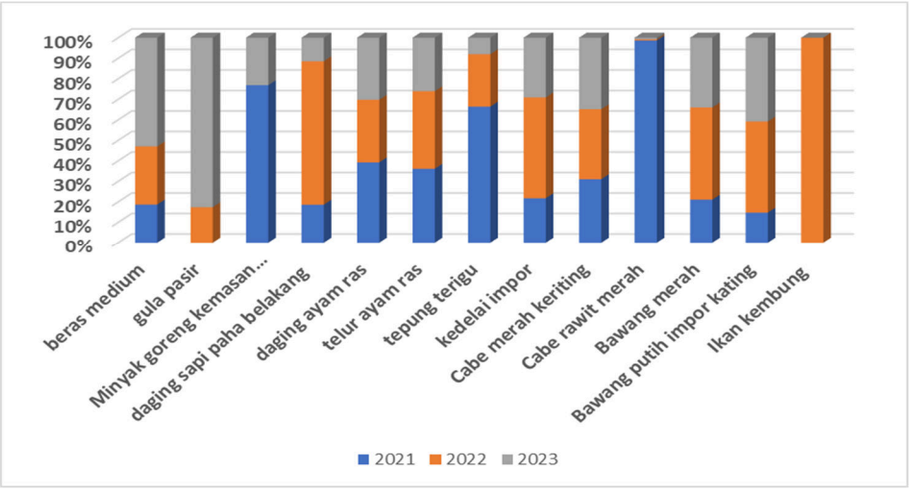

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 - 2025

Gambar 2. 99
Nilai koefisien harga Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024 (%)

2.3.7.3. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan asli daerah. Besaran penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Pada tahun 2020 nilainya turun menjadi 0,39 dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 0,44. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

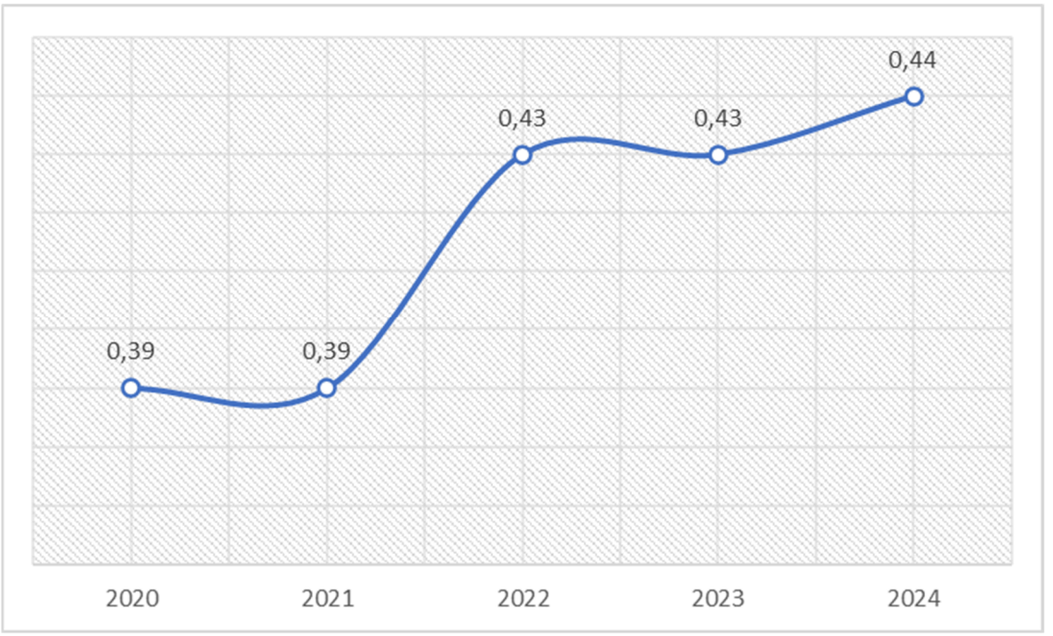

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Gambar 2. 100
Rasio Pajak Terhadap PDRB (2020-2024)

Guna menaikkan rasio pajak daerah diperlukan upaya untuk peningkatan kinerja pajak daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pajak, dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

2.4.1.1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas dinilai melalui Indek RB. Penilaian RB tahun 2023-2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020-2022 karena berbeda dalam perhitungan. Indek RB Kabupaten Banyumas tahun 2024 meningkat menjadi 85,68 dengan kategori A (Bobot 120) dari nilai indeks tahun sebelumnya sebesar 76,9 dengan kategori B, namun masih jauh lebih rendah dari nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab lain di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonogiri yang menunjukkan peningkatan signifikan, dengan total nilai 87,30 dengan kategori A serta Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 tertinggi nasional, dengan perolehan nilai 100,67 dengan nilai 86,39 untuk RB General dan nilai 14,28 untuk RB tematik.

Peningkatan Nilai RB didukung oleh peningkatan nilai komponen RB general 76,63 (bobot 100) pada tahun 2024 dari sebelumnya 66,92 pada tahun 2023, namun nilai komponen RB Tematik tahun 2024 (bobot 20) sedikit menurun menjadi 9,05 dari tahun sebelumnya sebesar 9,98.

Capaian Nilai RB dari tahun 2020-2024, dengan komponen pengungkit dan komponen hasil di tahun 2020-2022 dan komponen RB General dan RB Tematik pada tahun 2023-2024 dapat dilihat sebagai berikut :

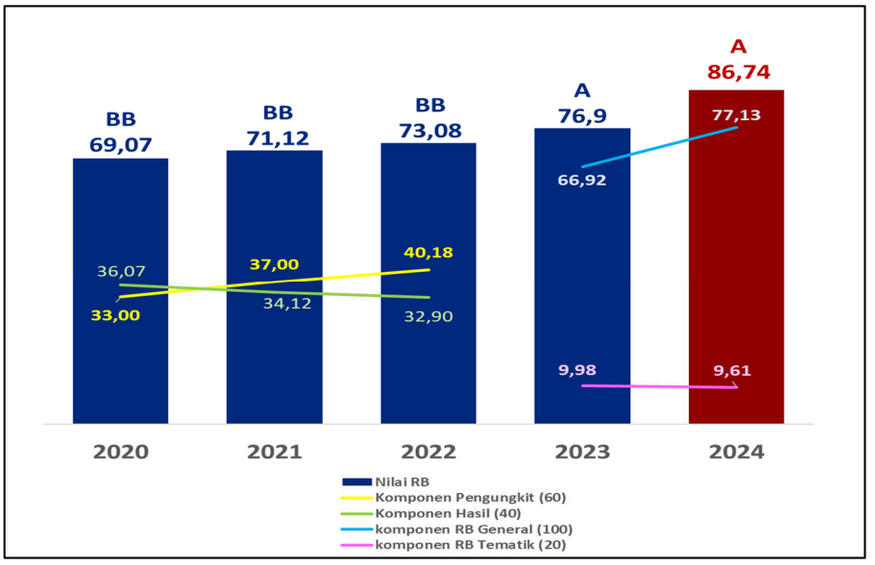

Sumber : Kemenpan RB, 2020-2024

Gambar 2. 101
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah dibentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/363 Tahun 2018 serta Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati Banyumas No 060/544/Tahun 2022.

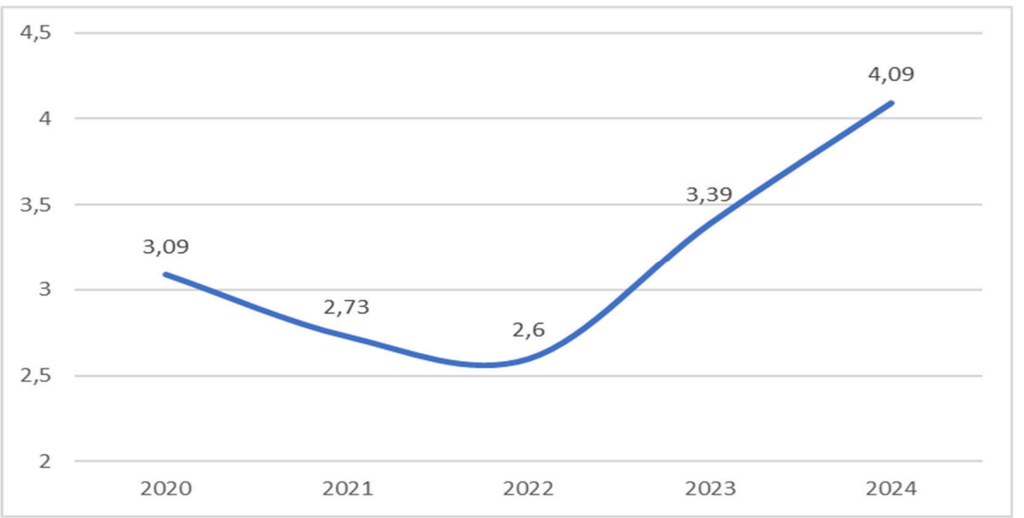

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2. 102
Perkembangan SPBE Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Capaian SPBE di Kabupaten Banyumas berkategori "Sangat Baik" (indeks 4,09), namun jika dibandingkan capaian SPBE Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapatkan kategori "Memuaskan", 21 Kabupaten/Kota mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan sisanya berkategori "Baik". Sehingga capaian SPBE di Kabupaten Banyumas belum optimal dikhawatirkan akan membuat tujuan-tujuan dari penerapan SPBE tidak terwujud.

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dalam penilaian Reformasi Birokrasi salah satu komponen yang dinilai adalah indeks kualitas pelayanan publik yang masuk dalam Komponen Hasil pada hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan capaian yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 namun menurun di tahun 2023.

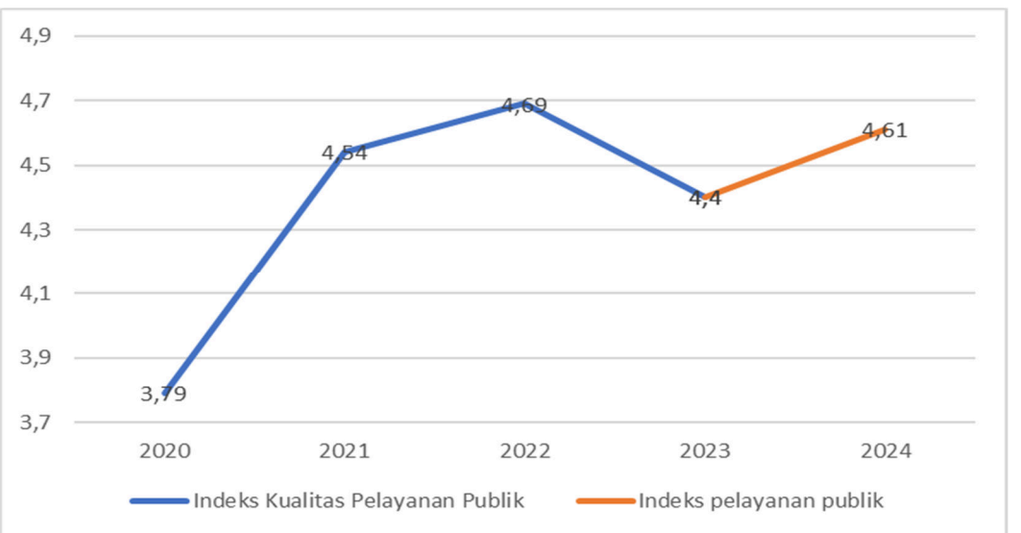

Sumber : Kemenpan RB, 2024

Gambar 2. 103
Capaian Kinerja Pelayanan Publik
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

2.4.1.4. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur terhadap risiko korupsi di instansi publik, dengan tujuan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. SPI tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Hasil survey dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing Perangkat Daerah dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks diantara 73-77) dan Terjaga (indeks 78-100). Dengan partisipasi yang jujur dan objektif dari para responden, menghasilkan nilai SPI yang dapat memberikan gambaran yang akurat dan berarti bagi upaya pemberantasan korupsi.

Indeks SPI memetakan risiko korupsi, menilai efektivitas upaya pemberantasan korupsi, dan mengukur tingkat integritas instansi. hasil penilaian SPI Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebesar 77,55% masuk ke dalam kategori Waspada, lebih rendah dari nilai SPI Kabupaten Cilacap sebesar 77,58% (Waspada) dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 79,47% (Terjaga).

Tingkat risiko korupsi dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari Skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari SPI pada gambar berikut.

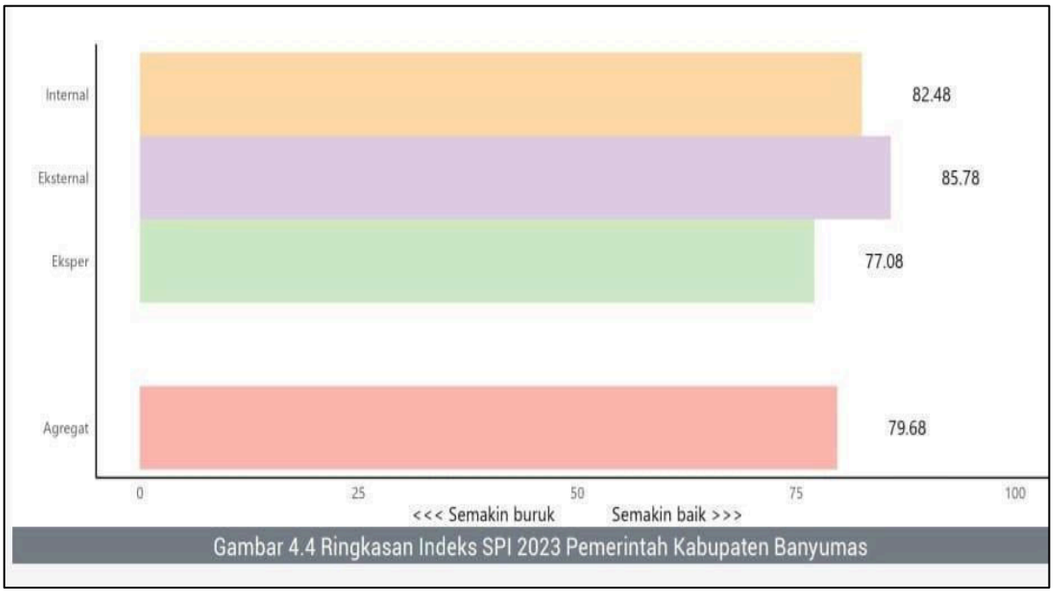

Sumber : KPK, 2024

Gambar 2. 104
Capaian Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)
Kabupaten Banyumas tahun 2023 hasil penilaian tahun 2024

Berdasarkan data diatas, skor agregat internal (pegawai) yaitu sebesar 82,48 dan eksternal (pengguna layanan) yaitu sebesar 85,78 dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Banyumas tahun 2024 menunjukkan persepsi yang cukup baik, namun belum optimalnya tingkat risiko korupsi dan kurang efektivitas upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh skor agregat (79,68) yang menunjukkan tingkat risiko korupsi dan keberhasilan upaya pencegahan korupsi serta skor eksper (77,08) yang memberikan gambaran tentang persepsi dan penilaian dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai isu-isu terkait integritas dan korupsi, masih belum menunjukkan nilai yang cukup baik.

Untuk dapat mengukur implementasi integritas Pemerintah Daerah, maka survei ini belum cukup merepresentasikan implementasi integritas di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu ditambahkan pengukuran lain yaitu Tingkat keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.

2.4.1.5. Nilai SAKIP

Dalam upaya mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta mengetahui tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka dilakukan evaluasi SAKIP oleh Menpan RB setiap tahunnya. Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Banyumas menggambarkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi hasil. Nilai SAKIP tahun 2019-2021 dan 2022-2024 tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan sistem komponen penilaiannya.

Hasil penilaian SAKIP Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

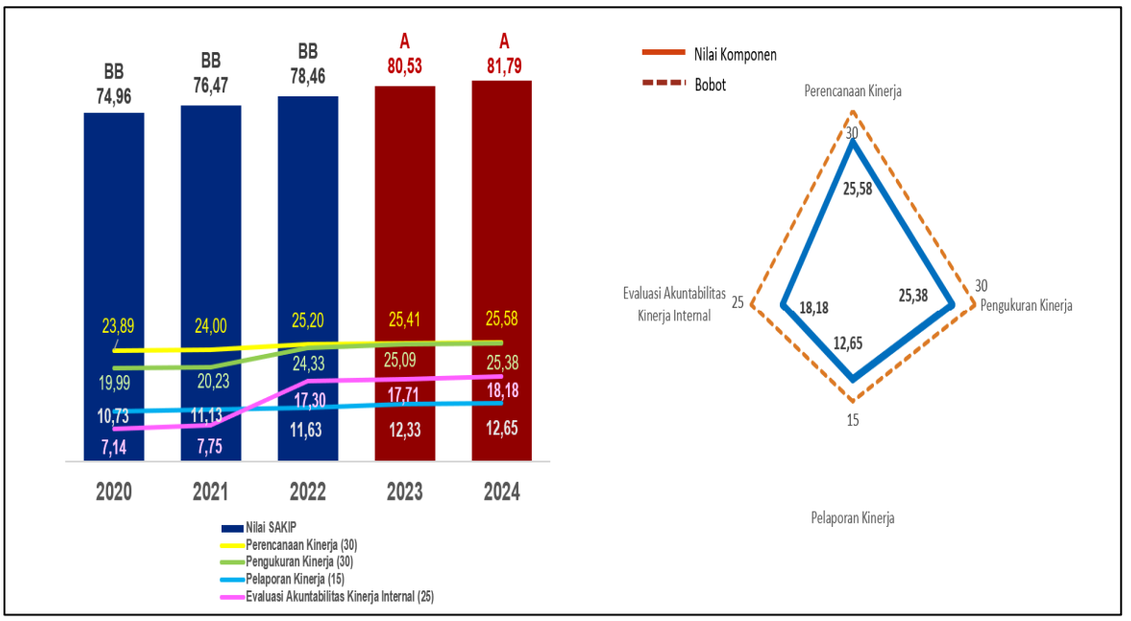

Sumber: diolah Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2025

Gambar 2. 105
Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Nilai SAKIP Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan nilai yang selalu meningkat dan tertinggi di Jawa Tengah sebesar 81,79 dengan predikat "A" atau memuaskan, namun masih belum lebih unggul dari Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya yang mendapatkan nilai SAKIP AA. Hal ini disebabkan belum optimalnya kualitas 4 komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja (25,58) dan pengukuran kinerja (25,38) dari bobot maksimal masing-masing komponen 30, pelaporan kinerja (12,65) dari bobot maksimal 15 dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (18,18) dari bobot maksimal 25.

2.4.1.6. Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah

Tabel 2. 25
Status Opini BPK Tahun 2020 – 2024

Tahun	Status Opini BPK
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian
2024	Wajar Tanpa Pengecualian

Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, meliputi penilaian terhadap pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan; pemeriksaan kinerja meliputi atas aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

2.4.1.7. Nilai Maturitas SPIP

Selain penilaian SAKIP yang mengukur implementasi akuntabilitas pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, juga dilakukan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah melalui penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komponen penilaian maturitas SPIP meliputi nilai SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian maturitas SPIP meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan. Data nilai maturitas penyelenggaraan SPIP secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

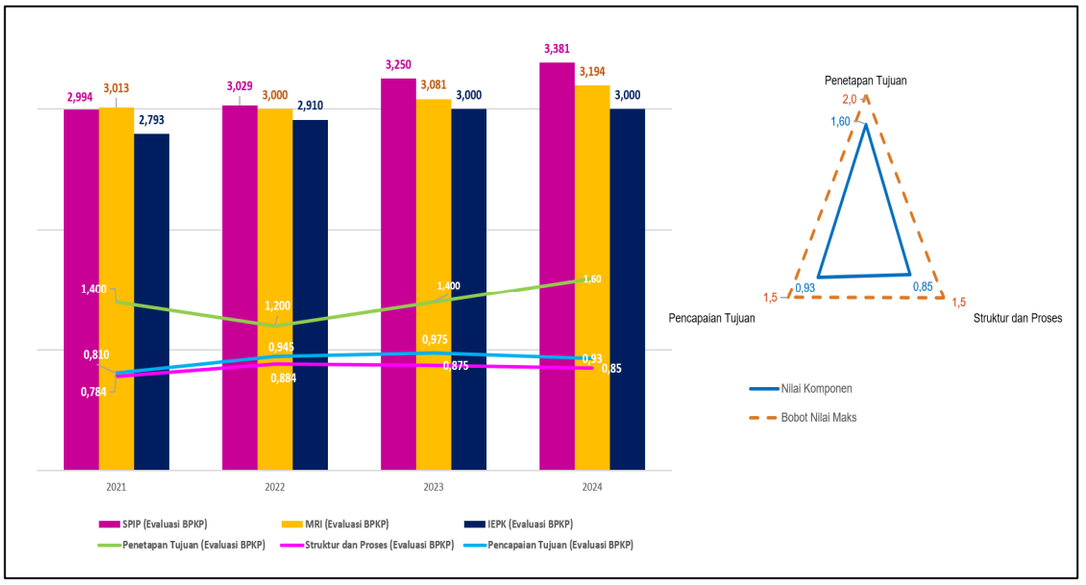

Sumber: data diolah Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2025

Gambar 2. 106
Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024

Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Banyumas dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yaitu 3,029 pada tahun 2022 menjadi 3,381 pada tahun 2024 dengan kategori berada pada level 3.

Meskipun nilai SPIP Kabupaten Banyumas sudah cukup tinggi pada angka 3,381, namun belum optimal mencapai nilai 4, dikarenakan masih belum optimalnya komponen pendukungnya yaitu MRI (nilai 3,194), dan IEPK (nilai 3,0) dan unsur-unsur SPIP yang meliputi penetapan tujuan (nilai 1,6 dari bobot 2), struktur proses (0,85 dari bobot 1,5), dan pencapaian tujuan (nilai 0,93 dari bobot 1,5).

2.4.1.8. Indeks Reformasi Hukum

Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan birokrasi yang kapabel diperlukan pelaksanaan reformasi hukum yang berkualitas. Kualitas reformasi hukum tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Berdasarkan hasil penilaian atas Indeks Reformasi Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai IRH Kabupaten Banyumas adalah 97,66 dengan kategori AA (Istimewa). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IRH Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari 57,55 (Kategori CC/ Cukup) pada tahun 2023 menjadi 97,66 (Kategori AA/ Istimewa) pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun masih terdapat Variabel penilaian yang perlu ditingkatkan yaitu Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (nilai 19,9 dari bobot 25), dan Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas (nilai 18,4 dari bobot 25). Selain itu, jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banyumas tahun 2024 masih lebih rendah dari provinsi Jawa Tengah (98,28). Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banyumas yang lebih optimal.

2.4.1.9. Indeks Pemerintah Digital

Indeks Pemerintah Digital adalah indikator untuk menilai sejauh mana suatu pemerintahan telah menerapkan dan memanfaatkan

teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam indikator ini, terdapat 9 aspek dan 35 indikator.

2.4.1.10. Satu Data Indonesia Kabupaten Banyumas.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Banyumas dimulai sejak tahun 2021 melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi internal Sekretariat SDI terhadap hasil asesmen dalam kurun waktu dua tahun, maka asesmen tersebut membutuhkan perincian dan perbaikan metodologi sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara optimal di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2023.

Table 2. 26
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai	
			Kabupaten Banyumas	Provinsi Jawa Tengah
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	87.55	89.72
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	35.65	60.31
3	Domain Data Leadership	23%	67.39	43.48
Indeks Satu Data Indonesia			**60.60**	**66.44**

Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS

Seperti terlihat pada tabel diatas, Indeks SDI Kabupatan Banyumas masih berada di bawah Jawa Tengah. Dimana hanya pada Domain Data dan Leadership yang angkanya lebih besar dibanding Jawa Tengah. Oleh karena itu, masih perlu ditingkatkan penyelenggaraan satu data indonesia pada domain Penyelenggaraan SDI.

Table 2. 27
Nilai Indeks Aspek

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	91.73
2	Aspek Kelembagaan	17%	83.36
3	Aspek Perencanaan	11%	31.82
4	Aspek Pengumpulan	6%	37.00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	25.17
6	Aspek Penyebarluasan	8%	63.50
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	53.57
8	Aspek Pembiayaan	9%	88.89

Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas secara garis besar sudah diatas rata-rata Nilai Kab/Kota di Indonesia, namun masih terdapat aspek yang perlu peningkatan yaitu aspek Perencanaan. Pada tahun 2025, Tim Satu Data Kabupaten Banyumas merencanakan untuk melakukan desk penetapan daftar data dengan seluruh Perangkat Daerah sehingga dapat menghasilkan Perencanaan data yang lebih efektif.

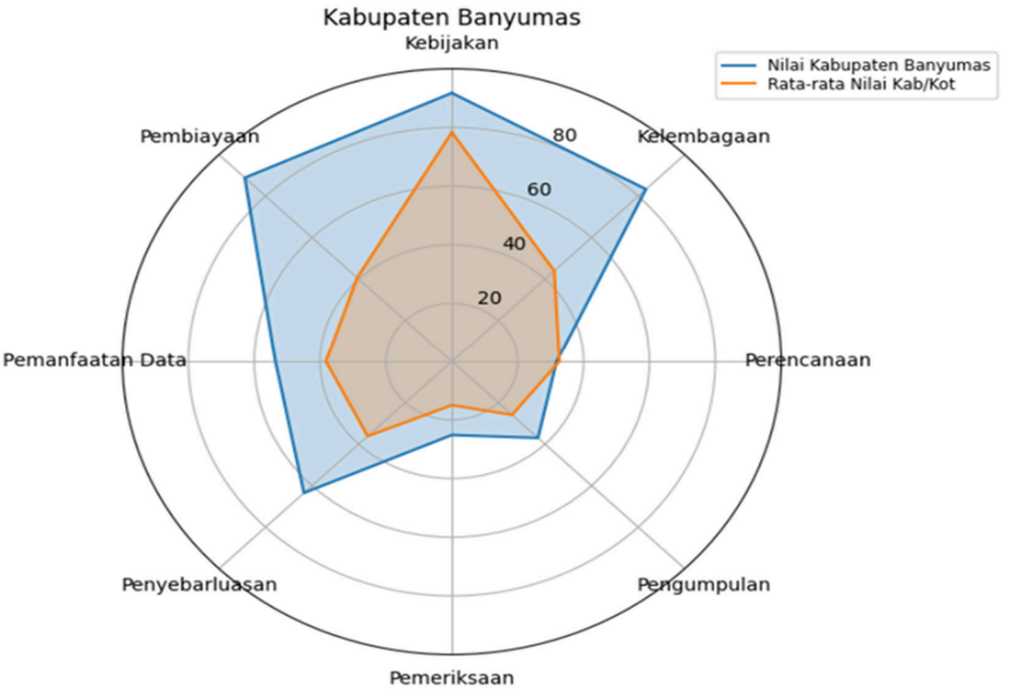

Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS

Gambar 2. 107
Hasil Penilaian Evaluasi SDI

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kestabilan keamanan diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan devisa sebagai sumber pendapatan daerah.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Perkembangan kriminalitas selama Tahun 2020-2024 adalah terlihat pada tabel berikut.

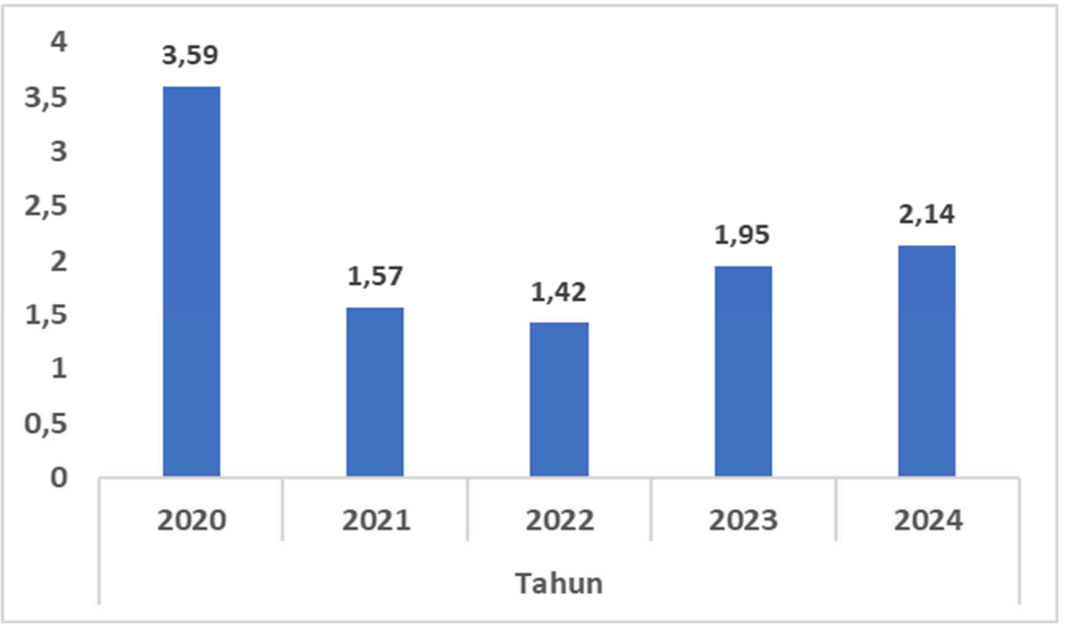

Sumber: Polresta Banyumas diolah, 2025

Gambar 2. 108
Jumlah Kriminalitas (per 10.000 penduduk)
di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Angka kriminalitas Kabupaten Banyumas untuk Tahun 2024 mengalami kenaikan dari 1,95 per 10.000 penduduk menjadi 2,14 per 10.000 penduduk, ini menunjukkan bahwa kondusifitas di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dan harapannya kondisi ini dapat segera ditanggulangi sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banyumas semakin baik. Selain itu, kasus kriminalitas yang tertangani juga mengalami penurunan dari 95,52% menjadi 81,01%. Penanganan kriminalitas diharapkan dapat dimaksimalkan sehingga keseluruhan kasus kriminalitas tertangani demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banyumas.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan IDSD ini adalah untuk mengukur pencapaian aktivitas di daerah yang dapat menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan mandiri. Skor IDSD Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 28
Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cilacap	3,2616	3,077	3,22	3,23	3,55
2	Banyumas	3,5333	3,543	3,43	3,58	4,01
3	Purbalingga	3,3297	3,53	2,90	3,06	3,61
4	Jawa Tengah	4,5268	3,931	3,63	3,89	3,84
5	Nasional	N/A	N/A	3,26	3,44	3,43

Sumber: BRIN, 2024

Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan skor 4,01. Skor Kabupaten Banyumas menempati ranking ke-7 (ketujuh) pada Skor Indeks Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan rangking Skor Indeks Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah menempati ranking ke-2 (kedua) setelah Kabupaten Sukoharjo. Akan tetapi, Hal ini disebabkan masih rendahnya nilai indeks pilar yang rendah berubah dari sebelumnya pada Pilar 2 (Infrastruktur) dan Pilar 11 (Dinamisme Bisnis) menjadi Pilar 9 yaitu Sistem Keuangan.

Tabel 2. 29
Nilai Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. JAWA TENGAH	4,71	4,06	3,89	4,25	4,15	3,88	2,02	3,02	2,23	5,00	4,23	4,64	3,84
RATA-RATA KAB/KOTA	4,79	3,62	4,59	3,72	4,19	3,85	3,80	3,19	2,23	4,50	3,91	2,81	3,77
CILACAP	4,67	3,98	4,51	3,48	4,11	3,33	2,03	2,99	1,24	5,00	4,64	2,67	3,55
BANYUMAS	4,81	3,57	4,69	3,80	4,09	3,81	4,03	3,67	2,06	4,78	4,62	4,25	4,01
PURBALINGGA	4,83	2,78	4,49	3,33	4,04	3,68	3,26	3,19	2,22	4,40	4,71	2,38	3,61

2.4.3.2. Kapasitas Fiskal Daerah

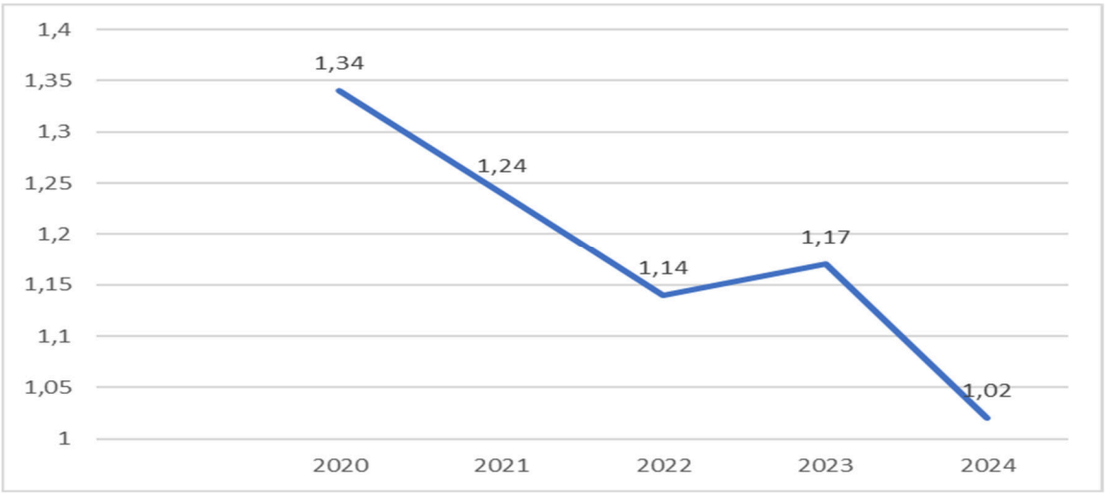

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2025

Gambar 2. 109
Rasio Kapasitas Fiskal
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Berdasarkan Grafik di atas, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 1,02. Berdasarkan rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan No 193/PMK.07/2022, Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori sangat rendah (<1,171). Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Banyumas sangat rendah dikarenakan adanya peningkatan belanja pegawai, masih adanya belanja bunga, adanya kenaikan alokasi belanja dana desa, serta masih adanya cicilan pokok pinjaman daerah (PEN).

2.4.4.Kinerja setiap urusan pemerintah daerah

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**											
1	Indek Pembangunan Manusia IPM	Indeks	73.96	76	75.50	72.13	72.59	73.30	73.96	74.52	98.05	ST
2	Angka Kemiskinan	%	12.53	10.84	10.90	12.53	13.26	12.84	12.53	11.95	89.76	T
3	Tingkat Pengangguran Terbuka TPT	%	6.05	5.9	6.00	6.00	6.05	6.05	6.35	6.18	95.25	ST
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.40	6.1	5.9	-1.65	4	5.86	5.40	5.29	86,72	T
5	Tingkat Kesempatan Kerja	%	93.65	94.35	94.15	95.79	94.00	93.95	93.95	93.82	99.65	ST
6	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA	%	36.08	93.55	93.53	n/a	n/a	n/a	n/a	93.18	99.63	ST
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.26	13.6	13.40	12.85	13.03	13.21	13.26	13.34	99.55	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
8	Indek Pembangunan Gender IPG	Tahun	89.14	90.05	89.45	88.27	88.54	89.15	89.14	89.14*	98.99	ST
9	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	543	620	600	528	518.93	595	542.90	542.90*	87.57	T
10	Usia Harapan Hidup UHH	Tahun	74.2	74.12	73.96	74.05	74.13	74.16	74.20	74.34	100.51	ST
11	Indeks Ketahanan Pangan IKP	Indeks	79.81	83.01	81.13	80,48	79,97	79,02	79,81	80.74	97.27	ST
12	Indeks risiko Bencana IRB	Indeks	122.82	144	152	193.71	164.25	140.18	122.82	109.01	139.44	ST
13	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	Indeks	79.12	85.95	83.43	80.0	81.7	81.0	79.10	81.19	97.32	ST
14	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	Indeks	79.77	83.12	81.48	82.7	80.5	79.5	79.8	82.54	101.3	ST
15	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	Indeks	80.36	80.73	79.14	79.2	78.3	77.2	79.8	79.05	99.89	ST
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.796	1.34	1.36	1.79	1.36	–2.95	0.796	0.605	155.51	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
17	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	%	28.80	0.7	0.60	n/a	n/a	n/a	n/a	0.19	31.67	SR
18	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM	Indeks	39.57	33.5	33	-	-	34.02	52.75	67.88	202.63	ST
19	Indek Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1.78	0.86	1.35	2,25	2,349	1,75	1,78	2.09	45.19	SR
20	Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB	Milyar Rupiah	45396.30	51.924	48.330	39.122	40.687	43.069	45.396	47.796	92.05	ST
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.78	8.08	7.94	7.52	7.63	7.78	7.87	7.91	97.89	ST
B.	**Aspek Daya Saing**											
1	Indek Reformasi Birokrasi IRB	Indeks	76.9	75	73.5	69,07	71,12	73.08	76.9	86,74*	114.24	ST
2	Indeks Daya Saing Daerah IDSD	Indeks	3.58	3.7	3.5	3,533	3,543	3,43	3,58	4.01	108.38	ST
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.65	73	71	67.48	37.33	40.49	65.65	80.1	109.73	ST
4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP	Indeks	4.4	4.65	4.57	n/a	n/a	96.5	3,721	3.26	70.11	S

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP	Nilai	80.53	80	79	74.96	76.47	78.46	80.53	81.79	102.24	ST
6	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	n/a	100	ST
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	Indeks	3.39	3.7	3.3	3.09	2.73	2.60	3.39	4.09	123.94	ST
8	Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	33.15	33.05	36.07	34.12	32.90	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	Nilai	3.25	3.1	3.050	n/a	n/a	3.029	3.25	3.381	110.85	ST
10	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1.93	1.44	1.48	3.59	1.57	1.42	1.95	2.14	51.39	SR
11	Indek daya saing infrastruktur	Indeks	2.55	3.42	3.42	n/a	n/a	2.08	2.55	3.57	104.39	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Indeks	65.3	64.25	64.20	62.27	65.24	63.81	65.31	67.00	104.36	ST
13	Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada IDSD	Indeks	3.64	2.97	2.95	n/a	n/a	2.93	3.64	4.25	143.09	ST
14	Persentase atas pengamanan aset daerah	%	11.05	95	95	n/a	85	86	10,5	171	180	ST
C.	**Aspek Pelayanan Umum**											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.26	13.60	12.88	12.85	13.03	13.21	13.26	13.34	98.09	ST
2	APK PAUD	%	78	63.9	64	77.5	77.75	78.2	78	76.63	119.92	ST
3	APK SMP Sederajat	%	99	103.3	107	85.04	85.34	81.22	86.37	87.35	84.56	T
4	APK SD sederajat	%	100.2	99.5	99.6	106.90	108.61	108.48	108.70	104.41	104.94	ST
5	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	7.78	8.08		7.52	7.63	7.78	7.87	7.91	97.89	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
6	APM PAUD	%		70.7		n/a	n/a	n/a	n/a	75.51	106.8	ST
7	APM SD/MI	%	99.96	91.04		98.54	98.90	99.96	99.62	99.40	109.18	ST
8	APM SMP/MTs	%	81.22	90.7		81.23	81.54	81.22	82.38	79.76	87.94	T
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.2	74.12	73.96	74.05	74.13	74.16	74.20	74.34	100.3	ST
2	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.31	0.44	0.36	n/a	n/a	n/a	0.20	0.42	95.45	ST
3	Persentase Desa Siaga	%	32.56	25	23	n/a	n/a	n/a	21.75	37.76	151.04	ST
4	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Banyumas)	Indeks	93.75	88	87	85	87.16	86.87	93.75	94.44	107.32	ST
5	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	%	90.9	97.5	90	98	98	98	90.9	95.45	97.9	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Rumah Sakit (RSUD Banyumas)											
6	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Ajibarang)	Indeks	87	87	86	82.58	97.4	91.25	86.75	88.99	102.29	ST
7	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Ajibarang)	%	97.56	87	86	88.76	86.8	90	97.56	100	114.94	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	%	79.045	81.419	79.782	73.834	76.410	78.232	79.170	80.918	99.38	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap	%	97.885	98.792	98.187	90.94	96.375	97.885	97.885	97.885	99.08	ST
3	Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota	%	71.444	87.085	84.167	76.276	79.766	81.249	82.708	71.444	82.04	T
4	Kinerja pelayanan irigasi %	%	81.29	84.82	82.82	79.12	80.440	81.210	81.29	81.29	95.84	ST
5	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	%	0.512	0.536	0.520	0.473	0.505	0.505	0.513	0.522	97.39	ST
6	Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	%	52.623	55.168	53.425	49.869	50.758	51.682	52.554	53.896	97.69	ST
7	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	%	82.979	83.169	83.043	82.967	82.975	82.979	82.979	82.979	99.77	ST
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	99.985	100	100	99.982	99.983	99.984	99.985	100	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dengan rencana tata ruang											
9	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	%	94.532	82.097	77.603	60.225	66.217	73.109	75.356	98.27	119.7	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Rasio	N/A	0.3571	0.1190	n/a	n/a	n/a	n/a	0.7071	198.01	ST
2	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	N/A	0.17	0.144	n/a	n/a	n/a	n/a	0.067	40.59	SR
3	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	%	0.58	1.5	1.5	0.95	0,06	1,48	0.58	1.94	129.33	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
4	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	%	2	2	2	0,73	1.10	1.17	2	1.24	62	R
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0.81	0.9	0.84	0.64	0,7	0,8	0,81	0.87	103.57	ST
2	Indeks risiko Bencana IRB	Indeks		144		193.71	164.25	140.18	122.82	109.01	139.44	ST
3	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	100	15	5	n/a	n/a	n/a	n/a	4.91	114.33	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
4	Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Menit	100	20	30	29	29	27	13	15	125	ST
5	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100		100	100	100	100	100	100	ST
2	Persentase PPKS yang terlindungi	%	100	100		100	100	100	100	100	100	ST
3	Persentase PPKS yang terehabilitasi	%	100	100		100	100	100	100	100	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
1	Persentase pembinaan kepada Serikat Pekerja / Organisasi pekerja	%	n/a	71.94	35.95	N/A	N/A	N/A	N/A	53.57	74.46	S
2	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ST
3	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi	%	n/a	100	50	N/A	N/A	28,47	60,66	62.71	62.71	R
4	Persentase pembinaan kepada Organisasi Pengusaha / Asosiasi Perusahaan	%	n/a	80	40	n/a	n/a	n/a	n/a	40	50	SR

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
5	Persentase Lowongan Kerja terdaftar terhadap Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	%	n/a	66	66	46.22	59.97	70.56	95.19	178.81	270.92	ST
6	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten kota	%	n/a	60	60	48.75	54.12	61.87	80.37	161.1	268.5	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	543	620	600	528	518.93	595	542.90	542.90	87.57	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	Indeks	72.77	71.2	71.00	71.74	70.71	72.77	73.16	69.77	102.75	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
1	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama Beras	%		121.28	110	n/a	n/a	n/a	n/a	128.55	105.99	ST
2	Persentase desa rawan pangan yang diberi bantuan	%		8	6	n/a	n/a	n/a	n/a	15.38	192.25	ST
3	Persentase Peningkatan Pemberian Bantuan di desa Rawan Pangan	%		2.0	1.0	n/a	-88.7	125.1	138.6	23.8	1190	ST
4	Persentase penguatan cadangan pangan	%		88	86	81,97	107,32	194,92	90,49	73.87	83.94	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
5	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%		0.6	0.50	n/a	0,29	1,12	0,54	-6.51	-1085	SR
6	Skor pola pangan harapan	Skor		93.55	n/a	88.5	91.5	91.7	92.6	92.6	98.99	ST
7	Produksi tanaman pangan	Ton	431.242	1.279.800	424.700	428.870	429.002	428.077	431.241	396.516	30.98	SR
8	Produksi Hortikultura	Ton	54024.21	144.670	47.983	47.031	47.744	53.481	55.593	47.936	33.14	SR
9	Produksi Perkebunan	Ton	72947.19	222.130	73.678	71.066	71.811	73.160	70.863	74.179	33.39	SR
10	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	2.01	2	3	3.06	2.94	3.20	2.01	-19.9	-663.33	SR
11	Produksi Peternakan	Ton		148.601	48.556	43.350	45.427	46.940	48.948	39.208	26.4	SR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	%		100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Indeks	65.31	64.25	64.20	62.27	65.24	63.81	65.31	67	104.28	ST
2	Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	Indeks		100	100	100	100	100	100	100	100	ST
3	Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik	Indeks	11.05	10.34	10.30	2.03	9.5	10.26	11.05	11.35	109.77	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS	Indeks		77	75	N/A	63.17	75.11	84.83	91.57	128.65	ST
5	Indeks Kualitas Air	Indeks	51.79	54.05	54	49.33	56.18	51.74	51.79	55.14	102.02	ST
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87.45	85.35	85.30	85.07	85.16	86.04	87.45	88.58	103.78	ST
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	47.59	42.75	42.70	42.32	43.96	43.44	47.59	47.46	111.02	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan	Indeks	93.41	89.15	89.05	86.46	90.25	89	93.41	92	103.2	ST
2	Persentase Pelayanan Administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	98.22	98.22	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kependudukan Sesuai SOP											
3	Tingkat akurasi Data Kependudukan dari Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	97.09	97.8	97.2	n/a	n/a	n/a	97.09	99.52	101.55	ST
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun (%)	%	98,61	99	100	88,54	90,56	94,69	96,48	98,61	99,61	ST
5	Persentase kepemilikan akta kematian yang terlaporkan	%	100	100	n/a	100	100	100	100	100	100	ST
6	Persentase kepemilikan akta perkawinan yang terlaporkan	%	100	100	n/a	100	100	100	100	100	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
7	Persentase kepemilikan akta perceraian yang terlaporkan	%	100	100	n/a	100	100	100	100	100	100	ST
8	Persentase kepemilikan KIA	%	68.01	72	n/a	49.89	55,93	55.7	66.92	68.01	94,46	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7323	0.74	0.72	0.6903	0.703	0.716	0.732	0.7477	101.04	ST
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	58.14	29	26	n/a	0	200	54.55	9.3	32.07	SR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	KELUARGA BERENCANA											
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.796	1.34	1.36		0.95	0.93	1.05	0.605	200	ST
2	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk LPP	%	0.015	0.01	0.41	0.92	0.43	2.41	-2.16	0.191	1910	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
1	Rasio konektivitas Wilayah	Rasio	79	63.5	63.5	68.6	68.6	70.2	79.0	78.5	123.62	ST
2	Indeks konektivitas angkutan jalan	Indeks	0.8	0.8	0.8	n/a	n/a	n/a	n/a	0.8	100	ST
3	Indeks konektivitas angkutan sungai	Indeks	0.75	0.25	0.25	n/a	n/a	n/a	n/a	0.75	300	ST
4	V C Ratio di jalan Kabupaten Kota	Rasio	0.6	0.74	0.74					0.45	118.92	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	98.92	92.5	91.5	94	93	90.50	98.92	96.66	104.5	ST
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	Indeks	3.39	3.7	3.3	2.75	2.73	2.60	3.39	4.09	110.54	ST
3	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	%	100	95	91	80	80	90	100	100	105.26	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
1	Persentase koperasi sehat	%	30.47	41.09	40	28.44	24.86	19.19	17.63	34.07	82.92	T
2	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%		2.19	1.96	13.49	15.73	18.5	40.58	1.95	89.04	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3	Persentase Koperasi Aktif	%	58.85	59.06	58.04	80.65	52.83	54.3	57.85	60.09	101.74	ST
4	Persentase koperasi yang mematuhi perundang undangan	%	0	27.4	21.43	n/a	n/a	n/a	n/a	21.61	78.87	T
5	Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	0	46.37	14.58	n/a	n/a	n/a	n/a	10.56	22.77	SR
6	Persentase peningkatan UMKM yang berdaya dan berkembang	%		8	6.36	0,49	0,27	1,2	2,94	1.97	24.63	SR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
1	IKM pelayanan terpadu satu pintu	Indeks	91.25	91	90.5	n/a	n/a	n/a	n/a	91.72	100.79	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2	persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	%		97	96	n/a	n/a	n/a	n/a	99.83	102.92	ST
3	Nilai Investasi Daerah	Milyar	1.993.592	2400	800	1077,96	1021,56	1662,46	1993,59	1694	70.58	S
4	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%		78	76	n/a	n/a	n/a	n/a	93.75	120.19	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
1	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	%	28.80	0.63	0.55	n/a	n/a	n/a	n/a	0.19	30.16	SR
2	Persentase Peningkatan Prestasi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi Dinporabudpar	%	13.20	13.84	6.47	n/a	89.47	15.74	13.2	3.18	22.98	SR

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	38.32	0.1	0.06	n/a	n/a	n/a	n/a	0.036	36	SR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	90	90	100	100	100	100	ST
2	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
1	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	%	100	73	67	64	64	64	64	100	136.99	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
1	Persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata	%	24.3	33.33	12.5	n/a	n/a	20.69	31.03	-32.98	-98.95	SR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	39.57	33.5	33	-	-	34,02	52,57	67.88	202.63	ST
2	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	52.32	58	56	56,70	62,90	64,4	52,32	67.39	116.19	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	74.20	67	65	86	62,92	64,35	74,20	81.64	121.85	ST
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Nilai	39.76	39	37	-	5,1	38,73	100	100	256.41	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	2.51	1.75	1.75	1,54	1,76	4,11	2,51	2.47	141.14	ST
2	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%		4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	12.47	311.75	ST
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2.68	2	2	1,52	1,73	4,31	2,68	2.52	126	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0.4	1.5	1.5	1,76	2,01	1,69	0,40	1.85	123.33	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	%										
1	Persentase peningkatan kunjungan daya tarik wisata dan event	%	62.86	4	2	-47.88	-19.72	77.23	62.86	26.21	655.25	ST
2	persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	n/a	31.43	22.73	n/a	n/a	24.03	33.3	4.62	14.7	SR
3	Persentase Peningkatan PAD sektor Pariwisata	%	2.55	4	2	n/a	n/a	n/a	n/a	-20.78	-519.5	SR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan	%		20	6.66	n/a	n/a	n/a	n/a	6.66	33.3	SR
2	Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan	%		26.67	13.33	n/a	n/a	n/a	n/a	13.33	49.98	SR
3	Produksi olahan hasil pertanian	Ton	131.87	387	128	n/a	n/a	n/a	n/a	3881.58	1002.99	ST
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
1	Persentase peningkatan omzet penjualan pelaku usaha perdagangan	%	6.19	5	5	n/a	n/a	n/a	n/a	14.15	283	ST
2	Indeks Keterjangkauan dalam IKP	Indeks	79.48	77	75	n/a	n/a	n/a	n/a	82.54	107.19	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3	Persentase peningkatan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan produk potensial pertanian dan non pertanian	%	9.94	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	6.7	167.5	ST
4	Persentase peningkatan pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi	%	3.8	10	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3.57	35.7	SR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
1	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	0.181	0.2	0.2	n/a	n/a	n/a	n/a	0.24	120	ST
	SEKRETARIAT DAERAH											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Nilai SAKIP Kabupaten Banyumas	Nilai	80.53	80	78	74.96	76.47	78.46	80.53	81.79	102.24	ST
2	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Kabupaten Banyumas	Nilai	3.250	3.1	3.050	N/A	2.994	3.029	3.25	3.381	109.06	ST
3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai		88	87.25	86.705	91.447	89.1	89.75	90	100.28	ST
4	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan penilaian mandiri SPIP	%	51	50	50	n/a	17,8	51.78	51.78	100	200	ST
5	Persentase Capaian Kinerja Sekreariat Daerah	%		100	100	n/a	127.47	126.99	101.58	116.56	116.56	ST
	SEKRETARIAT DPRD											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Indeks Kepuasan DPRD		100	87	85	n/a	n/a	n/a	n/a	86	98.85	ST
2	Persentase layanan Sekretariat DPRD yang terealisasi dalam jadwal Bamus	%		92	90	n/a	n/a	n/a	n/a	100	108.7	ST
	PERENCANAAN											
1	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Nilai	25.41	26	25.5	23,89	24,00	25,20	25,41	25.58	98.38	ST
2	Nilai MRI	Nilai	3.081	3.075	3.025	n/a	3,013	3,000	3,081	3.194	103.87	ST
	KEUANGAN											
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	26.8	19.9	19.7	18,62	19,47	20,53	26,8	21.58	108.44	ST
2	Persentase penyerapan APBD	%	83.16	95	95	100	82,28	86,99	83,16	97.26	102.38	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3	Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai ketentuan	%	100	100	100	n/a	100	100	105,26	87.9	87.9	T
4	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah PAD	%	5.8	4.5	4.30	3.75	14.03	7.96	3.92	-11.64	-258.67	SR
	KEPEGAWAIAN											
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.65	73	71	67.48	37.33	40.49	65.65	80.1	109.73	ST
2	Persentase kinerja ASN Kategori BAIK	%	99.66	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	ST
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.65	73	71	67.48	37.33	40.49	65.65	80.1	109.73	ST
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	%	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	165.25	165.25	ST
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	%		83	70.5	66.67	66.67	50	83.33	65.5	78.92	T
	INSPEKTORAT DAERAH											
1	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	3	0.17	0.17	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	SR
2	Nilai IEPK	Nilai	3	2.925	2.915	n/a	2.793	2.910	3	3	102.56	ST
	KECAMATAN											
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	99.67	99.67	ST
2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	101.57	101.57	ST
3	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	n/a	83.15	83.02	n/a	n/a	n/a	n/a	83.28	100.15	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target pada Akhir Tahun	Target	Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir	Status Capaian
			2023	2026	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
1	standar deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka		6.3	6.5	n/a	n/a	n/a	n/a	5.49	155.56	ST
2	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%		0.045	0.015	n/a	n/a	n/a	n/a	1.44	3191.11	ST
3	Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam	%		80	80	80	90	95	85	97.1	121.37	ST

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dilihat dari capaian kinerja indikator berstatus Sangat Rendah, Rendah dan N/A yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    - Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

      Kinerja indikator tingkat daya saing kepemudaan dan keolahragaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh menurunnya prestasi pemuda dan olahraga. Tidak optimalnya pembinaan dan kegiatan apresiasi pemuda berprestasi dan olahraga tingkat daerah menjadi penyebab menurunnya prestasi pemuda dan olahraga. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah kurang optimalnya kinerja kelembagaan organisasi pemuda dan olahraga.

2. Aspek Daya Saing
    - Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi

      Kinerja Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi pada tahun 2023-2024 tidak dapat dilihat nilainya karena adanya perbedaan penghitungan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2022.

3. Aspek Pelayanan Umum
    - APM PAUD

      Hingga Juli 2025, data mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Banyumas untuk tahun 2024 belum dirilis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

    - Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni

      Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2024, yang dihitung dari pengurangan kawasan kumuh dari tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pengurangan kawasan kumuh ada yang masuk dalam wewenang nasional, wewenang provinsi dan wewenang kabupaten. Dan yang masuk dalam wewenang Kabupaten hanya kawasan kumuh yang dibawah 10 Ha. Hal ini menyebabkan penanganan kawasan kumuh juga masih

bergantung dengan pengurangan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik

  Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik dihitung dari peningkatan persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik sebesar 93,24% mengalami kenaikan 1,24% dari tahun sebelumnya. Namun masih belum mencapai target 2%. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan program menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan target tersebut, selain itu keterbatasan lahan perumahan dalam penyediaan septic tank juga menjadi masalah lain dalam pemenuhan akses air limbah domestik.

- Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi

  Persentase lulusan pelatihan bersertifikat masih rendah. Rendahnya capaian dikarenakan 8 paket pelatihan yang telah dilaksanakan, 5 pelatihannya tidak disertai dengan anggaran uji kompetensi sehingga tingkat kepesertaan lebih tinggi dan tidak seiring dengan peserta yang tersertifikasi.

- Persentase pembinaan kepada Organisasi Pengusaha / Asosiasi Perusahaan

  Kinerja indikator persentase pembinaan kepada Organisasi Pengusaha/ Asosiasi Perusahaan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target akhir. Namun melihat tahun 2024 merupakan tahun pertama, untuk pencapaian menuju 100% merupakan kinerja yang cukup baik. Kinerja indikator sudah sesuai dengan perencanaan.

- Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

  Persentase peningkatan produksi pertanian memiliki capaian sangat rendah karena pada tahun 2024 jumlah produksi total dari 15 komoditas menurun menjadi 518.632,23 ton lebih rendah dari tahun dasar yang mencapai 554.719,72 ton. Faktor yang mempengaruhi penurunan produksi

tersebut adalah adanya pergeseran musim tanam yang diakibatkan oleh Bencana Alam kemarau panjang.

- Produksi tanaman pangan

  Produksi tanaman pangan ditopang oleh Padi, jagung dan kedelai. Capaian produksi tanaman pangan sangat rendah karena terdampak oleh musim kemarau panjang yang mempengaruhi produksi beberapa komoditas pertanian. Kemarau panjang juga menyebabkan musim tanam mundur. Seperti contoh, pada komoditas padi yang dibudidayakan di wilayah tadahhujan kekurangan sumber air dan pada komoditas kedelai hanya bisa dilakukan satu kali masa tanam.

- Produksi Hortikultura

  Produksi hortikultura memiliki capaian sangat rendah karena pada tahun 2024 untuk komoditas durian mengalami penurunan dibandingkan 2023 (-56%), hal tersebut disebabkan oleh proses berbuah Durian yang bergeser ke awal tahun 2025. Berbanding terbalik dengan komoditas cabai yang mengalami peningkatan cukup tajam pada 2024 (34%). Kenaikan produksi cabai tersebut dipicu oleh perluasan areal tanam cabai dan gerakan tanam cabai serentak.

- Produksi Perkebunan

  Capaian kinerja indikator produksi perkebunan pada tahun 2024 masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Namun apabila dilihat dari realisasinya, pada tahun 2024 produksi komoditas perkebunan mengalami kenaikan, khususnya untuk komoditas kopi.

- Persentase Peningkatan Produksi Peternakan

  Terjadi penurunan persentase peningkatan produksi peternakan di tahun 2024 yaitu sebesar -19,90%. Jumlah produksi peternakan pada tahun 2024 yang hanya sebesar 39.208 ton lebih rendah dari tahun sebelumnya yang produksinya mencapai 48.948 ton. Faktor yang mempengaruhi penurunan produksi peternakan tersebut yakni berkurangnya kontribusi produksi susu dan telur. Sehingga apabila dihitung peningkatannya nilainya

sangat rendah. Untuk itu, diperlukan optimalisasi ketersediaan pakan bagi ternak agar produksi peternakan terus meningkat.

- Produksi Peternakan

  Produksi peternakan terdiri atas produksi daging, susu dan telur. Capaian produksi peternakan sangat rendah karena menurunnya jumlah produksi telur dan susu. Produksi telur di tahun 2024 sebesar 3.253 ton dan turun dari 2023 sebesar 4.355 ton (-25,3%). Sementara itu, produksi susu juga mengalami penurunan mencapai -54,11%, dimana tingkat produksi pada tahun 2023 sebesar 19.336 ton, turun menjadi 8.874 ton di tahun 2024. Besarnya penurunan produksi susu dan telur disebabkan karena menurunnya jumlah populasi sapi perah dan ayam petelur di tingkat peternak. Penurunan populasi ternak tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan, sehingga berdampak pada terbatasnya pakan bagi ternak sapi perah dan ayam petelur. Dampak lain karena kondisi alam ini adalah ketidakstabilan suhu yang menyebabkan produksi susu harian ternak menurun karena komoditas sapi perah merupakan ternak yang sensitif terhadap perubahan suhu.

  Melihat dari populasi ternak, jumlah populasi ternak ruminansia yang terdiri dari sapi potong, sapi perah, kambing potong dan kambing perah di tahun 2020 mencapai 193.515 ekor dan menjadi 181.795 ekor pada tahun 2024 (-6%). Populasi ruminansia tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 209.044 ekor, yang didominasi oleh kambing potong sebanyak 186.853 ekor. Sementara itu, untuk jumlah populasi ternak non ruminansia terdiri dari ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan ayam buras/ayam kampung di tahun 2020 mencapai 14,38 juta ekor, dan meningkat menjadi 18,70 juta ekor pada tahun 2024 (30%). Populasi non ruminansia didominasi oleh ayam ras pedaging.

- Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam

  Kinerja indikator persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target akhir renstra. Hal ini disebabkan migrasi data dari sistem OSS menjadi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) masih belum optimal. Pada

tahun 2022 - 2023 terdapat Moratorium izin simpan pinjam sehingga koperasi belum dapat mengurus izin simpan pinjam di OSS. Lebih lanjut, sejak dikeluarkannya PermenkopUKM tahun 2023, koperasi masih perlu melengkapi persyaratan pemenuhan izin, karena terdapat tambahan peraturan dan dokumen yang perlu dilengkapi.

- Persentase peningkatan UMKM yang berdaya dan berkembang

  Persentase peningkatan UMKM yang berdaya dan berkembang sangat rendah. Terbatasnya kegiatan pelatihan yang dilakukan pada tahun 2024 menjadi penyebab rendahnya kinerja indikator. Terbatasnya kegiatan pelatihan yang dilakukan membuat pemberdayaan UMKM tidak optimal. Selain itu, UMKM yang ada di Banyumas didominasi oleh skala mikro, sehingga masalah modal masih menjadi penyebab tidak berkembangnya UMKM.

- Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

  Kinerja indikator tingkat daya saing kepemudaan dan keolahragaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya pembinaan dan kegiatan apresiasi pemuda berprestasi tingkat daerah. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah kurang optimalnya kinerja kelembagaan organisasi pemuda dan olahraga.

- Persentase Peningkatan Prestasi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi Dinporabudpar

  Kinerja indikator persentase Peningkatan Prestasi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi Dinporabudpar. Hal ini disebabkan oleh menurunnya prestasi pemuda. Selain itu, tidak optimalnya pembinaan dan kegiatan apresiasi pemuda berprestasi tingkat daerah juga turut menjadi penyebab penurunan prestasi pemuda khususnya yang difasilitasi oleh Dinporabudpar.

- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

  Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sangat rendah. Hal ini terjadi karena fasilitasi pada pemuda wirausaha masih belum

optimal. Selain itu, keterbatasan SDM pelaksana serta kurangnya kolaborasi dengan sektoral lain seperti UMKM turut berkontribusi terhadap tidak optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

- Persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata

  Kinerja indikator persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata masih sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik lingkup internal di OPD. Selain itu, sumber daya untuk mengelola kebudayaan menjadi wisata juga masih terbatas.

- Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif

  Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif sangat rendah jika dibandingkan target akhir. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dasar pengambilan data. Awalnya objek ukur indikator adalah pelaku ekraf yang difasilitasi Dinporabudpar, kemudian berubah menjadi data OSS, sehingga pertumbuhannya tidak besar. Lebih lanjut masih banyak pelaku Ekraf yang belum ber NIB yang seharusnya masuk kedalam pendataan seperti pekerja lepas atau *freelancer* yang banyak bergerak di sektor Ekonomi Kreatif.

- Persentase Peningkatan PAD sektor Pariwisata

  Kinerja indikator persentase peningkatan PAD sektor Pariwisata masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya pungutan retribusi pariwisata. Selain itu, adanya perubahan tarif masuk objek wisata yang dikelola Pemda (khususnya Taman Mas Kemambang) juga turut berkontribusi pada lambatnya peningkatan PAD.

- Persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan

  Capaian kinerja indikator persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan pada tahun 2024 masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target Renstra. Namun apabila dilihat dari realisasinya, pada tahun 2024 nilainya sudah cukup baik dan sesuai dengan perencanaan. Perlu dilakukan pengoptimalan pada pengembangan komoditas potensial yang ada, agar target akhir Renstra dapat terealisasi.

- Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan

  Indikator persentase komoditas pertanian yang dikembangkan capaiannya sangat rendah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya komoditas potensial yang dikembangkan. Dari total 15 komoditas potensial yang ada, baru 2 komoditas yang dikembangkan yakni ubi kayu dan pisang.

- Persentase peningkatan pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi

  Capaian kinerja indikator persentase peningkatan pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi sangat rendah. Pada tahun 2024 pemerintah daerah hanya melakukan pemeliharaan untuk 23 pasar dari total 28 pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya sumber daya.

- Persentase Peningkatan Nilai IEPK

  Persentase Peningkatan Nilai IEPK sangat rendah dikarenakan nilai IEPK tahun 2024 dan tahun 2023 sama, sehingga tidak terjadi peningkatan. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar yaitu pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, pilar Penerapan Strategi Pencegahan dan pilar Penanganan Kejadian Korupsi. Dari ketiga pilar tersebut yang mendapatkan nilai paling rendah yaitu pilar Penanganan Kejadian Korupsi, sehingga perlu mengoptimalkan penanganan kejadian korupsi yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

KERJASAMA DAERAH

Selama periode tahun 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh dukungan pembiayaan non-APBD melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten.

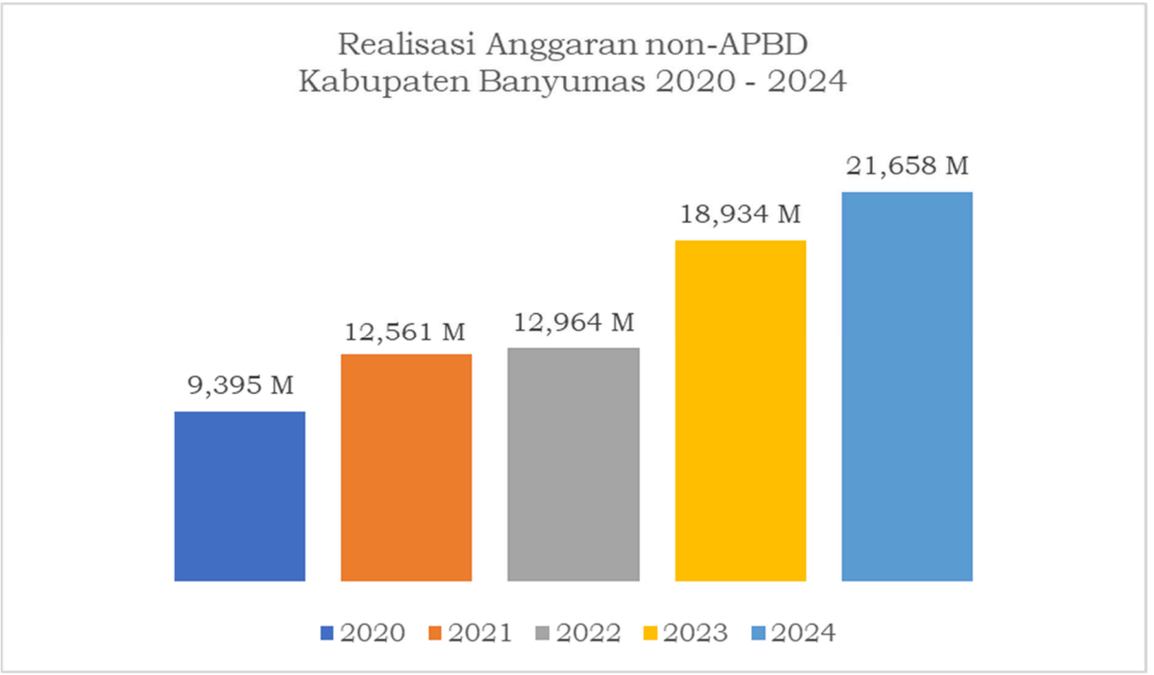

Gambar 2. 110
Realisasi Anggaran non-APBD Kab. Banyumas Tahun 2020-2024

Kontribusi pembiayaan dari Baznas menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari sebesar Rp 9,39 miliar pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp 12,56 miliar pada tahun 2021, Rp 12,96 miliar pada tahun 2022, Rp 18,93 miliar pada tahun 2023, hingga mencapai Rp 21,65 miliar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, total pembiayaan yang dihimpun dari Baznas mencapai lebih dari Rp 75 miliar. Peningkatan dukungan tersebut menunjukkan adanya peran strategis Baznas dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial ekonomi berbasis keumatan.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini membahas Gambaran Keuangan Daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah kurun waktu tahun 2020-2024 dan bagaimana proyeksi keter-sediaan dana pembangunan pada periodesasi RPJMD 2025-2029. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. sejak tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang baik.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LKPJ Bupati Banyumas, 2020-2024.

a. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

1) Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun gambaran keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020-2024, sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi; 1). Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2). Pendapatan transfer meliputi; transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah provinsi. 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi ; pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, otonomi khusus dan dana desa dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 mecapai Rp.3,33 triliun, tahun 2021 mencapai Rp.3,49 triliun, tahun 2022 mencapai Rp.3,43 triliun, tahun 2023 mencapai Rp.3,50 triliun dan tahun 2024 mencapai Rp.3,79 triliun. Peningkatan tersebut dampak dari menaiknya pendapatan yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

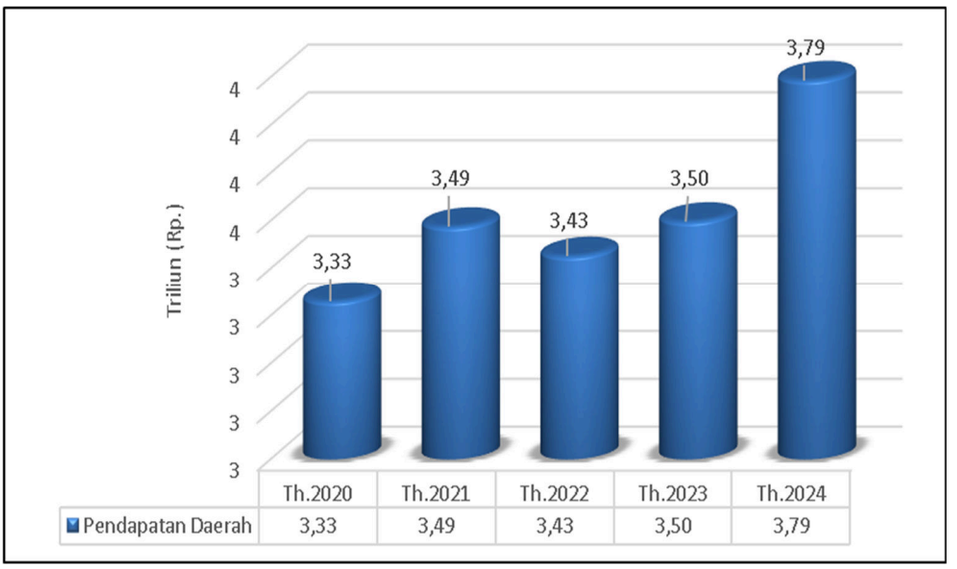

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.111
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 2,09%. Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 5,78%. Jika dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukkan kecenderungan fluktuaktif, tertinggi pada tahun 2021 sebesar 14,03% dan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 2,71%. Pertumbuhan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk pendapatan transfer daerah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2020-2024 tumbuh rata-rata sebesar 2,42%. Jika dilihat tren pertumbuhan pendapatan transfer menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif, tertinggi pada tahun 2024 sebesar 9,28% dan terendah di tahun 2020 sebesar minus 3,20%. Dana pendapatan transfer bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah *(otonom)* untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan transfer pemerintah provinsi. Pertumbuhan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat (pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya) dan pendapatan transfer pemerintah provinsi (pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu tahun 2020-2024 tumbuh rata-rata sebesar minus 17,92%. Jika dilihat tren pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi pada tahun 2024 sebesar 22,29% dan terendah pada tahun 2022 sebesar minus 92,62%. Pertumbuhan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya).

Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024, secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.32
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2024

No.	URAIAN	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	**PENDAPATAN**						
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**(2,71)**	**14,03**	**7,97**	**3,92**	**5,69**	**5,78**
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	(9,05)	6,66	20,09	11,17	8,87	7,55
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	(27,36)	(0,10)	10,31	4,69	1.817,78	361,06
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,43	(1,87)	40,59	23,21	4,95	17,86
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,99	19,09	1,45	(0,76)	(94,58)	(14,56)
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**(3,20)**	**2,25**	**2,13**	**1,65**	**9,28**	**2,42**
1.2.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**(3,13)**	**0,44**	**1,41**	**1,24**	**10,39**	**2,07**
1.2.1.1.	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**(4,44)**	**1,48**	**1,64**	**3,96**	**11,00**	**2,73**
1.2.1.1.1.	DanaBagi Hasil Pajak	74,56	19,22	(9,37)	(3,14)	(14,57)	13,34
1.2.1.1.2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)						
1.2.1.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	(9,05)	(1,32)	(0,74)	5,68	8,06	0,53
1.2.1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4,90	7,07	8,37	1,02	19,11	8,09
1.2.1.2.	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**3,09**	**(4,19)**	**0,30**	**(11,72)**	**6,96**	**(1,11)**
1.2.1.2.1.	Dana Desa	4,93	0,71	(2,64)	(4,45)	(94,14)	(19,12)
1.2.1.2.2.	Insentif Fiskal	(11,71)	(51,08)	58,06	(100,00)	-	(20,95)
1.2.2.	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**(3,89)**	**22,05**	**8,68**	**5,10**	**0,23**	**6,43**
1.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(12,34)	23,18	8,80	2,44	3,28	5,07
1.2.2.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	7,30	36,31	(26,67)	-
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**(2,28)**	**4,39**	**(92,62)**	**(21,36)**	**22,29**	**(17,92)**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	(89,33)	72,18	(54,43)	(21,59)	21,96	(14,24)
1.3.2.	Pendapatan Lainnya	768,58	(2,99)	(100,00)	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**(3,05)**	**4,73**	**(1,76)**	**2,10**	**8,44**	**2,09**

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 berada pada kisaran 20,07% hingga 24,44%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2024 sebesar 23,82%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Banyumas termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

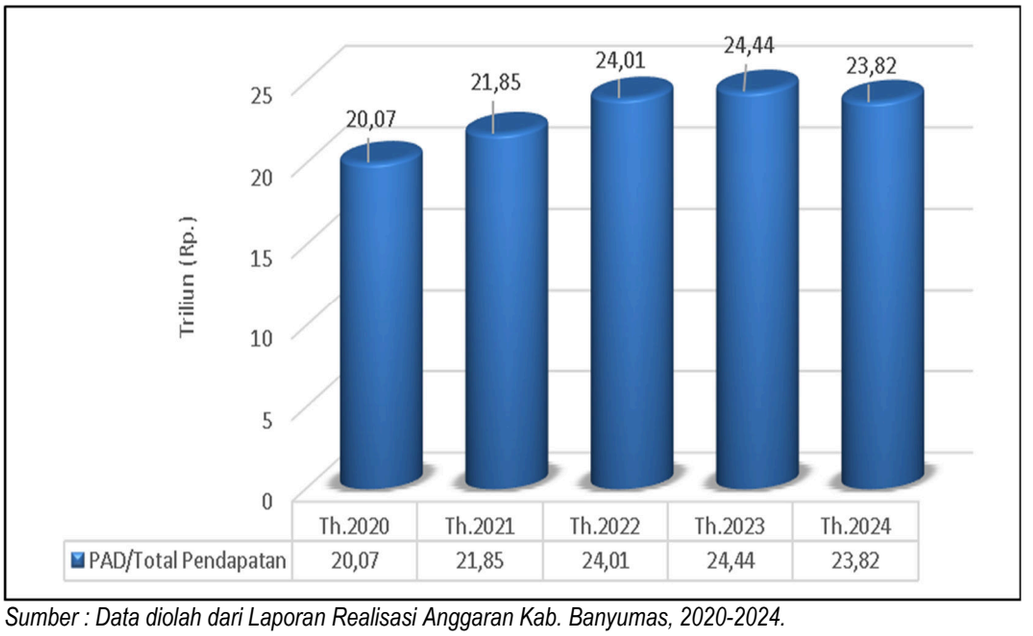

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.112
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan (%)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menggali potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Kurun waktu tahun 2020-2024 rasio ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuatif, terendah tahun 2021 sebesar 72,70% dan tertinggi tahun 2024 sebesar 75,83%. Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Banyumas terhadap pemerintah pusat dan provinsi kurun waktu tahun

2020-2024 termasuk kategori masih sangat tinggi dengan rasio diatas 50%.

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

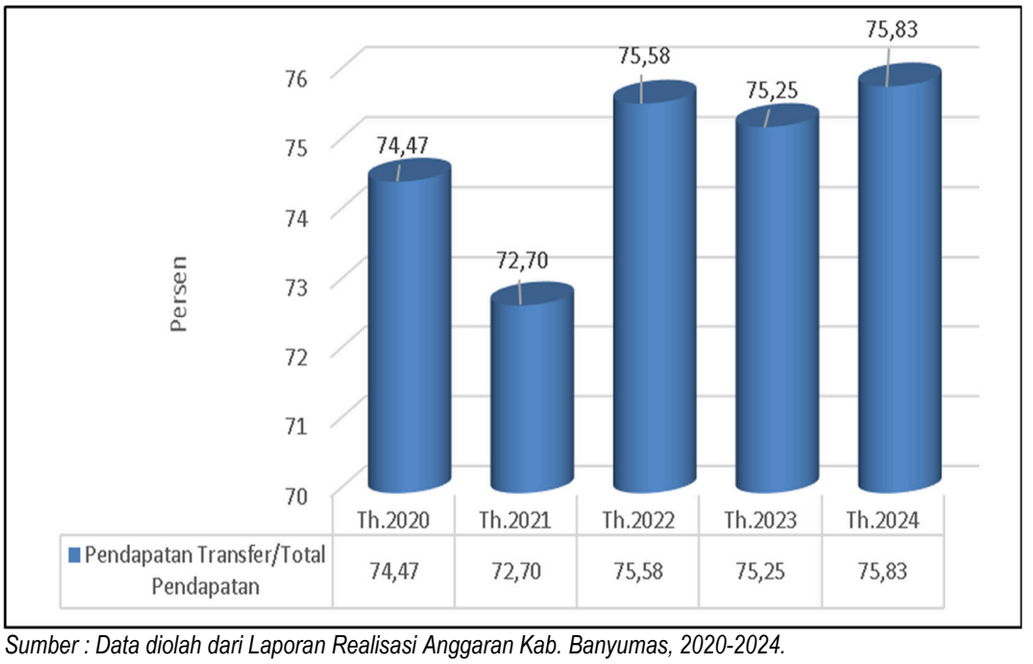

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.113
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (%)

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar kurun waktu tahun 2020-2024 adalah pendapatan transfer dengan kisaran antara 74,47% hingga 75,83%. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 20,07% hingga 24,44%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sah berkisar antara 0,32% hingga 5,47%. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

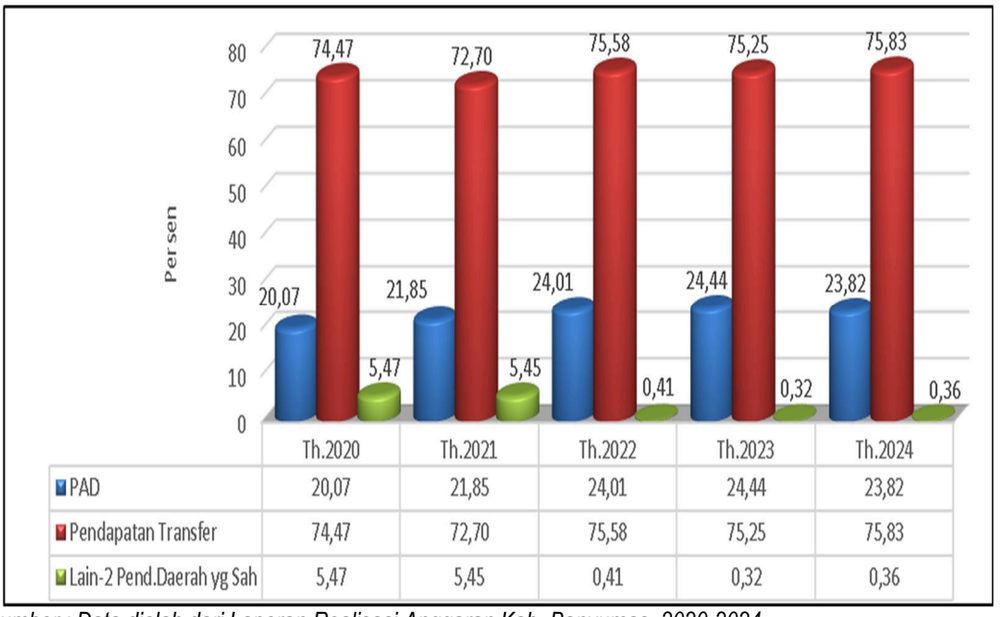

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.114
Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024 (%)

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024, pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Perkembangan Realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	**PENDAPATAN**						
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**668.211.148.299**	**761.991.440.173**	**822.685.992.142**	**854.942.206.458**	**903.571.683.035**	**5,78**
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	208.624.349.832	222.525.782.288	267.236.064.377	297.081.716.066	323.426.130.549	7,55
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	23.711.587.937	23.687.898.823	26.130.786.681	27.357.075.743	524.647.625.309	361,06
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.802.591.533	15.507.581.925	21.801.615.649	26.861.536.807	28.191.432.745	17,86
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	420.072.618.997	500.270.177.137	507.517.525.435	503.641.877.842	27.306.494.432	(14,56)
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.479.870.538.123**	**2.535.638.088.327**	**2.589.697.751.952**	**2.632.443.641.584**	**2.876.611.922.393**	**2,42**
1.2.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.272.417.360.150**	**2.282.438.497.924**	**2.314.527.536.417**	**2.343.242.969.975**	**2.586.742.016.886**	**2,07**
1.2.1.1.	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**1.854.294.495.150**	**1.881.829.664.924**	**1.912.726.855.537**	**1.988.550.751.975**	**2.207.364.617.886**	**2,73**
1.2.1.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	47.461.438.644	56.584.800.161	51.280.979.747	49.669.105.653	42.430.251.000	13,34
1.2.1.1.2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.004.973.702	2.506.021.548	3.574.498.957	2.395.891.942	7.866.113.000	59,92
1.2.1.2.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.306.921.916.000	1.289.633.614.000	1.280.141.707.164	1.352.843.702.304	1.461.885.991.064	0,53
1.2.1.2.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	497.906.166.804	533.105.229.215	577.729.669.669	583.642.052.076	695.182.262.822	8,09
1.2.1.2.	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**418.122.865.000**	**400.608.833.000**	**401.800.680.880**	**354.692.218.000**	**379.377.399.000**	**(1,11)**
1.2.1.2.1.	Dana Desa	378.545.183.000	381.247.099.000	371.196.905.880	354.692.218.000	20.771.888.000	(19,12)
1.2.1.2.2.	Insentif Fiskal	39.577.682.000	19.361.734.000	30.603.775.000	-	358.605.511.000	-
1.2.2.	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**207.453.177.973**	**253.199.590.403**	**275.170.215.535**	**289.200.671.609**	**289.869.905.507**	**6,43**
1.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	189.208.586.743	233.070.254.488	253.570.782.196	259.758.223.214	268.279.615.582	5,07
1.2.2.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	18.244.591.230	20.129.335.915	21.599.433.339	29.442.448.395	21.590.289.925	5,65

1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**182.105.101.820**	**190.093.371.910**	**14.024.437.570**	**11.028.512.968**	**13.486.471.156**	**(17,92)**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	17.874.081.820	30.775.169.520	14.024.437.570	10.997.012.968	13.411.593.892	14,24)
1.3.2.	Pendapatan Lainnya	164.231.020.000	59.318.202.390	-	31.500.000,00	74.877.264	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**3.330.186.788.242**	**3.487.722.900.410**	**3.426.408.181.664**	**3.498.414.361.010**	**3.793.670.076.584**	**2,09**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024 .

Dari tabel 2.C. di atas dapat terlihat bahwa Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan pendapatan yang tidak begitu signifikan selama kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu hanya mengalami perkembangan pertumbuhan sebesar 2,09%. Secara umum rata-rata perkembangan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) kondisinya cukup baik yaitu 5,78%. Pada kelompok ini jenis pendapatan yang mengalami pertumbuhan terkecil yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rata-rata sebesar minus 17,92%. Untuk perkembangan retribusi daerah tertingi dengan rata-rata sebesar 361,05%. Sedangkan perkembangan untuk pendapatan dari pajak daerah rata-rata sebesar 7,55%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata sebesar 17,86%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD. Melihat hal tersebut di atas artinya pemerintah Kabupaten Banyumas harus lebih optimal lagi meningkatkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD sehingga dapat lebih mandiri lagi.

Pada kelompok pendapatan transfer selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami rata-rata perkembangan pertumbuhan sebesar 2,42%. Pada kelompok ini jenis pendapatan yang mengalami perkembangan terkecil yaitu dari transfer pemerintah pusat rata-rata sebesar 2,07% dan tertinggi dari transfer pemerintah provinsi rata-rata sebesar 6,43%. Rata-rata perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan pertumbuhan minus sebesar 17,92%.

b) Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

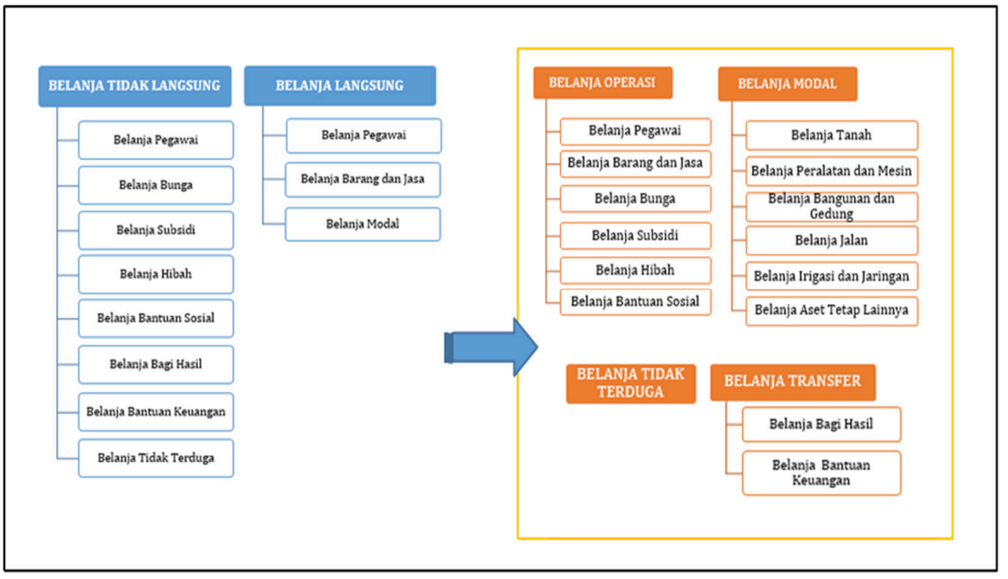

Gambar 2.115
Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 belanja daerah mencapai Rp.3,25 triliun, tahun 2021 mencapai Rp.3,43 triliun, tahun 2022 mencapai 3,60 triliun, tahun 2023 mencapai 3,50 trilin dan tahun 2024 mencapai 3,91 triliun. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya belanja berupa belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga dan belanja transfer.

Perkembangan belanja dan transfer Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

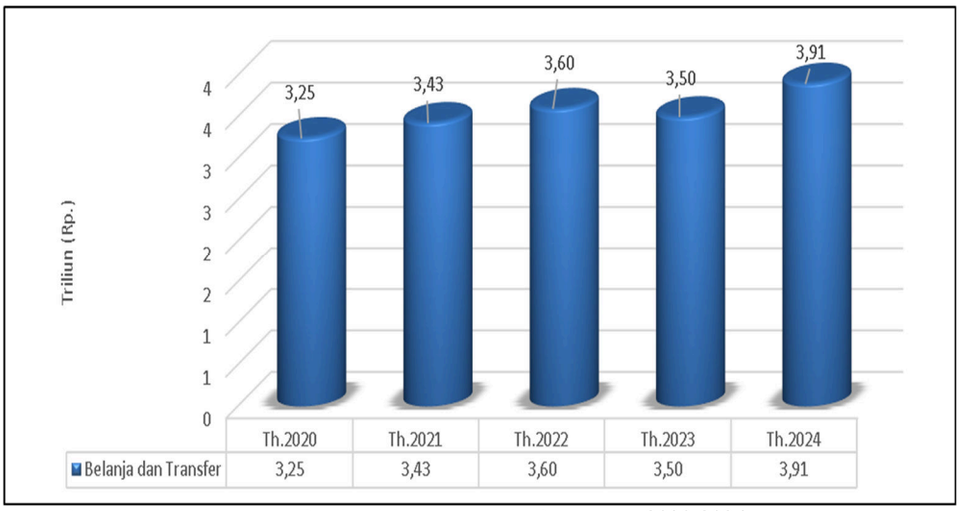

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.116
Perkembangan Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Rata-rata pertumbuhan belanja dan transfer Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 2,66%. Selama kurun waktu tersebut menunjukkan perkembagan fluktuatif, tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,55% dan terendah tahun 2020 sebesar minus 6,03%. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya belanja berupa belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga dan belanja transfer.

Rata-rata pertumbuhan komponen belanja operasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 4,54%. Selama kurun waktu tersebut menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi tahun 2024 sebesar 10,93% dan terendah pada tahun 2022 sebesar minus 3,42%. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya belanja berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja sosial.

Rata-rata pertumbuhan komponen belanja modal selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 1,26%. Selama kurun waktu tersebut menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2021 sebesar 18,92% dan terendah pada tahun 2023 sebesar minus 30,38%. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya belanja berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja modal set lainnya.

Rata-rata pertumbuhan komponen belanja tidak terduga kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 2.990,97%. Selama kurun waktu tersebut menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2020 sebesar 15.073,37% dan terendah tahun 2023 sebesar minus 98,91%. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya belanja berupa belanja tak terduga.

Rata-rata pertumbuhan belanja transfer daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 sebesar minus 1,77%. Persentase pertumbuhan belanja transfer daerah tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 11,22% dan terendah tahun 2020 sebesar minus 14,34%. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya transfer berupa belanja transfer bagi hasil pendapatan dan belanja bantuan keuangan.

Komponen belanja transfer bagi hasil pendapatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan fluktuaktif,

dengan rata-rata per-tumbuhan sebesar 7,72%. Persentase pertumbuhan tertinggi tahun 2022 mencapai 36,28% dan terendah pada tahun 2023 sebesar minus 12,49%. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi.

Untuk komponen transfer bantuan keuangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuh-an sebesar minus 2,15%. Persentase pertumbuhan tertinggi tahun 2021 sebesar 12,26% dan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 15,08%. Perkembangan fluktuatif tersebut disebabkan dampak dari naik turunnya berupa transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya.

Pertumbuhan realisasi belanja daerah kurun waktu tahun 2020-2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	**BELANJA**						
1.1.	**BELANJA OPERASI**	**(3,42)**	**2,37**	**6,50**	**6,32**	**10,93**	**4,54**
1.1.1.	Belanja Pegawai	(3,50)	9,99	3,81	0,88	13,87	5,01
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	(2,33)	(11,35)	9,03	8,69	1,92	1,19
1.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	13,66	(18,09)	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Belanja Hibah	(8,32)	69,32	23,10	75,99	36,71	39,36
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	(56,55)	80,44	(16,76)	35,65	110,18	30,59
1.2.	**BELANJA MODAL**	**(24,09)**	**18,92**	**10,83**	**(30,38)**	**31,01**	**1,26**
1.2.1	Belanja Tanah	43,40	9,12	(81,94)	362,62	(34,75)	59,69
1.2.2.	Belanja Pearalatan dan Mesin	17,77	(1,52)	13,17	(8,91)	29,99	10,10
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	(31,87)	164,87	9,39	(44,52)	30,67	25,71
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	(37,59)	(38,70)	17,99	(41,12)	50,98	(9,69)
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	(44,30)	832,43	57,64	42,24	12,35	180,07
1.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	(99,19)	-
1.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**	**15.073,37**	**(4,01)**	**(63,78)**	**(98,91)**	**48,17**	**2.990,97**
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	15.073,37	(4,01)	(63,78)	(98,91)	48,17	2.990,97
JUMLAH BELANJA		**(4,08)**	**4,42**	**5,21**	**(0,64)**	**13,21**	**3,62**
1.4.	**TRANSFER**						

No.	URAIAN	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.4.1.	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan**	**4,45**	**(10,13)**	**36,28**	**(12,49)**	**20,48**	**7,72**
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	6,88	(10,70)	41,43	(14,32)	22,44	9,15
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	(12,55)	(5,30)	(5,36)	9,56	1,93	(2,34)
1.4.2.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**(15,08)**	**12,26**	**2,52**	**(12,49)**	**2,07**	**(2,15)**
1.4.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	(15,37)	12,87	2,52	(12,49)	2,07	(2,08)
1.4.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	126,67	(100,00)	-	-	-	-
JUMLAH TRANSFER		**(14,34)**	**11,22**	**3,78**	**(12,49)**	**2,98**	**(1,77)**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**(6,03)**	**5,59**	**4,95**	**(2,78)**	**11,55**	**2,66**

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dan transfer daerah Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuatif bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 berkisar antara 66,90%-74,23%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio belanja operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

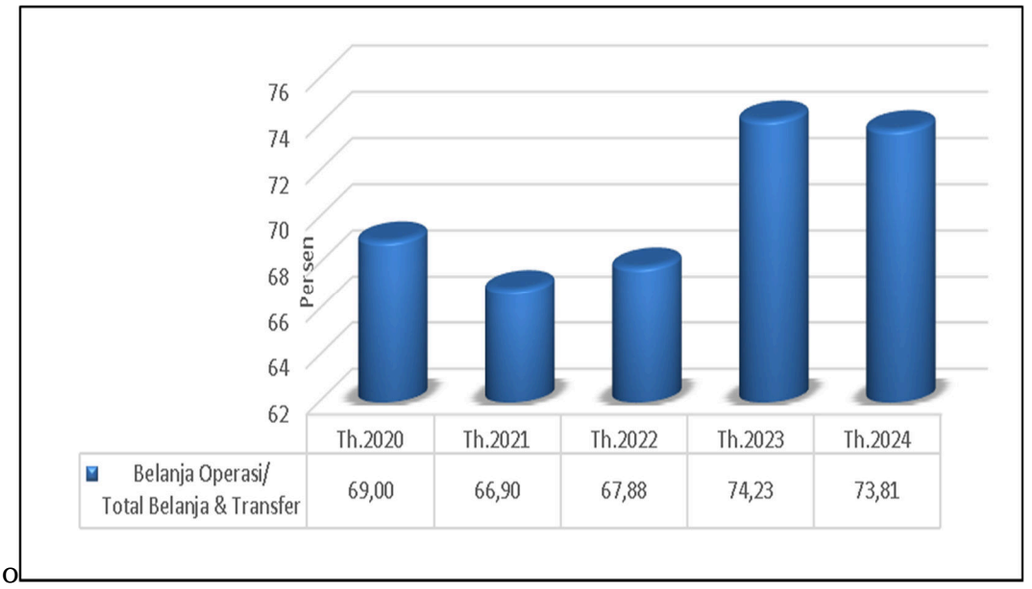

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.117.
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2020-2024 (%)

Rasio belanja modal terhadap total belanja dan transfer daerah Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Rasio belanja modal terhadap total belanja dan transfer daerah kurun waktu tahun 2020-2024, berkisar antara 9,53%-13,30%. Perkembangan rasio belanja modal terhadap total belanja dan transfer di Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

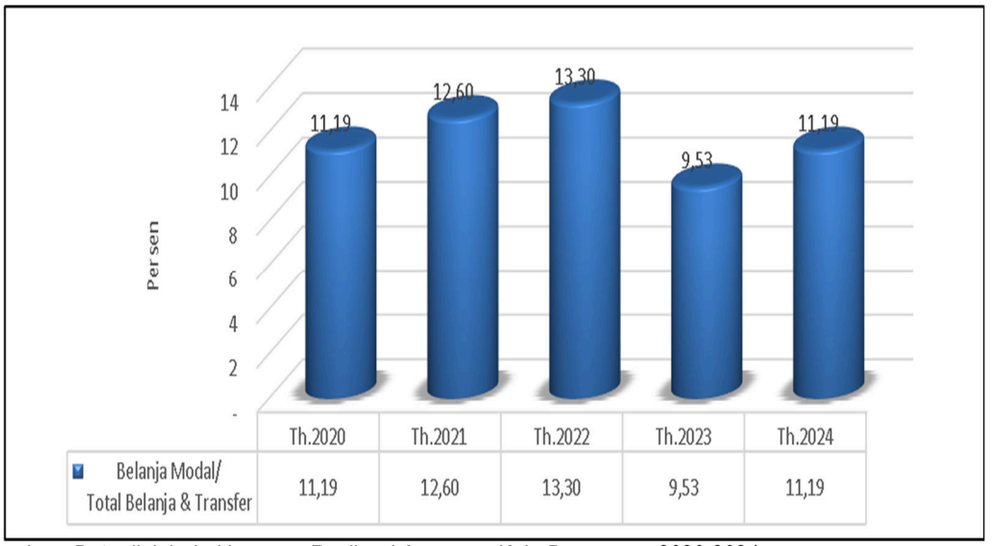

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.118
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2020-2024 (%)

Rasio belanja tak terduga terhadap total belanja dan transfer daerah Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Rasio belanja tak terduga terhadap total belanja dan transfer daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 berkisar antara 0,01%-2,49%. Perkembangan rasio belanja tak terduga terhadap total belanja daerah di Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

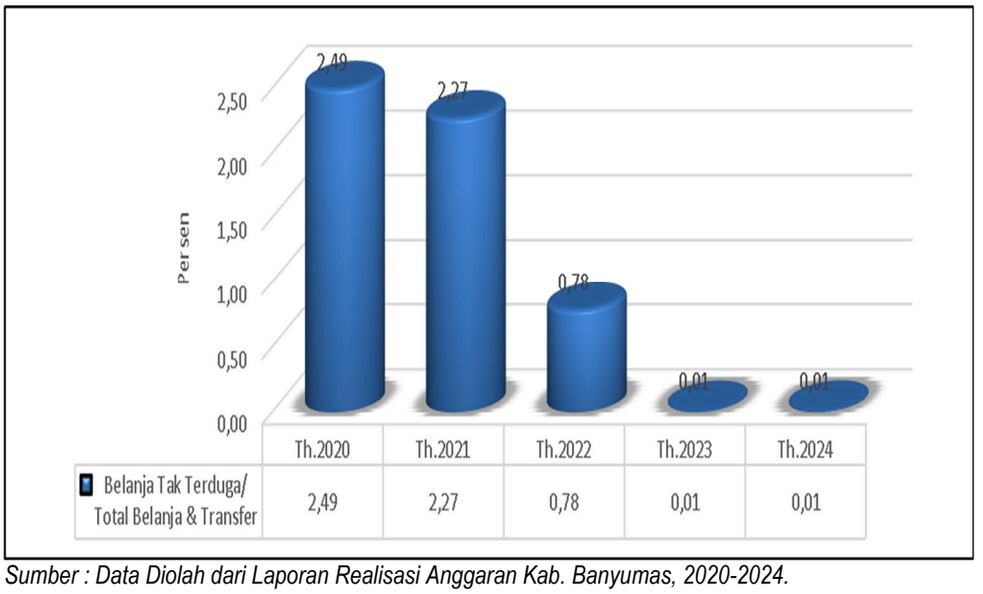

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.119
Rasio Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2020-2024 (%)

Rasio transfer terhadap total belanja dan transfer daerah menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Rasio belanja daerah terhadap total belanja dan transfer daerah, selama kurun waktu tahun 2020-2024

berkisar antara 14,99%-18,24%. Perkembangan rasio belanja transfer terhadap total belanja daerah di Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

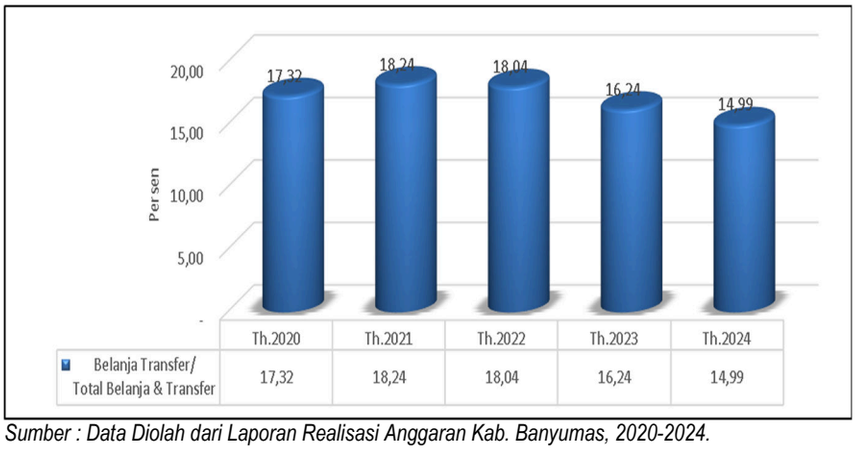

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.120
Rasio Belanja Transfer Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2020-2024 (%)

Perincian perkembangan realisasi belanja dan transfer daerah Kabupaten Banyumas, kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	**BELANJA**						
1.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.241.998.515.846**	**2.295.095.801.085**	**2.444.173.455.628**	**2.598.651.397.113**	**2.882.565.389.582**	**4,54**
1.1.1.	Belanja Pegawai	1.271.128.929.454	1.398.098.601.191	1.451.366.997.587	1.464.100.711.140	1.667.238.715.369	5,01
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	927.391.409.192	822.140.656.636	896.365.360.138	974.286.624.864	993.023.708.364	1,19
1.1.3.	Belanja Bunga	-	570.163.094	9.322.835.019	10.596.297.674	8.679.104.156	(2,22)
1.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Belanja Hibah	37.456.450.000	63.420.758.764	78.073.991.484	137.398.940.885	187.837.855.193	39,36
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	6.021.727.200	10.865.621.400	9.044.271.400	12.268.822.550	25.786.006.500	30,59
1.2.	**BELANJA MODAL**	**363.470.409.584**	**432.235.246.229**	**479.036.065.598**	**333.503.478.957**	**436.935.317.516**	**1,26**
1.2.1	Belanja Tanah	11.713.397.328	12.781.710.449	2.307.762.514	10.676.091.994	6.966.278.344	59,69
1.2.2.	Belanja Pearalatan dan Mesin	109.957.064.819	108.280.757.683	122.539.063.761	111.619.559.928	145.091.425.612	10,10
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	76.760.898.881	203.318.241.966	222.410.863.132	123.384.913.772	161.221.013.495	25,71

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	164.271.492.147	100.697.645.954	118.808.411.347	69.951.712.780	105.612.432.334	(9,69)
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	767.556.409	7.156.890.177	11.281.964.844	16.047.110.483	18.029.467.731	180,07
1.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	1.688.000.000	1.824.090.000	14.700.000	-
1.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**	**81.006.096.422**	**77.757.965.424**	**28.163.884.848**	**307.894.469**	**456.199.095**	**2.990,97**
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	81.006.096.422	77.757.965.424	28.163.884.848	307.894.469	456.199.095	2.990,97
JUMLAH ELANJA		**2.686.475.021.852**	**2.805.089.012.738**	**2.951.373.406.074**	**2.932.462.770.539**	**3.319.956.906.193**	**3,62**
1.4.	**TRANSFER**						
1.4.1.	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan**	**26.156.571.346**	**23.505.816.950**	**32.032.638.219**	**28.030.683.366**	**33.770.547.807**	**7,72**
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	23.422.682.526	20.916.759.399	29.582.380.341	25.346.214.987	31.034.171.413	9,15
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	2.733.888.820	2.589.057.551	2.450.257.878	2.684.468.379	2.736.376.394	(2,34)
1.4.2.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**536.510.342.166**	**602.289.456.465**	**617.441.322.880**	**540.335.367.135**	**551.517.780.876**	**(2,15)**
1.4.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	533.597.927.166	602.289.456.465	617.441.322.880	540.335.367.135	551.517.780.876	(2,08)
1.4.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.912.415.000	-	-	-	-	-
JUMLAH TRANSFER		**562.666.913.512**	**625.795.273.415**	**649.473.961.099**	**568.366.050.501**	**585.288.328.683**	**(1,77)**

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**3.249.141.935.364**	**3.430.884.286.153**	**3.600.847.367.173**	**3.500.828.821.040**	**3.905.245.234.876**	**2,66**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Dari tabel 2.E. di atas, rata-rata pertumbuhan belanja dan transfer daerah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun tahun 2020-2024 sebesar 2,66%. Jenis komponen belanja tertinggi yaitu pada belanja tak terduga yaitu rata-rata mencapai 2.990,97% dan yang terkecil belanja transfer rata-rata sebesar minus 1,77%.

Pada jenis komponen belanja operasi kurun waktu tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuh-an sebesar 4,54%. Untuk komponen belanja operasi rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu pada belanja hibah sebesar 39,36% dan terendah yaitu belanja bunga sebesar minus 2,22%.

Rata-rata perkembangan pada komponen belanja hibah selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 39,89%. Untuk rata-rata perkembangan komponen belanja bantuan sosial sebesar 30,59%. Alokasi Bantuan Sosial dianggarkan mendasari Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Rata-rata perkembangan belanja modal selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar minus 1,26%. Untuk komponen belanja modal tertinggi yaitu pada belanja modal aset tetap lainnya dengan rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 180,07% dan terendah pada belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan rata-rata perkembangan sebesar minus 9,69%.

Rata-rata perkembangan belanja tidak terduga kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 2.990,97%, belanja tidak terduga pada tahun 2020 mencapai 15.073,37%. Untuk belanja tidak terduga dimana digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Rata-rata perkembangan belanja transfer kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar minus 1,77%, belanja transfer tertinggi pada tahun 2021 sebesar 11,22% dan terendah pada tahun 2020 mencapai sebesar minus 14,34%. Untuk komponen belanja transfer terdiri dari belanja transfer bagi hasil pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,72%, belanja transfer bagi hasil pendapatan tertinggi pada tahun 2022 mencapai 36,28% dan terendah pada tahun 2023 mencapai minus 12,49%. Untuk belanja bantuan keuangan dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2020-2024 mencapai sebesar minus

2,15%, belanja bantuan keuangan tertinggi pada tahun 2021 mencapai 12,26% dan terendah pada tahun 2020 mencapai minus 15,08%.

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
2) Pencairan dana cadangan.
3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Penerimaan pinjaman daerah.
5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6) Penerimaan piutang daerah.
7) Penerimaan dana bergulir.
8) Penerimaan hasil penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui :

1) Pembentukan dana cadangan.
2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas berasal dari pemanfaatan SiLPA yang didasarkan atas hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman daerah. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,31%. Penerimaan pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp.242,71 miliar, tahun 2021 sebesar

Rp.362,81 miliar, tahun 2022 sebesar Rp.486,69 miliar, tahun 2023 sebesar Rp.293,39 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp.275,89 miliar.

Perkembangan penerimaan pembiayaan Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

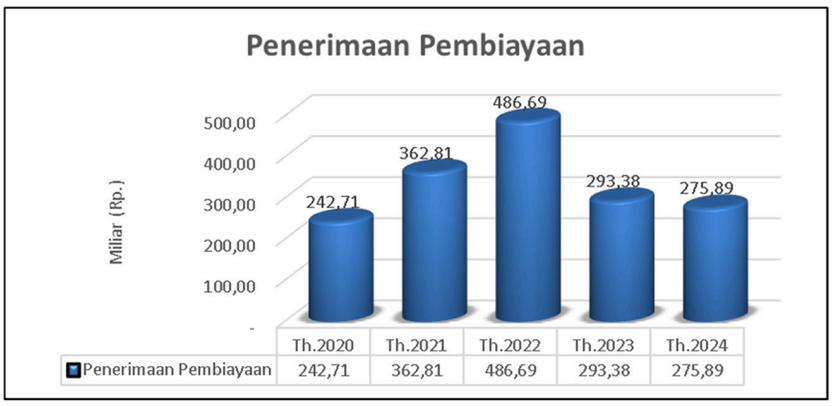

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2019-2023.

Gambar 2.121
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiaya-an yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Perkembangan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 24,39%. Pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp.29,52 miliar, tahun 2021 sebesar Rp.49,75 miliar, tahun 2022 sebesar Rp.49,75 miliar, tahun 2023 sebesar Rp.44,20 miliarr dan tahun 2024 mencapai sebesar Rp.61,79 miliar.

Pengeluaran pembiayaan utamanya digunakan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 20 miliar, tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.25 miliar dan tahun 2023 dianggarkan kembali sebesar Rp.15 miliar. Penyertaan modal (ivestasi) pemerintah daerah dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp.28,15 miliar, tahun 2021 sebesar Rp.28,25 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp.18,51 miliar. Pengeluaran investasi non permanen lainnya (pemberian pinjaman daerah) pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp.1,37 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp. 1,50 miliar.

Perkembangan pengeluaran pembiayaan seleng-kapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

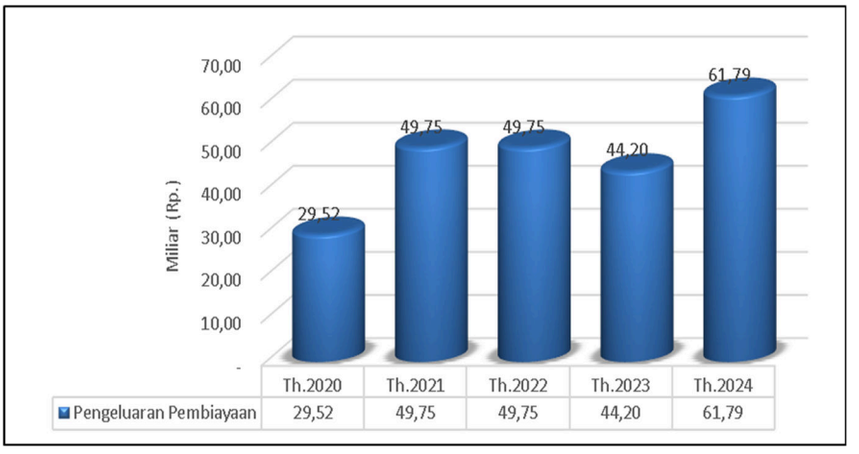

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

Gambar 2.122
Perkembangan Pengeluaran dan Pembiayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Pengeluaran dan Pembiayaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
1.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
1.1.1.	Penggunaan SILPA	242.705.123.481	294.230.476.359	369.896.692.236	262.505.937.757	246.766.334.764	(0,90)
1.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.879.033.600	29.120.966.400	**-**
1.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	**-**
1.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	68.575.601.620	116.794.431.030	-	-	-
1.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**242.705.123.481**	**362.806.077.979**	**486.691.123.266**	**293.384.971.357**	**275.887.301.164**	**4,31**
1.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
1.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	-	20.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000	-	(70,00)

1.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000	28.249.000.000	24.746.000.000	18.510.784.000	-	(23,43)
1.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	10.693.392.563	61.790.015.820	-
1.2.4.	Pemberian Pinjaman Dearah	1.369.500.000	1.499.000.000	-	-	-	-
1.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**29.519.500.000**	**49.748.000.000**	**49.746.000.000**	**44.204.176.563**	**61.790.015.820**	**23,03**
PEMBIAYAAN NETO		**213.185.623.481**	**313.058.077.979**	**436.945.123.266**	**249.180.794.794**	**214.097.285.344**	**1,94**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

d) Neraca Daerah

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

1) Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,30%. Aset Pemerintah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan menjadi :

- Aset lancar merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terikat penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pertumbuhan aset lancer selama kurun waktu tahun 2020-2024 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 7,74%. Penurunan pada asset lancar terjadi pada pos kas dan setara kas yang berisi sisa saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan penempatan deposito daerah serta pada pos persediaan pada SKPD yang menandakan pengadaan barang habis pakai, langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan tidak banyak menghasilkan sisa persediaan.

- Investasi jangka panjang berupa investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa penyertaan modal pada BUMD/BUMN. Pertumbuhan investasi jangka panjang kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,36% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyumas menambah pembiayaan penyertaan modal pada BUMD.

- Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimilik pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertumbuhan aset tetap kurun waktu tahun 2020-2024 fluktuatf, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,45%. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa sarana dan prasarana fisik serta pengadaan dan pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan yang menambah nilai aset tetap.

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan atau dibatasi penggunaannya, dikhususkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggarkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang akan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

- Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan minus 3,99%. Aset lainnya dalam bentuk berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lainnya (barang yang diusulkan penghapusan) yang mengalami peningkatan.

Kewajiban pada neraca menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu 2020-2024 nilainya cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan 76,53%. Walaupun kewajiban cukup siginifikan masih dapat tertutup dengan nilai aktiva yang dibayar pada tahun berikutnya.

Ekuitas pada neraca menginformasikan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih anara aset dan kewajiban pemerintah daerah atau dapat dikatakan sebagai hak residual pemerintah daerah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Pertumbuhan ekuitas selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami pening-katan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,83%.

Untuk mengetahui rincian Neraca Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2020-2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.G. berikut.

Tabel 2.37
Neraca Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*	*(7)*
1.	**ASET**						
1.1.	**ASET LANCAR**	**451.579.646.525**	**540.897.867.969**	**370.845.818.652**	**364.211.442.497**	**300.411.450.725**	**(7,74)**
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	222.140.883.834	261.966.442.541	217.430.497.985	211.984.134.191	76.428.503.601	(16,38)
1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	34.602.242	4.996.932	7.166.954	31.364.559	-	48,87
1.1.3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.387.152.032	82.901.960	65.654.253	336.017.359	4.010.375	48,43
1.1.4.	Kas di BLUD	59.359.664.230	106.418.860.864	44.847.975.511	32.598.451.762	25.579.555.902	(6,86)
1.1.5.	Kas Lainnya	8.044.923.911	2.361.414.330	805.239.129	2.522.398.752	1.101.059.407	5,09
1.1.6.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	Piutang	99.274.147.721	117.848.564.396	51.523.134.659	55.475.734.619	107.439.955.300	15,94
	Piutang Pendapatan	180.894.369.780	199.758.466.342	139.700.638.058	146.311.693.630	204.109.883.889	6,15
	Piutang Lain-lain	-	5.800.599.928	-	-	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(81.620.222.060)	(87.710.501.874)	(88.177.503.400)	(90.835.959.012)	(96.669.928.589)	4,36
1.1.4.	Beban Dibayar di Muka	56.021.004	175.561.358	129.153.288	89.996.785	87.740.313	38,53
1.1.5.	Persediaan	57.282.251.551	52.039.125.588	56.036.996.873	61.173.344.470	89.770.625.827	13,61

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*	*(7)*
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**378.448.112.640**	**393.551.925.712**	**425.916.693.914**	**451.726.616.076**	**411.773.619.132**	**2,36**
1.2.1.	Investasi Non Permanen (Bersih)	6.214.574.680	7.378.054.838	7.238.213.772	7.133.070.291	7.044.384.341	3,53
	Dana Bergulir	10.220.282.762	11.744.434.705	11.723.859.678	11.710.179.731	11.723.756.538	3,68
	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.005.708.082)	(4.366.379.867)	(4.485.645.906)	(4.577.109.440)	(4.679.372.197)	4,00
1.2.2.	Investasi Permanen	372.233.537.959	386.173.870.874	418.678.480.142	444.593.545.785	404.729.234.791	2,35
1.3.	**ASET TETAP**	**5.595.686.489.377**	**6.196.704.702.965**	**6.431.300.779.066**	**6.532.949.669.501**	**6.905.573.496.520**	**5,45**
1.3.1.	Tanah	3.166.862.869.332	3.450.040.187.352	3.594.841.536.168	3.592.765.625.609	3.702.939.151.692	4,04
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	1.101.282.188.526	1.236.320.901.236	1.381.337.913.152	1.343.778.001.359	1.507.321.719.737	8,36
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.744.975.379.109	1.850.601.192.656	2.137.435.427.066	2.314.784.725.367	2.535.712.960.602	9,85
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.535.440.492.117	2.676.435.728.540	2.905.455.719.397	3.006.730.651.683	3.223.919.529.350	6,21
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	106.398.762.561	100.876.757.746	101.767.399.503	94.913.272.160	96.022.197.410	(2,47)
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	39.048.500.214	206.555.843.236	80.642.301.025	100.053.526.073	48.864.580.203	85,23
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(3.098.321.702.482)	(3.324.125.907.802)	(3.770.179.517.246)	(3.920.076.132.751)	(4.209.206.642.474)	8,01
1.4.	**DANA CADANGAN**	**-**	**20.000.000.000**	**45.000.000.000**	**29.120.966.400**	**-**	**(67,64)**

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*	*(7)*
1.4.1.	Dana Cadangan	-	20.000.000.000	45.000.000.000	29.120.966.400	-	(67,64)
1.5.	**ASET LAINNYA**	**114.801.590.492**	**107.128.534.985**	**107.234.795.269**	**108.621.916.330**	**97.014.009.240**	**(3,99)**
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	758.550.000	758.550.000	758.550.000	758.550.000	-
1.3.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	82.767.544.715	82.767.544.715	72.985.149.000	73.154.945.386	56.106.642.386	(8,72)
1.3.4.	Aset Tidak Berwujud	146.262.772	56.372.910	1.507.797.656	2.366.217.842	1.622.792.081	634,69
1.3.5.	Aset Lain-lain	103.611.078.527	91.973.019.470	31.983.298.613	32.342.203.102	38.526.024.773	(14,05)
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(71.723.295.522)	(68.426.952.110)	-	-	-	(54,60)
1.6.	**PROPERTI INVESTASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.845.858.703**	**-**
1.6.1.	Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	4.830.993.643	-
1.6.2.	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	59.341.000	-

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*	*(7)*
1.6.3.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	(44.475.940)	-
JUMLAH ASET		**6.540.515.839.033**	**7.258.283.031.630**	**7.380.298.086.900**	**7.486.630.610.804**	**7.719.618.434.320**	**4,30**
2.	**KEWAJIBAN**						
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**53.745.484.966**	**157.445.030.773**	**51.868.107.152**	**54.912.628.951**	**136.237.156.301**	**69,96**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	304.523.002	599.803.097	707.251.723	656.776.149	645.988.508	26,52
	Utang Bunga	-	792.987.786	1.142.286.024	-	550.196.863	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	73.290.015.820	134,33
2.2.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	672.650.976	825.003.177	1.293.714.622	1.662.238.229	3.151.562.825	49,39
2.2.4.	Utang Beban	37.883.296.200	141.396.400.421	34.857.276.716	35.919.146.141	50.722.994.285	60,54
2.2.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.385.014.788	2.330.836.292	2.367.578.067	5.174.468.432	7.876.398.000	35,30
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**68.575.601.620**	**185.370.032.650**	**174.676.640.087**	**56.245.776.432**	**(36,78)**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-	68.575.601.620	185.370.032.650	174.676.640.087	56.245.776.432	(36,78)

No.	URAIAN	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*	*(7)*
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**53.745.484.966**	**226.020.632.393**	**237.238.139.802**	**229.589.269.038**	**192.482.932.733**	**76,53**
3.	**EKUITAS**						
3.1.	**EKUITAS**	**6.486.770.354.067**	**7.032.262.399.237**	**7.143.059.947.098**	**7.257.041.341.766**	**7.527.135.501.587**	**3,83**
JUMLAH EKUITAS		**6.486.770.354.067**	**7.032.262.399.237**	**7.143.059.947.098**	**7.257.041.341.766**	**7.527.135.501.587**	**3,83**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.540.515.839.033**	**7.258.283.031.630**	**7.380.298.086.900**	**7.486.630.610.804**	**7.719.618.434.320**	**4,30**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermaanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas menggunakan :

- Rasio lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan kewajiban lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Rasio lancar (*Current Ratio*) Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan *fluktuatif*. Tahun 2020 sebesar 8,40, tahun 2021 sebesar 3,44, tahun 2022, sebesar 7,15, tahun 2023 sebesar 6,63 dan tahun 2024 sebesar 2,21. *Current ratio* dalam kurun waktu tersebut masih pada nilai positif >1, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban lancarnya. Untuk mengetahui rincian *Current Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.H. berikut :

Tabel 2.38
***Current Ratio* Kabupaten Banyumas**
Tahun 2020-2024

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	*Current Ratio*
2020	451.579.646.524,58	53.745.484.966,00	8,40
2021	540.897.867.968,85	157.445.030.773,00	3,44
2022	370.845.818.651,66	51.868.107.152,33	7,15
2023	364.211.442.497,31	54.912.628.950,67	6,63
2024	300.411.450.725,11	136.237.156.301,00	2,21

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

- Rasio kas *(Cash Ratio)* membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. *Cash ratio* Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan *fluktuatif*. Tahuan 2020 sebesar 5,49, tahun 2021 menjadi 2,36, tahun 2022 sebesar 5,07,

tahun 2023 sebesar 4,51 dan pada tahun 2024 sebesar 0,76 walaupun terjadi penurunan akan tetapi *rasio* tersebut masih dalam kategori aman, artinya Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memenuhi/melunasi semua kewajibannya. Untuk mengetahui rincian *Cash Ratio* Kabupaten Banyuma tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.I. berikut :

Tabel 2.39
***Cash Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024**

Tahun	Kas (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	*Cash Ratio*
2020	294.967.226.249,00	53.745.484.966,00	5,49
2021	370.834.616.627,00	157.445.030.773,00	2,36
2022	263.156.533.831,84	51.868.107.152,33	5,07
2023	247.472.366.623,00	54.912.628.950,67	4,51
2024	103.113.129.285,00	136.237.156.301,00	0,76

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

- Rasio cepat *(Quick Ratio)* membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat, semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio cepat Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan *fluktuatif*. Tahun 2020 *quick ratio* sebesar 7,34, tahun 2021 sebesar 3,10, tahun 2022 sebesar 6,07, tahun 2023 sebesar 5,52 dan pada tahun 2024 sebesar 1,55. Walaupun mengalami penurunan namun masih menunjukkan angka positif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas keuangan tinggi sehingga dapat memenuhi semua kewajibannya dengan cepat. Untuk mengetahui rincian *Quick Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.J. berikut :

Tabel 2.40
***Quick Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023**

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Persediaan (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	*Quiick Ratio*
2020	451.579.646.524,58	57.282.251.550,70	53.745.484.966,00	7,34
2021	540.897.867.968,85	52.039.125.588,00	157.445.030.773,00	3,10
2022	370.845.818.651,66	56.036.996.873,29	51.868.107.152,33	6,07
2023	364.211.442.497,31	61.173.344.470,47	54.912.628.950,67	5,52
2024	300.411.450.725,11	89.770.625.827,02	136.237.156.301,00	1,55

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah dikatakan *solvable* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*. *Rasio Solvabilitas* Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan fluktuatif. Tahun 2020 sebesar 121,69, tahun 2021 sebesar 32,11 tahun 2022 sebesar 31,11 tahun 2023 sebesar 32,61 dan tahun 2024 sebesar 40,11. Walaupun ratio tersebut mengalami perkembangan fluktuatif namun kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memenuhi seluruh kewajibannya masih sangat *solvable*. Artinya Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai kemampuan dengan aktiva yang dimiliki untuk membayar semua kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki. Untuk mengetahui rincian rasio solvabilitas Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Rasio *Solvabilitas* Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Tahun	Total Kewajiban (Rp.)	Total Aktiva (Rp.)	*Ratio Solvabilitas*
2020	6.540.515.839.032,71	53.745.484.966,00	121,69
2021	7.258.283.031.630,04	226.020.632.393,00	32,11
2022	7.380.298.086.900,23	237.238.139.802,33	31,11
2023	7.486.630.610.804,07	229.589.269.037,67	32,61
2024	7.719.618.434.319,69	192.482.932.733,00	40,11

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

3) Rasio Laverage

Rasio utang *(Leverage)* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage yaitu Rasio utang terhadap ekuitas *(Total Debt to Equity Ratio/DER)*. DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang *(over laveraged)* dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko

pemberian utang semakin besar. Rasio DER pada Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai aktiva atau kekayaan yang tinggi untuk membayar semua kewajibannya dengan modal yang telah dimiliki. Untuk mengetahui rincian DER Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
***Debt to Equity Ratio* Kabupaten Banyumas**
Tahun 2020-2024

Tahun	Total Kewajiban (Rp.)	Total Ekuitas (Rp.)	*Ratio Leverage*
2020	53.745.484.966,00	6.486.770.354.066,71	0,01
2021	226.020.632.393,00	7.032.262.399.237,04	0,03
2022	237.238.139.802,33	7.143.059.947.097,90	0,03
2023	229.589.269.037,67	7.257.041.341.766,40	0,03
2024	192.482.932.733,00	7.527.135.501.586,69	0,03

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2020-2024.

b. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Otonomi fiskal daerah diukur melali seberapa besar peran PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka otonomi fiskal daerah semakin besar. Pada periode tahun 2020-2024 nilai otonomi fiskal Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 otonomi fiskal daerah menurun dikarenakan kenaikan PAD lebih kecil dari pendapatan transfer. Untuk itu diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam rangka menuju Kabupaten Banyumas yang lebih mandiri. *(Rekomendasi 8)*

Untuk mengetahui rincian analisis otonomi fiskal Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Total (Rp.)	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Otonomi Fiskal Daerah (%)
2020	3.330.186.788.242	668.211.148.299	20,07
2021	3.487.722.900.410	761.991.440.173	21,85
2022	3.426.408.181.664	822.685.992.142	24,01
2023	3.498.414.361.010	854.942.206.458	24,44
2024	3.793.670.076.584	903.571.683.035	23,82

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2020 – 2024.

Selain otonomi fiskal daerah, kesehatan keuangan daerah juga tercermin dari rasio kemampuan mendanai belanja daerah. Rasio ini membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan pada periode tahun 2020-2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022-2024.

Untuk mengetahui rincian raso kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Kabupaten Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan (Rp.)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.)	Total Penerimaan (Rp.)	Total Belanja dan Transfer (Rp.)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.)	Total Pengeluaran (Rp)	Rasio
a	*b*	*C*	*d=b+c*	*e*	*f*	*g=e+f*	*h=d/g*
2020	3.330.186.788.242	242.705.123.481	3.572.891.911.723	3.249.141.935.364	29.519.500.000	3.278.661.435.364	1,09
2021	3.487.722.900.410	362.806.077.979	3.850.528.978.389	3.430.884.286.153	49.748.000.000	3.480.632.286.153	1,11
2022	3.426.408.181.664	486.691.123.266	3.913.099.304.930	3.600.847.367.173	49.746.000.000	3.650.593.367.173	1,07
2023	3.498.414.361.010	293.384.971.357	3.791.799.332.367	3.500.828.821.040	44.204.176.563	3.545.032.997.603	1,07
2024	3.793.670.076.584	275.887.301.164	4.069.557.377.748	3.905.245.234.876	61.790.015.820	3.967.035.250.696	1,03

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2020 – 2024.

Kualitas belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan aspek penting dalam analisis kesehatan keuangan daerah. Kualitas ini dapat tercermin melalui rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, dan rasio belanja modal.

Rasio belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas periode 2020-2025 menunjukkan dengan rata-rata sebesar 40,94 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa belanja pegawai di Kabupaten Banyumas masih di bawah ketentuan pemerintah mengenai batas maksimal belanja

pegawai pada APBD yakni setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja daerah.

Untuk mengetahui rasio belanja pegawai daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Rasio Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Total Belanja dan Transfer (Rp.)	Rasio Belanja Pegawai (%)
2020	1.271.128.929.454	3.249.141.935.364	39,12
2021	1.398.098.601.191	3.430.884.286.153	40,75
2022	1.451.366.997.587	3.600.847.367.173	40,31
2023	1.464.100.711.140	3.500.828.821.040	41,82
2024	1.667.238.715.369	3.905.245.234.876	42,69

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2020 – 2024.

Dalam konteks belanja daerah, pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi di samping sektor swasta, sektor rumah tangga, dan luar negeri. Belanja pemerintah *(government spending)* dapat menjadi penggerak mesin ekonomi daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian kebijakan penggunaan APBD untuk menggerakkan ekonomi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja suatu pemerintah daerah.

Kualitas belanja pemerintah dapat diukur dari penggunaan APBD untuk belanja modal, barang dan jasa. Penggunaan ini tercermin melalui rasio belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja barang dan jasa pada periode 2020-2024 rata-rata mencapai 26,13 persen dari total belanja APBD.

Untuk mengetahui rincian rasio belanja barang dan jasa daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Rasio Belanja Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Barang & Jasa (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Rasio Belanja Barang & Jasa (%)
2020	927.391.409.192	3.249.141.935.364	28,54
2021	822.140.656.636	3.430.884.286.153	23,96
2022	896.365.360.138	3.600.847.367.173	24,89
2023	974.286.624.864	3.500.828.821.040	27,83
2024	993.023.708.364	3.905.245.234.876	25,43

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2020 – 2024.

Rasio belanja modal dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Kaupaten Banyumas pada periode 2020-2024 sebesar 11,56 persen dari total belanja APBD. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyumas digunakan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas difokuskan pada peremajaan dan pemeliharaan aset yang sudah dimiliki.

Untuk mengetahui rincian rasio belanja modal daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Rasio Belanja Modal (%)
2020	363.470.409.584	3.249.141.935.364	11,19
2021	432.235.246.229	3.430.884.286.153	12,60
2022	479.036.065.598	3.600.847.367.173	13,30
2023	333.503.478.957	3.500.828.821.040	9,53
2024	436.935.317.516	3.905.245.234.876	11,19

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2020 – 2024.

c. Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.93,50 miliar atau sebesar 2,25%. Adapun komponen pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja kurun waktu tahun 2020-

2024 dan pelaksanaan APBD 2025. Sedangkan target proyeksi PAD tahun 2026-2030 menggunakan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 6,00-6,45 %, tahun 2026 sebesar 6,10-6,50 serta optimis bahwa perekonomian terus membaik.

PAD tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.82,90 miliar atau 6,37%. Adapun komponen PAD bersumber dari ; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.46 miliar atau sebesar 7,99%. Untuk sumber PAD dari pajak daerah berasal dari ; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral, pajak PBB dan pajak BPHTB serta pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB.

Opsen PKB dan BBNKB tahun 2026-2030, untuk pendapatan dari opsen PKB diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.4,37 miliar atau sebesar 3,76%. Sedangkan untuk BBNKB diproyeksikan meningkat rata-rata Rp.1,32 miliar atau sebesar 2,53%.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menyediakan alokasi anggaran dari penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan opsen Pajak.

Retribusi daerah tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.30,90 miliar atau sebesar 4,90%. Untuk sumber PAD dari retribusi daerah jasa umum, terdiri dari ; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat, untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat rata-rata sebesar Rp.1,75 miliar atau sebesar 5,29% dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar meningkat rata-rata sebesar Rp.4,25 miliar atau sebesar 7,19%.

Guna pencapaian target PAD tahun 2026-2030 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan langkah-langkah upaya untuk peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya kebijakan *intensifikasi* yang akan

di tempuh Pemerintah Kabupaten Banyumas, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1) Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2) Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
3) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
4) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
5) Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi Online *(Sitari-on)* untuk pembayaran non tunai retribusi.
6) Meningkatkan pelayanan pajak daerah melalui tanda tangan elektronik pada SPPT PBB-P2, melakukan penagihan piutang PBB-P2 melalui informasi tunggakan pajak pada SPPT PBB-P2 dan Melakukan *update* NJOP.
7) Mempermudah dan memperluas cakupan pembayaran pajak daerah, baik dengan *system id billing*, Bima Qris Bank Jawa Tengah, BUMDes, Kantor Pos dan Indomart.
8) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembayaran pajak dan pembayaran tunggakan pajak.
9) *Updating* perundangan/Perbub terkait pajak (Perbub Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel), Restoran, BPHTB, MBLB, Air Tanah, PBB-P2, Hiburan, Reklame, Insentif Pajak, Nilai Sewa Reklame (NSR).
10) Melakukan pemasangan alat monitoring pajak antara lain yaitu di Restoran, Hotel dan Tempat Parkir.
11) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Opsen PKB dan BBNKB melalui kegiatan pemutakhiran data objek pajak, perluasan pelayanan dan pembayaran, giat lapangan tindakan penagihan tunggakan dan piutang yang besinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jasa Raharja dan Kepolisian.

Sedangkan upaya kebijakan *ekstensifikasi* pendapatan daerah melalui :

1) Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
2) Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.

3) Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.
4) Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Selain itu, dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk berinovasi dalam pembiayaan program-program pembangunan melalui kolaborasi dengan sektor swasta utamanya untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendapatan transfer tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.10,60 miliar atau sebesar 0,37%. Untuk sumber pendapatan transfer, terdiri dari ; pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah provinsi. Pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.6,41 miliar atau sebesar 0,24%, untuk komponen sumber pendapatan transfer pemerintah pusat, terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), DAU serta DAK dan transfer pemerintah pusat lainnya, berupa insentif fiskal dan dana desa.

Pendapatan transfer antar daerah dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya, untuk pendapatan bagi hasil pajak diproyeksikan meningkat rata-rata hanya sebesar Rp.4,19 miliar atau sebesar 2,05%, hal tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan dinamika yang ada dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 membebaskan tunggakan atas pokok PKB yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen bagi hasil pajak daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2026-2030 diproyeksikan tetap rata-rata sebesar Rp.5,27 miliar. Untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Komposisi struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan untuk :

1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2) Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta ketahanan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
4) Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangan diantaranya untuk fungsi pendidikan; fungsi kesehatan; dan infrastruktur.

Struktur belanja daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja dan transfer daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.106,33 miliar atau sebesar 2,55%, struktur belanja daerah terdiri dari :

1) Belanja operasi, untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.39,15 miliar atau sebesar 1,31%. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
    a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD dan pegawai ASN dan PPPK yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tahun 2026-2030 belanja pegawai diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.38,73 miliar atau sebesar 2,17%, kenaikan tersebut dikarenakan untuk *acrees* 2,5% yang digunakan antara

lain untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan PNS dan PPPK.

b) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat. Dalam belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas berpedoman Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar Rp.6,02 miliar atau sebesar minus 0,55%, hal ini dikarena diperkirakan adanya kenaikan kebutuhan dan harga atas barang/jasa pada tahun yang akan datang, seperti kenaikan kebutuhan barang/jasa dan biaya jasa Non PNS yang setiap tahunnya naik dengan adanya kenaikan UMR untuk wilayah Kabupaten Banyumas.

c) Belanja bunga yaitu untuk membayar pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan pada tahun 2026 Rp.1,31 miliar.

d) Belanja subsidi tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 95 juta dan tahun 2027-2030 diproyeksikan tetap sebesar Rp.500 juta.

e) Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah, untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.5,9 miliar atau 7,21%. Belanja hibah antara lain digunakan untuk bantuan operasional PAUD dan TK, SD, MI dan SMP, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Ponpes, PMI, Pramuka, organisasi olahraga/KONI, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah

kepada partai politik ke KPUD, Bawaslu dalam rangka kebutuhan penyelengaraan Pilkada serentak.

f) Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Belanja bantuan sosial untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.755,43 juta atau sebesar 2,83%. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

2) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Belanja modal, untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.69,36 miliar atau sebesar 13,08%.

3) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga untuk tahun 2026-2030 rata-rata setiap tahunnya diproyeksikan tetap sebesar Rp.10 miliar. Penganggaran belanja tidak terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.

b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat meng-ganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya (pemerintah kabupaten/kota dan desa). Belanja transfer, untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar Rp.2,17 miliar atau sebesar minus 0,35%. Meningkatnya dana transfer karena adanya harapkan penambahan dana transfer yang ditujukan untuk Pemerintah desa/kelurahan. Belanja transfer dirinci atas jenis :

   a) Belanja bagi hasil pendapatan bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada pemerintah kabupaten/kota. Belanja bagi hasil pendapatan untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.2,44 miliar atau sebesar 5,06%.
   b) Transfer bantuan keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja bantuan keuangan, untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar Rp.4,61 miliar atau sebesar minus 0,80%, proyeksi peningkatan tersebut di proyeksikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa/kelurahan dalam rangka pemulih-an ekonomi (UMKM) dan untuk pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan.

5) Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya tahun 2026-2030 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar Rp.3,75 miliar atau sebesar 3,19%. Untuk pencairan dana cadangan pada tahun 2028 diproyeksikan sebesar Rp.40,88 miliar dan tahun 2029 diproyeksikan sebesar Rp.39,12 miliar, pencairan dana cadangan tersebut akan dihibahkan ke KPUD, Bawaslu dalam rangka kebutuhan penyelengaraan Pilkada serentak. Sedang-kan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2026-2030 dialokasikan untuk, pembentukan dana cadangan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.20 miliar, tahun 2027 Rp.30 miliar dan tahun 2028 sebesar Rp.30 miliar. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian *(prudential)* berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diproyeksikan pada tahun 2026-2030 sebesar Rp.12,60 miliar. Pembayaran pokok hutang berupa angsuran pokok pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN Daerah) tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.46,34 miliar.

Untuk lebih jelasnya Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026-2030, sebagaimana tabel 2.R. berikut.

Tabel 2.48
APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Proyeksi APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2026-2030

No.	URAIAN	APBD Tahun 2024 (Rp.)	PROYEKSI (Rp.)				
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2208	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	**PENDAPATAN DAERAH**						
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**903.571.683.035**	**1.186.170.900.000**	**1.245.632.180.000**	**1.310.242.801.000**	**1.385.712.945.000**	**1.517.777.000.000**
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	323.426.130.549	511.395.000.000	547.410.600.000	587.613.138.000	635.613.339.000	695.399.330.000
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	524.647.635.309	589.775.900.000	611.221.580.000	632.629.663.000	654.099.606.000	713.377.670.000
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.191.432.745	31.000.000.000	32.000.000.000	33.000.000.000	34.000.000.000	38.000.000.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.306.494.432	54.000.000.000	55.000.000.000	57.000.000.000	62.000.000.000	71.000.000.000
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.876.611.922.393**	**2.823.341.600.000**	**2.834.088.900.000**	**2.845.313.800.000**	**2.856.727.600.000**	**2.865.727.600.000**
1.2.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.586.742.016.886**	**2.625.218.300.000**	**2.630.670.400.000**	**2.636.441.300.000**	**2.644.855.100.000**	**2.650.855.100.000**
1.2.1.1.	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**2.207.364.617.886**	**2.259.987.800.000**	**2.265.439.900.000**	**2.271.210.800.000**	**2.279.624.600.000**	**2.285.624.600.000**
1.2.1.1.1.	Bagi Hasil Pajak	42.430.251.000	44.421.300.000	45.753.900.000	47.126.500.000	48.540.300.000	48.540.300.000
1.2.1.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	7866.113.000	1.784.600.000	1.784.600.000	1.784.600.000	1.784.600.000	1.784.600.000
1.2.1.2.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.461.885.991.064	1.533.010.600.000	1.537.130.100.000	1.541.528.400.000	1.548.528.400.000	1.554.528.400.000
1.2.1.2.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	695.182.262.822	680.771.300.000	680.771.300.000	680.771.300.000	680.771.300.000	680.771.300.000
1.2.1.2.	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**379.377.399.000**	**365.230.500.000**	**365.230.500.000**	**365.230.500.000**	**365.230.500.000**	**365.230.500.000**
1.2.1.2.1.	Dana Desa	358.605.511.000	15.042.000.000	15.042.000.000	15.042.000.000	15.042.000.000	15.042.000.000
1.2.1.2.2.	Insentif Fiskal	20.771.888.000	350.188.500.000	350.188.500.000	350.188.500.000	350.188.500.000	350.188.500.000

No.	URAIAN	APBD Tahun 2024 (Rp.)	PROYEKSI (Rp.)				
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2208	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.2.2.	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**289.869.905.507**	**198.123.300.000**	**203.418.500.000**	**208.872.500.000**	**211.872.500.000**	**214.872.500.000**
1.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	268.279.615.582	176.505.400.000	181.800.600.000	187.254.600.000	190.254.600.000	193.254.600.000
1.2.2.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya / Bantuan Keuangan	21.590.289.925	21.617.900.000	21.617.900.000	21.617.900.000	21.617.900.000	21.617.900.000
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.486.471.156**	**5.272.100.000**	**5.272.100.000**	**5.272.100.000**	**5.272.100.000**	**5.272.100.000**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	13.411.593.892	5.272.100.000	5.272.100.000	5.272.100.000	5.272.100.000	5.272.100.000
1.3.2.	Pendapatan lainnya	74.877.264	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPTAN DAERAH		**3.793.670.076.584**	**4.014.784.600.000**	**4.084.993.180.000**	**4.160.828.701.000**	**4.247.712.645.000**	**4.388.776.700.000**
2.	**BELANJA DAERAH**						
2.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.882.565.389.582**	**2.945.883.339.263**	**3.021.631.640.000**	**3.083.177.001.000**	**3.113.478.745.000**	**3.102.491.495.000**
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.667.238.715.369	1.739.270.195.503	1.812.122.059.000	1.869.189.300.000	1.880.189.600.000	1.894.195.600.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	993.023.708.364	1.079.426.542.506	1.066.136.081.000	1.032.856.701.000	1.050.345.545.000	1.055.352.295.000
2.1.3.	Belanja Bunga	8.679.104.156	1.310.000.000	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	95.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.1.5.	Belanja Hibah	187.837.855.193	99.835.307.004	115.030.400.000	152.231.000.000	153.475.600.000	123.475.600.000
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	25.786.006.500	25.946.294.250	27.843.100.000	28.400.000.000	28.968.000.000	28.968.000.000
2.2.	**BELANJA MODAL**	**436.935.317.516**	**443.147.714.657**	**462.752.440.000**	**515.430.500.000**	**597.636.400.000**	**720.567.705.000**
2.2.1.	Belanja Tanah	6.966.278.344	5.600.000.000	14.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000
2.2.2.	Belanja Pearalatan dan Mesin	145.091.425.612	89.966.840.516	121.016.340.000	125.092.400.000	128.101.700.000	131.101.700.000
2.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	161.221.013.495	220.827.996.771	139.990.100.000	140.089.900.000	156.089.900.000	227.141.205.000
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.612.432.334	121.416.578.170	165.078.600.000	209.440.600.000	268.440.600.000	312.320.600.000
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.029.467.731	5.303.799.200	22.602.400.000	23.732.600.000	24.919.200.000	24.919.200.000
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	14.700.000	32.500.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	85.000.000
2.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**	**4.56.199.095**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	456.199.095	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
JUMLAH BELANJA		**3.319.956.906.193**	**3.399.031.053.920**	**3.494.384.080.000**	**3.608.607.501.000**	**3.721115.145.000**	**3.833.059.200.000**

No.	URAIAN	APBD Tahun 2024 (Rp.)	PROYEKSI (Rp.)				
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2208	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
3.4.	**TRANSFER**						
3.4.1.	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan**	**33.770.547.807**	**45.202.500.000**	**49.835.600.000**	**52.327.500.000**	**54.943.800.000**	**54.943.800.000**
3.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	31.034.171.413	36.327.400.000	40.516.800.000	42.542.700.000	44.669.800.000	44.669.800.000
3.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	2.736.376.394	8.875.100.000	9.318.800.000	9.784.800.000	10.274.000.000	10.274.000.000
3.4.2.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**551.517.780.876**	**576.608.546.080**	**558.173.500.000**	**558.173.700.000**	**558.173.700.000**	**558.173.700.000**
3.4.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	551.517.780.876	576.608.546.080	558.173.500.000	558.173.700.000	558.173.700.000	558.173.700.000
JUMLAH TRANSFER		**585.288.328.683**	**621.811.046.080**	**608.009.100.000**	**610.501.200.000**	**613.117.500.000**	**613.117.500.000**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**3.905.245.234.876**	**4.020.842.100.000**	**4.102.393.180.000**	**4.219.108.701.000**	**4.334.232.645.000**	**4.446.176.700.000**
SURPLUS/(DEFISIT)		**(111.575.158.292)**	**(6.057.500.000)**	**(17.400.000.000)**	**(58.280.000.000)**	**(86.520.000.000)**	**(57.400.000.000)**
4.	**PEMBIAYAAN**						
4.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
4.1.1.	Penggunaan SILPA	246.766.334.764	85.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	70.000.000.000
4.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	29.120.966.400	-	-	40.880.000.000	39.120.000.000	-
4.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
4.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**275.887.301.164**	**85.000.000.000**	**60.000.000.000**	**100.880.000.000**	**99.120.000.000**	**70.000.000.000**
4.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
4.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	20.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
4.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000
4.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	61.790.016.000	46.342.500.000	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**61.790.015.820**	**78.942.500.000**	**42.600.000.000**	**42.600.000.000**	**12.600.000.000**	**12.600.000.000**

No.	URAIAN	APBD Tahun 2024 (Rp.)	PROYEKSI (Rp.)				
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2208	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
PEMBIAYAAN NETTO		**214.097.285.344**	**6.057.500.000**	**17.400.000.000**	**58.280.000.000**	**86.520.000.000**	**57.400.000.000**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**102.522.127.052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Data diolah dari Bapenda, BKADdan Bappedalitbang Kab. Banyumas, (LRA APBD Tahun 2024 dan Proyeksi APBD Tahun 2026-2030).

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas berikut ini:

1. Aspek Geografi dan Demografi

Posisi dan Peran Strategis Daerah

- Belum optimalnya pemanfaatan posisi dan peran strategis daerah

Potensi Sumber Daya Alam

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

- Daya dukung air cenderung menurun
- Kecenderungan penurunan daya dukung pangan

Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

- Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran perlu dipertahankan
- Rendahnya peningkatan rumah tangga dengan akses air limbah domestik
- Masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap cakupan air minum
- Ketahanan Pangan Banyumas lebih rendah dari Provinsi
- Konsumsi makanan masyarakat Banyumas lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk hidup sehat dan aktif

Lingkungan Hidup Berkualitas

- Kualitas lingkungan hidup berpotensi menurun
- Fasilitas pengelolaan sampah masih belum optimal

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

- Kondisi geografis Kabupaten Banyumas merupakan wilayah rawan bencana
- Tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi

- Ancaman Perubahan Iklim

Demografi

- Pertumbuhan penduduk dan penduduk usia tua cenderung meningkat
- Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas tidak merata

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Banyumas belum optimal, yang ditunjukkan oleh capaian indikator berikut:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi melambat
- Banyaknya masyarakat Banyumas yang miskin
- Pendapatan rata-rata masyarakat Banyumas per orang masih rendah
- Rata-rata pengeluaran masyarakat Banyumas per orang meningkat lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional namun masih ada ketimpangan
- Ketimpangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi
- Pendapatan penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan
- Ketimpangan Pendapatan masih rendah namun cenderung meningkat
- Masih banyaknya Pengangguran
- Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas lebih rendah dari Nasional

Kesehatan Untuk Semua

- Harapan Hidup masyarakat Banyumas lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah karena kurang optimalnya faktor-faktor penunjang kesehatan seperti kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan gizi, perubahan perilaku, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan serta faktor fasilitas pelayanan kesehatan baik itu fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

Pendidikan Berkualitas yang Merata

- Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
- Harapan lama sekolah masyarakat yang tinggi perlu dipertahankan
- Tingkat perkembangan literasi masyarakat melalui peran perpustakaan belum optimal
- Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi masih rendah

Perlindungan Sosial yang Adaptif

- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih fluktuatif

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

- Belum optimalnya pembangunan kebudayaan di Kabupaten Banyumas
- Keberhasilan pembangunan olahraga masih rendah

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

- Pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan anak untuk memastikan hak-hak anak terlindungi di Kabupaten Banyumas belum optimal
- Tingkat keberhasilan program pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah
- Kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Banyumas masih rendah dibandingkan kesetaraan gender di Provinsi dan Nasional
- Belum optimalnya pembangunan pemuda

3. Aspek Daya Saing

Daya Saing Sumber Daya Manusia

- Beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk non produktif masih tinggi

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

- Peningkatan nilai tambah produk barang dan jasa belum optimal
- Nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan melambat
- Rasio sektor industri pengolahan belum optimal
- Rasio sektor akomodasi dan makan minum belum optimal
- Rasio kewirausahaan belum optimal

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja belum optimal
- Daya saing ekonomi daerah belum optimal
- Return on Aset pada BUMD masih rendah
- Kemampuan daerah dalam mengembangkan ide-ide baru menjadi inovasi belum optimal
- Dampak dari pengelolaan zakat belum optimal
- UMKM belum semua memiliki sertifikat halal

Penerapan Ekonomi Hijau

- Nilai tambah produk ekonomi hijau belum optimal

Transformasi Digital

- Cakupan Anggota Rumah Tangga mengakses Internet belum optimal

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami penurunan
- Nilai Ekspor meningkat namun diversifikasi ekspor masih belum optimal

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- Masih rendahnya perbandingan nilai tambah produk barang dan jasa di Kabupaten terhadap Provinsi
- Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah
- Tingkat perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa di wilayah Banyumas masih kurang
- Masih terdapat desa dan kelurahan yang kurang berkembang
- Pengembangan wilayah belum berbasis Produk Unggulan Daerah

Stabilitas Ekonomi Makro

- Tingkat inflasi di Kabupaten Banyumas fluktuatif
- Masih tingginya perbedaan harga antar wilayah beberapa komoditas pangan di Kabupaten Banyumas
- Menurunnya kapasitas fiskal daerah
- Pendapatan pajak daerah masih belum optimal

4. Aspek Pelayanan Umum

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Banyumas yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel kurang optimal
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
- Kualitas Pelayanan Publik belum optimal
- Integritas pemerintah daerah belum optimal
- Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum optimal
- Akuntabilitas keuangan daerah perlu dipertahankan
- Pengendalian intern pemerintah daerah belum optimal
- Pelaksanaan Reformasi Hukum belum optimal
- Kemampuan daerah melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal

Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

- Meningkatnya gangguan kondusifitas daerah

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

- Daya Saing Daerah Banyumas masih belum optimal

2.6.2.Isu Strategis

Isu strategis daerah Banyumas diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Banyumas yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Sebelumnya

Isu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis daerah Banyumas lima tahun ke depan terkait dengan isu-isu yang ada dalam SDG's, isu nasional dalam RPJMN, isu-isu dalam KLHS, maupun isu RPJMD pada periode sebelumnya. Berbagai isu tersebut tergambarkan dalam tabel isu strategis global, nasional, dan daerah sebagai berikut.

Tabel 2.49

Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Daerah (RPJMD periode sebelumnya)
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	1. Isu Strategis Kewilayahan: Ketimpangan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2. Isu Pembangunan Perdesaan: Perekonomian dan kemiskinan, Kesenjangan Pelayanan dan Relasi Desa-Kota 3. Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola 4. Isu Pembangunan IKN: Kesiapan Pemindahan ASN, Akselerasi Investasi di IKN, Alokasi Anggaran Pembangunan IKN 5. Isu Wilayah Jawa: Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah, Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri, Prevalensi stunting, wasting dan underweight masih relatif tinggi, Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11% (2023)	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat 8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Belum Meratanya Akses Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Ancaman Degradasi Hutan dan Lahan 3. Belum Optimalnya Akses Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan 4. Peningkatan Intensitas Bencana Alam dan Perubahan Iklim 5. Belum Optimalnya Daya Saing, Produktivitas dan Keberlanjutan Ekonomi Daerah 6. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah 3. Penanggulangan Kemiskinan 4. Penguatan Ketahanan Pangan

Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Banyumas

Perumusan isu strategis daerah dapat disimpulkan dari:

1. Permasalahan;
2. Isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional); dan
3. Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut

Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Perekonomian kabupaten Banyumas masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Kontribusi sektor pertanian cenderung menurun, diversifikasi produk ekspor komoditas perdagangan masih belum optimal, dan pengembangan pariwisata belum optimal. Peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masih rendah dengan banyaknya koperasi yang tidak sehat dan serapan tenaga kerja pada UMKM rendah. Sementara, pertumbuhan nilai investasi melambat. Dalam penanaman modal masih memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur, penyiapan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, dan kapasitas inovasi, serta stabilitas keamanan wilayah yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Banyumas. Sampai dengan tahun 2024, kondisi keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik ditandai dengan tingginya penegakan perda dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konflik.

Untuk mewujudkan penguatan daya saing ekonomi daerah, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penguatan infrastruktur, peningkatan SDM, penguatan jaringan perdazakatgangan dan ekspor, penguatan pariwisata dan ekraf, serta adopsi teknologi dan inovasi harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Banyumas dapat memperkuat daya saingnya di kancah ekonomi regional dan global, menciptakan peluang baru, dan membangun pondasi ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi, penanganan kemiskinan maupun pengangguran belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran berjalan lambat karena penanganan kemiskinan dan pengangguran belum secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan data dan integrasi antar program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan perbaikan agar tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Investasi yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, kesempatan kerja dan peluang usaha terbatas, serta kemandirian ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan pengangguran dan kemiskinan di kabupaten Banyumas. Selain itu, isu perlindungan sosial yang belum optimal turut mempengaruhi efektivitas program-program yang ada, sehingga perlindungan sosial yang memadai dan tepat sasaran diperlukan untuk mendukung masyarakat rentan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan pengangguran.

Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter

Untuk mengoptimalkan bonus demografi dan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat maka yang harus dilakukan adalah dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat dan kesehatan untuk semua. Tidak kalah penting peningkatan gender, yang meliputi kesetaraan gender dalam pendidikan, akses ke pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan kualitas SDM karena dapat meningkatkan kesehatan dan gizi anak, meningkatkan kemampuan belajar anak, dan mengurangi angka *stunting*.

Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi

Isu Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif merupakan isu jangka panjang yang tidak bisa diabaikan dan terkait dengan isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal, berorientasi hasil yang berdampak pada masyarakat. Landasan transformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyumas ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan yaitu cepat, responsif dan efektif serta kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, dengan meningkatkan kualitas kebijakan publik didukung dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi serta sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta proses pencapaian tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.

Di era teknologi informasi yang semakin maju, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan pondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel, akuntabilitas yang lebih tinggi. Teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data dan informasi yang lebih efisien, serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan tidak serta merta menjamin optimalnya keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi keuangan daerah, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung, integrasi sistem keuangan yang kurang baik, serta kurangnya sinergi antara program pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Daerah

Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Kabupaten Banyumas, dan belum optimalnya kualitas jalan (masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak). Pada pusat pertumbuhan ekonomi ketersedian dan kerusakan jalan menyebabkan belum optimalnya infrastruktur tersebut dalam mendukung perekonomian daerah, terutama untuk mendorong investasi, memperlancar arus barang dan orang, serta efisiensi logistik untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu perlu didorong untuk ditingkatkan pemenuhan dan pemerataannya, seperti perumahan dan kawasan permukiman yang layak, penyediaan sarana air minum kayak dan air minum aman, serta sanitasi aman bagi masyarakat.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan infrastruktur adalah kerusakan pada jaringan irigasi sehingga distribusi air tidak merata, masih kurangnya sarana tampungan air baku. Hal ini mempengaruhi produktivitas tanaman pangan, dan dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

Sebagai upaya mitigasi bencana yang diakibatkan daya rusak air Kabupaten Banyumas yang memiliki sungai-sungai besar memerlukan bangunan pengaman longsor berupa talud tebing sungai di berbagai wilayah. Ketersediaan dan kualitas jalan sebagai jalur evakuasi juga perlu terus ditingkatkan mengingat wilayah Kabupaten Banyumas yang rawan bencana. Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan potensi bencana, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Ketahanan Iklim dan Bencana

Kekayaan sumber daya alam Kabupaten Banyumas merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang potensial untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis wilayah, keberadaan Gunung Slamet, segala potensi yang menyertainya seperti tanah subur, pemandangan indah, jalur mineralisasi, potensi air tanah, potensi energi baru terbarukan (panas bumi, *biomassa*, dll), serta kekayaan lainnya mampu memberikan dukungan bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian kondisi geografis Kabupaten Banyumas juga memiliki potensi bahaya bencana. Kabupaten Banyumas memiliki risiko bencana tingkat sedang untuk beberapa jenis bahaya bencana, antara lain gempa bumi, tanah longsor, gunung api, banjir.

Peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan peningkatan kegiatan masyarakat, berdampak pada peningkatan penggunaan sumber daya alam, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Sejalan dengan peningkatan penduduk daya dukung pangan dan daya dukung air, dan kualitas lingkungan hidup diperkirakan menurun, dan timbulan sampah akan meningkat. Sementara emisi gas rumah

kaca sebagai penyumbang utama perubahan iklim diperkirakan meningkat hingga lima tahun yang akan datang. Perubahan iklim dapat meningkatkan kejadian bencana, khususnya bencana yang terkait iklim. Tanpa upaya yang signifikan hal-hal tersebut akan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan tetap melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menopangnya. Pelaksanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan mengimplementasikan strategi mitigasi bencana yang efektif. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan faktor-faktor lingkungan dan risiko bencana.

Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan suatu daerah dihitung melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Nilai indeks ketahanan pangan Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah sebesar 80,74. Nilai tersebut masuk dalam kategori ketahanan pangan sangat baik (lebih dari 75,68), namun jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya IKP Kabupaten Banyumas salah satu yang paling rendah di Jawa Tengah.

Aspek ketersediaan pangan, meskipun produksi pangan Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan, namun secara produktivitas komoditas pangan utama tidak terjadi peningkatan yang signifikan (padi, jagung, kedelai). Komoditas hortikultura masih diperlukan pengembangan komoditas potensial seperti buah-buahan bernilai tambah tinggi (alpukat, durian, melon), dan juga perlu mendapatkan perhatian yaitu produksi komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah. Dari subsektor peternakan terjadi perlambatan pertumbuhan produksi hasil peternakan tahun 2024 yang hanya tumbuh -19,9%, sementara di 2023 berhasil tumbuh sebesar 2,6%. Penguatan sarana dan

prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, irigasi, jalan) menjadi syarat mutlak untuk peningkatan ketersediaan pangan. Sarana prasarana cadangan pangan pemerintah daerah juga sangat terbatas, dari 27 kecamatan, hingga 2024 hanya ada 5 sarana prasarana cadangan pangan yang terbangun. Dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan diperlukan pemanfaatan teknologi pertanian sehingga upaya penguatan kelembagaan pertanian dan regenerasi petani menjadi penting. Penguatan ketersediaan pangan menjadi mutlak terutama dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis. Diharapkan kebutuhan dalam program prioritas nasional tersebut dapat disediakan dan dipenuhi dari dalam daerah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi petani. beberapa komoditas yang penting untuk disediakan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis antara lain: Daging Ayam, Telur, Susu, Ikan, Beras, Sayur dan Buah.

Aspek keterjangkauan pangan, dapat didekati dengan ketersediaan sarana prasarana pasar yang menjadi tempat penyediaan pangan bagi masyarakat. Hingga 2024, masih terdapat 10 kecamatan yang belum memiliki pasar rakyat, dan berdasarkan data yang telah di rekap dari 301 desa hanya ada 91 desa yang memiliki pasar desa. Hal tersebut berdampak juga pada jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Banyumas (2024: 78 desa rawan pangan). Ketersediaan pasar menjadi syarat mutlak untuk peningkatan nilai keterjangkauan pangan masyarakat. Selain itu, upaya pengendalian harga pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyumas harus terus berjalan melalui berbagai kebijakan antara lain: operasi pasar, gerakan pangan murah, gerakan tanam cabai, pengembangan pekarangan pangan lestari, pengembangan akses pasar kepada petani, dan lain-lain.

Aspek pemanfaatan pangan dapat ditinjau melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang pada 2024 skor untuk Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 92,63 atau masih di bawah skor PPH ideal 100. Diversifikasi konsumsi masyarakat sangat dibutuhkan terutama upaya peningkatan konsumsi untuk pangan hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur buah dan konsumsi ikan. Penguatan konsumsi masyarakat tersebut diharapkan juga mampu menurunkan nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) masyarakat, yang pada tahun 2024 nilai PoU Kabupaten Banyumas sebesar 7,98%.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1.Visi dan Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2024, yaitu

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung tiga frasa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Produktif

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal, secara terus menerus dengan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya. Berdasarkan pengertian tersebut produktif mencakup pencapaian hasil/tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan. Dengan demikian daerah yang produktif dapat dimaknai sebagai daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Daerah yang produktif mencakup sumber daya manusia, kelembagaan/organisasi, dan sektor ekonomi yang produktif. Dalam konteks perencanaan jangka menengah Kabupaten Banyumas produktif difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. dengan demikian Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien, baik di sektor pertanian, industri, maupun sektor lainnya. Daerah yang produktif menunjukkan performa ekonomi yang baik dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Secara lebih luas Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki ekonomi yang kuat, menghasilkan banyak lapangan kerja, dan mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun global.

Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok dihormati tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan

mengedepankan pemenuhan hak, perlindungan terhadap orang yang lemah, dan pembuatan keputusan yang didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah yang adil adalah Pemerintah daerah yang melindungi hak-hak Masyarakat, dan berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Pemerintahan daerah yang adil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi.

Sejahtera

Sejahtera berarti kondisi yang baik dan makmur. Kata ini merujuk pada keadaan masyarakat hidup dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara umum, sejahtera menggambarkan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, ada kedamaian, dan setiap orang memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, Daerah yang sejahtera adalah daerah di mana warga masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Daerah yang sejahtera memiliki berbagai karakteristik untuk kehidupan masyarakatnya, antara lain kondisi ekonomi yang baik, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keamanan dan ketertiban, infrastruktur yang memadai, keseimbangan alam dan lingkungan, serta kehidupan sosial yang harmonis.

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 akan diwujudkan dengan pelaksanaan misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia**

   Misi ini didukung dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan bermutu serta terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik melalui peningkatan pelayanan kesehatan untuk semua, peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan kepemudaan agar masyarakat Banyumas menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkarakter maka masyarakat Banyumas perlu memiliki dan mengaktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan serta menjunjung tinggi nilai

nasionalisme dan religius dalam kehidupan masyarakat sebagai jati diri. Selain itu pembentukan karakter yang unggul juga dapat dimiliki oleh pemuda melalui peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan**

   Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan dengan menggerakkan industri kerakyatan, pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM, didukung oleh peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas.

3. **Memperkuat ketahanan pangan**

   Misi ini mencakup upaya-upaya pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dan pengembangan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. Selain itu misi ini didukung dengan upaya untuk meningkatkan keterjangkauan dan keamanan pangan.

4. **Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan**

   Misi ini dilaksanakan melalui pemerataan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerataan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan pendekatan daya saing infrastruktur daerah serta pengembangan perdesaan, perkotaan, dan pusat pertumbuhan. Melalui upaya ini sumber daya daerah dikelola dengan bijak untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah, dan wilayah dapat berkembang sesuai potensi, peran dan fungsinya.

5. **Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup**

   Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, meliputi peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.

6. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah**

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diturunkan tujuan pembangunan yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dalam 5 tahun ke depan. selanjutnya dari tujuan diturunkan sasaran yang merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Selanjutnya penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2030 disertai dengan indikator kinerja dan targetnya diuraikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Visi, Tujuan, dan Sasaran dengan Indikator Kinerja dan Target Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2030

NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	REALISASI TAHUN 2024	TARGET INDIKATOR TUJUAN PEMKAB						NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	REALISASI TAHUN 2024	TARGET INDIKATOR SASARAN PEMKAB					
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
VISI : MEWUJUDKAN BANYUMAS PRODUKTIF, ADIL DAN SEJAHTERA																					
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan (%)	11.95	11,00- 9,93	10,84- 9,50	10,50- 9,00	10,25- 8,75	10,17- 8,24	10,00- 8,00	1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	74.52	75.75	76	76.11	76.18	77.2	77.5
											2	Meningkatnya ketahanan pangan	2	Indek Ketahanan Pangan (IKP)	80.74	70,86	71,74	72,64	73,55	74,48	75,42
											3	Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	3	PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah per kapita/ tahun)	37,60 (2023)	40,69- 40,97	40,97- 45,25	45,25- 55,25	55,25- 65,25	65,25- 78,29	78,29- 80,00
													4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	17,32 (2023)	17,72- 17,92	17,92- 18,00	18,00- 18,25	18,2- 18,5	18,5-18,96	18,96 - 19,05
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	2	Indeks daya saing daerah (IDSD)	4.01	4.03	4.04	4.05	4.06	4.07	4.08	4	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.29	5,50-6,45	5,88-6,50	5,93-6,55	5,98-6,60	6,03-6,65	6,08-6,70
													6	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	6.18	6,15- 5,8	5,94- 5,75	5,89- 5,70	5,84- 5,65	5,79- 5,60	5,74- 5,55
											5	Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing	7	Nilai Daya Saing infrastruktur	3.57	3.58	3.59	3.6	3.61	3.62	3.63
													8	Rasio PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	4.08	4.11	4.14	4.17	4.19	4.22	4.25
											6	Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup	9	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif dalam TonCO2eq (TonCO2eq)	53,325.88	1,416,804.88	1,775,298.17	2,154,949.38	2,558,029.74	2,987,051.90	3,444,795.49
											7	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif	10	Indeks Reformasi Birokrasi	86.74	87	87.18	88.68	90.18	91.68	93.18

Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan nasional perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Sandingan Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	TUJUAN PROVINSI	NO.	SASARAN PROVINSI
VISI : MEWUJUDKAN BANYUMAS PRODUKTIF, ADIL DAN SEJAHTERA				VISI: JAWA TENGAH SEBAGAI PPROVINSI YANG MAJU BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045			
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	MEWUJUDKAN JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	1	Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
		2	Meningkatnya ketahanan pangan				
		3	Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat				
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	4	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah			2	Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
		5	Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing				
		6	Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup				
		7	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif			3	Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis

3.2. Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management)* di Kabupaten Banyumas. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan meliputi optimalisasi sumber daya, pentahapan, penentuan lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Perumusan strategi dan arah kebijakan mempertimbangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 Tahap I Tahun 2025-2029, rekomendasi KLHS, program strategis nasional dan kewilayahan RPJMN, program delegasi Gubernur Jawa Tengah, dan program unggulan Bupati terpilih.

Dalam rangka sinergitas pembangunan nasional, perencanaan Pembangunan di Kabupaten Banyumas mensinergikan program Pembangunan

daerah dengan prioritas nasional Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target program strategis nasional Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian PPN menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Bappenas Nomor: 100.2,4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Program strategis nasional tersebut meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan meliputi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Sekolah Rakyat, Pembangunan 3 juta rumah.
2. Ketahanan pangan meliputi pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan beras pemerintah.
3. Kesehatan untuk semua, meliputi jaminan Kesehatan nasional, makan bergizi gratis.
4. Perluasan akses Pendidikan meliputi Pembangunan dan revitalisasi Pendidikan dasar dan menengah.
5. Pertumbuhan ekonomi, melalui pengendalian inflasi, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemudahan perizinan di daerah.

Kawasan Perkotaan Purwokerto dalam pembangunan kewilayahan RPJMN menjadi salah satu kawasan pertumbuhan dan Kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Jawa Tengah. Intervensi program pada Kawasan Perkotaan Purwokerto meliputi:

1. Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Purwokerto, melalui:
    a. Penyusunan masterplan penataan Kawasan Perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan permasalahan perkotaan secara terpadu;
    b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
    c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
    d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
2. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Purwokerto (PHTC)

3. Pengembangan SPAM Perkotaan Purwokerto
4. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Prof. DR. Margono Soekardjo Purwokerto
5. Pengembangan Kota Agropolitan Purwokerto.

Indikasi intervensi pada Kawasan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto (termasuk Kabupaten Banyumas) antara lain meliputi:

1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain DI Serayu dan DI Tajum;
2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah;
3. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);
4. Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan);
5. Pengembangan dan produktivitas hortikultura;
6. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
7. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Serayu-Bogowonto
8. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitar air di sungai dan danau
9. Pembangunan infrastruktur PLTP Baturraden
10. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/ pestisida/pakan organik
11. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
12. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan

koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi Gudang, pengelolaan dan pengendalian pengendalian hasil panen komoditas pangan utama;

13. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas mengintegrasikan dukungan program terhadap program prioritas Gubernur Jawa Tengah yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Program delegasi tersebut meliputi:

1. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan
2. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta
3. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa
4. Cek Kesehatan Gratis
5. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu
6. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan
7. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)
9. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional
10. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK
11. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru
12. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)
13. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat
14. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clean Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
15. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak

16. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin
17. Peningkatan operasional kader Posyandu
18. Peningkatan kualitas hidup lansia
19. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru
20. "Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim"
21. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis
22. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan
23. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana
24. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya
25. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan
26. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata
27. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM
28. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau
29. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa
30. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
31. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan
32. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
33. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa
34. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila
35. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana

Selain program delegasi Gubernur RPJMD Kabupaten Banyumas juga menyelaraskan arah pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dirumuskan dengan mengacu Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044. Kabupaten Banyumas masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Cibalingmas, bersama Kabupaten Cilacap dan Purbalingga. WP Cibalingmas, memiliki potensi produk unggulan yang berasal dari keragaman industri lokal dengan pemanfaatan bahan baku lokal yang beragam untuk menghasilkan produk berkualitas.

Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di WP Cibalingmas meliputi:

1. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi :
   - Pengembangan Integrated *Eco-Tourism* Sabuk Gunung Slamet (Baturaden–Serang-Purbalingga) dan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan.
2. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi :
   - Pengembangan Industri Pengolahan (Pertanian dan Perikanan) Cilacap – Banyumas– Purbalingga
   - Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, tebu, serta perikanan budidaya dan tangkap)

Dalam revisi RTRW penataan ruang di Kabupaten Banyumas bertujuan "Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berbasis sektor pertanian dan didukung oleh pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri yang mandiri, maju, berdaya saing, dan lestari". Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan beberapa kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.3
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Banyumas

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
1	Pengembangan pusat kegiatan yang strategis dan terpadu	a. Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu; b. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa; c. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa; d. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang; e. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang terindikasi tumbuh cepat; f. Meningkatkan fungsi kota kecamatan yang potensial menjadi PKL; g. Meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan; dan h. Mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terhubung dengan kawasan perkotaan terdekat

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
2	Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagai pendukung potensi wilayah	a. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jaringan transportasi penghubung pusat pelayanan dan fungsi kawasan; b. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah; c. Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumber daya air; d. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan perdesaan terpadu; e. Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; f. Mengembangkan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana; dan g. Meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana
3	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung	a. Penetapan kawasan lindung di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; b. Penataan kawasan lindung dalam kerangka mengurangi dampak perubahan iklim global; c. Mewujudkan kawasan hutan dengan kecukupan luas kawasan hutan dan penutup hutan; d. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem; e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; f. Mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air; g. Mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku; dan h. Melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
4	Pengurangan resiko bencana alam	a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi resiko bencana; b. Mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung; c. Mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan d. Mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana
5	Pengembangan kawasan budi daya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	a. Menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. Mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial; c. Mengembangkan sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian; d. Mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan; e. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan; f. Mengembangkan kegiatan industri yang berbasis hasil pertanian; dan g. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu
6	Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya	a. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang; b. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		c. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik (pemerintahan) pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman; e. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional; f. Menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (rth) pada kawasan perkotaan dengan minimal luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau (rth) publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau (rth) privat; g. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional; h. Mengembangkan dan melestarikan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional; dan i. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
7	Pengendalian perkembangan kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. Pengalokasian ruang bagi kegiatan budidaya yang dibolehkan dan dilarang berada di dalam kawasan lindung; b. Pengembangan bangunan fisik di kawasan rawan bencana tanah longsor dan gunung api dilakukan secara selektif berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; c. Mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; d. Mengembangkan kawasan tanah non produktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan; e. Penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; f. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan keberlanjutan; dan g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak bencana
8	Meningkatkan akses dan peluang investasi kawasan budi daya dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah	a. Mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri; dan b. Meningkatkan akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri
9	Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan	a. Memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agribisnis; b. Pengembangan diversifikasi produk untuk mendukung pengembangan sektor sekunder; c. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan pertanian, serta perdagangan dan jasa dalam kerangka daya saing kawasan; dan

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		d. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
10	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	a. Mendukung penetapan Kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; dan d. Turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.
11	Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan penetapannya	a. Menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya; b. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat; c. Mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian; d. Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian; e. Menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada kawasan sentra kelautan perikanan budidaya dan kawasan agropolitan; f. Melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan luasan lahan pada kawasan sentra kelautan perikanan budidaya dan kawasan agropolitan;; g. Melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; h. Memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan; i. Mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan kawasan dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan; j. Memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup; k. Mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan l. Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan gunung slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan
12	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing	a. Menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten pengembangan ekonomi; c. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; e. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi
13	Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa	a. Melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan sosial; b. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur; c. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		d. Melestarikan situs warisan budaya bangsa.

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyumas

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya rekomendasi sasaran, strategi dan program perangkat daerah untuk menjawab isu dan permasalahan daerah. Rekomendasi strategi KLHS RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rekomendasi KLHS RPJMD untuk Misi, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kabupaten Banyumas 2025-2029

Rekomendasi Misi	Rekomendasi Sasaran	Rekomendasi Strategi
Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan yang Berkualitas	**Sasaran 1:** Terwujudnya Derajat Kesehatan Manusia Melalui Penuntasan Penyakit tidak Menular, Sarana Kesehatan, dan Pola Konsumsi Pangan yang Bergizi	**Penguatan ketahanan pangan** ● Peningkatan ketersediaan dan akses pangan, serta peningkatan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman ● Pengentasan daerah rentan dan rawan pangan, stunting, penguatan pasokan, distribusi dan Cadangan pangan **Peningkatan diversifikasi pangan** ● Pengembangan diversifikasi dan industri pangan lokal serta keamanan dan mutu pangan ● Pengembangan diversifikasi pangan melibatkan berbagai jenis lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat seperti singkong dan ketela **Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan pelatihan bagi kelompok wanita tani (KWT)**
	Sasaran 2: Terwujudnya derajat kesehatan dengan penyediaan akses layanan kesehatan universal dan berkualitas	**Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan** ● Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat ● Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga Kesehatan ● Perluasan akses layanan kesehatan berbasis layanan bergerak dan digital melalui pemanfaatan teknologi informasi ● Penguatan sistem pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
	Sasaran 3: Terwujudnya Akses Pendidikan Dasar yang Berkualitas	**Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan** ● Peningkatan kualitas anak usia dini, dan sekolah dasar ● Peningkatan kualitas penyelenggaraan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing ● Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi **Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan Perencanaan Berbasis Data** ● Meningkatkan kursus pelatihan termasuk pendidikan keaksaraan, Taman Bacaan masyarakat (TBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU) ● Pemetaan terhadap guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan pemerataan tenaga pendidik
	Sasaran 4: Pengentasan Kemiskinan dan Terwujudnya Distribusi	**Padu Dadi Gemayu** ● Perencanaan Terpadu Berbasis Data Digital untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas

Rekomendasi Misi	Rekomendasi Sasaran	Rekomendasi Strategi
	Kesejahteraan yang Merata dan Berkeadilan	● Penanganan kemiskinan tepat sasaran dengan menyinkronkan data antar pemangku kepentingan, meningkatkan perencanaan desa, dan memanfaatkan data spasial berbasis digital **Kartu Banyumas Pintar** ● Meningkatkan bantuan kepada warga miskin di Kabupaten Banyumas **Program PENA di Kabupaten Banyumas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dengan menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** melalui berbagai bantuan sosial **Program pengelolaan zakat produktif** dengan melibatkan bantuan modal usaha, sarana prasarana, ternak, pelatihan skill dan pemberdayaan usaha kecil menengah
	Sasaran 5 : Terwujudnya Keluarga Berkualitas Melalui Upaya Keluarga Berencana dan Perlindungan Terhadap Perempuan	**Peningkatan partisipasi dan akses layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana** ● Peningkatan dan pemenuhan akses layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi Masyarakat ● Edukasi penggunaan kontrasepsi dan program keluarga berencana **Program Upaya Pencegahan Pernikahan Dini:** ● Sosialisasi melalui program Kampung KB, PKK, dan Forum Anak di seluruh kecamatan **Program Penguatan Resiliensi dan Kapasitas Penyintas Kekerasan Usia Anak:** ● Program Pusat Riset Gender dan Anak (PRGA) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto bekerjasama dengan Yayasan Sahabat Kapas **Program Pendidikan dan Kesadaran** ● Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak Perempuan dan anak serta dampak negatif dari kekerasan terhadap mereka ● Kampanye kesadaran, seminar dan lokakarya dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan memotivasi partisipasi aktif **Program Pelaporan dan Pengaduan** ● Meningkatkan pelaporan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak ● Mendorong pengaduan melalui hotline, aplikasi seluler atau kantor pelayanan sosial setempat

Rekomendasi Misi	Rekomendasi Sasaran	Rekomendasi Strategi
Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Hutan sebagai Konservasi Sumber Daya Hayati	**Sasaran 1:** Terwujudnya Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan **Sasaran 2 :** Terwujudnya Pelestarian Hutan Lindung dan Ekosistem Alami melalui Perencanaan dan Perwujudan Tata Ruang	**Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** ● Upaya terpadu untuk mempertahankan keragaman sumber daya alam hayati ● Taman Proklim merupakan perpaduan taman KEHATI dan ekosistem serta program kampung iklim ● Perlindungan dan pengelolaan wilayah Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas melalui koordinasi dan kolaborasi lintas wilayah **Program Pembangunan Hutan Rakyat** ● Pembangunan hutan rakyat dengan melibatkan partisipasi petani ● Penguatan kelompok tani hutan rakyat melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan kemitraan **Penanganan Penambangan Tanpa Izin** ● Koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk kegiatan penambangan ● Pendataan dan pemantauan ● Perbaikan lokasi pasca tambang untuk memulihkan lingkungan yang terdampak ● Pengawasan, pembinaan dan pengelolaan lingkungan di sekitar tambang
Peningkatan Upaya Pengurangan Risiko Bencana	**Sasaran 1 :** Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana dan Berketahanan Iklim	**Peningkatan ketangguhan bencana** ● Penambahan pembentukan desa tangguh bencana terutama pada kawasan yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana ● Pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*) multi ancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi ● Peningkatan kapasitas wilayah dan masyarakat yang inklusif terhadap ancaman bencana terutama bencana hidrometeorologi melalui kesiapsiagaan bencana ● Pengembangan master plan drainase yang di dalamnya merencanakan sistem drainase wilayah yang terintegrasi dengan peningkatan intensitas hujan akibat perubahan cuaca ● Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ● Penyusunan rencana evakuasi yang meliputi jalur dan tempat evakuasi terutama terhadap ancaman banjir dan tanah longsor dalam strategi pengurangan risiko bencana ● Program kawasan siaga bencana (KSB)
	Sasaran 2: Terwujudnya Kapasitas Daerah yang Berketahanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	**Program Kecamatan Tanggung Bencana (Kencana) untuk memperkuat pemerintah di level kecamatan** ● Identifikasi dan pemetaan potensi bencana yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas ● Penyusunan rencana kontinjensi terutama di wilayah potensi banjir seperti Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak
Akses Sanitasi, Layanan Sampah dan Air Bersih Aman	**Sasaran 1:** Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk Air Baku dan Sanitasi Layak dan Aman	**Peningkatan Wilayah Konservasi untuk peningkatan cadangan air** ● Perlindungan dan pengelolaan daerah tangkapan air seperti DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu, DAS (Daerah Aliran Sungai) Tipar ● Konservasi daerah tangkapan air di wilayah Baturaden yang mempunyai banyak curug atau air terjun ● Menyepakati mekanisme insentif dengan daerah sekitar sesuai peraturan perundangan dalam perlindungan kawasan satuan DAS

Rekomendasi Misi	Rekomendasi Sasaran	Rekomendasi Strategi
		Program Pengembangan Infrastruktur Air Baku ● Pembangunan waduk, embung sebagai penampungan air ● Pemeliharaan terhadap infrastruktur air baku yang sudah ada ● Meningkatkan upaya efisien pemanfaatan air dan penampungan air hujan skala persil dan kawasan ● Program pemerataan distribusi melalui jaringan perpipaan PDAM ● Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM ● Peningkatan distribusi air minum melalui perpipaan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas **Program Peningkatan Kualitas Air** ● Perlindungan sumber daya air serta peningkatan terhadap monitoring dan evaluasi ● Peningkatan akses sanitasi aman pada limbah domestik untuk meminimalisir beban cemaran fecal coliform ● Peningkatan pengawasan lingkungan hidup untuk kegiatan industri dan domestik ● Pengendalian laju erosi untuk meminimalisir sedimentasi dan parameter Total Suspended Solid (TSS) ● Penggunaan pupuk tepat dosis dalam kegiatan pertanian sebagai upaya dalam mengurangi beban cemaran Total Fosfat dalam perairan **Program Pengelolaan dan Pemeliharaan IPAL Komunal yang Berkelanjutan** ● Pembangunan IPAL di kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan mitigasi perubahan iklim (pemanfaatan gas metana) ● Pemeliharaan IPAL di beberapa Lokasi dengan evaluasi operasi dan pemeliharaan ● Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik yang layak dan aman
	Sasaran 3 : Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Terpadu Menuju Zero Waste dan Mendukung Ekonomi Sirkuler	**Program Perencanaan Pengelolaan Sampah** ● Penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Rencana Induk Persampahan Kabupaten Banyumas **Peningkatan jangkauan layanan pengelolaan sampah** ● Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di seluruh wilayah berupa TPS3R serta peralatan pengangkutan dan pengolahan sampah ● Pembentukan organisasi pengelolaan sampah berbasis Masyarakat ● Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui upaya pemilahan sampah di tingkat sumber **Penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan di TPA untuk mereduksi sampah** ● Pengelolaan sampah residu menggunakan sanitary landfill ● Pengembangan pengelolaan sampah ramah lingkungan yang dapat mereduksi sampah di TPA secara signifikan, salah satunya melalui RDF
Pengembangan Industri Hijau yang Berdaya Saing	**Sasaran 1:** Terwujudnya Industri Pengolahan dan Manufaktur Terpadu Ramah Lingkungan Berbasis Keunggulan Wilayah	● Gerakan Legalisasi Usaha Mikro Kecil Banyumas (Gelas Umi Kece Mas) ● Program kolaborasi seni dan ruang usaha untuk memasarkan produk UMKM ● Program percepatan perizinan NIB ● Pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan
	Sasaran 2 : Terserapnya Tenaga	**Peningkatan kualitas tenaga kerja** ● Peningkatan jaringan kemitraan tenaga kerja

Rekomendasi Misi	Rekomendasi Sasaran	Rekomendasi Strategi
	Kerja dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Industri, Pertanian	● Peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai ● dengan kebutuhan pasar kerja ● Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan
	Sasaran 3: Terciptanya Sektor Unggulan Pariwisata dengan Daya Tarik yang Kuat Secara kolaboratif dan Partisipatif	**Peningkatan daya saing pariwisata** ● Pengembangan pengelolaan pariwisata dengan penerapan CHSE ● Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sesuai karakteristik dan kearifan lokal ● Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata ● Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif
	Sasaran 4 : Terwujudnya Produksi Bersih melalui Penerapan Infrastruktur Energi Terbaharukan dan Peningkatan Kepatuhan Terhadap Instrumen Lingkungan	**Pengembangan Energi Terbaharukan** ● Peningkatan energi terbarukan melalui pemanfaatan gas metana dari limbah ternak, limbah cair dan sampah ● Peningkatan kawasan pemerintah daerah dan swasta untuk pemanfaatan EBT ● Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Lereng Gunung Slamet Kecamatan Cilongok (pemanfaatan sumber air sebagai energi andalan) ● Instalasi Pompa Air bertenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) **Program pengawasan dan perizinan lingkungan** ● Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha ● Pelayanan permintaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan rekomendasi UKL-UPL juga menjadi bagian dari pengawasan ● Memfasilitasi pengelolaan limbah B3 rumah tangga, medis dan industri
Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	**Sasaran 1:** Terwujudnya kelembagaan dengan Kapasitas Aparatur Daerah yang Adaptif **Sasaran 2 :** Terwujudnya Tata Kelola, Aksesibilitas Masyarakat dan Kualitas layanan Sistem Pelayanan Publik **Sasaran 3 :** Terwujudnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan yang Inovatif	**Peningkatan pengelolaan keuangan daerah** ● Program keuangan melalui Kerjasama pemerintah dan badan usaha **Program Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daera**h ● Penyusunan Rencana Anggaran Daerah ● Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ● Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Sasaran 4 : Terwujudnya Kondusifitas Wilayah yang Dapat memberikan Perlindungan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	**Peningkatan keamanan** ● Peningkatan pengawasan pada tempat publik berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat mengawasi dan mencegah kejahatan ● Pengembangan sistem keamanan di lingkungan masyarakat dengan dukungan organisasi masyarakat yang ada ● Peningkatan pelayanan untuk perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan keadilan

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

Untuk mewujudkan visi Bupati terpilih telah menetapkan program unggulan "TRILAS" yaitu 13 program unggulan Bupati sebagai berikut:

1. Program Pasti Sekolah:
   a. Transportasi sekolah yang murah dan aman di daerah-daerah terpencil
   b. Beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
   c. Membangun dan memperluas fasilitas PAUD di wilayah-wilayah yang kurang terlayani
   d. Renovasi sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan infrastruktur
   e. Meningkatkan ketersediaan prasarana sekolah yang modern
   f. Menyediakan jaringan internet di sekolah-sekolah
2. Insentif guru ngaji, pesantren, organisasi keagamaan, RT/RW dan BPD
3. Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas
   a. Satu event kebudayaan atau olahraga setiap bulan
   b. Peningkatan insentif untuk atlet
   c. Peningkatan kualitas pembinaan dan manajemen atlet
   d. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga dan kebudayaan
   e. Fasilitas penyelenggaraan pentas seni dan budaya lokal
4. Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di setiap Kecamatan
   a. Fasilitas akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan
   b. Fasilitas kemitraan antara UMKM dengan perusahaan skala besar
   c. Pelatihan dan pendampingan manajemen bisnis untuk pemuda pelopor UMKM dan petani muda
   d. Pelatihan dan fasilitasi pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal
   e. Pembentukan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal
   f. Fasilitasi promosi produk kreatif lokal
5. Pengembangan Desa Wisata dengan Melibatkan BUMDES
   a. Penguatan manajemen BUMDES untuk pengembangan dan pengelolaan desa wisata
   b. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis potensi dan budaya lokal
   c. Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya
   d. Promosi destinasi wisata hingga tingkat internasional
6. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

a. Menurunkan angka stunting dengan pemberian bantuan makanan bergizi
b. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran
c. Percepatan penambahan jumlah rumah layak huni
d. Perluasan akses kesempatan kerja bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan

7. Revitalisasi Pasar Tradisional yang Aman dan Nyaman
   a. Revitalisasi sanitasi pasar yang bersih dan sehat
   b. Penataan kios pedagang dan fasilitas parkir
   c. Penguatan pengelola pasar melalui kolaborasi dengan paguyuban
   d. Pelatihan dan pendampingan pedagang pasar tradisional untuk peningkatan daya saing dengan pasar modern
   e. Digitalisasi retribusi pasar
8. Layanan Puskesmas Rawat Inap di Setiap Kecamatan
   a. Pembangunan Ruang Rawat Inap pada Puskesmas Non Rawat Inap Prioritas
9. Mewujudkan Swasembada Pangan Lokal Menuju Kesejahteraan Petani
   a. Penguatan kolaborasi kelompok tani dan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan
   b. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan jalan usaha tani
   c. Pengembangan gudang penyimpanan pangan
   d. Mempermudah permodalan untuk petani
   e. Jaminan keanggotaan asuransi petani
   f. Pengembangan pasar komoditas tani yang berdaya saing
   g. Implementasi teknologi pertanian modern *(smart farming),* terintegrasi dan berkelanjutan
   h. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk peningkatan kualitas dan kapasitas produksi pertanian
10. Percepatan Pembangunan Kawasan Industri untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan
    a. Perencanaan percepatan pembangunan kawasan industri
    b. Penyiapan kebijakan pembangunan kawasan industri
    c. Perencanaan teknis kawasan industri
    d. Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri
    e. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Industri
    f. Tahap Pembangunan Kawasan Industri
11. Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota
    a. Pembangunan Jalan Kabupaten

b. Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten (Jembatan, Drainase)
c. Pembangunan Jalan Lingkungan
d. Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Lingkungan (Jembatan, Drainase)
e. Pengembangan Perlengkapan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan
f. Pengembangan Prasarana Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan

12. Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat
    a. Pembangunan jaringan air bersih baru
    b. Perbaikan sarana penyediaan air bersih
    c. Jaminan bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan
    d. Kolaborasi program sungai bersih untuk menjaga kualitas air dan lingkungan sungai
13. Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan dan Solutif
    a. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan publik
    b. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem birokrasi untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan
    c. Penerapan aplikasi layanan publik berbasis gawai untuk memudahkan masyarakat berbagai layanan pemerintahan
    d. Implementasi sistem pembayaran digital untuk layanan-layanan pemerintah

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 Tahap I Tahun 2025-2029, rekomendasi KLHS, program strategis nasional dan kewilayahan RPJMN, program delegasi Gubernur Jawa, dan program unggulan Bupati terpilih dirumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator Tingkat Kemiskinan (%)

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM), dengan strategi sebagai berikut :

1. Transportasi sekolah yang murah dan aman di daerah-daerah terpencil
2. Membangun dan memperluas fasilitas PAUD di wilayah-wilayah yang kurang terlayani
3. Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu (SD dan SMP) serta mahasiswa kurang mampu yang berprestasi
4. Penanganan anak tidak sekolah

5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), penyelenggaraan pendidikan inklusi, serta dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat
6. Peningkatan Kompetensi dan pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas di seluruh wilayah
7. Pemenuhan Sarana dan Prasarana satuan Pendidikan yang memadai termasuk penyediaan jaringan internet di sekolah-sekolah
8. Peningkatan dukungan terhadap pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif guru ngaji dan operasional pesantren
9. Peningkatan budaya literasi sejak usia dini serta kecakapan literasi dan numerasi bagi siswa PAUD, SD dan SMP
10. Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan
11. Pembangunan RS dengan unggulan Paru
12. Peningkatan cakupan dan jangkauan intervensi Integrasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan serta peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap
13. Pemenuhan SPM Kesehatan, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB) serta penurunan Angka Kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya
14. Peningkatan Status Gizi, pencegahan dan penurunan stunting serta dukungan pada Program MBG
15. Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, persediaan farmasi, dan peralatan medis
16. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat serta Peningkatan promosi kesehatan
17. Peningkatan prestasi olahraga dan Peningkatan dukungan terhadap atlet
18. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga
19. Pembangunan keluarga serta pemberdayaan, penguatan kapasitas, kemandirian dan partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia di berbagai bidang pembangunan.
20. Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian kelahiran penduduk

Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator Indek Ketahanan Pangan (IKP), dengan strategi sebagai berikut :

1. Regenerasi SDM sektor Pertanian dan Penguatan Kapasitas, Akses Permodalan, serta Perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi petani

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas pertanian pangan, diversifikasi pangan berbasis Pangan Lokal serta Penyediaan prasarana pendukung ketersediaan pangan dan dukungan program prioritas swasembada pangan
3. Peningkatan keterjangkauan pangan
4. Pemenuhan kecukupan pangan dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal

Sasaran 3 : Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, dengan indikator PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah per kapita/ tahun), dengan strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan akses internet pada fasilitas strategis dan optimalisasi pemanfaatannya untuk pengembangan usaha
2. Peningkatan Kinerja BUMD
3. Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan

Sedangkan untuk indikator Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil olahan
2. Pemerataan penyediaan sarana distribusi perdagangan pendukung usaha
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
4. Pemutakhiran data penerima bantuan yang lebih akurat dan peningkatan Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran
5. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Daerah, dengan indikator Indeks daya saing daerah (IDSD)

Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), dengan strategi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas usaha mikro dan pelaku ekonomi kreatif dalam pengolahan pangan hasil pertanian dan perikanan serta pengolahan produk unggulan daerah
2. Pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)
3. Penerapan tata kelola pertanian modern berbasis Integrated Farming

4. Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan, pengoperasian transportasi massal, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta penghijauan
5. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis potensi dan budaya lokal (wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata olahraga) serta Pengembangan dan pengelolaan desa wisata dengan Melibatkan BUMDES
6. Penguatan pemasaran pariwisata serta Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya
7. Pembangunan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal
8. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan Banyumas
9. Peningkatan promosi dan Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan
10. Pengembangan pasar hasil produksi serta Peningkatan promosi dan diversifikasi ekspor
11. Peningkatan Aksesibilitas Pasar dan Revitalisasi pasar tradisional yang aman dan nyaman
12. Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan, serta Pengoperasion transportasi masal dalam mendukung ekonomi hijau dan biru
13. Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
14. Pengembangan klaster ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan ekonomi kreatif serta Pengembangan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal
15. Penguatan SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha koperasi (dukungan koperasi merah putih)

Sedangkan untuk indikator Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%) melalui strategi:

1. Perluasan akses kesempatan kerja bagi masyarakat, serta peluang kerja bagi kelompok disabilitas
2. Percepatan pembangunan Kawasan Industri

Sasaran 5 :

Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing, dengan indikator Nilai Daya Saing infrastruktur, dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat
2. Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota

3. Peningkatan akses layanan sanitasi

Untuk indikator Rasio PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%) dengan strategi :

1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk optimalisasi fungsi pelayanan kawasan, mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, serta pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan
2. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
3. Pengelolaan lingkungan perdesaan meliputi pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan;
4. Peningkatan kemandirian desa melalui Pemanfaatan Potensi Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan daya saing, produktivitas dan ketahanan ekonomi perdesaan., serta sinkronisasi perencanaan dan penguatan peran atau pembagian kewenangan
5. Pengelolaan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan penguatan integrasi antar moda transportasi
6. Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum);
7. Optimalisasi perencanaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
8. Perencanaan dan Pembangunan Sentra Produk Unggulan, Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
9. Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan dan Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)
10. Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata

Sasaran 6 : Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup, dengan indikator Penurunan Emisi GRK kumulatif dalam TonCO2eq, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan lahan berkelanjutan
2. Pengembangan transportasi berkelanjutan
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

4. Pengembangan industri hijau dan Penerapan kebijakan mendorong pembangunan rendah karbon dan perubahan perilaku untuk aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah khususnya Pengelolaan sampah spesifik, limbah B3 dan limbah medis, serta percepatan penghapusan merkuri, berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada peningkatan peran masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sampah, serta perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha;
6. Menjaga ketersediaan air secara kontinu dan mengendalikan daya rusak air
7. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana;
8. Peningkatan kapasitas daerah dengan upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat;
9. Pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan ketahanan iklim dan bencana

Sasaran 7 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sistem Manajemen ASN serta peningkatan kualitas SDM Aparatur
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan perencanaan kinerja Pemerintah daerah yang berkualitas, serta Optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah
3. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem birokrasi untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta Penyediaan layanan publik inklusif
4. Peningkatan kualitas pengawasan/evaluasi internal kinerja penyelenggaraan pemerintah oleh APIP
5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah
6. Peningkatan kualitas kebijakan dan kolaborasi implementasi kebijakan
7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
8. Penguatan SDM, kelembagaan dan kerjasama riset daerah, serta Pengembangan inovasi dan komersialisasi inovasi masyarakat dan perangkat daerah

9. Pencegahan dan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
10. Peningkatan Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan serta Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan
11. Optimalisasi implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah
12. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengelolaan Belanja Daerah secara efisien;

Selaras dengan strategi dirumuskan arah kebijakan Pembangunan daerah pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, yang merupakan rangkaian kerja penjabaran misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan arah kebijakan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Tahap I yaitu 'Penguatan Landasan Transformasi' dalam rangka mewujudkan visi Banyumas HEBAT pada 2045.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahap I Tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2029

Visi	Misi	Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2029
Banyumas 2045 HEBAT **Harmoni bErkelanjutan, Berdaya saing maju, mandiri berbudayA sejahTera**	1. Terwujudnya transformasi sosial	Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua, pemerataan layanan pendidikan bermutu, serta penguatan pelayanan perlindungan sosial.
	2. Terwujudnya transformasi ekonomi	Penguatan pondasi transformasi ekonomi dengan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian meliputi fisik dan digital, pembuatan regulasi yang hijau dan adaptif untuk pengembangan produk yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi berbasis IPTEK dan riset, serta pengembangan sumber daya manusia untuk melandasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.
	3. Terwujudnya transformasi tata kelola	Peningkatan efektivitas kelembagaan perangkat daerah, kualitas kebijakan, kualitas SDM Aparatur, akuntabilitas kinerja, dan sistem pengendalian internal pemerintah, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	4. Terwujudnya ketahanan sosial budaya	Peningkatan pembangunan keluarga, kesetaraan gender, dan pembangunan kebudayaan
	5. Terwujudnya ketahanan ekologi	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan dan air, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana
	6. Pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas	Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah dan sarana prasarana

Untuk kesinambungan pembangunan disusun pentahapan arah kebijakan RPJMD untuk mewujudkan visi Banyumas Produktif, Adil dan

Sejahtera. Pentahapan ini sebagai panduan untuk fokus pembangunan tahunan yang akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

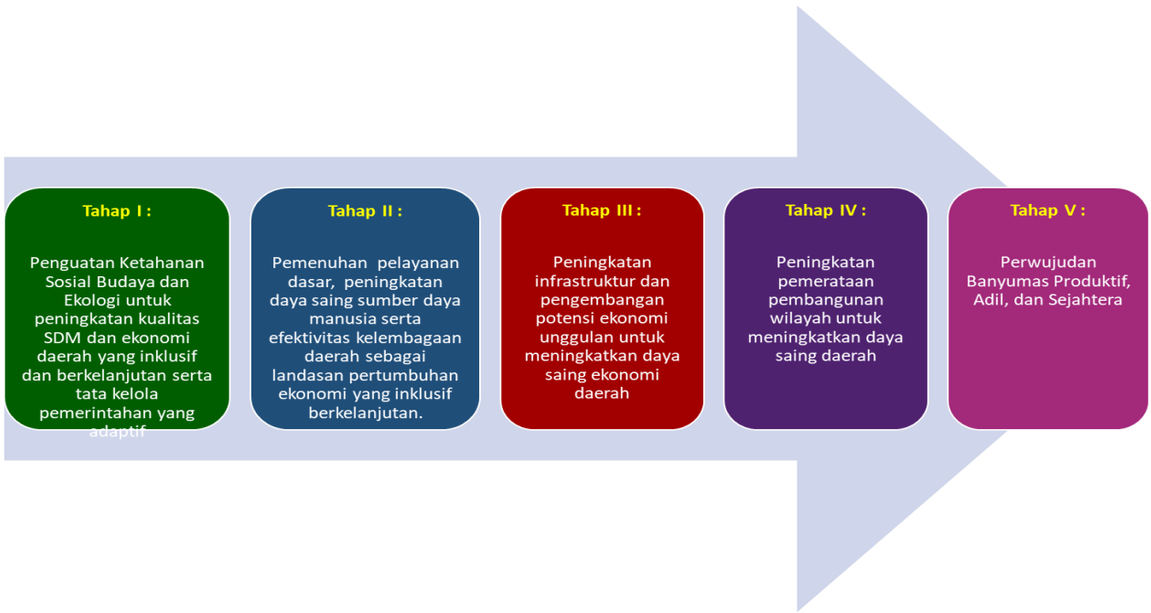

Gambar 3.1.
Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas
Tahun 2026-2030

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah pentahapan pembangunan Kabupaten Banyumas juga memperhatikan keselarasan dan dukungan pada pentahapan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Sinergi pembangunan Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah penyelarasan dan dukungan arah kebijakan tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Keselarasan dan Dukungan Tema Pembangunan Kabupaten Banyumas Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Dukungan Arah Kebijakan
2026	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah: Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif	Arah kebijakan penguatan ketahanan ekologi termasuk di dalamnya ketahan pangan merupakan dukungan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Arah kebijakan Kabupaten Banyumas didukung dengan penguatan ketahanan sosial budaya, peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan landasan transformasi ekonomi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan.
2027	Peningkatan Kinerja	Pemenuhan	Fokus pembangunan Kabupaten

Tahun	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Dukungan Arah Kebijakan
	Pembangunan Daerah: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.	Banyumas peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan efektifitas kelembagaan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan, di antaranya potensi pariwisata dan ekonomi syariah.
2028	Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah: Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi unggulan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Peningkatan infrastruktur difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi ekonomi unggulan pada kawasan perdesaan dan sentra pengembangan produk unggulan
2029	Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah: Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah	Tahapan peningkatan pemerataan pembangunan wilayah selaras dengan arah kebijakan Provinsi dalam menumbuhkan daya saing daerah. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan desa kota secara berimbang, serta pengembangan wilayah berbasis produk unggulan daerah
2030	Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera	Tahun 2030 Kabupaten Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera untuk mendukung terwujudnya Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan

Arah Kebijakan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Misi RPJMD. Keselarasan Arah Kebijakan dan Misi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banyumas

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Pencapaian **Program Pasti Sekolah** melalui peningkatan akses pendidikan untuk semua dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Peningkatan mutu layanan pendidikan, melalui pemenuhan dan Pengembangan SDM serta infrastruktur Pendidikan serta peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan
		Peningkatan literasi masyarakat
		Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk semua
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
		Peningkatan peran masyarakat terhadap kesehatan diri dan lingkungan

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		Pemajuan kebudayaan dan pembangunan olahraga
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
2	Memperkuat ketahanan pangan	Pengelolaan ketahanan pangan untuk menuju Swasembada Pangan Lokal dan Kesejahteraan Petani
3	Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan	Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja dan kelembagaan ekonomi daerah adaptif terhadap digitalisasi dan pemanfaatan teknologi
		Peningkatan pendapatan masyarakat
		Percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong kemiskinan dengan pemutakhiran data penerima bantuan yang lebih akurat. Peningkatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat.
4	Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sektor usaha daerah dengan peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya (Hilirisasi) produk unggulan daerah dan pengembangan produk potensial daerah serta industri pengolahan pangan untuk peningkatan ekonomi masyarakat
		Peningkatan investasi daerah
		Pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri untuk produk unggulan dan produk kreatif berbasis kearifan lokasi
		Dukungan penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkular, serta kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
		Sinergi pengembangan pariwisata, budaya, koperasi, usaha mikro dan industri ekonomi kreatif serta Penguatan rantai pasok industri pendukung pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,
		Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
		Pengembangan Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sarana prasarana wilayah
		Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk kemandirian desa dan Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas
		Pengembangan kawasan strategis berbasis Produk Unggulan Daerah dan potensial daerah
6	Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pembangunan rendah karbon dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Pembangunan berketahanan iklim dan berketahanan bencana
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah	**Pengembangan sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan solutif** serta Optimalisasi strategi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan sistem birokrasi berbasis teknologi informasi
		Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik
		Peningkatan kapabilitas dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah
		Peningkatan stabilitas sosial, ekonomi, politik daerah serta ketentraman dan ketertiban wilayah.

Rumusan program prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
VISI	**MEWUJUDKAN BANYUMAS PRODUKTIF, ADIL DAN SEJAHTERA**																	
1	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan (%)	1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	DINDIK	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	- Harapan Lama Sekolah - Indeks SPM Pendidikan (Sesuai Rapor Pendidikan) - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	- Persentase guru yang memiliki sertifikat Pendidik - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang SD - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang SMP - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi Jenjang SD - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi Jenjang SMP - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi jenjang pendidikan	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	PB, PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
														Nonformal/Kesetaraan - Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B				
										DINKESKB	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	- Usia Harapan Hidup (UHH) - Prevalensi Stunting	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesehatan masyarakat	- Jumlah Kematian Ibu - Jumlah Kematian Balita - Angka Populasi Bebas PTM - Angka Populasi Bebas PM - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar - Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional - Persentase Indikator Cakupan Layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Bidang Kesehatan yang Terpenuhi - NDR RSUD Banyumas - NDR RSUD Ajibarang - NDR RSKMP - Persentase Penurunan Prevalensi Stunting - Persentase Baduta 6-23 bulan yang mendapatkan MPASI beragam - Persentase Anak usia 0-5 bulan mendapat ASI eksklusif - Insiden Stunting Balita (Kasus Baru)	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	PB, PG
																Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	PG
																Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	PG
																Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
												TFR (Angka Kelahiran Total)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keluarga berencana	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	PB
										DINSOS PPA	Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS serta Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan , termasuk TPPO	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya implementasi PUG pada Pemerintah Daerah	PG
																Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	PB
																Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	PB
												- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) - Indek Perlindungan Anak (IPA)		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota		Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Layanan penanganan perlindungan anak	PB
										DINARPUSDA	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Arsip	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) - Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan untuk Literasi	- Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk - Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	PB
										DINPORA BUDPAR	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga serta meningkatnya	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Menguatnya daya saing pemuda dan olahraga	Tingkat Prestasi Pemuda	Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	PB, PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
											nilai tambah sektor pariwisata berbasis potensi lokal dan kebudayaan			Tingkat Prestasi Olahraga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas daya saing olahraga	PB, PG
2	Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan					2	Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	2	PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah per kapita/ tahun)	DINSOS PPA	Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS serta Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Cakupan jenis PPKS yang tertangani	Persentase Jenis PPKS yang tertangani	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	PB, PG
								3	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia							Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	PB, PG
																Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	PB, PG
3	Memperkuat ketahanan pangan					3	Meningkatnya ketahanan pangan	4	Indek Ketahanan Pangan (IKP)	DINKANNAK	Menguatnya Pengelolaan Penyediaan Pangan Utama dan Meningkatnya Produksi Perikanan	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama	Menguatnya pengelolaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Skor PPH Konsumsi	Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan cadangan pangan	PB
																Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	PB
														Penurunan Jumlah Daerah (Desa) Rawan Pangan		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	PB
												Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Optimalnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	PB
																Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	PB, PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
																Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	PB
										DINPERTAN	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	- Persentase peningkatan produksi hortikultura - Persentase peningkatan produksi perkebunan - Persentase Peningkatan Produksi Peternakan - Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terpenuhinya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan untuk peningkatan produksi	PB, PG
																	Terpenuhinya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas	
																Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	PB, PG
																	Terpenuhinya penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	
																Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PB, PG
																Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	PB, PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
																Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	PB, PG
4	Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	2	Indeks daya saing daerah (IDSD)	4	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	DINKOPUKM DAG	Meningkatnya daya saing koperasi, UMKM dan Perdagangan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Penguatan Koperasi dan UMKM	- Persentase Koperasi dengan tata kelola yang baik	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PG, PN
																Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	PB, PG, PN
												Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan		- Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil - Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PB, PG
																Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangkan UMKM	PB, PG
												Nilai ekspor	Peningkatan nilai tambah produk	- Nilai ekspor produk unggulan - Nilai omzet produk	Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Optimalnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	PB
																Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan pengembangan pelaku usaha siap ekspor	PB
																Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya pemasaran produk dalam negeri	PG
										DINPORABUDPAR	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga serta meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Persentase peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Tingkat Pemajuan Kebudayaan	Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	PB
												Kontribusi sektor pariwisata	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik wisata	PB, PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
											berbasis potensi lokal dan kebudayaan	terhadap PDRB harga berlaku				Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya promosi pariwisata	PB
																Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	PB
								6	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	DPMPTSP	Meningkatnya Nilai Investasi daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Investasi dan Pelayanan Penanaman Modal	- Nilai IKM Pelayanan Penanaman Modal - Nilai Investasi Daerah	Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	PB
																Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	PB
																Program Pelayanan Penanaman Modal	Optimalnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai SOP	PB
										DINKERIN	Meningkatnya penguatan pengelolaan ketenagakerjaan dan pengembangan industri	Persentase tenaga kerja yang dikelola	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	- Persentase tenaga kerja formal yang dikelola - Persentase tenaga kerja informal yang dikelola - Persentase tenaga kerja perempuan yang dikelola	Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	PB
																Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PB
																Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	PB
																Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Hubungan Industrial	PB
												Persentase Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri yang memenuhi ketentuan dan patuh pada per aturan	Persentase industri yang masih taat sesuai dengan izin usahanya	Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PB, PG, PN
																Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya kualitas data Sistem Informasi Industri Nasional	PB, PG, PN

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
						5	Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing	7	Nilai Daya Saing infrastruktur	DINHUB	Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau	- Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Rasio konektivitas	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	- Indeks konektivitas angkutan jalan - Indeks konektivitas angkutan sungai - VC Ratio di Jalan Kabupaten	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	PB
										DPU	Meningkatnya kinerja infrastruktur dan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	- Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Persentase bangunan gedung pemerintah dan kawasan strategis yang tertata - Persentase ketersediaan drainase jalan - Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina - Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana SDA dan meningkatnya Kinerja irigasi	PB
																Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatkan Akses Air Minum Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air minum	PB
																Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan	PB
																Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan Akses sanitasi Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air limbah domestik	PB

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
																Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	'- Meningkatnya infrastruktur drainase lingkungan - Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	PB, PG
																Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis dalam kondisi baik	PB, PG
																Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	PB, PG
																Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	PG
																Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	PB, PG
												Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengelolaan wilayah		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksanany a Penyelenggara an penataan ruang	PB
										DINPERKIM	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tertib	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya pelayanan pertanahan	Persentase pelayanan pemanfaatan penggunaan tanah	Pertanahan	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya penatagunaan tanah	PB, PG
												Rasio Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Kinerja	- Persentase Peningkatan Akses Air Limbah	Perumahan Dan	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kawasan permukiman	PB, PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
											administrasi pertanahan		Infrastruktur Permukiman	Domestik - Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor air limbah - Persentase Peningkatan Akses Air Minum - Persentase rata-rata capaian kinerja infrastruktur kawasan permukiman	Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya program pengembangan perumahan	PG
												Rasio Rumah Layak Huni	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	PB
																Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	PB
								8	Rasio PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	DINPERMASDES	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa	- Persentase Desa Mandiri - persentase Peningkatan Status Desa (Desa berkembang jadi maju, berkembang jadi mandiri dan maju mandiri), rumus penjumlahan dari persentase desa berkmbang ke maju, berkembang ke mandiri dan maju ke mandiri)	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	PG
																Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	PB
																Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PB, PG
5	Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup					6	Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup	9	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif dalam TonCO2eq (TonCO2eq)	DLH	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Lahan (IKL) - Indeks Kualitas Udara (IKU)	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PB
																Program Pengelolaan	Meningkatkan lahan yang	PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
																Keanekaragaman Hayati (Kehati)	bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	
																Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Optimalnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	PB
														Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	PB
										BPBD	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	- Meningkatnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana - Optimalnya Penanganan Darurat Bencana - Optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	PB, PG
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah					7	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif	10	Indeks Reformasi Birokrasi	DINARPUSDA	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Arsip	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan	- Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten - Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Sesuai Dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	PB

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
														akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
										SATPOL PP	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	- Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Optimalnya kinerja penanganan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	- Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada - Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	PB
												- Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat		Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Meningkatnya Layanan pencegahan kebakaran - Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PB
										DINDUKCAPIL	Meningkatnya kinerja Pelayanan administrasi Kependudukan	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Sesuai Standar Pelayanan	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	PB
																Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan	PB

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
																	Pencatatan Sipil	
										DINKOMINFO	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya Keamanan Informasi	Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	PB, PG
												Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	- Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital - Nilai Domain Manajemen SPBE - Nilai Domain Layanan SPBE - Nilai Domain Tata Kelola SPBE		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	
														Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	PB
												Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PB
										SETDA	Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif,	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PB, PG

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
												Nilai EPPD Pemerintah Daerah		Persentase keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	PG
												IKM Pemerintah Daerah		- Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori "Sangat Baik" - Nilai SAKIP Pemda - Nilai SPIP Pemda		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	PB
										SETWAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Capaian kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pemberian dukungan terhadap tusi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungs Dprd	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	PB
										BAPPERIDA	Meningkatnya kualitas perencanaan, riset dan inovasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah	Nilai Manajemen Risiko Indek (MRI)	Meningkatnya kualitas penetapan tujuan dan efektivitas efisiensi pencapaian tujuan pemerintah daerah	Nilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan unsur SPIP	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	PB
												Nilai SAKIP Pemkab pada komponen Perencanaan Kinerja		Nilai komponen penetapan tujuan unsur SPIP		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	PB

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
												Indeks Kapabilitas Inovasi	Meningkatnya pemanfaatan riset dan pengembangan inovasi daerah	- Persentase peningkatan inovasi daerah yang dikembangkan - Persentase Publikasi Ilmiah	Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya penerapan hasil riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah	PB, PG
										BAPENDA	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Rasio PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan PAD - Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PB
										BKAD	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Persentase SKPD dan BLUD yang melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	PB
													Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD dan BLUD yang melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi	PB
										BKPSDM	Meningkatnya Manajemen dan Profesionalitas ASN	Nilai Sistem Merit	Meningkatnya Pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi dan kinerja	- Nilai NSPK - IP ASN Dimensi Hasil Penilaian Kinerja - IP ASN Dimensi Riwayat Hukum Disiplin	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	- Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian - Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Kinerja ASN - Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	PB

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
												Nilai IP ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN	IP ASN Dimensi Kualifikasi	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	PB, PG
																	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	
										INSPEKTORAT	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	- Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) - Nilai Kapabilitas APIP - Nilai MCSP pada area penguatan APIP	Optimalnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	- Nilai Kapabilitas APIP pada elemen Peran dan Layanan - Nilai SAKIP Pemkab pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal - Persentase Parameter IEPK yang mendapat grade B	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	PG
																Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Asistensi	PB, PG
										KESBANG POL	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat, serta stabilitas politik daerah	- Cakupan wilayah yang memperoleh pendidikan politik - Indeks Kinerja Ormas - Indeks Kewaspadaan Nasional	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	PG
																Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	PG
																Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	PB

NO.	VISI / MISI	NO.	TUJUAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	NO.	SASARAN PEMKAB	NO.	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KET *PB = PROGRAM BUPATI* *PG = PROGRAM GUBERNUR* *PN = PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*
										KECAMATAN	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai capaian kinerja layanan kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	- Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PB, PG
																Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PG
																Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	PB

Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Terhadap Program Unggulan Bupati (Trilas Program) Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Dukungan Program Unggulan Bupati

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
1	**Program Pasti Sekolah:**			
	a. Transportasi sekolah yang murah dan aman di daerah-daerah terpencil	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Meningkatnya kualitas layanan lalu lintas dan angkutan jalan	PD Pengampu bidang urusan Perhubungan
	b. Beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi c. Membangun dan memperluas fasilitas PAUD di wilayah-wilayah yang kurang terlayani d. Renovasi sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan infrastruktur e. Meningkatkan ketersediaan prasarana sekolah yang modern f. Menyediakan jaringan internet di sekolah-sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan	PD Pengampu bidang urusan Pendidikan
2	**Insentif guru ngaji, pesantren, organisasi keagamaan, RT/RW dan BPD**	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	PD Pengampu fungsi Sekretariat Daerah
3	**Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas**			
	a. Fasilitas penyelenggaraan pentas seni dan budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai luhur budaya	PD Pengampu bidang urusan Kebudayaan
	b. Satu event kebudayaan atau olahraga setiap bulan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
	c. Peningkatan kualitas pembinaan dan manajemen atlet	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PD Pengampu bidang urusan Kepemudaan dan olahraga
	d. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga dan kebudayaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya fasilitasi bantuan keuangan	PD Pengampu fungsi Keuangan
4	**Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di setiap Kecamatan**			
	a. Fasilitas akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	b. Fasilitas kemitraan antara UMKM dengan perusahaan skala besar	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	PD Pengampu bidang urusan Penanaman Modal
	c. Pelatihan dan pendampingan manajemen bisnis untuk pemuda pelopor UMKM dan petani muda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	PD Pengampu bidang urusan Kepemudaan dan olahraga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
	d. Pelatihan dan fasilitasi pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	e. Pembentukan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya kualitas data Sistem Informasi Industri Nasional	PD Pengampu bidang urusan Perindustrian
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
	f. Fasilitasi promosi produk kreatif lokal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Promosi Pariwisata	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	
5	**Pengembangan Desa Wisata dengan Melibatkan BUMDES**			
	a. Penguatan manajemen BUMDES untuk pengembangan dan pengelolaan desa wisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat	PD Pengampu bidang urusan Kebudayaan

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
	b. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis potensi dan budaya lokal c. Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya d. Promosi destinasi wisata hingga tingkat internasional	MASYARAKAT HUKUM ADAT	Hukum Adat dalam pembangunan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	PD Pengampu bidang urusan Kebudayaan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
6	**Percepatan Pengentasan Kemiskinan**			
	a. Menurunkan angka stunting dengan pemberian bantuan makanan bergizi	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	PD Pengampu bidang urusan Sosial
	b. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya jumlah dan kualitas sistem pengelolaan air limbah	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya layanan sistem penyediaan air minum	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	c. Percepatan penambahan jumlah rumah layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	PD Pengampu bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	d. Perluasan akses kesempatan kerja bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
7	**Revitalisasi Pasar Tradisional yang Aman dan Nyaman**			
	a. Revitalisasi sanitasi pasar yang bersih dan sehat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Optimalnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD Pengampu bidang urusan Perdagangan
	b. Penataan kios pedagang dan fasilitas parkir			
	c. Penguatan pengelola pasar melalui kolaborasi dengan paguyuban			

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
	d. Pelatihan dan pendampingan pedagang pasar tradisional untuk peningkatan daya saing dengan pasar modern	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	e. Digitalisasi retribusi pasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PD Pengampu fungsi Keuangan
8	**Layanan Puskesmas Rawat Inap di Setiap Kecamatan**			
	a. Pembangunan Ruang Rawat Inap pada Puskesmas Non Rawat Inap Prioritas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	PD Pengampu bidang urusan Kesehatan
9	**Mewujudkan Swasembada Pangan Lokal Menuju Kesejahteraan Petani**			
	a. Penguatan kolaborasi kelompok tani dan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	PD Pengampu bidang pertanian
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	b. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan jalan usaha tani	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana SDA dan meningkatnya Kinerja irigasi	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
	c. Pengembangan gudang penyimpanan pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan cadangan pangan	PD Pengampu bidang urusan Pangan
	d. Mempermudah permodalan untuk petani	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
	e. Jaminan keanggotaan asuransi petani	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	PD Pengampu bidang Sosial
	f. Pengembangan pasar komoditas tani yang berdaya saing	PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	PD Pengampu bidang urusan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Optimalnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD Pengampu bidang urusan Perdagangan
	g. Implementasi teknologi pertanian modern (smart farming), terintegrasi dan berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan produktivitas dengan penerapan teknologi pertanian	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
	h. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk peningkatan kualitas dan kapasitas produksi pertanian	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Meningkatnya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Optimalnya penerapan hasil riset	PD Pengampu fungsi Penelitian dan Pengembangan
10	**Percepatan Pembangunan Kawasan Industri untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan**			
	a. Perencanaan percepatan pembangunan kawasan industri b. Penyiapan kebijakan pembangunan kawasan industri c. Perencanaan teknis kawasan industri d. Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri e. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Industri f. Tahap Pembangunan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	PD Pengampu urusan Perencanaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya jumlah dan kualitas sistem pengelolaan air limbah	

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya layanan sistem penyediaan air minum	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan	
11	**Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota**			
	a. Pembangunan Jalan Kabupaten b. Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten (Jembatan, Drainase) c. Pembangunan Jalan Lingkungan d. Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Lingkungan (Jembatan, Drainase) e. Pengembangan Perlengkapan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan f. Pengembangan Prasarana Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		PD Pengampu bidang urusan perumahan dan Kawasan permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		PD Pengampu bidang urusan perhubungan
12	**Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat**			
	a. Pembangunan jaringan air bersih baru	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya layanan sistem penyediaan air minum	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Perbaikan sarana penyediaan air bersih			
	c. Jaminan bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya mitigasi bencana, penanganan darurat bencana, dan penanganan pasca bencana	PD Pengampu bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	d. Kolaborasi program sungai bersih untuk menjaga kualitas air dan lingkungan sungai	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Optimalnya Pengelolaan Limbah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun	PD Pengampu bidang urusan Lingkungan Hidup
13	**Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan dan Solutif**			
	a. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu dan pengelolaan investasi	PD Pengampu bidang urusan Penanaman Modal

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
	b. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem birokrasi untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Pelayanan dan Jangkauan TIK	PD Pengampu bidang urusan Komunikasi dan Informatika
	c. Penerapan aplikasi layanan publik berbasis gawai untuk memudahkan masyarakat berbagai layanan pemerintahan			
	d. Implementasi sistem pembayaran digital untuk layanan-layanan pemerintah			
	e. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	PD Pengampu fungsi Kepegawaian
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kompetensi ASN	PD Pengampu fungsi Pendidikan dan Pelatihan
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Asistensi	PD Pengampu fungsi Pengawasan
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	f. Peningkatan Promosi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	PD Pengampu bidang urusan Penanaman Modal
	g. Peningkatan Kualitas Layanan Publik, melalui Pengiriman tim layanan publik keliling dan penguatan pusat layanan publik terpadu di setiap kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PD Pengampu fungsi Kewilayahan
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	PD Pengampu bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	PD Pengampu bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan	PD Pengampu fungsi Sekretariat Daerah

No	Program Delegasi Bupati	Dukungan Program	Outcome	Penanggung jawab Bidang Urusan
			pemerintah daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	PD Pengampu bidang urusan Penanaman Modal
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu dan pengelolaan investasi	PD Pengampu bidang urusan Penanaman Modal

Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Terhadap Program Delegasi Gubernur Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Banyumas
Terhadap Program Delegasi Gubernur

No	Program Delegasi Gubernur	Dukungan Program	Penanggung Jawab Bidang Urusan
1	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PD Pengampu bidang urusan Pendidikan
2	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta		
3	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PD Pengampu bidang urusan Kesehatan
4	Cek Kesehatan Gratis		
5	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PD Pengampu bidang urusan Kesehatan
6	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PD Pengampu bidang urusan Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PD Pengampu bidang urusan Sosial
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PD Pengampu bidang urusan Pemuda dan Olah Raga
8	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PD Pengampu fungsi Kewilayahan
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PD Pengampu bidang urusan Perumahan

No	Program Delegasi Gubernur	Dukungan Program	Penanggung Jawab Bidang Urusan
	Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional		dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PD Pengampu fungsi Pengawasan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PD Pengampu fungsi Pengawasan
11	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
12	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PD Pengampu bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
14	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clean Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PD Pengampu fungsi Pendidikan dan Pelatihan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Pengampu fungsi Kewilayahan
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PD Pengampu fungsi Pengawasan
15	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PD Pengampu bidang urusan Sekretariat Daerah
16	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PD Pengampu bidang urusan Sosial
17	Peningkatan operasional kader Posyandu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PD Pengampu bidang urusan Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Peningkatan kualitas hidup lansia	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PD Pengampu bidang urusan Sosial
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PD Pengampu bidang urusan Sosial
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PD Pengampu bidang urusan Kesehatan
19	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Delegasi Gubernur	Dukungan Program	Penanggung Jawab Bidang Urusan
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PD Pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PD Pengampu bidang urusan Lingkungan Hidup
20	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PD Pengampu bidang urusan Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
21	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PD Pengampu bidang urusan Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
22	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PD Pengampu bidang urusan Tenaga Kerja
23	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PD Pengampu bidang urusan Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
		PROGRAM RISET DAN INOVASI	PD Pengampu bidang urusan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PD Pengampu bidang urusan Pertanian
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PD Pengampu bidang urusan Perdagangan

No	Program Delegasi Gubernur	Dukungan Program	Penanggung Jawab Bidang Urusan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PD Pengampu bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PD Pengampu bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PD	Pengampu bidang urusan Pemerintahan Umum
25	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PD pengampu bidang Pertanian
26	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PD Pengampu bidang urusan Pariwisata
27	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
28	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PD Pengampu bidang urusan Sekretariat Daerah
29	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PD Pengampu bidang urusan Lingkungan Hidup
30	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PD Pengampu bidang urusan Pemerintahan Umum
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PD Pengampu bidang urusan Pemerintahan Umum
31	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PD Pengampu bidang urusan Pemerintahan Umum
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PD Pengampu bidang urusan Pemerintahan Umum
32	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PD Pengampu bidang urusan Pemuda dan Olah Raga
33	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PD Pengampu bidang urusan OPD Pengampu bidang urusan Koperasi,

No	Program Delegasi Gubernur	Dukungan Program	Penanggung Jawab Bidang Urusan
			Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PD Pengampu bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
34	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PD Pengampu bidang urusan Kelautan dan Perikanan
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PD Pengampu bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	TAHAPAN				
							2026	2027	2028	2029	2030
							Tema Tahap I : "Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif"	**Tema Tahap II :** Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.	**Tema Tahap III :** Peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi unggulan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah	**Tema Tahap IV :** Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah	**Tema Tahap V :** Perwujudan Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera
VISI : MEWUJUDKAN BANYUMAS PRODUKTIF, ADIL DAN SEJAHTERA											
1 Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1 Tingkat Kemiskinan (%)	1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	1 Pencapaian Program Pasti Sekolah melalui peningkatan akses pendidikan untuk semua dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Transportasi sekolah yang murah dan aman di daerah-daerah terpencil	Operasional layanan bus sekolah gratis di Kecamatan Somagede, Banyumas, Kalibagor	Operasional layanan bus sekolah gratis di Kecamatan Somagede, Banyumas, Kalibagor	Operasional layanan bus sekolah gratis di Kecamatan Somagede, Banyumas, Kalibagor	Peningkatan layanan bus sekolah gratis dengan penambahan rute layanan di Kecamatan Patikraja	Optimalisasi operasional bus sekolah gratis di Kecamatan Somagede, Banyumas, Kalibagor, dan Patikraja
							Penyediaan ZOSS untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa	Penyediaan 5 ZOSS di Kabupaten Banyumas	Penyediaan 5 ZOSS di Kabupaten Banyumas	Penyediaan 5 ZOSS di Kabupaten Banyumas	Penyediaan 5 ZOSS di Kabupaten Banyumas
							Penyusunan Kajian RASS Kabupaten Banyumas	Penyusunan RASS di Kabupaten Banyumas	Penambahan RASS di Kabupaten Banyumas	Penambahan RASS di Kabupaten Banyumas	Penambahan RASS di Kabupaten Banyumas
						2 Membangun dan memperluas fasilitas PAUD di wilayah-wilayah yang kurang terlayani	Evaluasi dan analisis kebutuhan sarpras sekolah dan siswa PAUD	Pemerataan Pemenuhan kebutuhan sarpras sekolah dan siswa PAUD			
						3 Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu (SD dan SMP) serta mahasiswa kurang mampu yang berprestasi	Pemberian beasiswa kepada siswa SD sederajat dan SMP Sederajat dari keluarga miskin Seluruh wilayah kecamatan serta mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin untuk menempuh Pendidikan Tinggi				
						4 Penanganan anak tidak sekolah	Verifikasi data ATS Dapodik dan Intervensi Penanganan ATS	Pengembalian Anak usia Sekolah Kembali bersekolah		Pengendalian dan percepatan penanganan ATS	Evaluasi, pemantauan dan penanganan ATS berkelanjutan

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
									2026	2027	2028	2029	2030
							5	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), penyelenggaraan pendidikan inklusi, serta dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat	Pemetaaan kebutuhan Sekolah Menengah, peningkatan kompetensi guru inklusi serta dukungan pembangunan sekolah rakyat	Pengusulan pendirian Sekolah Menengah, Penyediaan sarana prasarana sekolah inklusi dan peningkatan kompetensi Guru Inklusi, Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	Persiapan Pendirian Sekolah Menengah, Pemerataan Penyediaan sarana prasarana sekolah inklusi, peningkatan kompetensi guru inklusi, Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusi, peningkatan kompetensi guru inklusi, Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	Evaluasi dan pemantauan kualitas layanan pendidikan inklusi, dukungan pembangunan Sekolah Menengah, Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
					2	Peningkatan mutu layanan pendidikan, melalui pemenuhan dan Pengembangan SDM serta infrastruktur Pendidikan serta peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan	6	Peningkatan Kompetensi dan pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas di seluruh wilayah	Penyediaan formasi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah yang belum terpenuhi serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan				
							7	Pemenuhan Sarana dan Prasarana satuan Pendidikan yang memadai termasuk penyediaan jaringan internet di sekolah-sekolah	Pembangunan dan rehab prasarana serta pemenuhan sarana termasuk jaringan internet pada satuan Pendidikan				
							8	Peningkatan dukungan terhadap pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif guru ngaji dan operasional pesantren	Pemberian insentif kepada guru ngaji dan bantuan operasional kepada pesantren di seluruh wilayah kecamatan				
					3	Peningkatan literasi masyarakat	9	Peningkatan budaya literasi sejak usia dini serta kecakapan literasi dan numerasi bagi siswa PAUD, SD dan SMP	Pemetaan dan evaluasi kondisi perpustakaan	Kebijakan pemenuhan pustakawan yang mengelola perpustakaan desa dan SD	Pembinaan perpustakaan yang terstandarisasi nasional perpustakaan (SNP)	Pemanfaatan perpustakaan desa dan perpustakaan SD melibatkan pemberdayaan masyarakat	Keberlanjutan pemanfaatan perpustakaan desa dan perpustakaan SD melibatkan pemberdayaan masyarakat
					4	Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk semua	10	Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Verifikasi dan Validasi, Reaktivasi Kepesertaan JKN, serta Pemberian bantuan iuran pada Peserta JKN penduduk Banyumas untuk peningkatan Cakupan JKN dan Cakupan JKN Aktif				
							11	Pembangunan RS dengan unggulan Paru	Persiapan Pembangunan RS Unggulan Paru	Pembangunan RSU dengan keunggulan paru tahap 1 di Kecamatan Purwokerto Utara	Pembangunan RSU dengan keunggulan paru tahap 2	Pembangunan RSU dengan keunggulan paru tahap 3	Pembangunan RSU dengan keunggulan paru tahap 4
							12	Peningkatan cakupan dan jangkauan intervensi Integrasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan serta peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap	Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pengembangan Puskesmas Kalibagor menjadi Rawat Inap, Pembangunan Pustu dan atau Revitalisasi PKD menjadi Pustu, serta Layanan Puskesmas Keliling	Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pengembangan Puskesmas Sumbang II menjadi Rawat Inap, Pembangunan Pustu dan atau Revitalisasi PKD menjadi Pustu, serta Layanan Puskesmas Keliling	Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pengembangan Puskesmas Kembaran II menjadi Rawat Inap, Pembangunan Pustu dan atau Revitalisasi PKD menjadi Pustu, serta Layanan Puskesmas Keliling	Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pengembangan Puskesmas Patikraja menjadi Rawat Inap, Pembangunan Pustu dan atau Revitalisasi PKD menjadi Pustu, serta Layanan Puskesmas Keliling	Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pengembangan Puskesmas menjadi Rawat Inap, Pembangunan Pustu dan atau Revitalisasi PKD menjadi Pustu, serta Layanan Puskesmas Keliling

VISI / MISI		TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB		INDIKATOR SASARAN PEMKAB		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
												2026	2027	2028	2029	2030
								5	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	13	Pemenuhan SPM Kesehatan, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB) serta penurunan Angka Kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan, Peningkatan cakupan penemuan, pengobatan, dan keberhasilan pengobatan Penyakit Menular, serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Hidup Sehat				
										14	Peningkatan Status Gizi, pencegahan dan penurunan stunting serta dukungan pada Program MBG	Peningkatan Cakupan Layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Peningkatan Kualitas dan Cakupan Penerimaan Makan Bergizi Gratis				
										15	Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, persediaan farmasi, dan peralatan medis	Penambahan dan distribusi tenaga kesehatan, pemenuhan kefarmasian dan alat kesehatan di fasilitas layanan kesehatan				
								6	Peningkatan peran masyarakat terhadap kesehatan diri dan lingkungan	16	Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat serta Peningkatan promosi kesehatan	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga Sehat serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				
								7	Pembangunan olahraga	17	Peningkatan prestasi olahraga dan Peningkatan dukungan terhadap atlet	Pemasalan dan Pengembangan Olahraga Bagi Masyarakat melalui penyelenggaran event serta pembinaan atlet dan SDM olahraga.				
										18	Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga	Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria	Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria			
												Rehabilitasi 1 lapangan tiap kecamatan serta Pemanfaatan RTH untuk olahraga dan ramah anak				
								8	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	19	Pembangunan keluarga serta pemberdayaan, penguatan kapasitas, kemandirian dan partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia di berbagai bidang pembangunan.	Peningkatan keterlibatan organisasi dan fasilitasi kepeloporan pemuda.	Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan.			
												Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, politik , pendidikan				
												Pemenuhan sarana prasarana ramah anak Penguatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap anak				
												Pendataan Kondisi Keluarga yang Memerlukan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Pemanfaatan Data Keluarga untuk Intervensi	Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Optimalisasi dan Penguatan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Peningkatan Kemandirian Ekonomi keluarga
										20	Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian kelahiran penduduk	Pelatihan Kader Posyandu untuk Aspek Kesehatan Reproduksi dan KAP, Penguatan Kelompok Masyarakat (BKB, BKR, BKL), dan Peningkatan Kualitas Layanan KB				
2	Memperkuat ketahanan pangan			2	Meningkatnya ketahanan pangan	2	Indek Ketahanan Pangan (IKP)	9	Pengelolaan ketahanan pangan untuk menuju Swasembada Pangan Lokal dan Kesejahteraan Petani	21	Regenerasi SDM sektor Pertanian dan Penguatan Kapasitas, Akses Permodalan, serta Perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi petani	Penguatan Kapasitas SDM melalui Pendampingan dan Pelatihan bagi Peternak, Nelayan Kecil, Petani dan Pembudidaya Ikan				
												Penguatan Kelembagaan Pertanian melalui Fasilitasi Kemudahan Perizinan bagi Pelaku Usaha Peternakan, Akses Permodalan bagi Petani serta Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi dan Keselamatan bagi Penderes				
												Pelaksanaan Regenerasi Petani melalui pendataan petani millenial di Setiap Kecamatan	Pengembangan Regenerasi Petani melalui Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Petani			

VISI / MISI		TUJUAN PEMKAB		INDIKATOR TUJUAN PEMKAB		SASARAN PEMKAB		INDIKATOR SASARAN PEMKAB		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
														2026	2027	2028	2029	2030
												22	Peningkatan Produksi dan Produktivitas pertanian pangan, diversifikasi pangan berbasis Pangan Lokal serta Penyediaan prasarana pendukung ketersediaan pangan dan dukungan program prioritas swasembada pangan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal melalui Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari dan Produksi Pangan Berkelanjutan serta Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian			
														Kajian Pemetaan kawasan perikanan	Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan pada Kawasan Perikanan Potensial		Pengembangan Kawasan Perikanan Potensial	
												23	Peningkatan keterjangkauan pangan	Penguatan Cadangan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan serta Stabilisasi Harga dan Revitalisasi dan Pemeliharaan Pasar				
												24	Pemenuhan kecukupan pangan dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal	Penjaminan kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal				
3	Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan					3	Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	3	PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah per kapita/ tahun)	10	Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja dan kelembagaan ekonomi daerah adaptif terhadap digitalisasi dan pemanfaatan teknologi	25	Pemenuhan akses internet pada fasilitas strategis dan optimalisasi pemanfaatannya untuk pengembangan usaha	Penguatan data potensi serta peningkatan promosi dan pemasaran digital tiap kecamatan	Peningkatan kecakapan pemasaran digital bagi pelaku usaha	fasilitasi pemasaran digital bagi pelaku usaha	peningkatan produktivitas pelaku usaha dengan pemasaran digital	Pendampingan dan pemantauan produktivitas pelaku usaha dengan pemasaran digital
												26	Peningkatan Kinerja BUMD	Peningkatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan, pembinaan dan monev, penyertaan modal PT BPD Jateng dan Perumdam Tirta Satria	Peningkatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan, pembinaan dan monev, penyertaan modal PT BPD Jateng dan Perumdam Tirta Satria	Peningkatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan, pembinaan dan monev, penyertaan modal Perumdam Tirta Satria	Peningkatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan, pembinaan dan monev, penyertaan modal Perumdam Tirta Satria	Peningkatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan, pembinaan dan monev, penyertaan modal PT BPD Jateng dan Perumdam Tirta Satria
												27	Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital				
														Penguatan UMKM melalui pelatihan wirausaha bagi pelaku UMKM				
														Pelaksanaan Regenerasi Petani melalui pendataan petani millenial di Setiap Kecamatan	Pengembangan Regenerasi Petani melalui Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Petani			
								4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	11	Peningkatan pendapatan masyarakat	28	Peningkatan kapasitas, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan	Pengembangan UMKM				

VISI / MISI		TUJUAN PEMKAB		INDIKATOR TUJUAN PEMKAB		SASARAN PEMKAB		INDIKATOR SASARAN PEMKAB		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
														2026	2027	2028	2029	2030
													pengolahan dan pemasaran hasil olahan					
												29	Pemerataan penyediaan sarana distribusi perdagangan pendukung usaha	Fasilitasi usulan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung usaha di desa				
												30	Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat miskin				
										12	Percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan terintegrasi, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong kemiskinan	31	Pemutakhiran data penerima bantuan yang lebih akurat dan peningkatan Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran	Peningkatan Pemutakhiran data Kemiskinan Seluruh wilayah kecamatan	Peningkatan Pengelolaan Data Kemiskinan Seluruh wilayah kecamatan	data kemiskinan terpadu kabupaten Banyumas	Peningkatan Pemanfaat Data kemiskinan Kabupaten Banyumas	Optimalisasi penyaluran bantuan ke PPKS di Kabupaten Banyumas
												32	Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat	Optimalisasi program pemberdayaan sosial masyarakat serta percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi dan Penanganan RTLH di seluruh wilayah kecamatan			
4	Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	2	Indeks daya saing daerah (IDSD)	4	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	13	Peningkatan kualitas sektor usaha daerah dengan peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah dan pengembangan produk potensial daerah untuk	33	Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas usaha mikro dan pelaku ekonomi kreatif dalam pengolahan pangan hasil pertanian dan perikanan serta pengolahan produk unggulan daerah	Pengembangan pengolahan produk unggulan daerah, pembinaan usaha olahan pangan hasil pertanian dan perikanan dengan sertifikasi halal serta fasilitasi bantuan akses permodalan bagi petani, nelayan dan Usaha Mikro,				
												34	Pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)	Peningkatan budidaya ikan melalui pemberian bimtek penerapan CPIB CBIB di setiap kecamatan				

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
									2026	2027	2028	2029	2030
						peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung ekonomi syariah	35	Penerapan tata kelola pertanian modern berbasis Integrated Farming	Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari /P2L difokuskan pada desa miskin dan stunting	Pemenuhan penyediaan sarana pertanian serta fasilitasi bimbingan teknis budidaya yang baik bagi petani dan peternak	Peningkatan penerapan teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Peningkatan produktivitas produk unggulan	Pengembangan kemitraan agribisnis pertanian dan perikanan hulu sampai hilir berbasis digital serta jaminan pasar dan harga yang bersaing.
							36	Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan, pengoperasian transportasi massal, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta penghijauan	Peningkatan Fasilitasi sarana prasarana untuk pengairan lahan pertanian di daerah rawan kekeringan (daerah sepanjang aliran sungai serayu) serta Pembangunan, Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan embung, irigasi dan jalan usaha tani	Peningkatan penyelenggaraan pertanian ramah iklim dan rendah emisi melalui Penggunaan pupuk organik untuk pertanian, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), varietas padi rendah emisi, dan BATAMAS (Biogas Ternak Asal Masyarakat)	Pengendalian pemenuhan persyaratan izin industri ramah lingkungan	Pengembangan Kawasan Industri ramah lingkungan	
									Penyelenggaraan layanan transportasi massal di wilayah strategis				
						14 Peningkatan daya tarik pariwisata dengan membangun citra, karakter, dan jati diri perkotaan, penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif	37	Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis potensi dan budaya lokal (wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata olahraga) serta Pengembangan dan pengelolaan desa wisata dengan Melibatkan BUMDES	Penguatan Kapasitas BUMDes, Pengelolaan Desa Wisata melalui Bumdes, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
							38	Penguatan pemasaran pariwisata serta Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya	Penguatan pondasi pariwisata berbasis budaya dan alam melalui pengembangan destinasi, pembentukan desa wisata berbasis ekonomi kreatif, atraksi budaya desa, branding, serta pemetaan potensi wisata unggulan.	Peningkatan kualitas daya tarik wisata dengan penguatan branding Banyumas, pelatihan SDM pariwisata, serta pembentukan desa wisata berbasis budaya yang didukung promosi dan event atraktif.	Perluasan jangkauan pariwisata melalui peningkatan kolaborasi event, pengembangan paket wisata antar destinasi, serta pembentukan desa wisata berbasis kelestarian alam untuk memperkuat daya saing daerah.	Penguatan ekosistem pariwisata melalui penyelenggaraan paket wisata terintegrasi (desa wisata, alam, budaya, kuliner, sport tourism) serta peningkatan klasifikasi desa wisata berkembang.	Keberlanjutan dan penguatan branding pariwisata daerah dengan mengokohkan paket wisata terintegrasi, konsistensi penyelenggaraan event, dan pengembangan desa wisata berbasis kelestarian alam sebagai ikon Banyumas.

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
									2026	2027	2028	2029	2030
									Penguatan citra pariwisata Banyumas melalui branding, promosi dalam–luar negeri, Optimalisasi badan/ tim promosi wisata, serta event budaya sebagai daya tarik unggulan.	Penguatan pemasaran pariwisata dengan promosi terpadu, event atraktif, dan peningkatan peran influencer desa wisata.	Perluasan promosi pariwisata melalui kolaborasi event dengan swasta dan pengembangan paket wisata antar destinasi.	Penguatan promosi pariwisata melalui paket wisata terintegrasi (desa wisata, budaya, alam, kuliner, sport tourism) dengan kolaborasi multi stakeholder.	Penguatan branding pariwisata Banyumas dengan ikon paket wisata terintegrasi dan event rutin sebagai daya tarik unggulan.
							39	Pembangunan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal	Kajian Penetapan Sentra Industri di Banyumas	Pengembangan Sentra Industri di Banyumas			
							40	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan Banyumas	Pemetaan potensi seni dan budaya, inventarisasi kelompok seni serta penguatan awal perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi pelaku seni-budaya, penyelenggaraan festival tahunan, serta konsistensi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.	Perluasan jangkauan kegiatan budaya melalui festival tingkat kecamatan dan kabupaten, didukung event kebudayaan dan penguatan perlindungan objek budaya.	Penguatan ekosistem budaya dengan penguatan identitas daerah melalui festival tahunan di berbagai tingkatan, serta peningkatan kualitas perlindungan dan pengembangan objek budaya.	Keberlanjutan dan penguatan branding daerah berbasis budaya melalui festival budaya berjenjang dan konsistensi pemajuan objek kebudayaan.
					15	Peningkatan investasi daerah	41	Peningkatan promosi dan Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan	Fasilitasi Pelayanan perizinan Keliling , Peningkatan Jangkauan Pelayanan perizinan Keliling ke Kecamatan serta Peningkatan promosi investasi	Evaluasi kebijakan Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan	Penerapan kebijakan Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan		
					16	Pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri untuk produk unggulan dan produk kreatif berbasis kearifan lokasi	42	Pengembangan pasar hasil produksi serta Peningkatan promosi dan diversifikasi ekspor	Pengembangan pasar hasil produksi	Fasilitasi promosi produk kreatif lokal dan Pengembangan pasar komoditas tani yang berdaya saing	Peningkatan promosi pemasaran dan diversifikasi ekspor	Peningkatan Pengembangan ekspor produk unggulan dan produk potensial daerah	Diversifikasi Ekspor Produk Unggulan Daerah (PUD)
							43	Peningkatan Aksesibilitas Pasar dan Revitalisasi pasar tradisional yang aman dan nyaman	Revitalisasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah				
					17	Dukungan penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkular, serta kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	44	Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan, serta Pengoperasion transportasi masal dalam mendukung ekonomi hijau dan biru	Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan serta Pengoperasian transportasi massal				

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB		INDIKATOR SASARAN PEMKAB		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
											2026	2027	2028	2029	2030
							18	Sinergi pengembangan pariwisata, budaya, koperasi, usaha mikro dan industri ekonomi kreatif serta Penguatan rantai pasok industri pendukung pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,	45	Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan Influencer wisata untuk menuju 1 Influencer 1 Desa Wisata serta pemberian Awarding untuk Konten Kreator Wisata	Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus Kelompok Sadar Wisata dan SDM Pariwisata	Peningkatan Aktivasi Badan Promosi Wisata (PHRI, Biro wisata dan Tour Guide, Komunitas Wisata lainnya, Tourism Information Center) dalam promosi wisata melalui event kebudayaan	Peningkatan kolaborasi dalam pengelolaan wisata daerah
									46	Pengembangan klaster ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan ekonomi kreatif serta Pengembangan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif				
									47	Penguatan SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha koperasi (dukungan koperasi merah putih)	Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih melalui Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi di seluruh wilayah kecamatan				
					6	Tingkat penganggura n terbuka (TPT) (%)	19	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	48	Perluasan akses kesempatan kerja bagi masyarakat, serta peluang kerja bagi kelompok disabilitas	Pengelolaan data Tenaga Kerja	Pemanfaatan data Peluang dan kesempatan kerja	Peningkatan akses informasi peluang dan kesempatan kerja	Peningkatan ketrampilan dan kecakapan tenaga kerja dan masyarakat sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat
							20	Pengembangan Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan	49	Percepatan pembangunan Kawasan Industri	Penyusunan Kajian Penetapan Kawasan Industri	Penyiapan kebijakan pembangunan kawasan industri dan perencanaan teknis kawasan industri	Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri	Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri dan penyusunan dokumen lingkungan Kawasan Industri	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri
				5	Meningkatnya pengembanga n wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing	7	Nilai Daya Saing infrastruktur	21	Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sarana prasarana wilayah	50	Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan SPAM, koordinasi pengembangan SPAM Regional Maslancip, pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan SPAM, koordinasi pengembangan SPAM Regional Maslancip, koordinasi pembangunan SPAM IKK Rawalo, pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM lainnya	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan SPAM, koordinasi pengembangan SPAM Regional Maslancip, koordinasi pembangunan SPAM IKK Rawalo, pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM lainnya	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan SPAM, koordinasi pengembangan SPAM Regional Maslancip, koordinasi pembangunan SPAM IKK Rawalo, pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM lainnya	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan SPAM, koordinasi pengembangan SPAM Regional Maslancip, koordinasi pembangunan SPAM IKK Rawalo, pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM lainnya
											bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan dan analisis ketersediaan sumber air baku pada kawasan rawan kekeringan	bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan dan analisis potensi sumber air baku alternatif untuk kawasan rawan kekeringan	bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan dan analisis potensi sumber air baku alternatif untuk kawasan rawan kekeringan	bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan dan analisis potensi pengembangan SPAM pada kawasan rawan kekeringan	bantuan air bersih dan perencanaan pengembangan SPAM pada kawasan rawan kekeringan

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
										2026	2027	2028	2029	2030
										Inventarisasi Sumber Air Baku serta koordinasi pelestarian Catchment Area (Area Tangkapan Air)	Perlindungan Sumber Air Baku serta koordinasi Pelestarian Catchment Area (Area Tangkapan Air)	Perlindungan Sumber Air Baku serta koordinasi Pelestarian Catchment Area (Area Tangkapan Air) dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan melibatkan peran serta masyarakat	Peningkatan Perlindungan Sumber Air Baku serta koordinasi Pelestarian Catchment Area (Area Tangkapan Air) dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan melibatkan peran serta masyarakat	Peningkatan Perlindungan Sumber Air Baku serta koordinasi Pelestarian Catchment Area (Area Tangkapan Air) dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan melibatkan peran serta masyarakat
								51	Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, survey berkala kondisi jalan, pembangunan dan pemeliharaan Jalan				
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis, pembangunan dan pemeliharaan pelengkap jalan Kabupaten				
								52	Peningkatan akses layanan sanitasi	Pembangunan SPALD-S terutama pada kawasan kecamatan rawan sanitasi, dan peningkatan kapasitas IPLT	Pembangunan SPALD-S, peningkatan kapasitas IPLT dan sarana prasarana IPLT, serta penyediaan SDM pengelola	Pembangunan SPALD-S, peningkatan sarana prasarana IPLT dan layanan L2T2	Operasional dan pemeliharaan IPLT dan peningkatan layanan L2T2	Operasional dan pemeliharaan IPLT dan peningkatan layanan L2T2
				8	Rasio PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	22	Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk kemandirian desa dan Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	53	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk optimalisasi fungsi pelayanan kawasan, mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, serta pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan	Pengintegrasian hasil pelaksanaan program NUDP dalam dokumen perencanaan, serta pengembangan pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur perkotaan	Peningkatan koordinasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan;	Peningkatan koordinasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan;	Peningkatan koordinasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan;	Peningkatan koordinasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan;
											Perencanaan tata bangunan dan lingkungan pada kawasan perkotaan	Perencanaan tata bangunan dan lingkungan pada kawasan perkotaan	Implementasi rencana tata bangunan dan lingkungan pada kawasan perkotaan	Implementasi rencana tata bangunan dan lingkungan pada kawasan perkotaan
														Penyusunan kajian, perencanaan. studi kelayakan pembangunan hunian vertikal dan Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		TAHAPAN				
								2026	2027	2028	2029	2030
						54	Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan;	Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan;				
						55	Pengelolaan lingkungan perdesaan meliputi pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan;	Optimalisasi peran dan kapasitas Taruna Tanggap Bencana	Optimalisasi peran dan kapasitas Taruna Tanggap Bencana	Optimalisasi peran dan kapasitas Taruna Tanggap Bencana	Optimalisasi peran dan kapasitas Taruna Tanggap Bencana	Optimalisasi peran dan kapasitas Taruna Tanggap Bencana
						56	Peningkatan kemandirian desa melalui Pemanfaatan Potensi Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan daya saing, produktivitas dan ketahanan ekonomi perdesaan., serta sinkronisasi perencanaan dan penguatan peran atau pembagian kewenangan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan desa, peningkatan penataan desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan monitoring dan evaluasi pembangunan desa				
						57	Pengelolaan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan penguatan integrasi antar moda transportasi	Penyusunan RILLAJ, mendorong penggunaan transportasi masal dan penambahan koridor layanan Trans Banyumas	Operasional Trans Banyumas	Operasional Trans Banyumas	Operasional Trans Banyumas	Evaluasi operasional trans Banyumas
						58	Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa (pendidikan,	Identifikasi dan analisis pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar	Perencanaan teknis pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa	Perencanaan teknis, penyiapan lahan pemenuhan sarana dan prasarana	Penyiapan dokumen lingkungan dan pembangunan sarana prasarana	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa

VISI / MISI		TUJUAN PEMKAB		INDIKATOR TUJUAN PEMKAB		SASARAN PEMKAB		INDIKATOR SASARAN PEMKAB		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
														2026	2027	2028	2029	2030
													kesehatan, sanitasi, air minum);	desa (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum)		pelayanan dasar desa	pelayanan dasar desa	
														Memperkuat kebijakan untuk mendorong peran serta desa dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar desa sesuai kewenangan	Mendorong peran serta desa dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar desa	Fasilitasi dan bantuan teknis penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar desa		
										23	Pengembangan kawasan strategis berbasis Produk Unggulan Daerah dan potensial daerah	59	Optimalisasi perencanaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Optimalisasi perencanaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang				
												60	Perencanaan dan Pembangunan Sentra Produk Unggulan, Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Kajian Pengembangan kawasan berbasis Produk Unggulan Daerah dan potensial daerah	Perencanaan dan Pembangunan Sentra Produk Unggulan	Peningkatan infrastruktur kawasan untuk mendukung peningkatan produksi dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		
															Pengembangan PUD di Kawasan Perdesaan Wikabalung dan Kawasan perdesaan pegunungan kendeng	Pengembangan PUD di Kawasan Perdesaan Wikabalung, Kawasan Perdesaan Pegunungan Kendeng, serta 2 Kawasan Pengembangan PUD Potensial		
												61	Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan dan Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan dan Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) pada kawasan LP2B				
												62	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pengembangan PUD				
5	Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup					6	Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup	9	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif dalam TonCO2eq (TonCO2eq)	24	Pembangunan rendah karbon dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	63	Pengelolaan lahan berkelanjutan	Penyelenggaraan pertanian ramah iklim dan rendah emisi melalui penggunaan pupuk organik untuk pertanian, pemanfaatan limbah ternak melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), penerapan pupuk berimbang, pengembangan pertanian bernilai konservasi, varietas padi rendah emisi, pemanfaatan residu pertanian (jerami dan sekam), pembuatan pakan ternak berbasis fermentasi, dan pengembangan agroforestri.				
												64	Pengembangan transportasi berkelanjutan	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkelanjutan melalui: pengoperasian Area Traffic Control System (ATCS) dan Bus Rapid Transit (BRT) serta pelaksanaan Car Free Day/Hari Bebas Kendaraan				
												65	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pemantauan kualitas udara dan kualitas air, serta pemantauan kegiatan yang berpotensi menjadi sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				
														Peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup				
														Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup				
														Penataan dan pembangunan RTH Publik				

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
									2026	2027	2028	2029	2030
							66	Pengembangan industri hijau dan Penerapan kebijakan mendorong pembangunan rendah karbon dan perubahan perilaku untuk aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.	Fasilitasi pemenuhan izin lingkungan untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan serta Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup				
							67	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah khususnya Pengelolaan sampah spesifik, limbah B3 dan limbah medis, serta percepatan penghapusan merkuri, berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada peningkatan peran masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sampah, serta perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha;	Penyusunan kebijakan yang bersifat inklusif terkait pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya, perbaikan retribusi mendukung pembiayaan persampahan, penerapan teknologi tepat guna pada tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;	Rehab PDU/TPST/TPS3R dan pembangunan sarpras PDU/TPST/TPS3R pada Kecamatan yang belum memiliki fasilitas persampahan dan implementasi pengelolaan sampah dari hulu	Rehab PDU/TPST/TPS3R dan pembangunan sarpras PDU/TPST/TPS3R pada Kecamatan yang belum memiliki fasilitas persampahan dan implementasi pengelolaan sampah dari hulu	Rehab PDU/TPST/TPS3R dan pembangunan sarpras PDU/TPST/TPS3R pada Kecamatan yang belum memiliki fasilitas persampahan dan implementasi pengelolaan sampah dari hulu	Rehab PDU/TPST/TPS3R dan pembangunan sarpras PDU/TPST/TPS3R pada Kecamatan yang belum memiliki fasilitas persampahan dan implementasi pengelolaan sampah dari hulu
									Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah				
									Peningkatan Pengelolaan limbah serta Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3				
					25	Pembangunan berketahanan iklim dan berketahanan bencana	68	Menjaga ketersediaan air secara kontinu dan mengendalikan daya rusak air	Pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	Perencanaan konservasi pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air serta Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air	Pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air serta, perlindungan dan rehabilitasi sumber air baku	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, perlindungan dan rehabilitasi sumber air baku khususnya di kawasan rawan bencana kekeringan dan kawasan rawan bencana longsor	
							69	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana;	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana;				
							70	Peningkatan kapasitas daerah dengan upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan bencana mulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas				
									Peningkatan pengelolaan risiko difokuskan pada bahaya bencana yang sering terjadi				
									Penguatan kurikulum kebencanaan di setiap satuan pendidikan	Implementasi kurikulum kebencanaan di setiap satuan pendidikan	Implementasi kurikulum kebencanaan di setiap satuan pendidikan	Implementasi kurikulum kebencanaan di setiap satuan pendidikan	Implementasi kurikulum kebencanaan di setiap satuan pendidikan
									Penumbuhan Desa maju dan berdaya melalui Penguatan Taruna Tanggap Bencana serta peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya				

VISI / MISI		TUJUAN PEMKAB		INDIKATOR TUJUAN PEMKAB		SASARAN PEMKAB		INDIKATOR SASARAN PEMKAB		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
														2026	2027	2028	2029	2030
													kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat;	Peningkatan mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, pengendalian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan rawan bencana, serta pembangunan dan pemeliharaan EWS				
														Penanganan darurat bencana serta Pengembangan logistik kebencanaan				
												71	Pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan ketahanan iklim dan bencana	Penyelenggaraan pertanian ramah iklim dan rendah emisi melalui penggunaan pupuk organik untuk pertanian, pemanfaatan limbah ternak melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), penerapan pupuk berimbang, pengembangan pertanian bernilai konservasi, varietas padi rendah emisi, pemanfaatan residu pertanian (jerami dan sekam), pembuatan pakan ternak berbasis fermentasi, dan pengembangan agroforestri.				
6	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah					7	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif	10	Indeks Reformasi Birokrasi	26	Pengembangan sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan solutif serta Optimalisasi strategi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan sistem birokrasi berbasis teknologi informasi	72	Optimalisasi Sistem Manajemen ASN serta peningkatan kualitas SDM Aparatur	Penerapan kebijakan Sistem Merit dengan penempatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Peningkatan kompetensi ASN dan Perangkat Desa melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan	Peningkatan kinerja ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan kinerja ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan kualitas penilaian kinerja ASN
										27	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik	73	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan perencanaan kinerja Pemerintah daerah yang berkualitas, serta Optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah	Penguatan SDM Perencanaan, Pengintegrasian Manajemen risiko dalam proses perencanaan dan penganggaran serta Penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi	Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur dalam implementasi manajemen resiko serta Pengendalian intern Pemerintah	Penguatan pengelolaan manajemen kinerja dan Peningkatan budaya manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan efektivitas manajemen kinerja	Peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi
												74	Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem birokrasi untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta Penyediaan layanan publik inklusif	Peningkatan Implementasi sistem pembayaran digital pada layanan pemerintahan	Peningkatan Cakupan Aplikasi Layanan Pemerintahan yang berbasis Aplikasi Gawai	Penguatan SDM layanan publik dengan kecakapan digital	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital	Peningkatan efektivitas Layanan Pemerintahan yang berbasis digital
												75	Peningkatan kualitas pengawasan/evaluasi internal kinerja penyelenggaraan pemerintah oleh APIP	Pengelolaan risiko korupsi melalui pengawasan dan pendampingan terhadap seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta Peningkatan kualitas APIP melalui pengiriman pelatihan sesuai dengan ketentuan				
												76	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah	Pembinaan secara rutin penatausahaan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah				
														Peningkatan pengamanan aset daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menghasilkan PAD				
												77	Peningkatan kualitas kebijakan dan kolaborasi implementasi kebijakan	Optimalisasi kerjasama daerah				

VISI / MISI	TUJUAN PEMKAB	INDIKATOR TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	INDIKATOR SASARAN PEMKAB	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		TAHAPAN				
									2026	2027	2028	2029	2030
							78	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	Memperkuat layanan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan	Membangun kerja sama lintas sektor, membuka layanan di mal pelayanan publik dan meningkatkan layanan keliling	Memperluas integrasi layanan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan perbankan	Meningkatkan layanan admindukcapil yang inklusi	Mewujudkan layanan admindukcapil yang berkualitas
									Peningkatan kemudahan perizinan				
									Penyiapan pemanfaatan sistem informasi Desa (SID)	Peningkatan Pengelolaan sistem informasi Desa (SID) terintegrasi	Penguatan SDM Pemanfaatan sistem informasi Desa (SID) terintegrasi	Optimalisasi Pemanfaatan sistem informasi Desa (SID) terintegrasi	Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan sistem informasi Desa (SID) terintegrasi
					28	Peningkatan kapabilitas dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah	79	Penguatan SDM, kelembagaan dan kerjasama riset daerah, serta Pengembangan inovasi dan komersialisasi inovasi masyarakat dan perangkat daerah	Penguatan SDM IPTEK, Peningkatan Riset untuk pengembangan prioritas daerah (PUD), optimalisasi tracking hasil riset (tracksiris) serta pengembangan monitoring dan evaluasi inovasi di aplikasi SIAPPMAS	penguatan SDM dan ekosistem riset dan inovasi serta Penguatan data dukung Laboratorium Inovasi (LABINOV)	Optimalisasi pemanfaatan tracking hasil riset (tracksiris)	Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Inovasi dalam rangka mendukung pengembangan PUD	Peningkatan pemanfaatan inovasi untuk penyelesaian permasalahan Utama Daerah
					29	Peningkatan stabilitas sosial, ekonomi, politik daerah serta ketentraman dan ketertiban wilayah.	80	Pencegahan dan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peningkatan pelayanan penyelamatan kebencanaan				
							81	Peningkatan Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan serta Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik dan wawasan kebangsaan				
							82	Optimalisasi implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah	Peningkatan penyediaan dan pemerataan distribusi barang kebutuhan pokok	Peningkatan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok	Pemantauan harga barang kebutuhan pokok secara kontinyu serta pengendalian harga melalui Operasi pasar pada Pasar Rakyat	pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Evaluasi dan pemantauan efektivitas implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah
							83	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengelolaan Belanja Daerah secara efisien;	Pembaharuan data objek pajak dan retribusi dan kebijakan mengurangi belanja pegawai	Optimalisasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta efisiensi belanja daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pengendalian efisiensi belanja daerah	Pengendalian efektivitas belanja dan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Monitoring dan evaluasi belanja daerah dan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program strategis (Program pembangunan daerah) menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Seluruh program yang tercantum dirumuskan juga dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi:

4.1.1. Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengelolaan Pendidikan.

      Program ini diprioritaskan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Strategi yang akan dilakukan yaitu menyediakan transportasi sekolah yang terjangkau, kemudian membangun, rehabilitasi, serta memperluas fasilitas PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Non Formal/Kesetaraan, perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan meningkatkan mutu hasil belajar siswa dengan meningkatkan metode pengajaran, lingkungan pembelajaran, keterlibatan siswa serta dukungan dari berbagai pihak seperti guru, orang tua dan pihak sekolah serta pembinaan kelembagaan dan manajemen pada satuan pendidikan.

   b. Program Pengembangan Kurikulum.

Program ini diprioritaskan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Program ini diprioritaskan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pemerataan pendidikan yang bermutu dengan memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang pengajaran yang inklusif dan pengelolaan kelas yang efektif serta menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diprioritaskan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak untuk menekan jumlah Kasus Kematian Ibu dan Balita, Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Deteksi Dini untuk Penurunan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Peningkatan Integrasi Layanan Primer dan Standarisasi Pelayanan di FKTP dan FKTL, Peningkatan Surveilance Kesehatan guna pencegahan dan pengendalian KLB, Peningkatan Kepesertaan dan Kepesertaan Aktif JKN, dan Peningkatan Status Gizi Masyarakat

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten.

3. Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu Pembangunan Unit Air Baku, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, meningkatkan kapasitas dan peran

penyelenggara SPAM, meningkatkan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait, menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum.

c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu membangun sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta melakukan peningkatan terhadap PDU/TPST/TPS3R yang sudah ada guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi, meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaran sanitasi, pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi, pengembangan alternatif sumber pembiayaan, keberlanjutan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan pembangunan sarana air limbah.
e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Operasi dan Pemeliharaan Drainase.
f. Program Penataan Bangunan Gedung.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Strategi yang akan dilakukan yaitu Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota.
g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang

akan dilakukan yaitu Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

h. Program Penyelenggaraan Jalan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pelebaran Jalan Kabupaten Menuju Standar, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, serta Pemeliharaan Berkala Jembatan.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. dengan Strategi yang akan dilakukan yaitu Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi, Operator dan Analis Tenaga Konstruksi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu penyusunan dan penetapan RDTR yang sesuai struktur ruang (PKL dan PPK).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.

b. Program Kawasan Permukiman.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha,

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha. Strategi yang akan dilakukan yaitu pengurangan kawasan kumuh dan pendataan luasan kumuh disertai dengan penyusunan SK Kumuh terbaru.

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini difokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan PPNS, optimalisasi patroli rutin dan operasi gabungan dengan pihak terkait (TNI, Polri, dan instansi teknis) untuk mendeteksi dini serta menindak gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda/Perkada, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung sistem pelaporan, pengaduan masyarakat, dan monitoring tindak lanjut penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan transparan, dan peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kesadaran hukum agar masyarakat ikut menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungannya.

b. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Strategi yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten, Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Ancaman Bencana), penyusunan dokumen rencana kontijensi Kabupaten (tanah longsor dan banjir), Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten dan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

6. Sosial.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pemberdayaan Sosial

      Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten. Strategi yang akan diterapkan meliputi pelatihan dan sertifikasi pekerja sosial, peningkatan kualitas lembaga sosial melalui akreditasi, serta penguatan tim tanggap darurat bencana. Kolaborasi antara lembaga sosial, sektor kesehatan, dan masyarakat akan diperkuat untuk memastikan keberhasilan program ini.

   b. Program Rehabilitasi Sosial

      Program ini difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Strategi yang akan dilakukan yaitu peningkatan akses layanan, sarana pelayanan, dan kualitas

layanan serta kerjasama dengan lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu Peningkatan akses dan kualitas layanan jaminan sosial bagi penerima manfaat, peningkatan kemandirian ekonomi, serta penguatan pengelolaan dan pendataan fakir miskin perlu dilakukan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga harus diperkuat untuk menyediakan perlindungan sosial yang lebih luas bagi keluarga miskin dan rentan, dengan tujuan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Banyumas akan menyelenggarakan sekolah berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui pembangunan Sekolah Rakyat.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini difokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar bagi korban bencana alam, sosial, dan non-alam pada saat dan setelah tanggap darurat, serta memastikan penyediaan layanan pemulihan sosial yang memadai. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dengan menyelenggarakan pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten. Strategi yang dilaksanakan dengan peningkatan pemeliharaan dan perawatan rutin makam pahlawan.

4.1.2. Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan optimalisasi koordinasi dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan optimalisasi penentuan sasaran pelatihan serta monitoring pasca pelatihan.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan pelaksanaan Jobfair, optimalisasi sistem informasi lowongan kerja pada satu portal website Banyumas, serta monitoring penempatan tenaga kerja.

d. Program Hubungan Industrial.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan penguatan hubungan tripartid.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

      Program ini difokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu penguatan kebijakan pengarusutamaan gender,

alokasi anggaran responsif gender (ARG), serta peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) melalui pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan yang mendukung perempuan di dunia kerja

b. Program Perlindungan Perempuan

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

   Program ini difokuskan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu edukasi tentang kesetaraan gender dan hak anak, serta pengembangan Puspaga untuk layanan berbasis gender dan perlindungan keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, standarisasi data, pemanfaatan teknologi, serta monitoring untuk mendorong pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia

Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu pengembangan layanan perlindungan khusus yang komprehensif, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan berbasis data untuk memastikan anak yang memerlukan perlindungan mendapatkan layanan sesuai standar dan meningkatkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

3. Pangan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu pengembangan gudang penyimpanan pangan dan penyediaan cadangan pangan daerah.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Strategi yang akan dilakukan yaitu penguatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat melalui sosialisasi penguatan penganekaragaman konsumsi pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu penyediaan cadangan pangan dan penyalurannya ke desa prioritas rawan pangan, desa miskin dan desa stunting.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu penguatan keamanan pangan masyarakat melalui peningkatan uji keamanan pangan dan sertifikasi keamanan pangan.

4. Pertanahan.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.

      Program ini difokuskan pada kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

   b. Program Penatagunaan Tanah.

      Program ini difokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu melaksanakan konsolidasi tanah.

5. Lingkungan Hidup.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

      Program ini difokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan penyusunan KLHS untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan evaluasi terhadap perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

   b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

      Program ini difokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan serta kepada masyarakat umum, serta meningkatkan kualitas pemantauan terhadap kualitas air dan udara.

   c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

      Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3; Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan verifikasi dan penetapan kelompok adat Bonokeling sebagai MHA.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan penilaian pada calon sekolah adiwiyata, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan sekolah adiwiyata.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan percepatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

i. Program Pengelolaan Persampahan.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari hulu, menyusun kebijakan pengelolaan sampah, dan menguatkan produksi RDF dan BBJP.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Strategi yang akan dilakukan yaitu sosialisasi baik langsung maupun secara elektronik terkait dengan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sehinga dapat memanfaatkan akses-akses tersebut, optimalisasi perekaman keliling pada penduduk wajib KTP dan mengoptimalkan pelayanan terpadu pada MPP dengan melaksanakan migrasi pelayanan Offline Administrasi kependudukan dari Kantor Dukcapil ke MPP Banyumas.

b. Program Pencatatan Sipil.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Strategi yang akan dilakukan yaitu sosialisasi baik langsung maupun secara elektronik terkait dengan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sehinga dapat memanfaatkan akses-akses tersebut dan optimalisasi Pelayanan Keliling Akta Kelahiran, KIA dan Aktivasi IKD pada event/acara di Kabupaten Banyumas.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Strategi yang akan dilakukan yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan data melalui Bimtek-bimtek/Pendampingan, Rakor Pelayanan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan relasi pelayanan secara berkala.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

   Program ini difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan. strategi yang akan dilakukan yaitu pengumpulan data yang valid, kolaborasi antara pihak internal dan OPD pemilik data dalam analisis data serta penyajian data-data profil kependudukan yang urut, sistematis, mudah dipahami dan aman.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Penataan Desa.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Strategi dilakukan melalui fasilitasi penataan desa yang terarah dan partisipatif, serta penguatan perencanaan pembangunan desa agar lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaannya

b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa.

Program ini difokuskan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa. Strategi yang akan dilakukan yaitu fasilitasi kerja sama antar desa yang mendorong kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pembangunan bersama, serta peningkatan pemahaman dan pendampingan teknis agar desa dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Strategi yang akan dilakukan yaitu pembinaan dan pengawasan intensif terhadap aparatur desa, peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi, serta fasilitasi penerapan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset desa secara transparan dan akuntabel.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, adat, dan hukum adat agar berperan aktif dalam pembangunan desa

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

9. Perhubungan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program ini diarahkan pada kegiatan :

- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengelolaan Pelayaran.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha; Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal; Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

10. Komunikasi Dan Informatika.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

f. Program Pengembangan UMKM

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman Modal.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

b. Program Promosi Penanaman Modal.

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal.

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan Dan Olahraga.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

14. Statistik.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

15. Persandian.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

16. Kebudayaan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah

Kabupaten/Kota; Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya..

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan Permuseuman.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

17. Perpustakaan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun; Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota; Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

4.1.3. Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

1. Kelautan Dan Perikanan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota; Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Pariwisata.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Program ini difokuskan pada kegiatan :

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian; Pembangunan Prasarana Pertanian; Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
e. Program Perizinan Usaha Pertanian.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
f. Program Penyuluhan Pertanian.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.
   Program ini difokuskan pada kegiatan:
   - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
   - Penerbitan Tanda Daftar Gudang
   - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
   - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
   Program ini difokuskan pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
d. Program Pengembangan Ekspor.

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Transmigrasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini difokuskan pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Administrasi Tata Pemerintahan
- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Fasilitasi Kerja Sama Daerah

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

2. Sekretariat DPRD.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Fasilitasi Tugas DPRD

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2. Keuangan.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

      Program ini difokuskan pada kegiatan:

      - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
      - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
      - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
      - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

   b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

      Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

   c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

      Program ini difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Kepegawaian.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Kepegawaian Daerah

      Program ini difokuskan pada kegiatan :

      - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
      - Mutasi dan Promosi ASN
      - Pengembangan Kompetensi ASN
      - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

4. Pendidikan Dan Pelatihan.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

      Program ini difokuskan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5. Penelitian Dan Pengembangan.

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Riset Dan Inovasi Daerah

      Program ini difokuskan pada kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; Invensi dan Inovasi.

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.1.8. Urusan Pemerintah Umum

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Penganggaran program perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2026-2030

Kapasitas Riil/ Belanja	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil	**4.020.842.100.000**	**4.102.393.181.000**	**4.219.108.701.000**	**4.334.232.645.000**	**4.446.176.700.000**
BELANJA DAERAH	**4.020.842.100.000**	**4.102.393.181.000**	**4.219.108.701.000**	**4.334.232.645.000**	**4.446.176.700.000**
BELANJA OPERASI	**2.967.294.500.000**	**3.021.631.641.000**	**3.083.177.001.000**	**3.113.478.745.000**	**3.102.491.495.000**
Belanja Pegawai	1.788.143.697.000	1.812.122.059.000	1.869.189.300.000	1.880.189.600.000	1.894.195.600.000
Belanja Barang dan Jasa	1.039.193.500.000	1.066.136.082.000	1.032.856.701.000	1.050.345.545.000	1.055.352.295.000
Belanja Bunga	1.310.000.000	-	-	-	-
Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Belanja Hibah	107.872.900.000	115.030.400.000	152.231.000.000	153.475.600.000	123.475.600.000
Belanja Bantuan Sosial	30.274.403.000	27.843.100.000	28.400.000.000	28.968.000.000	28.968.000.000
BELANJA MODAL	**447.920.000.000**	**462.752.440.000**	**515.430.500.000**	**597.636.400.000**	**720.567.705.000**
BELANJA TAK TERDUGA	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
BELANJA TRANSFER	**595.627.600.000**	**608.009.100.000**	**610.501.200.000**	**613.117.500.000**	**613.117.500.000**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	47.462.600.000	49.835.600.000	52.327.500.000	54.943.800.000	54.943.800.000
Transfer Bantuan Keuangan	548.165.000.000	558.173.500.000	558.173.700.000	558.173.700.000	558.173.700.000

Sumber : Bappedalitbang, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2025

Berdasarkan kerangka pendanaan di atas selanjutnya dijabarkan program masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2026 – 2030

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	99,58	100	268.826.773.432	100	283.088.361.655	100	289.898.361.655	100	295.353.361.655	100	296.353.361.655	PD Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	%	80,1	86,04		89,01		91,98		94,53		97,07		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,99	100		100		100		100		100		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	%	99,86	100		100		100		100		100		
				Angka Partisipasi sekolah (APS) 7-18 tahun (kesetaraan)	%	25,47	35,43		40,41		45,38		50,36		55,34		
				Persentase Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sesuai Kriteria	%	N/A	100		100		100		100		100		
01.01.03		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	100	250.000.000	100	521.380.000	100	522.655.000	100	470.380.000	100	592.780.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pendidikan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	N/A	100		100		100		100		100		
01.01.04		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru	Angka	72,5	85,25	26.866.357.184	86,5	32.650.800.000	87,75	33.313.600.000	88	35.174.300.000	88	35.621.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
				Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	%	56	57		58		59		60		61		
01.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau	Persentase Case Fatality Rate < 1% (perdarahan dan eklamsi) pada RS Pemerintah	%	1,37	0,97	157.863.849.000	0,95	160.995.323.000	0,93	165.480.980.000	0,91	169.786.948.000	0,9	191.897.510.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	97,53	92,35		92,35		92,35		92,35		86,91		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase Faskes Primer dan FKTP dengan Sarana Prasarana Alat Kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		
				Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	12,41	11,63		10,97		10,46		9,96		9,46		
				Persentase Cakupan penerima CKG	%	N/A	40		50		60		70		80		
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	13,56	11,4		10,4		9,4		8,4		8		
				Cakupan skrining aktifitas fisik secara assesment mandiri	%	N/A	75		80		85		90		95		
				Prevalensi Obesitas > 15 tahun	%	N/A	23		22,5		22		21,5		21		
				Prevalensi wasting balita	%	5,1	4,9		4,8		4,7		4,6		4,5		
				Persentase penduduk lebih dari sama dengan 15 tahun depresi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	1,4	1,6		1,7		1,8		1,9		2		
				Persentase institusi dibina dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	39	45		50		55		60		65		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TC)	%	165,1	109		109		109		109		109		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	%	92	95		96		97		99		100		
				Insidensi HIV	%	0,11	0,085		0,08		0,07		0,065		0,06		
				Persentase faskes yang melaksanakan pemeliharaan eliminasi malaria	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase kasus NTD yang dikendalikan	%	100	100		100		100		100		100		
				Angka Kematian Dengue	%	0,55	0,51		0,49		0,47		0,45		0,43		
				Angka Kematian Leptospirosis	%	8,11	7,5		7		6,5		6,2		6		
				Insidensi Hepatitis B	%	0,8	0,7		0,65		0,6		0,55		0,5		
				Persentase Puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	N/A	7,5		10		12,5		15		17,5		
				Persentase Tatanan dalam KKS dengan nilai lebih dari 71%	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Fasyankes FKRTL dengan SPA kesehatan sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase Fasyankes FKTP dengan SPA kesehatan sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	per 1000 penduduk	1,56	1,58		1,59		1,6		1,61		1,62		
				Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	%	84,68	84,75		84,8		84,85		84,9		85		
				Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna	%	86,58	92,7		94,03		95,36		96,02		96,67		
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100		100		100		100		100		
				Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	56	64		67		69		71		73		
				Persentase Faskes Menjadi RS dengan Unggulan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase RS dengan layanan KJSU sesuai pedoman (KMK)	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase RS dengan peningkatan layanan prognas	%	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95	97,5		98		98,5		98,7		99		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase puskesmas yang memiliki kesiapsiagaan penaggulangan KLB dan Krisis kesehatan akibat bencana	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif	%	76,08	80		80		80		80		80		
				Persentase SPM yang terpenuhi layanannya	%	75	100		100		100		100		100		
				NDR RSUD Ajibarang	per 1000 pasien rawat inap lebih dari 48 jam	13,13	13,1		13		13		12,9		12,9		
				NDR RSUD Banyumas	per 1000 pasien rawat inap lebih dari 48 jam	22,06	21,9		21,8		21,7		21,6		21,5		
				NDR RSKMP	per 1000 pasien rawat inap lebih dari 48 jam	0	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		
01.02.03		Program Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis	per 1000	3,35	3,37	1.628.000.000	3,38	1.661.000.000	3,39	1.708.300.000	3,4	1.753.700.000	3,41	1.775.900.000	PD Pengampu Urusan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Sumber Daya Manusia Kesehatan	pemerataan SDM Kesehatan	terhadap Populasi	penduduk												Bidang Kesehatan
01.02.04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen) sesuai standar	%	65	75	150.000.000	80	153.000.000	85	157.300.000	90	161.400.000	95	163.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	N/A	85		85,5		86		86,5		87		
01.02.05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	93,68	94,5	723.290.000	95	737.900.000	95,5	758.900.000	96	779.000.000	96,5	788.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
01.03.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana SDA dan	Persentase Bangunan Penyedia Air Baku dalam Kondisi Baik	%	81,52	83,52	20.021.032.000	84,52	20.070.300.000	85,52	20.642.300.000	86,52	21.191.300.000	87,52	21.460.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Dan Penataan Ruang		meningkatnya Kinerja irigasi														Dan Penataan Ruang
				Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	55,5	57,5		58,5		59,5		60,5		61,5		
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	58,867	61,252		62,252		63,252		64,252		65,252		
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	70,5	71,5		72		72,5		73		73,5		
01.03.03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatkan Akses Air Minum Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	%	79,54	80,97	15.815.000.000	81,7	16.136.000.000	82,45	16.595.800.000	83,21	17.037.200.000	83,98	17.253.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP)	%	30,24	33,22		34,72		36,21		37,7		39,19		
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	17,12	32,39		40,03		47,66		55,3		62,94		
01.03.04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	%	47,83	47,83	100.000.000	52,17	2.600.000.000	56,52	2.600.000.000	60,87	2.600.000.000	65.22	2.500.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01.03.05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan Akses sanitasi Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93,24	94,08	21.419.413.000	94,53	21.854.200.000	94,99	22.477.000.000	95,48	23.074.800.000	95,98	23.367.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,46	8,24		12,24		16,24		20,24		24,24		
				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Air Limbah	TonCO2eq	7.514,77	54.571,71		68.773,58		84.642,69		102.347,74		122.078,64		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.03.06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	68,18	69,07	6.677.096.000	69,5	6.841.000.000	69,92	7.075.800.000	70,35	7.301.200.000	70,78	7.411.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman strategis	Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis yang Disediakan	%	N/A	N/A	0	33,33	1.400.000.000	66,67	1.800.000.000	100	2.200.000.000	100	2.600.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01.03.08		Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	70,15	71,55	45.637.185.000	72,25	46.563.600.000	72,95	47.890.600.000	73,65	49.164.400.000	74,35	59.788.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100	100		100		100		100		100		
01.03.09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	19,13	19,93	7.650.000.000	20,73	7.805.200.000	21,53	8.027.600.000	22,33	8.241.100.000	23,13	8.345.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01.03.10		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang Dibangun, Direkonstruksi	%	1,62	4,97	120.158.985.000	6,8	121.526.800.000	8,63	124.590.300.000	10,46	127.515.000.000	12,31	148.744.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				dan Ditingkatkan Kapasitasnya													Umum Dan Penataan Ruang
				Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang Dipelihara	%	71,444	71,69		71,81		71,94		72,06		72,18		
01.03.11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Jumlah tenaga konstruksi terlatih	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih	%	61,44	68,91	63.600.000	72,64	64.800.000	76,37	66.600.000	80,1	68.300.000	83,84	69.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	94,77	96,08		96,73		97,39		98,04		98,69		
				Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	94,85	95,36		95,62		95,88		96,13		96,39		
01.03.12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	100	100	850.000.000	100	867.200.000	100	891.900.000	100	915.600.000	100	927.200.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.04.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya program pengembangan perumahan	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	4.845.000.000	100	4.943.300.000	100	5.084.100.000	100	5.219.300.000	100	5.285.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%	100	100		100		100		100		100		
01.04.03		Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kawasan permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	%	55,41	19,39	1.315.000.000	38,77	1.341.600.000	58,16	1.379.800.000	77,55	1.416.500.000	100	1.434.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
01.04.04		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	%	84,57	85,65	14.000.000.000	86,22	14.284.200.000	86,8	14.691.200.000	87,4	15.081.900.000	88,02	18.273.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
01.04.05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	N/A	43,21	6.215.782.000	44,82	6.341.900.000	46,42	6.522.600.000	48,03	6.696.100.000	49,63	6.781.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			dan kawasan permukiman														Permukiman
				Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	40	42,95		43,21		43,47		43,73		43,99		PD Pengampu Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	40,92	47,52		50,83		54,13		57,43		60,73		PD Pengampu Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100		100		100		100		100		PD Pengampu Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
01.05.02	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	2.844.615.000	100	2.902.300.000	100	2.985.000.000	100	3.064.400.000	100	3.103.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Masyarakat																Masyarakat
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	107,65	100		100		100		100		100		
01.05.03		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	%	14,5	23,87	4.069.300.000	26,89	4.151.900.000	29,91	4.270.200.000	32,93	4.383.700.000	35,95	4.439.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	%	28,57	50		62,5		75		87,5		100		
			Optimalnya Penanganan	Persentase penanganan	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Darurat Bencana	darurat sarana prasana yang terdampak bencana													
				Persentase penanganan korban bencana yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		
			Optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)	%	100	100		100		100		100		100		
01.05.04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	796.153.000	100	812.300.000	100	835.400.000	100	857.600.000	100	868.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		
				Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	menit	15	15		15		15		15		15		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.06.02	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N/a	100	935.000.000	100	953.900.000	100	981.000.000	100	1.007.000.000	100	1.019.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Sosial
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial	%	N/A	57		57		57		57		57		
01.06.04		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	3.418.000.000	100	3.487.300.000	100	3.586.600.000	100	3.682.000.000	100	3.728.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Sosial
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	N/A	56,7		56,72		56,74		56,76		56,78		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	N/A	54,31		54,33		54,35		54,37		54,39		
01.06.05		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Presentase PPKS yang menerima perlindungan	%	100	71,01	3.477.500.000	71,02	3.548.000.000	71,03	3.649.100.000	71,04	3.746.100.000	71,05	3.793.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Sosial

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				dan jaminan sosial													
01.06.06		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	1.610.000.000	100	1.642.600.000	100	1.689.400.000	100	1.734.300.000	100	1.756.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Sosial
01.06.07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	%	100	100	95.000.000	100	96.900.000	100	99.600.000	100	102.200.000	100	103.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Sosial
02.07.02	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga	%	100	100	80.000.000	100	81.600.000	100	83.900.000	100	86.100.000	100	87.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja
02.07.03		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	%	46,93	40	600.000.000	40	612.100.000	40	629.500.000	40	646.200.000	40	654.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja
02.07.04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	59,83	60	550.840.000	60	562.000.000	60	578.000.000	60	593.300.000	60	600.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.07.05		Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	%	10.039	12,05	407.609.000	13,03	415.800.000	14,15	427.600.000	15,12	438.900.000	16,25	444.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja
02.08.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya implementasi PUG pada Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan	%	72,58	75,21	310.000.000	79,03	316.200.000	82,26	325.200.000	85,48	333.800.000	88,71	338.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	58,5	58,9		59,1		59,3		59,5		59,7		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Angka	50,62	50,67		50,7		50,73		50,75		50,78		
02.08.03		Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	270.000.000	100	275.400.000	100	283.200.000	100	290.700.000	100	294.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan	Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	%	16	35	35.000.000	37	35.700.000	39	36.700.000	41	37.600.000	43	38.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			perempuan dan anak	peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
02.08.05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	41,37	55,55	30.000.000	55,55	30.600.000	59,26	31.400.000	59,26	32.200.000	59,26	32.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak	%	85	86	90.000.000	87	91.800.000	87	94.400.000	88	96.900.000	88	98.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.07		Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Layanan penanganan perlindungan anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	364.600.000	100	372.000.000	100	382.600.000	100	392.700.000	100	397.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.09.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan	Meningkatnya pengelolaan cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	%	N/A	69	5.355.500.000	70	5.464.200.000	71	5.619.900.000	72	5.769.300.000	73	5.842.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pangan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Kemandirian Pangan															
02.09.03		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi	Angka	2079	2100	1.691.900.000	2100	1.726.200.000	2100	1.775.300.000	2100	1.822.500.000	2100	1.845.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pangan
				Angka Kecukupan Protein	Angka	59	57		57		57		57		57		
02.09.04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah (desa) rentan rawan pangan	%	23	20	1.836.750.000	18	1.874.000.000	17	1.927.400.000	15	1.978.600.000	14	2.003.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pangan
02.09.05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	88,68	89,5	376.250.000	90	383.900.000	90,5	395.700.000	91	406.900.000	91,5	411.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pangan
02.10.04	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	108.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanahan
02.10.06		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Terlaksananya redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimal dan tanah absentee	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	N/A	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.900.000	100	107.600.000	100	108.900.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanahan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Prosentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	N/A	100		100		100		100		100		
02.10.09		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya pengelolaan izin membuka tanah	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N/A	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	108.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanahan
02.10.10		Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya penatagunaan tanah	Persentase jumlah bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	%	N/A	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanahan
				Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase ketersediaan Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin	%	N/A	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				lokasi yang diterbitkan													
02.11.02	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terjamin kualitasnya	%	100	100	1.646.202.000	100	1.679.600.000	100	1.727.400.000	100	1.773.300.000	100	1.795.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
02.11.03		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	32,86	32,86	580.722.000	32,86	592.500.000	32,86	609.300.000	32,86	625.500.000	32,86	633.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
				Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100	100		100		100		100		100		
02.11.04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Persentase Luasan RTH Publik terhadap Kawasan Perkotaan	%	2,27	2,29	10.438.660.000	2,3	10.650.500.000	2,31	10.954.000.000	2,32	11.245.300.000	2,33	11.388.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor FOLU	TonCO2eq	1.320,80	261.928,36		303.184,49		342.376,53		379.342,21		413.882,52		
02.11.05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya	Optimalnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100	321.324.000	100	327.800.000	100	337.100.000	100	346.000.000	100	350.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Dan Beracun (Limbah B3)															
02.11.06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	28	421.324.000	28	429.800.000	27	442.000.000	27	453.700.000	26	459.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
02.11.07		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Optimalnya pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	160.662.000	100	163.900.000	100	168.500.000	100	172.900.000	100	175.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
02.11.08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Optimalnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase jumlah sekolah adiwiyata yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPLHS)	%	N/A	35	374.878.000	36	382.400.000	37	393.200.000	38	403.600.000	39	408.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
				Persentase kader lingkungan hidup yang	%	N/A	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				ditingkatkan kapasitasnya													
02.11.10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	100	100	160.662.000	100	163.900.000	100	168.500.000	100	172.900.000	100	175.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
02.11.11		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	76,24	85,74	9.871.065.000	90,5	7.573.400.000	95,25	7.863.200.000	100	8.141.500.000	100	8.377.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Persampahan	TonCO2eq	37.698,08	210.924,62		262.645,87		319.625,25		382.400,19		451.573,93		
02.12.02	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	68,01	72	227.325.000	75	231.900.000	77	238.500.000	79	244.800.000	81	247.900.000	PD Pengampu Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	7,02	7,5		8		8,5		9		9,5		
				Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	99,32	99,41		99,42		99,43		99,44		99,45		
				Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	98,22	98,23		98,24		98,26		98,29		98,3		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Sesuai Standar Pelayanan													
02.12.03		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	98,61	99,2	176.215.000	99,3	179.700.000	99,4	184.800.000	99,5	189.700.000	99,6	192.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penerbitan Akta kematian yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Penerbitan Akta Perceraian yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase penerbitan Akta Perkawinan yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Sesuai Standar Pelayanan	%	98	98,23		98,24		98,26		98,29		98,3		
02.12.04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase aduan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang diselesaikan	%	100	100	684.999.000	100	698.900.000	100	718.800.000	100	737.900.000	100	747.200.000	PD Pengampu Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Data Kependudukan	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				bermasalah yang terselesaikan													
				Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100		100		100		100		100		
02.12.05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	60.000.000	100	61.200.000	100	62.900.000	100	64.500.000	100	65.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase penyusunan profil Perkembangan Penduduk sesuai standar waktu yang ditargetkan	%	100	100		100		100		100		100		
02.13.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	1.565.000.000	100	1.596.700.000	100	1.642.200.000	100	1.685.800.000	100	1.707.200.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.13.03		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Desa yang di Fasilitasi Kerjasamanya	%	N/A	15,38	1.010.000.000	15,38	1.030.500.000	23,08	1.059.800.000	23,08	1.087.900.000	23,08	1.101.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
02.13.04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase BUMDES dengan klasifikasi berkembang dan maju	%	30,33	31	8.289.622.000	31,33	8.457.900.000	31,66	8.698.900.000	32	8.930.200.000	32,33	9.043.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi Tata kelola Desa	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase Kapasitas Aparatur Desa dan BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	N/A	1,77		2,21		2,65		3,09		3,53		
				Persentase laporan desa yang sesuai standar peraturan perundang-undangan	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	9,3	2,06		3,09		4,12		5,15		6,18		
02.13.05		Program Pemberdayaan Lembaga	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakat	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang	%	100	100	2.322.000.000	100	2.369.100.000	100	2.436.600.000	100	2.501.400.000	100	2.533.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	an dalam pembangunan	Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaannya													Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
02.14.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	16,4	16,2	443.000.000	16,1	451.900.000	16	464.700.000	15,9	477.000.000	15,8	483.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Digunakan dalam Menyusun Kebijakan Pengendalian Penduduk	%	100	100		100		100		100		100		
02.14.03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	%	64	64,4	13.576.027.000	64,6	13.851.600.000	64,8	14.246.300.000	65	14.625.200.000	65,2	14.810.900.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	92,15	93,05		93,96		94,86		95,77		96,68		
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak	%	9,15	9,11		9,09		9,07		9,05		9,03		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Terpenuhi (Unmet Need)													
				Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan	%	15,8	14,6		14		13,4		12,8		12,3		
				Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	%	75,23	77		78		79		80		81		
02.14.04		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	13,76	13,8	8.902.000.000	13,9	9.082.700.000	14	9.341.500.000	14,1	9.589.900.000	14,2	9.711.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
02.15.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	35,88	36,27	36.086.986.000	36,47	36.819.500.000	36,66	37.868.800.000	36,86	38.876.100.000	37,06	39.369.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perhubungan
				Persentase Kendaraan yang melakukan uji laik	%	76,25	80,54		80,6		80,7		80,8		81		
				Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Pelaksanaan Pengendalian Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase Prasarana Angkutan Jalan yang tersedia	%	52,76	56,44		59,51		62,58		65,64		68,1		
				Persentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	%	100	100		100		100		100		100		
				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Transportasi	TonCO2eq	1.835,64	233.966,23		312.818,78		405.539,93		513.501,60		638.259,57		
02.15.03		Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Prasarana Angkutan Sungai sesuai dengan SPM	%	43,3	60,8	1.050.500.000	80,8	1.071.800.000	91,7	1.102.300.000	97,5	1.131.600.000	100	1.145.900.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perhubungan
02.16.02	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik	%	78	85	1.308.403.000	87	1.334.900.000	91	1.372.900.000	94	1.409.400.000	96	1.427.200.000	PD Pengampu Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	N/A	70		75		80		85		90		
				Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
02.16.03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70	82	2.366.671.000	84	2.414.700.000	86	2.483.500.000	88	2.549.500.000	90	2.581.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100		100		100		100		100		
02.17.03	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi dengan Kelembagaan yang baik	%	N/A	81,43	200.000.000	82,67	204.000.000	83,75	209.800.000	84,71	215.300.000	85,56	218.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.17.04		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi berstatus Sehat	%	N/A	92,42	200.000.000	92,75	204.000.000	93,06	209.800.000	93,33	215.300.000	93,59	218.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
02.17.05		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peserta pelatihan yang memahami materi pelatihan	%	N/A	83,64	355.000.000	84,82	362.200.000	85,09	372.500.000	85,34	382.400.000	86,44	387.200.000	PD Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
02.17.06		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan pembinaan perkoperasian	%	N/A	2,09	195.000.000	2,19	198.900.000	2,3	204.500.000	2,4	209.900.000	2,5	212.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
02.17.07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	%	N/A	0,81	580.000.000	0,84	591.700.000	0,85	608.500.000	0,86	624.600.000	0,88	632.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
02.17.08		Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya Pengembangkan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan	%	N/A	6,98	580.000.000	7,75	591.700.000	8,53	608.500.000	9,3	624.600.000	10,08	632.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
02.18.02	Urusan Pemerintahan	Program Pengembangan Iklim	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase hasil pemetaan potensi investasi	%	N/A	100	100.000.000	100	147.000.000	100	104.900.000	100	107.600.000	100	108.900.000	PD Pengampu Urusan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Bidang Penanaman Modal	Penanaman Modal		yang dipromosikan													Bidang Penanaman Modal
02.18.03		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang menindaklanjuti kepeminatan investasi	%	N/A	50	250.000.000	71	210.000.000	71	262.200.000	87,5	269.100.000	87,5	272.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Penanaman Modal
02.18.04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Optimalnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai SOP	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	100	97	224.500.000	99	229.000.000	99,5	235.500.000	100	241.700.000	100	244.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Penanaman Modal
02.18.05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Optimalnya Pengendalian dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Proyek Penanaman Modal yang Memiliki Nilai Investasi dari LKPM yang disetujui	%	N/A	23	393.000.000	35	400.900.000	47	412.300.000	59	423.200.000	71	428.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Penanaman Modal
02.18.06		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Optimalnya Pemanfataan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%	100	100	20.000.000	100	20.400.000	100	20.900.000	100	21.400.000	100	21.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Penanaman Modal
02.19.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda	%	111,43	23,65	482.195.000	37,16	491.900.000	54,05	505.900.000	70,95	519.300.000	87,84	525.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda	%	127,27	13,33		36,67		40		53,33		66,67		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.19.03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas daya saing olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	-13,2	0,92	11.380.894.000	0,93	11.611.900.000	0,94	11.942.800.000	0,95	12.260.400.000	0,96	12.416.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
02.19.04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase peningkatan prestasi kepramukaan	%	N/A	20	1.845.000.000	30	1.882.400.000	40	1.936.000.000	50	1.987.400.000	60	2.012.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
02.20.02	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,8	2,88	108.803.000	2,88	111.000.000	2,96	114.100.000	2,96	117.100.000	3	118.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Statistik
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				pembangunan daerah													
02.21.02	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	396	487	218.878.000	530	223.300.000	575	229.600.000	620	235.700.000	647	238.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Persandian
02.22.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	10,68	12,46	1.612.496.000	13,65	1.645.200.000	14,84	1.692.000.000	16,02	1.737.000.000	17,21	1.759.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
				Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	50	52		53		54		55		56		
				Persentase peningkatan Objek Pemajuan kebudayaan	%	N/A	24,75		37,02		49,3		61,97		74,65		
02.22.04		Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pembinaan objek sejarah lokal	Persentase peningkatan pembinaan objek sejarah lokal	%	100	100	40.925.000	100	41.700.000	100	42.800.000	100	43.900.000	100	44.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
02.22.05		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan	%	11,28	12,84	621.158.000	13,62	633.700.000	14,4	651.700.000	15,18	669.000.000	15,95	677.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya	%	15,32	22,56		26,45		30,35		34,24		38,13		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan													
02.22.06		Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase koleksi museum yang terdigitalisasi	%	70,98	74,66	917.805.000	76,49	936.400.000	79,25	963.000.000	82	988.600.000	84,76	1.001.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
				Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	%	-0,6	4,03		6,02		8,02		10,02		12,02		
02.23.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP	%	4,57	10	422.000.000	11	430.500.000	12	442.700.000	13	454.400.000	14	460.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perpustakaan
02.23.03		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Kabupaten Banyumas	Persentase Naskah Kuno Milik Masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	%	60	100	16.000.000	100	16.300.000	100	16.700.000	100	17.100.000	100	17.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perpustakaan
02.24.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Sesuai Dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Persentase pengelolaan arsip statis sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	100	100	300.000.000	100	306.000.000	100	314.700.000	100	323.000.000	100	327.100.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kearsipan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	48,15	100		100		100		100		100		
02.24.03		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	100	100	55.000.000	100	56.100.000	100	57.600.000	100	59.100.000	100	59.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kearsipan
02.24.04		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Optimalnya Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan	%	100	100	15.000.000	100	15.300.000	100	15.700.000	100	16.100.000	100	16.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kearsipan
03.25.03	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	972,56	1007,45	65.000.000	1022,56	66.300.000	1037,9	68.100.000	1053,47	69.900.000	1069,27	70.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan
03.25.04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah pemuda pembudidaya ikan yang telah menerapkan teknis budidaya ikan	orang	N/A	10	544.975.000	15	556.000.000	15	571.800.000	15	587.000.000	15	594.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	12211,64	12832,35		13153,16		13481,99		13819,04		14164,52		
03.25.05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum	Persentase jumlah perairan umum yang dikelola	%	N/A	100	120.000.000	100	122.400.000	100	125.800.000	100	129.100.000	100	130.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kelautan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Dan Perikanan															Dan Perikanan
03.25.06		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Angka	34,36	34,64	65.000.000	34,78	66.300.000	34,92	68.100.000	35,06	69.900.000	34,2	70.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan
				Persentase Unit Usaha Perikanan yang Menerapkan Proses Peningkatan Nilai Tambah	%	N/A	10		10		10		10		10		
03.26.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik wisata	Tingkat Hunian Akomodasi	%	36,24	36,28	1.456.164.000	36,3	1.485.700.000	36,32	1.528.000.000	36,34	1.568.600.000	36,36	1.588.500.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-4,95	0,96		1,27		1,88		2		2,26		
03.26.03		Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya promosi pariwisata	Persentase peningkatan event yang diselenggarakan	%	90	21,05	3.414.340.000	31,58	3.483.600.000	42,11	3.582.800.000	52,63	3.678.100.000	63,16	3.724.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
03.26.05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	4,62	10,25	395.079.000	15,76	403.000.000	21,55	414.400.000	27,63	425.400.000	34,01	430.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pariwisata

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase peningkatan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	%	5,69	18		24,15		30,31		36,46		42,62		
03.27.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi Daging	ton	25.855	26.179	2.331.760.000	26.382	2.379.000.000	26.613	2.446.800.000	26.873	2.511.800.000	27.163	2.543.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanian
				Produksi Telur	ton	3.523	3.289		3.312		3.338		3.368		3.402		
				Produksi Susu	ton	8.874	8.972		9.035		9.107		9.189		9.281		
				Produktivitas komoditas Cabai	ton/ha	6,25	6,27		6,28		6,29		6,3		6,31		
				Produktivitas komoditas Kopi	ton/ha	0,68	0,7		0,71		0,72		0,73		0,74		
				Produktivitas komoditas Padi	ton/ha	5,9	5,93		5,94		5,95		5,96		5,97		
				Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor Pertanian	TonCO2eq	4.821,42	481.268,01		560.981,40		638.364,65		713.260,81		785.465,55		
03.27.03		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Jenis Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dalam Kondisi Baik	unit	2	2	6.894.000.000	2	7.033.900.000	2	7.234.300.000	2	7.426.700.000	2	7.521.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanian
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	N/A	39,01		47,83		61,99		75,73		88,06		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
03.27.04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesmavet	%	N/A	10	315.000.000	10	321.300.000	10	330.400.000	10	339.100.000	10	343.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanian
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	7,8	8		8		8		8		8		
03.27.05		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan luas lahan gagal panen akibat bencana pertanian	%	N/A	0,243	571.000.000	0,239	582.500.000	0,234	599.100.000	0,23	615.000.000	0,226	622.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanian
				Persentase wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi	%	N/A	100		100		100		100		100		
03.27.06		Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya unit usaha yang mentaati regulasi perizinan	Persentase unit usaha yang mematuhi regulasi perizinan	%	N/A	90	35.000.000	90	35.700.000	90	36.700.000	90	37.600.000	90	38.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanian
03.27.07		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	Jumlah petani muda yang menerapkan hasil pelatihan bidang pertanian	orang	N/A	4	1.822.150.000	9	1.859.100.000	15	1.912.000.000	22	1.962.800.000	30	1.987.700.000	PD Pengampu Urusan Bidang Pertanian
				Persentase petani kopi dan kelapa yang menerapkan GAP untuk	Persen	N/A	17		20		23		27		30		PD Pengampu Urusan Bidang Pertanian

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				peningkatan kualitas produk													
				Persentase kelompok tani yg naik kelas	%	4,21	5		5		5		5		5		
03.30.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	88,08	88,3	45.000.000	88,45	45.900.000	88,6	47.200.000	88,75	48.400.000	88,9	49.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
03.30.03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Optimalnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	%	N/A	39,29	18.688.975.000	42,86	19.068.300.000	46,43	19.611.700.000	50	20.133.300.000	57,14	20.388.900.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
03.30.04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga barang	%	7,49	8,8	573.500.000	8,6	585.200.000	8,4	602.000.000	8,2	618.100.000	8	626.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
03.30.05		Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan pengembangan pelaku usaha siap ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha siap ekspor	%	N/A	10	353.000.000	15	360.100.000	20	370.300.000	25	380.100.000	30	384.900.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
03.30.06		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera tera ulang	%	92,41	93	325.000.000	93,25	331.500.000	93,5	340.900.000	93,75	349.900.000	94	354.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
03.30.07		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk	Meningkatnya pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	1,13	1,14	20.000.000	1,15	20.400.000	1,16	20.900.000	1,17	21.400.000	1,18	21.600.000	PD Pengampu Urusan Bidang

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Dalam Negeri															Perdagangan
03.29.05	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	%	N/A	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
03.31.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase capaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	%	N/A	90	1.521.202.000	90	1.552.000.000	90	1.596.200.000	90	1.638.600.000	90	1.659.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
03.31.03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	N/A	100	60.000.000	100	61.200.000	100	62.900.000	100	64.500.000	100	65.300.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
03.31.04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya kualitas data Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	45	90	62.298.000	90	63.500.000	90	65.300.000	90	67.000.000	90	67.800.000	PD Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
03.32.03	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Optimalnya Penyiapan Calon Transmigran	Persentase Calon Transmigran yang sesuai Kualifikasi	%	N/A	54,55	150.000.000	63,64	153.000.000	72,73	157.300.000	81,82	161.400.000	90,91	163.400.000	PD Pengampu Urusan Bidang Transmigrasi

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
04.01.02	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat capaian kinerja Bagian di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	N/A	91	15.555.102.000	92	15.870.800.000	93	16.323.100.000	94	16.757.200.000	95	16.970.000.000	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
				Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	N/A	91		92		93		94		95		
04.01.03		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja Bagian di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	%	N/A	91	2.483.512.000	92	2.533.900.000	93	2.606.100.000	94	2.675.400.000	95	2.709.300.000	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
				Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi asisten	%	N/A	91		92		93		94		95		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Perekonomian dan Pembangunan													
04.02.02	Sekretariat Dprd	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	Dokumen	3	3	28.536.600.000	3	29.115.800.000	3	29.945.600.000	3	30.742.100.000	3	31.132.500.000	PD Pengampu Urusan Sekretariat Dprd
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	91		92		92		92		93		
05.01.02	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas sasaran strategis	angka	2	2,5	725.000.000	2,5	739.700.000	2,5	760.700.000	2,5	780.900.000	2,5	790.800.000	PD Pengampu Urusan Perencanaan
				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase ketercapaian program prioritas	%	89,9	90		91		92		93		94		
05.01.03		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan pada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori memuaskan	%	100	100	879.000.000	100	896.800.000	100	922.300.000	100	946.800.000	100	958.800.000	PD Pengampu Urusan Perencanaan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan pada perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori memuaskan	%	100	100		100		100		100		100		
				Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan pada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kategori memuaskan	%	100	100		100		100		100		100		
05.02.02	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	637.444.798.000	100	650.384.900.000	100	668.920.800.000	100	686.714.000.000	100	695.435.200.000	PD Pengampu Urusan Keuangan
				Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase informasi tentang sumberdaya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase akses publik terhadap	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				informasi keuangan daerah													
				Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	32,54	32		31		31		30		30		
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	58	61		62		63		64		65		
				Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	3,82	3,78		3,76		3,74		3,72		3,7		
				Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,12	3,1		3,09		3,08		3,07		3,06		
05.02.03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah	%	100	100	14.862.948.000	100	15.164.600.000	100	15.596.700.000	100	16.011.500.000	100	16.214.800.000	PD Pengampu Urusan Keuangan
				Persentase aset manajemen	%	100	100		100		100		100		100		
05.02.04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	%	N/A	100	9.435.288.000	100	9.626.800.000	100	9.901.100.000	100	10.164.400.000	100	10.293.400.000	PD Pengampu Urusan Keuangan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	%	N/A	25		25		25		25		25		
				Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Angka	N/A	86		87		88		89		90		
05.03.02	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	2,8	2,8	12.750.000.000	2,8	13.008.800.000	2,8	13.379.500.000	2,8	13.735.300.000	2,8	13.909.700.000	PD Pengampu Urusan Kepegawaian

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar	%	63.760	64,5		65		65,5		66		66,5		
			Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Kinerja ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	%	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Daerah yang Menilai Kinerja ASN sesuai Kurva Distribusi Predikat Kinerja Pegawai dengan Capaian Kinerja Organisasi	%	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	%	100	100		100		100		100		100		
05.04.02	Pendidikan Dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	2,8	2,8	6.000.000.000	2,8	6.121.800.000	2,8	6.296.200.000	2,8	6.463.600.000	2,8	6.545.600.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
05.05.03	Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya penerapan hasil riset dan inovasi di lingkungan	Persentase nilai inovasi perangkat daerah kategori	%	N/A	27,78	2.730.000.000	37,04	2.785.400.000	53,7	2.864.700.000	72,22	2.940.900.000	90,74	2.978.200.000	PD Pengampu Urusan Penelitian Dan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Pemerintah Daerah	inovatif dan sangat inovatif													Pengembangan
				Persentase penerapan hasil riset	%	N/A	30		40		50		60		70		
				Persentase riset yang diusulkan untuk publikasi ilmiah	%	N/A	12,5		25		37,5		50		62,5		
06.01.02	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	%	75,73	75,97	1.347.551.000	76,09	1.374.900.000	76,21	1.414.000.000	76,33	1.451.600.000	76,45	1.470.000.000	PD Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	%	95	96		96		96		97		97		
06.01.03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Asistensi	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	%	1	1	4.898.095.000	1	4.997.500.000	1	5.139.900.000	1	5.276.600.000	1	5.343.600.000	PD Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
				Persentase OPD yang memperoleh Nilai SAKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal minimal 22,5	%	14	14		16		16		16		16		
				Persentase OPD yang memperoleh predikat ZI	%	1	1		1		1		1		1		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
08.01.02	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	N/A	100	1.386.612.000	100	1.414.700.000	100	1.455.000.000	100	1.493.700.000	100	1.512.600.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Persentase peserta yang memahami 4 Pilar Kebangsaan	%	N/A	100		100		100		100		100		
08.01.03		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Kader Parpol yang Sesuai Etika dan Budaya Politik	%	N/A	100	3.781.892.000	100	3.858.600.000	100	3.968.500.000	100	4.074.000.000	100	4.125.700.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	N/A	100		100		100		100		100		
08.01.04		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarkatan	Persentase Monitoring Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif and Tercatat	%	N/A	100	336.600.000	100	343.400.000	100	353.100.000	100	362.400.000	100	367.000.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
08.01.05		Program Pembinaan Dan Pengembangan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	%	N/A	100	423.720.000	100	432.300.000	100	444.600.000	100	456.400.000	100	462.100.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	budaya masyarakat	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dikoordinasikan													Bangsa Dan Politik
08.01.06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kasus	1	2	1.319.000.000	2	1.345.700.000	2	1.384.000.000	2	1.420.800.000	2	1.438.800.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	97,1	100		100		100		100		100		
07.01.02	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Mengingkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	93,75	93,77	912.972.000	93,78	931.228.000	93,79	949.838.000	93,8	968.821.000	93,81	988.187.000	PD Pengampu Urusan Kecamatan
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan	%	93,75	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Standar Pelayanan (SP)													
07.01.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	7.905.835.000	100	8.063.947.000	100	8.225.215.000	100	8.389.706.000	100	8.557.485.000	PD Pengampu Urusan Kecamatan
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		
07.01.04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan ganguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	987.525.000	100	1.007.272.000	100	1.027.405.000	100	1.047.937.000	100	1.068.886.000	PD Pengampu Urusan Kecamatan
				Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100		
07.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	966.895.000	100	986.230.000	100	1.005.943.000	100	1.026.047.000	100	1.046.556.000	PD Pengampu Urusan Kecamatan
07.01.06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggar	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	603.079.000	100	615.136.000	100	627.432.000	100	639.972.000	100	652.759.000	PD Pengampu Urusan Kecamatan

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			aan Pemerintah Desa														
XX.XX.01	Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	N/A	89	2.350.538.352.384	89,5	2.383.963.203.345	90	2.453.462.871.345	90,5	2.523.160.672.345	91	2.561.707.375.345	Semua Perangkat Daerah
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	81		82		83		84		85		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	N/A	43		44		45		46		47		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase tingkat capaian kinerja perangkat daerah predikat baik sesuai mandat asisten administrasi umum	%	90	91		92		93		94		95		
				Persentase tingkat capaian kinerja bagian di	%	100	100		100		100		100		100		

No.	URUSAN	NAMA PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				lingkup asisten administrasi umum													
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		

4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Banyumas dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten sebagaimana termuat pada Bab III RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Banyumas tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						KET
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1.	Tingkat Kemiskinan	%	11,00 - 9,93	10,84 - 9,50	10,50 - 9,00	10,25 - 8,75	10,17 - 8,24	10,00 - 8,00	
2.	Indeks daya saing daerah (IDSD)	angka	4,03	4,04	4,05	4,06	4,07	4,08	
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	75,75	76	76,11	76,18	77,2	77,5	
4.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	70,86	71,74	72,64	73,55	74,48	75,42	
5.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah per kapita/ tahun)	Juta Rupiah per kapita/ tahun	40,69 - 40,97	40,97 - 45,25	45,25 - 55,25	55,25 - 65,25	65,25 - 78,29	78,29 - 80,00	
6.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	angka	17,72 - 17,92	17,92 - 18,00	18,00 - 18,25	18,2 - 18,5	18,5 - 18,96	18,96 - 19,05	
7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5,50 - 6,45	5,88 - 6,50	6,50 - 7,48	6,90 - 7,50	7,40 - 8,24	7,90 - 8,41	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	6,82 - 5,56	5,94 - 5,75	5,65 - 5,35	5,57 - 5,27	5,49 - 5,17	5,41 - 4,98	

NO	INDIKATOR KERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						KET
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
9.	Nilai Daya Saing infrastruktur	angka	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63	
10.	Rasio PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	%	4,11	4,14	4,17	4,19	4,22	4,25	
11.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulaif (TonCO2eq)	TonCO2eq	1.416.805	1.775.298	2.154.949	2.558.030	2.987.052	3.444.795	
12.	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	87	87,18	88,68	90,18	91,68	93,18	

4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah yang ditetapkan dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,44	7	6,65	6,3	5,95	5,59	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	70,86	71,74	72,64	73,55	74,48	75,42	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	37,56	41,17	44,78	48,39	52	55	
4	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif	TonCO2 eq	1.416. 805	1.775. 298	2.154. 949	2.558. 030	2.987. 052	3.444.79 5	
B.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
5	Tingkat Kemiskinan	%	11,00 - 9,93	10,84 - 9,50	10,50 - 9,00	10,25 - 8,75	10,17 - 8,24	10,00- 8,00	
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,51	74,88	75,25	75,62	75,99	76,36	
7	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	18	17	17	17	17	16	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,5	17,4	16,3	15,2	14,2	13,5	
9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	109	109	109	109	109	109	
10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	94	95	96	97	99	100	
11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,45	99,23	99,43	99,63	99,83	99,9	
12	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):								
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	88,93	
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	86,42	87,42	88,42	89,42	90,42	91,42	
	c. Numerasi SD/Sederajat	%	80,07	81,07	82,07	83,07	84,07	85,07	
	d. Numerasi SMP/Sederajat	%	82,82	83,82	84,82	85,82	86,82	87,82	
13	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,23	9,33	9,45	9,58	9,71	9,85	
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,67	13,82	13,99	14,16	14,35	
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,75	7,9	8,1	8,25	8,5	8,6	
16	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	83,07	86,04	89,01	91,98	94,53	97,07	
17	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan *)	%	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	11,57	12,46	13,65	14,84	16,02	17,21	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	63575	65482	67446	69469	71553	73699	
20	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	51	52	53	54	55	56	
21	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	60,81	63,62	66,51	69,4	72,29	75,19	
22	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	61,83 - 61,86	62,56 - 62,63	63,3-63,40	64,03 - 64,17	64,77 - 64,95	65,5-65,72	
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,21-0,204	0,209 - 0,196	0,207 - 0,189	0, 206-0,181	0, 204-0,174	0, 202-0,167	
24	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,27	4,28	4,29	4,3	4,31	4,32	
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,82-5,56	5,94-5,75	5,65-5,35	5,57-5,27	5,49-5,17	5,41-4,98	
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,65	50,67	50,7	50,73	50,75	50,78	
27	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43,19	47,13	49,55	52,11	54,79	57,49	
28	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah per kapita/ tahun	40,69 - 40,97	40,97 - 45,25	45,25 - 55,25	55,25 - 65,25	65,25 - 78,29	78,29-80,00	
29	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	17,72 - 17,92	17,92 - 18,00	18,00 - 18,25	18,2-18,5	18,5-18,96	18,96 - 19,05	
30	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50-6,45	5,88-6,50	6,50-7,48	6,90-7,50	7,40-8,24	7,90-8,41	
31	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	74.349.661	75.638.509	78.927.357	82.216.205	85.505.052	87.500.000	
32	PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta Rp)	Juta Rupiah	9.098.964	9.623.964	10.248.964	10.873.964	11.521.127	12.250.000	
33	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,75	90,05	90,35	90,65	90,95	91	
34	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	75,75	76	76,11	76,18	77,2	77,5	
35	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/orang	58.872.287	60.954.016	63.238.973	65.498.108	67.721.771	69.917.441	
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
36	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,28	27,5	27,75	28	28,61	28,85	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
37	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,5	3,7	3,9	4,2	4,5	4,8	
38	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	386	397	408	420	432	444	
39	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,99	3,11	3,33	3,44	3,49	3,56	
40	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,81	1,88	1,9	1,92	1,99	2,01	
41	Return on Aset (ROA) BUMD	%	3,38	3,5	3,7	3,9	4,18	4,4	
42	Disparitas Harga	Angka	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	
43	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	35,5	35,6	35,7	35,8	35,9	36	
44	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	
45	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *)	%	26	27	28	29	30	30,5	
46	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	26,5	27	28,5	29,5	30	31	
47	Persentase Desa Mandiri	%	22,57	22,94	23,26	23,58	23,91	24,25	
48	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	75	77,5	80	82	83,71	85,25	
49	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,07	69,67	71,27	72,86	74,46	74,46	
50	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	37,56	41,17	44,78	48,39	52	55	
51	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	36,08	36,27	36,47	36,66	36,86	37,06	
52	Indeks daya saing daerah (IDSD)	Angka	4,03	4,04	4,05	4,06	4,07	4,08	
53	Nilai Daya Saing infrastruktur	Angka	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63	
54	Rasio PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	%	4,11	4,14	4,17	4,19	4,22	4,25	
55	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	4,72	4,74	4,76	4,78	4,8	4,81	
56	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,565	0,57	0,575	0,58	0,585	0,6	
57	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	55	56,5	58	59,5	61	62,5	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
58	Jumlah Produk Sertifikasi Halal	Sertifikat	6635	6640	6645	6650	6655		
D.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
59	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kasus	6	6	6	6	6	6	
60	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87	87,18	88,68	90,18	91,68	93,18	
61	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,75	98	98,25	98,5	98,75	99	
62	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35	
63	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,45	4,45	4,45	4,46	4,46	4,46	
64	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,75	78	78,25	78,5	78,75	79	
65	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	N/A	1,7	1,7	2	2	2,2	
66	Indeks kesejahteraan sosial	Angka	54,5	55	55,5	56	56,5	57	

LPPD

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota**								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,07	86,04	89,01	91,98	94,53	97,07	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,68	99,78	99,88	99,98	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	30,45	35,43	40,41	45,38	50,36	55,34	
II	**Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota**								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	per 1.000 penduduk	1,57	1,58	1,59	1,6	1,61	1,62	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat	%	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kabupaten/Kota yang Terakreditasi								
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pelayanan TBC sesuai standar								
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
III	**Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota**								
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	56,5	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	71	71,5	72	72,5	73	73,5	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	80,25	80,97	81,7	82,45	83,21	83,98	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93,65	94,08	94,53	94,99	95,48	95,98	
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	72,69	73,94	75,19	76,44	77,69	78,94	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95,42	96,08	96,73	97,39	98,04	98,69	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	95,1	95,36	95,62	95,88	96,13	96,39	
IV	**Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota**								

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	17	55	55	55	55	55	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	13,61	27,22	40,83	54,44	68,05	81,65	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	14,9	14,35	13,78	13,2	12,6	11,98	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	
V	**Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota**								
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	525.000	670.000	720.000	770.000	820.000	870.000	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1000	1600	1700	1800	1900	2000	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15	
VI	**Urusan Sosial Kabupaten/Kota**								
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
VII	**Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota**								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,44	1,45	1,45	1,46	1,47	1,48	
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	11	12,05	13,03	14,15	15,21	16,25	
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	n/a	60	60	60	60	60	60	
VIII	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota**								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	58,7	58,9	59,1	59,3	59,5	59,7	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	6,09	5,97	5,85	5,73	5,62	5,51	
IX	**Urusan Pangan Kabupaten/Kota**								
1	Persentase Cadangan Pangan	%	68	69	70	71	72	73	
X	**Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota**								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	
XI	**Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	75,49	75,54	75,58	75,63	75,67	75,71	
2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	80,99	85,74	90,5	95,25	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	28	28	27	27	26	
XII	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**								
1	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	99,45	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	70	72	75	77	79	81	
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	%	99	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	
XIII	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota**								
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	5,97	11,94	17,91	23,88	29,85	35,82	
XIV	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota**								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,1	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Angka	64,2	64,4	64,6	64,8	65	65,2	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,13	9,11	9,09	9,07	9,05	9,03	
XV	**Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota**								
1	Rasio konektivitas	Angka	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
XVI	**Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota**								

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
XVII	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	12,75	17,93	22,45	26,39	29,82	32,8	
2	persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	2,08	2,2	2,32	2,44	2,56	2,68	
XVIII	**Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota**								
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	3,57	0,36	0,43	0,5	0,56	0,63	
XVIII	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota**								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,06	0,08	0,09	0,1	0,11	0,13	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,06	4,08	5,1	6,12	7,14	8,16	
3	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	
XIX	**Urusan Statistik Kabupaten/Kota**								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pembangunan daerah								
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
XX	**Urusan Persandian Kabupaten/Kota**								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	441	487	530	575	620	647	
XXI	**Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota**								
1	Persentase tingkat pelestarian cagar budaya	%	13,23	14,79	16,34	17,9	19,46	21,01	
XXII	**Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		68	69	70	71	72	73	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		68	69	70	71	72	73	
XXIII	**Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota**								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	N/A	83,75	88,75	93,75	96	100	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	
XXIV	**Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota**								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	13.506	13.840	14.176	14.520	14.873	15.234	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
XXVI	**Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota**								
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	2	1,96	1,92	1,89	1,85	1,82	
2	Tingkat hunian akomodasi	%	36,26	36,28	36,3	36,32	36,34	36,36	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,093	0,105	0,117	0,13	0,145	0,165	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	6,23	6,71	7,39	8,15	8,97	9,54	
XXVII	**Urusan Pertanian Kabupaten/Kota**								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	5,92	5,93	5,94	5,95	5,96	5,97	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	8	8	8	8	8	8	
XXX	**Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota**								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	88,15	88,30	88,45	88,60	88,75	88,90	
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	92,41	93	93,25	93,5	93,75	94	
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	79,67	82,85	86,17	89,61	93,2	96,93	
XXXI	**Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota**								
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam	%	90	90	90	90	90	90	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK								
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	90	90	90	90	90	90	
XXXII	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kab/Kota**								
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	32	32	31	31	30	30	
2	Rasio PAD	%	27	28	28,5	29	29,5	30	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,39	3,395	3,4	3,41	3,425	3,45	
4	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Angka	60	61	62	63	64	65	
6	Opini Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	41,5	42	42,5	43	43,5	44	
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	42,5	44,5	46	48	49	50	
9	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	22,5	24	25,5	27	28,5	30	
10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan	%	64	64,5	65	65,5	66	66,5	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)								
11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22	22,5	23	23,5	24	24,5	
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	81,5	82	82,5	83	83,5	84	
13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	3,8	3,78	3,76	3,74	3,72	3,7	
14	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	5	5	5	5	5	5	
15	Persentase Assets Management	Angka	4	4	4	4	4	4	
16	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Angka	3,11	3,1	3,09	3,08	3,07	3,06	
17	Persentase Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**								
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat daerah	Angka	92	92,3	92,5	92,7	92,9	93	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,61	4615	4,62	4625	4,63	4,635	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,9	90,91	90,93	90,95	91	91,1	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,49	3,5	3,52	3,54	3,56	3,57	
	Persentase Penerbitan Dokumen	%	98,5	98,7	98,9	99	99,2	99,4	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Administrasi Kependudukan Sesuai Standar Pelayanan								
	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	94,7	95,1	95,5	96	96,5	97	
2	**Inspektorat Daerah**								
	Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,005	3,007	3,009	3,011	3,013	3,015	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,83	3,84	3,85	3,86	3,87	3,88	
	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08	
	Nilai Kapabilitas APIP pada elemen Peran dan Layanan	Level	3	3	3	3	3	3	
	Nilai MCSP pada area penguatan APIP	Angka	85	86	87	88	89	90	
	Nilai SAKIP Pemkab pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Angka	18,19	18,2	18,21	18,22	18,23	18,24	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,2	88,5	88,7	89	89,5	90	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,53	3,533	3,536	3,54	3,543	3,546	
	Persentase Parameter IEPK yang mendapat grade B	%	5	5	5	5	10	10	
3	**Kearsipan**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,93	3,94	3,95	3,96	3,97	3,98	
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Angka	82	82,5	83	83,5	84	84,5	
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten	Angka	68,3	69	69,4	70,5	71,7	73	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,9	90	90,1	90,2	90,3	90,4	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,528	3,53	3,532	3,535	3,538	3,54	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara,	%	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	
4	**Kebudayaan**								
	Persentase peningkatan Pemajuan Kebudayaan	%	6,45	19,35	25,81	35,48	51,61	67,74	
	Tingkat Pemajuan Kebudayaan	%	63,46	71,15	75	80,77	90,38	100	
5	**Kelautan Dan Perikanan**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,511	3,512	3,513	3,514	3,515	
	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	13506	13840	14176	14520	14873	15234	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86	86,25	86,5	86,75	87	87,25	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,53	3,54	3,55	3,56	3,57	3,58	
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	2	2	2	2	2	2	
6	**Keluarga Berencana**								
	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,1	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	67,7	70,2	72,7	75,2	77,7	80	
7	**Kepegawaian**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	
	IP ASN Dimensi Hasil Penilaian Kinerja	Angka	25	25	25	25	25	25	
	IP ASN Dimensi Riwayat Hukum Disiplin	Angka	5	5	5	5	5	5	
	Nilai NSPK	Angka	83	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80	81	82	83	83,5	84	
	Nilai Sistem Merit	Angka	300	325	325	325	325	325	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	
8	**Kepemudaan Dan Olahraga**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,52	3,53	3,55	3,75	3,8	4	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,5	87,6	87,7	87,8	87,9	88	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	2,4	4,79	9,25	13,36	17,47	21,58	
	Tingkat Prestasi Olahraga	%	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	
	Tingkat Prestasi Pemuda	%	0,073	0,075	0,078	0,081	0,084	0,087	
9	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**								
	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
	Cakupan wilayah yang memperoleh pendidikan politik	%	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	N/A	74	75	76	77	78	
	Indeks Kinerja Ormas	Angka	N/A	78,26	78,91	79,34	81	82	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86	86,1	86,2	86,3	86,4	86,5	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
10	**Kesehatan**								
	Angka Populasi Bebas PM	%	62,5	67,5	70	72,5	75	77,5	
	Angka Populasi Bebas PTM	%	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,45	99,23	99,43	99,63	99,83	99,9	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,54	3,57	3,6	3,63	3,65	
	Insiden Stunting Balita (Kasus Baru)	%	2,5	2,25	2	1,5	1,25	1	
	Jumlah Kematian Balita	Kasus	257	230	221	211	202	192	
	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	18	17	17	17	17	16	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87	88	89	90	91	91,5	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,35	3,38	3,4	3,42	3,45	3,47	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	86,05	88,37	88,64	88,89	89,13	89,36	
	Prevalensi Stunting	%	18,5	17,4	16,3	15,2	14,2	13,5	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,51	74,88	75,25	75,62	75,99	76,36	
11	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	N/A	30	35	40	45	50	
	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	5	5	5	5	5	5	
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	105,26	103,7	102,13	100,57	99,01	97,45	
	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	
	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	%	73	74	75	76	77	78	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,54	3,57	3,6	3,63	3,66	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85	85	85	85	85	85	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	
12	**Keuangan**								
	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Rasio PAD	%	27	28	28,5	29	29,5	30	
	Persentase Peningkatan PAD	%	25	5	5,25	5,5	5,75	6	
	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	5	5	5	5	5	5	
	Persentase SKPD dan BLUD yang melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase SKPD dan BLUD yang melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	sesuai dengan ketentuan								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,6	3,62	3,63	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88	88,5	89	89,5	90	90,5	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,3	3,35	3,4	3,45	3,46	3,48	
13	**Komunikasi Dan Informatika**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,54	3545	3,55	
	Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	1,7	1,7	2	2	2,2	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35	
	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	1,5	1,5	2	2	2,2	
	Nilai Domain Manajemen SPBE	Angka	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	
	Nilai Domain Layanan SPBE	Angka	4,69	4,74	4,79	4,84	4,89	4,94	
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,8	3,85	3,9	3,95	4	4,05	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	96,86	97,06	97,26	97,46	97,66	97,86	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,8	85,85	85,9	85,95	86	86,05	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3526	3526	3,53	3,54	3,55	3,56	
14	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**								
	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	16,643	17,246	18,381	19,486	20,561	21,607	
	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	%	7,65	7,91	8,01	8,16	8,25	8,38	
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	25,31	25,56	25,81	26,06	26,31	26,56	
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,42	1,431	1,441	1,453	1,462	1,473	
15	**Lingkungan Hidup**								
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	70,32	74,19	78,28	82,57	87,06	89,37	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	71,78	71,88	71,98	72,08	72,18	72,28	
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	62,87	62,88	62,89	62,9	62,91	62,92	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,49	75,54	75,58	75,63	75,67	75,71	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(IKLH) Kabupaten/Kota								
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,77	85,78	85,79	85,8	85,81	85,82	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,9	89,95	90	90,05	90,1	90,15	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,55	3,551	3,552	3,553	3,554	3,555	
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	77,05	78,51	80,48	83,51	87,19	91,06	
16	**Pangan**								
	Penurunan Jumlah Daerah (Desa) Rawan Pangan	Desa	5	5	5	5	5	5	
	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama	%	128,68	128,81	128,94	129,07	129,2	129,33	
	Skor PPH Konsumsi	Nilai	92,72	92,99	93,27	93,54	93,82	94,09	
17	**Pariwisata**								
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	6,23	6,71	7,39	8,15	8,97	9,54	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,093	0,105	0,117	0,13	0,145	0,165	
18	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**								
	Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur	%	66,587	67,964	69,383	71,684	73,987	75,332	
	Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	%	67,568	68,443	69,318	70,193	71,068	71,943	
	Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya	%	29,883	30,873	32,082	37,702	43,325	44,165	
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	72,694	73,944	75,194	76,444	77,694	78,944	
	Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Dibina	%	62,79	66,56	70,32	74,08	77,85	81,61	
	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86,95	87	87,05	87,1	87,15	87,2	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,49	3,64	3,79	3,94	4,09	4,24	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,66	3,81	3,96	4,11	4,26	
19	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**								
	Indeks Desa	Angka	0, 750	0, 757	0, 758	0, 767	0, 768	0, 769	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,7	88,75	88,8	88,85	88,9	88,95	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,6	3,62	3,65	3,67	3,68	3,69	
	Persentase Desa Mandiri	%	22,57	22,94	23,26	23,58	23,91	24,25	
	persentase Peningkatan Status Desa (Desa berkembang jadi maju, berkembang jadi mandiri dan maju mandiri), rumus penjumlahan dari persentase desa berkmbang ke maju, berkembang ke mandiri dan maju ke mandiri)	%	9,83	19,67	29,5	39,34	49,17	59,01	
20	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**								
	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,75	90,05	90,35	90,65	90,95	91	
	Indek Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65	65,4	65,8	66,2	66,6	70	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,21-0,204	0,209 - 0,196	0,207 - 0,189	0,206 - 0,181	0,204 - 0,174	0,202-0,167	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	
	indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	63	63,5	64	64,5	65	65,5	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,7	88,75	88,8	88,85	88,9	88,95	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,6	3,62	3,65	3,67	3,68	3,69	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan , termasuk TPPO	Angka	5,29	5,28	5,27	5,26	5,25	5,24	
21	**Penanaman Modal**								

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	IKM Mal Pelayanan Publik	Angka	91,72	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	
	Nilai IKM Penanaman Modal	Angka	89,6	89,8	90	90,2	90,4	90,6	
	Nilai Investasi Daerah	Milyar	1400	1405	1411	1418	1426	1435	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,5	87,55	87,6	87,7	87,8	87,9	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	4,2	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	3,57	0,36	0,43	0,5	0,56	0,63	
22	**Pendidikan**								
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,67	13,82	13,99	14,16	14,35	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	
	Indeks SPM Pendidikan (Sesuai Rapor Pendidikan)	Angka	81,45	81,49	81,52	81,55	81,58	100	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86,55	86,56	86,57	86,58	86,59	86,6	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,525	3,526	3,527	3,528	3,529	3,53	
	Persentase guru yang memiliki sertifikat Pendidik	%	70,8	71,71	72,62	73,53	74,44	75,35	
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	72,57	73,57	74,57	75,57	76,57	77,57	
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang SD	%	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	88,93	
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang SMP	%	86,42	87,42	88,42	89,42	90,42	91,42	
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi jenjang pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	66,995	67,995	68,995	69,995	70,995	71,995	
	Persentase siswa yang mencapai	%	80,07	81,07	82,07	83,07	84,07	85,07	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	standar kompetensi minimum Numerasi Jenjang SD								
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi Jenjang SMP	%	82,82	83,82	84,82	85,82	86,82	87,82	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	84,93	85,33	85,74	86,15	86,56	86,97	
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,23	9,33	9,45	9,58	9,71	9,85	
23	**Pendidikan dan Pelatihan**								
	IP ASN Dimensi Kompetensi	Angka	30	31	32	33	34	35	
	IP ASN Dimensi Kualifikasi	Angka	25	25	25	25	25	25	
	Nilai IP ASN	Angka	80,15	80,2	80,4	80,6	80,8	81	
24	**Penelitian Dan Pengembangan**								
	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	N/A	4,28	4,29	4,3	4,31	4,32	
	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	%	N/A	58,22	61,64	66,78	71,92	77,05	
	Persentase Publikasi Ilmiah	%	N/A	100	100	100	100	100	
25	**Perdagangan**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	
	Nilai ekspor	US $	93.350.000	93.400.000	93.450.000	93.500.000	93.550.000	93.600.000	
	Nilai ekspor produk unggulan	US $	11.270.000	11.280.000	11.290.000	11.300.000	11.310.000	11.320.000	
	Nilai omzet produk	Juta Rupiah	6000	6300	6600	6900	7200	7500	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	91,65	91,65	91,65	91,65	91,65	91,65	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,718	3,718	3,718	3,718	3,718	3,718	
26	**Perencanaan**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	
	Nilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan unsur SPIP	Angka	N/A	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	
	Nilai komponen penetapan tujuan unsur SPIP	Angka	N/A	1,62	1,68	1,7	1,72	1,74	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nilai Manajemen Risiko Indek (MRI)	Angka	3,196	3,198	3,2	3,202	3,204	3,206	
	Nilai SAKIP Pemkab pada komponen Perencanaan Kinerja	Angka	25,75	26	26,15	26,25	26,35	26,5	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,55	91,35	91,4	91,47	91,55	91,65	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,539	3,54	3,541	3,542	3,543	3,544	
27	**Perhubungan**								
	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	51.932	52.008	55.838	55.918	55.994	56.074	
	Indeks konektivitas angkutan jalan	Angka	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
	indeks konektivitas angkutan sungai	Angka	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	35,22	35,24	35,26	3,53	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,5	88,6	88,7	88,8	88,9	90	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Rasio konektivitas	Angka	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	
	VC Ratio di Jalan Kabupaten	Angka	0,6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
28	**Perindustrian**								
	Persentase industri yang masih taat sesuai dengan ijin usahanya	%	39,68	40,26	41,3	41,67	42,4	42,66	
	Persentase Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	%	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	
29	**Perpustakaan**								
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	68	69	70	71	72	73	
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Angka	68	69	70	71	72	73	
	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	Angka	0,599	0,6	0,602	0,603	0,604	0,606	
	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	60,81	63,62	66,51	69,4	72,29	75,19	
30	**Persandian**								
	Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0,3	0,3	1	1	1,5	
	Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0,3	0,3	1	1	1,5	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
31	**Pertanahan**								
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	61,38	67	72,63	78,25	83,88	89,5	
	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	%	95,83	100	100	100	100	100	
32	**Pertanian**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,54	3,541	3,542	3,543	3,544	3,545	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88	88,3	88,6	88,9	89,1	89,4	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	
	Persentase peningkatan produksi hortikultura	%	0,52	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
	Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	
	Persentase peningkatan produksi pertanian	%	0,64	0,725	0,825	0,925	1,025	1,125	
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	
	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,54	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
33	**Perumahan Dan Kawasan Permukiman**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	
	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	0,624	0,642	0,658	0,673	0,687	0,698	
	Persentase rata-rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman	%	49,226	49,432	53,275	57,118	60,961	63,586	
	Persentase Permukiman Layak Huni	%	99,807	99,844	99,882	99,919	99,957	100	
	Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat	%	48,5	56	63,5	71	78,5	86	
	Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	1	
	Rasio Rumah Layak Huni	Angka	0,2204	0,2234	0,2266	0,23	0,2335	0,237	
34	**Sekretariat Daerah**								
	IKM Pemerintah Daerah	Angka	88,41	88,42	88,5	88,7	88,9	89	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Angka	67,8	68	69	70	71	72	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	
	Nilai EPPD Pemerintah Daerah	Angka	3,6	3,61	3,62	3,63	3,64	3,65	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,1	90,5	91	91,25	91,5	91,75	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,7	3,75	3,775	3,8	3,825	3,85	
	Persentase keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase unit pelayanan publik yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori "Sangat Baik"	%	41,984	42,748	43,511	44,274	45,038	45,801	
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Angka	82	82,5	83	84	85	86	
	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	Angka	3,39	3,395	3,41	3,42	3,425	3,45	
35	**Sekretariat DPRD**								
	Capaian kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	%	92	93	93,5	94	94,5	95	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,51	3,51	3,52	3,52	3,53	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88	88,7	89	89,25	89,5	89,75	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	87	87	87,5	87,5	88	88	
36	**Sosial**								
	Persentase Jenis PPKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
37	**Statistik**								
	Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0,5	0,5	1	1	1,5	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
38	**Tenaga Kerja**								
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,35	89,37	89,39	89,4	89,45	89,5	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,494	3,495	3,496	3,497	3,498	3,499	
	Persentase tenaga kerja formal yang dikelola	%	63,5	64,49	65,46	66,44	67,41	68,39	
	Persentase tenaga kerja informal yang dikelola	%	1,5	1,51	1,54	1,56	1,59	1,61	
	Persentase tenaga kerja perempuan yang dikelola	%	31,45	31,93	32,42	32,9	33,39	33,87	
	Presentase tenaga kerja yang di kelola	%	65	66	67	68	69	70	
39	**Kecamatan**								
	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80	81	82	83	84	85	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	
	Nilai Capaian Kinerja Koordinasi Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	

4.4 Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Dalam upaya mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, maka dilakukan Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Strategis. Identifikasi Risiko dan RTP Tahun 2025-2029 tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	E/ KE/ TE	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PD PENGAMPU
1	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**	**1**	**Tingkat Kemiskinan (%)**											
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah	a. Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah; b. Adanya pengaruh kondisi lingkungan dan sosial masyarakat	1. Rendahnya Daya saing Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Banyumas; 2. Kinerja pemerintah dalam sektor pembangunan manusia belum optimal	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/048/tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Dan Kelompok Kerja Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penetapan Perbup/ SK Banyumas tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan ATS Tahun 2026-2030	Bupati Banyumas	Tahun 2026	PD PENGAMPU URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	E/ KE/ TE	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PD PENGAMPU
								Tahun Pra Sekolah Dasar; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif; 6. SK Bupati Banyumas Nomor 050/1146/tahun 2022 tentang Tim Gerakan Mayuh Sekolah Maning Kabupaten Banyumas; 7. Rencana Aksi Daerah Penanganan ATS Tahun 2023-2025						
				Layanan pendidikan belum merata	1. Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan	1. Tingkat Pendidikan masyarakat rendah; 2. Kualitas pendidikan masyarakat rendah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	1. Keputusan Bupati Banyumas NOMOR 050 /535/ Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	SK Penetapan wilayah yang membutuhkan pendirian Sekolah Menengah Atas	Bupati Banyumas	Tahun 2026	PD PENGAMPU URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	E/ KE/ TE	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PD PENGAMPU
					secara memadai; 2. Belum meratanya pemenuhan SDM pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan;			Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lumbir di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Proses Hibah Dan Pembangunan SMA Negeri Cilongok Desa Karang Tengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas		mampu menangani risiko yang teridentifikasi				
				Meningkatnya angka kematian dan kesakitan masyarakat banyumas	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan; 2. Belum optimalnya penegakan kebijakan pemerintah terhadap kawasan bebas rokok; 3. Masih adanya masyarakat Banyumas yang belum menjangkau layanan kesehatan	1. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Banyumas; 2. Kinerja pemerintah dalam sektor pembangunan manusia belum optimal	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok; 2. Peraturan Bupati (Perbup) Banyumas Nomor 24 Tahun 2025 mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR); 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Kabupaten	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	SE Bupati Banyumas terkait penerapan kebijakan kawasan bebas rokok di wilayah desa dan kelurahan	Bupati Banyumas	Tahun 2026	PD PENGAMPU URUSAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	E/ KE/ TE	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PD PENGAMPU
								Banyumas Tahun 2018; 4. Perbup Nomor 13 Tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan integrasi Layanan Primer (ILP); 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.						
2	Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	2	PDRB ADHB per Kapita	Masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan	Pendapatan per kapita rendah	1. Kesejahteraan masyarakat tidak meningkat; 2. Meningkatnya tingkat kemiskinan Kab. Banyumas	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat; 3. Stakeholder terkait	1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Peraturan Daerah Kabupaten	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penetapan SK Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas; 2. Penetapan SK Bupati tentang penerima bantuan masyarakat miskin	Bupati Banyumas	Tahun 2026-2030	A. PD PENGAMPU URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH; B. PD PENGAMPU URUSAN BIDANG TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN; PD PENGAMPU

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	E/ KE/ TE	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PD PENGAMPU
								Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan						URUSAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		3	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Menurunnya kemampuan daya beli kelompok masyarakat menengah kebawah	1. Tidak adanya peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah; 2. Tingkat inflasi yang fluktuatif 3. Kurangnya kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan kemandirian ekonomi; 4. Program penanggulangan kemiskinan belum efektif dalam penanganan kemiskinan	1. Kesejahteraan masyarakat rendah; 2. Kondisi perekonomian daerah tidak stabil	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat; 3. Stakeholder terkait	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 5. Pelaksanaan Program-program penanggulangan kemiskinan (penanganan RTLH, penyediaan air bersih dan listrik, pembangunan jamban, penanganan stunting, penanganan ATS, dukungan bagi penyandang disabilitas); 6. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi, Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMD, Baznas, dan alokasi APBD	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penetapan SK Bupati tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah; 2. Penetapan SK Bupati tentang penerima bantuan masyarakat miskin; 3. Penetapan SK Bupati tentang Tim TKPKD; 4. Penetapan RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2026-2030	A. PD PENGAMPU URUSAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH; B. PD PENGAMPU URUSAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; C. PD PENGAMPU URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH; D. PD PENGAMPU URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

								Kabupaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; 9. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dereah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 Melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahap Kesatu; 11. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 6						

								Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; 12. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Tim Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024; 13. SK Bupati Banyumas Nomor 465.3/626 Tahun 2023 tentang Desa Prioritas dampingan oleh Perangkat Daerah dalam rangka akselerasi Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas; 14. SK Bupati Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Lokasi desa/ kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas Tahun 2025						

BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD menjadi pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 akan dijabarkan menjadi RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2025-2029.

Secara substansial, RPJMD ini memuat kesimpulan penting bahwa keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, Legislatif, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta berkelanjutan, dengan mengedepankan penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

5.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2030 di bawah kepemimpinan Bupati

dan Wakil Bupati terpilih periode 2030-2035 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi serta efektivitas pendanaan maupun waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD sebaik-baiknya;
2. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial sebagai prinsip dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara.
3. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan, guna mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi hambatan sejak dini, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk setiap tahun disusun dalam RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas wajib menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah secara berkala;

7. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

5.3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan melalui mekanisme pemantauan berkala, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan, sementara evaluasi digunakan untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi masukan penting bagi penyesuaian kebijakan, agar RPJMD dapat tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan kondisi daerah, nasional, maupun global.

Dengan tersusunnya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi "Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera" demi tercapainya masyarakat Banyumas yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan.

BUPATI BANYUMAS

SADEWO TRI LASTIONO